

**PEMERINTAH KOTA CILEGON
2012**

RANCANGAN AKHIR

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
BUKU I
MENENGAH DAERAH TAHUN 2010-2015**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR .. TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2010-2015**





BUKU SATU

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010-2015

**PEMERINTAH KOTA CILEGON
2012**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, maka **Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015** telah tersusun.

Pada prinsipnya, **Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015** ini menyajikan tentang: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah; Analisis Isu-Isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Penetapan Indikator Kinerja Daerah; serta Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Akhir kata, Kami berharap semoga **Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015** ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat sebagai pedoman : penyusunan Perubahan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2016 serta pelaksanaan pembangunan di Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2013-2016. Atas partisipasi segenap pemangku kepentingan di Kota Cilegon dalam proses penyusunan ini, Kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum	I - 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I - 5
1.4. Sistematika Penyajian.....	I - 7
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I - 7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi	II - 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II - 1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif.....	II - 1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	II - 3
2.1.1.3. Kondisi Morfologi dan Topografi	II - 5
2.1.1.4. Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi.....	II - 7
2.1.1.5. Kondisi Klimatologi.....	II - 9
2.1.1.6. Kondisi Geologi dan Tanah.....	II - 11
2.1.1.7. Kondisi Kelautan.....	II - 13
2.1.1.8. Kondisi Pemanfaatan Ruang	II - 14
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II - 15
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II - 20
2.1.4. Demografi	II - 27
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 33
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II - 33
2.2.1.1. Nilai, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2008-2011.....	II - 33
2.2.1.2. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tahun 2008-2010	II - 39
2.2.1.3. Laju Inflasi Tahun 2009-2011	II - 40
2.2.1.4. Nilai dan Laju Pertumbuhan Investasi Tahun 2010-2011.....	II - 40
2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010- 2011	II - 41
2.2.1.6. Tingkat Kemiskinan Tahun 2010-2011	II - 41
2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun	II - 42

	2008-2011.....	
2.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II - 44
2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II - 44
2.3.1.1.	Pendidikan.....	II - 44
2.3.1.2.	Kesehatan.....	II - 50
2.3.1.3.	Pekerjaan Umum.....	II - 53
2.3.1.4.	Perumahan.....	II - 55
2.3.1.5.	Penataan Ruang.....	II - 56
2.3.1.6.	Perencanaan Pembangunan.....	II - 57
2.3.1.7.	Perhubungan.....	II - 59
2.3.1.8.	Lingkungan Hidup.....	II - 60
2.3.1.9.	Pertanahan.....	II - 63
2.3.1.10.	Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II - 64
2.3.1.11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II - 64
2.3.1.12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	II - 65
2.3.1.13.	Sosial.....	II - 66
2.3.1.14.	Ketenagakerjaan.....	II - 69
2.3.1.15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	II - 70
2.3.1.16.	Penanaman Modal.....	II - 70
2.3.1.17.	Kebudayaan.....	II - 71
2.3.1.18.	Kepemudaan dan Olahraga.....	II - 71
2.3.1.19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ...	II - 73
2.3.1.20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....	II - 74
2.3.1.21.	Ketahanan Pangan.....	II - 80
2.3.1.22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II - 80
2.3.1.23.	Statistik.....	II - 82
2.3.1.24.	Kearsipan.....	II - 82
2.3.1.25.	Komunikasi dan Informatika.....	II - 82
2.3.1.26.	Perpustakaan.....	II - 83
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II - 83
2.3.2.1.	Pertanian.....	II - 83
2.3.2.2.	Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II - 84
2.3.2.3.	Kepariwisata.....	II - 84
2.3.2.4.	Kelautan dan Perikanan.....	II - 84
2.3.2.5.	Perdagangan.....	II - 85
2.3.2.6.	Industri.....	II - 85
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II - 86
2.4.1.	Potensi Sektorial Daerah.....	II - 86
2.4.1.1.	Pertanian.....	II - 86

	2.4.1.2. Perdagangan	II - 87
	2.4.1.3. Industri	II - 88
	2.4.1.4. Pariwisata	II - 89
	2.4.2. Penataan Ruang	II - 90
	2.4.2.1. Rencana Struktur Ruang	II - 90
	2.4.2.2. Rencana Pola Ruang.....	II - 93
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	III - 1
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 4
	3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III - 4
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 20
	3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III - 20
	3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	III - 36
	3.3. Kerangka Pendanaan.....	III - 43
	3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III - 43
	3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III - 46
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	IV - 1
	4.1. Permasalahan Pembangunan.....	IV - 1
	4.2. Isu Strategis	IV - 25
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V - 1
	5.1. Visi	V - 1
	5.2. Misi.....	V - 2
	5.3. Agenda.....	V - 3
	5.4. Tujuan Dan Sasaran	V - 7
	5.4.1 Penghitungan Kerangka Pendanaan	V - 7
	5.4.2 Tujuan Dan Sasaran Misi Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Jasa.....	V - 7
	5.4.3 Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan.....	V - 7
	5.4.4 Tujuan dan Sasaran Misi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan, Dan Keagamaan.....	V - 8
	5.4.5 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik	V - 9

BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI - 1
6.1.	Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI - 1
6.1.1	Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran	VI - 1
6.1.2	Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Jasa.....	VI - 4
6.1.3	Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan.....	VI - 6
6.1.4	Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Keagamaan	VI - 9
6.1.5	Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik	VI - 12
6.2.	Strategi Dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	VI - 14
6.2.1	Strategi Dan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	VI - 14
6.2.2	Strategi Dan Kebijakan Belanja Daerah.....	VI - 14
6.2.3	Strategi Dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	VI - 14
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII - 1
7.1.	Program	VII - 11
7.2.	Rencana Kerja Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ...	VII - 23
BAB VIII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	VIII - 1
8.1.	Indikator Kinerja Visi.....	VIII - 1
8.2.	Indikator Kinerja Misi	VIII - 1
BAB IX	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	IX - 1
9.1.	Pedoman Transisi	IX - 1
9.2.	Program Transisi.....	IX - 1
9.2.1	Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran	IX - 1
9.2.2	Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Jasa	IX - 2

9.2.3	Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan	IX - 2
9.2.4	Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Keagamaan	IX - 3
9.2.5	Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik	IX - 4
9.3.	Kaidah Pelaksanaan	IX - 6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon	II - 1
Tabel 2.2.	DAS dan Sub River Basin di Kota Cilegon	II - 8
Tabel 2.3.	Keadaan Suhu Udara Perbulan di Kota Cilegon Tahun 2011	II - 10
Tabel 2.4.	Keadaan Tingkat Kelembaban di Kota Cilegon Tahun 2011	II - 10
Tabel 2.5.	Daerah Potensi Genangan	II - 25
Tabel 2.6.	Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2005 dan 2011	II - 28
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kota Cilegon Tahun 2011.....	II - 28
Tabel 2.8.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kota Cilegon Tahun 2008-2011	II - 29
Tabel 2.9.	Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT Di Kota Cilegon Tahun 2006-2010	II - 31
Tabel 2.10.	Prosentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Kota Cilegon Tahun 2008-2010	II - 32
Tabel 2.11.	Perkembangan Nilai PDRB ADHB Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2008-2011 (Rp. Juta).....	II - 33
Tabel 2.12.	Perkembangan Nilai PDRB ADHK Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2008-2011 (Rp. Juta).....	II - 34
Tabel 2.13.	Jenis Sektor dan Klasifikasi Kelompok Sektor Dalam Struktur Perekonomian Kota Cilegon.....	II - 34
Tabel 2.14.	Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2008-2011 (Persen).....	II - 35
Tabel 2.15.	Perkembangan Kontribusi PDRB ADHK Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2008-2011 (Persen).....	II - 36
Tabel 2.16.	Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Kelompok Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2008-2010 (Persen). ..	II - 36
Tabel 2.17.	Perkembangan Kontribusi PDRB ADHK Menurut Kelompok Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2008-2010 (Persen). ..	II - 37
Tabel 2.18.	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2008-2011 (Persen)	II - 38
Tabel 2.19.	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2008-2011 (Persen).....	II - 38
Tabel 2.20.	Perkembangan Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Cilegon Tahun 2008-2010.....	II - 39
Tabel 2.21.	Perkembangan Laju Inflasi Kota Cilegon Tahun 2009-2011.....	II - 40
Tabel 2.22.	Perkembangan Nilai dan Laju Perumbuhan Investasi Kota Cilegon Tahun 2010-2011	II - 41

Tabel 2.23.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cilegon Tahun 2010-2011	II - 41
Tabel 2.24.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Cilegon Tahun 2010-2011.....	II - 42
Tabel 2.25.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon Tahun 2008-2010	II - 43
Tabel 2.26.	Produksi Menurut Jenis Tanaman di Kota Cilegon Tahun 2006-2011 (Ton).....	II - 86
Tabel 2.27.	Luas Panen Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kota Cilegon Tahun 2006-2011 (Ha).....	II - 87
Tabel 2.28.	Jumlah Perusahaan Perdagangan Nasional Terdaftar di Kota Cilegon Tahun 2011.....	II - 88
Tabel 2.29.	Potensi Kawasan Industri di Kota Cilegon Tahun 2011... ..	II - 89
Tabel 2.30.	Jumlah Hotel Menurut Klasifikasi di Kota Cilegon Tahun 2011.....	II - 90
Tabel 2.31.	Karakteristik dan Fungsi Pengembangan Wilayah dalam setiap BWK.....	II - 91
Tabel 2.32.	Potensi dan Zonasi Bahan Tambang Galian Batuan di Kota Cilegon.....	II - 104
Tabel 3.1.	Perubahan Peraturan Terhadap Struktur Pendapatan	III - 2
Tabel 3.2.	Perubahan Peraturan Terhadap Struktur Belanja.....	III - 3
Tabel 3.3.	Perubahan Peraturan Terhadap Struktur Pembiayaan.....	III - 3
Tabel 3.4.	Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2005.....	III - 5
Tabel 3.5.	Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2006.....	III - 6
Tabel 3.6.	Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2007	III - 8
Tabel 3.7.	Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2008	III - 10
Tabel 3.8.	Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2009.....	III - 12
Tabel 3.9.	Target Pendapatan Tahun 2010.....	III - 13
Tabel 3.10.	Neraca Daerah Kota Cilegon Tahun 2006-2009.....	III - 18
Tabel 3.11.	Rencana Dan Realisasi Belanja Tahun 2005	III - 20
Tabel 3.12.	Rencana Dan Realisasi Belanja Tahun 2006	III - 22
Tabel 3.13.	Rencana dan Realisasi Belanja Tahun 2007	III - 25
Tabel 3.14.	Rencana dan Realisasi Belanja Tahun 2008.....	III - 26
Tabel 3.15.	Rencana Dan Realisasi Tahun 2009	III - 28
Tabel 3.16.	Realisasi Belanja Tidak Langsung 2007-2009.....	III - 30
Tabel 3.17.	Realisasi Belanja 2007-2009	III - 32
Tabel 3.18.	Rencana Belanja Tahun 2010.....	III - 33
Tabel 3.19.	Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon 2005.....	III - 36
Tabel 3.20.	Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon Tahun 2006.....	III - 37

Tabel 3.21.	Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon 2007.....	III - 38
Tabel 3.22.	Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon 2008.....	III - 38
Tabel 3.23.	Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon 2009.....	III - 40
Tabel 3.24.	Realisasi Pembiayaan Tahun 2007-2009.....	III - 40
Tabel 3.25.	Rencana Dan Realisasi Pembiayaan 2010.....	III - 41
Tabel 3.26.	Defisit Riil Anggaran.....	III - 42
Tabel 3.27.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran.....	III - 42
Tabel 3.28.	Target Pendapatan Daerah Kota Cilegon Tahun 2013-2016 (Rp.).....	III - 44
Tabel 3.29.	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.....	III - 45
Tabel 3.30.	Kerangka Pendanaaan Kota Cilegon Tahun 2013-2016 (Rp.).....	III - 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kedudukan RPJM Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah	I - 6
Gambar 2.1.	Wilayah Administratif Kota Cilegon Tahun 2011.....	II - 2
Gambar 2.2.	Posisi Geostrategis Kota Cilegon Dalam Konstelasi Regional dan Internasional	II - 5
Gambar 2.3.	Peta Struktur Patahan Dan Lipatan Regional di Wilayah Banten Dan Sekitarnya.....	II - 21
Gambar 2.4.	Peta Seismitas di Selat Sunda Tahun 2006	II - 22
Gambar 2.5.	Potensi Tsunami Kawasan Pesisir Kota Cilegon	II - 23
Gambar 3.1.	Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005.....	III - 5
Gambar 3.2.	Struktur Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2005.....	III - 6
Gambar 3.3.	Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006.....	III - 7
Gambar 3.4.	Struktur Realisasi Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun 2006 ...	III - 7
Gambar 3.5.	Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2007	III - 8
Gambar 3.6.	Struktur Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2007.....	III - 9
Gambar 3.7.	Struktur Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2007.....	III - 9
Gambar 3.8.	Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2008	III - 10
Gambar 3.9.	Struktur Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2008.....	III - 11
Gambar 3.10.	Struktur Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Cilegon Tahun 2008	III - 11
Gambar 3.11.	Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009.....	III - 12
Gambar 3.12.	Struktur Realisasi Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun 2009 ...	III - 13
Gambar 3.13.	Target Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2010	III - 14
Gambar 3.14.	Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun 2010	III - 14
Gambar 3.15.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Cilegon Tahun 2010	III - 15
Gambar 3.16.	Struktur Belanja Aparatur Daerah Kota Cilegon Tahun 2005	III - 21
Gambar 3.17.	Struktur Belanja Pelayanan Publik Tahun 2005	III - 21
Gambar 3.18.	Struktur Belanja Aparatur Daerah Kota Cilegon Tahun 2006	III - 22
Gambar 3.19.	Struktur Belanja Pelayanan Publik Kota Cilegon Tahun 2006	III - 23
Gambar 3.20.	Belanja Aparatur Daerah Kota Cilegon Tahun 2005-2006.....	III - 24
Gambar 3.21.	Belanja Pelayanan Publik Kota Cilegon Tahun 2005-2006	III - 24
Gambar 3.22.	Struktur Belanja Kota Cilegon Tahun 2007	III - 25
Gambar 3.23.	Struktur Belanja Tidak Langsung Tahun 2007.....	III - 26
Gambar 3.24.	Struktur Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun 2007	III - 26
Gambar 3.25.	Struktur Belanja Tahun 2008.....	III - 27
Gambar 3.26.	Struktur Belanja Tidak Langsung Tahun 2008.....	III - 27
Gambar 3.27.	Struktur Belanja Langsung Tahun 2008	III - 28

Gambar 3.28.	Struktur Belanja Kota Cilegon Tahun 2009	III - 28
Gambar 3.29.	Struktur Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun 2009	III - 29
Gambar 3.30.	Struktur Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun 2009	III - 29
Gambar 3.31.	Tren Realisasi Belanja Langsung	III - 31
Gambar 3.32.	Tren Belanja Langsung 2007-2009	III - 32
Gambar 3.33.	Struktur Rencana Belanja Kota Cilegon Tahun 2010	III - 33
Gambar 3.34.	Struktur Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon tahun 2010	III - 33
Gambar 3.35.	Struktur Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun 2010	III - 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok. Setelah terjadi pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Kota Cilegon termasuk dalam wilayah Provinsi Banten.

Perkembangan pembangunan Kota Cilegon sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang diperlukan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan sehingga tujuan dan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon dapat tercapai. Keseluruhan hasil-hasil pembangunan tersebut, tentunya tidak lepas dari konsep perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana daerah, baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Terkait dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan maka Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030. Dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi pedoman dan landasan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dalam periode perencanaan jangka menengah, pembangunan Kota Cilegon memasuki tahap ketiga, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015. Dokumen ini merupakan kelanjutan dari perencanaan jangka menengah Tahap II yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Tahun 2010-2015, dan merupakan *blue print* pelaksanaan pembangunan di Tahun 2010-2015 yang menjadi pedoman bagi

penyusunan dokumen perencanaan tahunan baik pada lingkup Pemerintah Kota Cilegon maupun SKPD Kota Cilegon.

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015, maka untuk menelaah sejauh mana keberhasilan dan kekurangan capaian pembangunan, tentunya diperlukan review terhadap dokumen RPJMD. Review ini pada dasarnya suatu proses evaluasi tentang kinerja dan proses implementasi dari seluruh program dan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah. Terkait dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada dasarnya hal ini merupakan perwujudan dari asas *accountability* (pertanggungjawaban).

Selain itu evaluasi ini juga diperlukan untuk penyusunan rencana percepatan pencapaian sasaran, dengan melihat sejauh mana masalah yang dihadapi dapat terselesaikan hingga saat ini. Dan jika belum, upaya apa yang dapat dilakukan pada jangka waktu pemerintahan yang masih tersisa selama tiga tahun kedepan, serta langkah percepatan apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan, sehingga dapat mempermudah pemerintahan selanjutnya.

Hal tersebut sejalan dengan dinamika pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Cilegon dan penetapan kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan upaya untuk mengakomodasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai wujud respon Pemerintah Kota Cilegon terhadap implementasi kebijakan pemerintah pusat dan penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 284 dimana perubahan RPJMD dilakukan karena adanya perubahan target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah salah satunya adalah pencapain target sasaran infrastruktur.

Sebagai wujud implementasi amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan maka diperlukan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015. Review RPJMD Kota Cilegon menjadi pedoman dalam penyusunan Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Revisi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 3858);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
21. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon;
22. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

- Kota Cilegon Jo. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon;
23. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015;
 25. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Secara grafik, hubungan antara dokumen dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana digambarkan dalam gambar 1.1. di bawah ini. Secara hirarki dokumen RPJM disusun dengan berpedoman pada rencana jangka panjang daerah (RPJP) serta memperhatikan RPJM Nasional/Provinsi. Selanjutnya, RPJM Kota Cilegon Tahun 2006-2010 yang telah dimutakhirkan (ditetapkan melalui Peraturan Daerah) menjadi pedoman dalam proses pemutakhiran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra-SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan bagi setiap SKPD.

Lebih lanjut, RPJM Kota Cilegon Tahun 2010-2015 sebagai dokumen perencanaan yang bersifat 'indikatif' dijabarkan dalam mekanisme perencanaan pembangunan tahunan dan penganggaran daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mana dokumen RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Bersifat "Indikatif" mengandung makna bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang terkandung di dalam dokumen RPJM ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, RPJM juga disusun dengan berpedoman kepada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon. Adanya keselarasan antara rencana pembangunan dengan penataan ruang merupakan suatu keharusan, sehingga dapat terwujud pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan keserasian perkembangan kegiatan pembangunan pada setiap bagian kota yang mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah



1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Rancangan Akhir Revisi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab IV Analisis Isu-isu Strategis

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab IX Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Review RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 **dimaksudkan** untuk ditujukan untuk menyesuaikan kembali Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 sampai dengan tahun 2011 dan rencana pelaksanaan tahun 2012 serta perkembangan kebutuhan pembangunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Berpijak pada maksud tersebut, maka penyusunan Review RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 **ditujukan** untuk menjadi pedoman bagi SKPD dalam meriew Renstra SKPD Tahun 2010-2015 dan RKPD Kota Cilegon dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

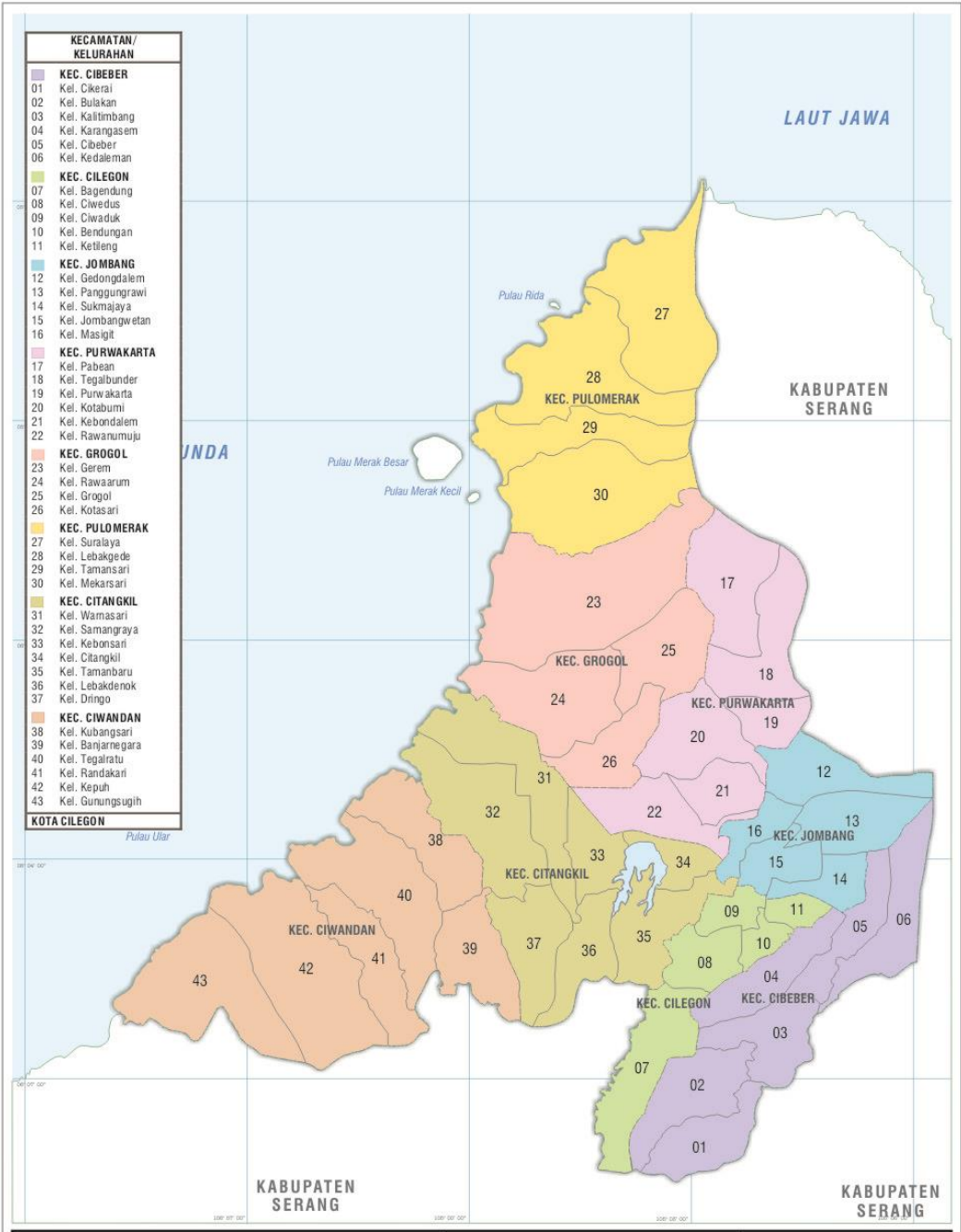
Kota Cilegon merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok. Sebagai kota yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Secara administratif, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Cilegon, Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,51 km² yang terbagi kedalam 8 (delapan) Kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) Kelurahan. Pembagian wilayah serta jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon

No.	Kecamatan	Pusat Kecamatan	Luas		Jumlah Kelurahan
			Km ²	%	
1	Ciwandan	Tegal Ratu	51,81	29,52	6
2	Citangkil	Kebonsari	22,98	13,09	7
3	Pulomerak	Tamansari	19,86	11,32	4
4	Purwakarta	Purwakarta	15,29	8,71	6
5	Grogol	Grogol	23,38	13,32	4
6	Cilegon	Ciwaduk	9,15	5,21	5
7	Jombang	Jombang Wetan	11,55	6,58	5
8	Cibeber	Kalitimbang	21,49	12,24	6
Kota Cilegon			175,51	100,00	43

Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2012

Gambar 2.1
Wilayah Administratif Kota Cilegon



2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Cilegon terletak antara 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur dan 5°52'24" - 6°04'07" Lintang Selatan yang dibatasi oleh :

Sebelah Barat : Selat Sunda
Sebelah Utara : Kabupaten Serang
Sebelah Timur : Kabupaten Serang
Sebelah Selatan : Kabupaten Serang

Ditinjau dari aspek geostrategis, Kota Cilegon memiliki peran dan posisi yang sangat menentukan dalam mendukung arah dan pola pembangunan dan pengembangan perkotaan baik dalam konstelasi regional, nasional, dan bahkan internasional yaitu:

1. Kota Cilegon sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah Provinsi Banten.

Dalam arahan RTRW Provinsi Banten, Kota Cilegon terletak di Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II, yang mempunyai arti strategis bagi seluruh wilayah provinsi. **Kota Cilegon**, Kota Serang dan Kabupaten Serang berfungsi sebagai pemacu dan pusat pertumbuhan utama bagi wilayah belakangnya dengan kegiatan perekonomian terdiri dari industri, pelabuhan, pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, pendidikan, kehutanan, pertambangan, dan jasa. Fungsi Kota Cilegon sebagai pusat pertumbuhan tidak dapat dilepaskan dari peran PT. Krakatau Steel yang alokasinya dalam RTRW Provinsi Banten sudah fix dan menjadi penggerak utama kegiatan industri di Provinsi Banten. Kawasan PT. Krakatau Steel dan sekitarnya ini pun kemudian direncanakan untuk ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus oleh Provinsi Banten dan PLTU Suralaya serta Waduk Krenceng sebagai Kawasan Strategis Provinsi.

Kota Cilegon sebagai salah satu PKN dan pusat pertumbuhan wilayah Provinsi Banten, sebagaimana dalam RTRW Provinsi Banten Tahun 2009–2029, Kota Cilegon lebih diarahkan pada pengembangan kelompok industri besar dan sedang, industri kecil, dan industri kerajinan. Dalam realisasinya, kawasan industri yang ada telah bertumbuhkembang dan sekaligus berperan sebagai pembentuk utama perekonomian Kota Cilegon. Peran sektor industri di Kota Cilegon juga memiliki peranan penting terhadap perekonomian Provinsi Banten. Sebagai pusat permukiman dengan segenap fasilitas dan jasa perkotaan yang tersedia, Kota Cilegon merupakan orientasi pergerakan bagi wilayah di sekitarnya, seperti Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Kota Cilegon merupakan salah satu daerah andalan bagi Provinsi Banten dalam sektor industri yang berskala nasional maupun yang sudah berorientasi ekspor. Kondisi ini merupakan suatu potensi yang perlu untuk dipertahankan bahkan dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Selain potensi industri yang berskala nasional, Kota Cilegon juga memiliki potensi yang berbasis pada masyarakat menengah yang dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.

2. Kota Cilegon sebagai simpul sistem jaringan utilitas dan pergerakan Jawa-Sumatera.

Melalui posisi seperti ini Kota Cilegon turut menentukan pertumbuhan dan perkembangan wilayah di kedua pulau besar tersebut. Dalam sektor transportasi, keberadaan Pelabuhan Merak menjadi penentu roda perekonomian dan pergerakan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan sebaliknya, khususnya dalam menjamin kelancaran distribusi arus barang dan manusia. Di samping itu, keberadaan Jalan Tol Jakarta – Merak semakin meningkatkan aksesibilitas eksternal Kota Cilegon, baik dengan ibukota negara (Jakarta) maupun wilayah-wilayah di Pulau Jawa lainnya. Selain itu dalam hal sistem jaringan transportasi kereta api, Kota Cilegon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstelasi simpul sistem pengelolaan jaringan rel KA Jawa – Bali; serta dalam kaitannya dengan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik yang diprioritaskan penanganannya terutama sebagai pemasok kebutuhan listrik bagi Jawa-Bali.

3. Kota Cilegon sebagai potensi inlet-outlet terhadap lokasi pasar dunia.

Secara geografis memiliki akses langsung terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang didukung oleh keberadaan 21 pelabuhan umum dan khusus. ALKI yang merupakan salah satu jalur pelayaran internasional menjadi salah satu acuan pengembangan inlet-outlet wilayah nasional, yaitu dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap lokasi pasar dunia. Dari gambaran aksesibilitas outlet terhadap pasar dunia dapat disimpulkan bahwa tendensi akses ALKI I adalah ke negara ASEAN, Uni Eropa, dan Asia Pasifik. Peran penting Kota Cilegon sebagai inlet-outlet di tingkat nasional disisi lain ditunjukkan dengan kinerja bongkar muat barang antar pulau dan luar negeri pada beberapa pelabuhan di Kota Cilegon yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Peran penting Kota Cilegon sebagai inlet-outlet di tingkat nasional di sisi lain ditunjukkan dengan kinerja bongkar muat barang antar pulau dan luar negeri pada Pelabuhan PT. Krakatau Bandar Samudera (PT. KBS) yang menempati urutan ketiga di tingkat nasional pada tahun 2002.

Gambar 2.2
Posisi Geostrategis Kota Cilegon
Dalam Konstelasi Regional dan Internasional



Selain aspek geostrategis, karakteristik geografis Kota Cilegon masuk ke dalam kategori kota pesisir. Hal ini diindikasikan dengan membentangnnya kawasan pesisir laut dari bagian utara hingga selatan wilayah kota serta hasil perhitungan Peta Topografi Kota Cilegon di mana panjang garis pantai Kota Cilegon adalah 40,88 km atau sekitar 43,6% dari total perimeter wilayah Kota Cilegon.

2.1.1.3. Kondisi Morfologi dan Topografi

Kota Cilegon memiliki bentang alam yang beragam dari mulai dataran hingga perbukitan terjal. Ditinjau dari satuan morfologi daratan, banyak dijumpai di sepanjang pantai dan bagian tengah wilayah melebar ke timur. Kota Cilegon berada pada ketinggian antara 0-553 meter di atas permukaan laut (dpl). Wilayah tertinggi berada di bagian utara Kecamatan Pulomerak (Gunung Gede), sedangkan terendah berada di bagian barat yang merupakan hamparan pantai. Lebih spesifik lagi satuan ini dapat dipisahkan atas sub satuan dataran pantai dengan kemiringan 0-3% dan sub satuan morfologi bergelombang dengan kemiringan 3-5%.

Berdasarkan karakteristik morfologi daratan dan kemiringan lahan, secara garis besar karakteristik fisik Kota Cilegon dapat dibedakan ke dalam tiga bagian, yaitu:

- Bentuk dataran, mempunyai kemiringan lahan berkisar antara 0-2% hingga 2-7% dan ketinggian antara 0 meter hingga 50 meter dpl, tersebar di sepanjang pesisir pantai barat dan bagian tengah Kota Cilegon.
- Bentuk perbukitan-sedang, mempunyai kemiringan lahan berkisar antara 7-15% dan ketinggian antara 50-100 meter dpl, terdapat di wilayah tengah kota, tersebar di bagian utara dan selatan Kecamatan Cilegon dan Cibeer, serta bagian selatan Kecamatan Ciwandan dan Citangkil.
- Bentuk perbukitan-terjal, mempunyai kemiringan lahan berkisar antara 15-40% hingga lebih dari 40% dengan ketinggian antara 100 hingga 200 meter dpl, tersebar di bagian utara Kota Cilegon (Kecamatan Pulomerak dan Grogol) dan sebagian kecil wilayah barat Kecamatan Ciwandan.

Berdasarkan kenampakan pada peta topografi dan citra satelit SPOT, sebaran bentang alam di wilayah Kota Cilegon teratur. Kondisi bentang alam (morfologi) wilayah ini dicirikan oleh adanya beberapa satuan bentang alam, yaitu: satuan perbukitan bergelombang rendah dan satuan dataran rendah.

Satuan bentang alam perbukitan rendah bergelombang menempati wilayah di bagian utara, dicirikan oleh perbukitan bergelombang rendah dengan ketinggian maksimum sekitar 1000 meter. Secara umum permukaan dataran dari satuan ini adalah rata sampai miring landai, torehan sungai dangkal dan lebar. Satuan ini disusun oleh produk erupsi dan hasil rombakan dari gunung api-gunung api pada satuan pegunungan. Dari kenampakan bentang alamnya, batuan yang menyusunnya relatif lebih lunak atau bersifat lepas yang terdiri dari tufa dan breksi berbutir halus.

Satuan bentang alam dataran rendah menyebar hampir di seluruh wilayah, sebagian besar di dataran pantai barat. Bentuk satuan ini berbeda dalam kenampakan yang sifatnya sesuai dengan cara pembentukan dataran tersebut. Dataran aluvial sungai dan pantai merupakan bentuk yang sangat umum terdapat di wilayah ini.

2.1.1.4. Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi

Kondisi hidrogeologi dan hidrologi di Kota Cilegon dapat dibedakan atas air tanah dan air permukaan. Air tanah umumnya dapat dijumpai pada kedalaman yang cukup tinggi dengan produktivitas yang beragam tergantung pada karakteristik geologi dan kandungan unsur kimia lainnya. Akan tetapi dengan semakin tingginya kompetisi pengambilan air tanah baik untuk kebutuhan industri maupun domestik menimbulkan dampak terhadap produktivitasnya yang semakin menurun. Bahkan untuk daerah di sekitar pesisir pantai, intrusi air laut dan kandungan logam dalam air (besi, timbal, nitrit, dan logam berat lainnya) dapat ditemukan sehingga sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Potensi air sungai wilayah ini umumnya kecil dengan fluktuasi sangat tergantung pada musim. Sebagian besar sungai di wilayah ini kering di musim kemarau (intermittent). Sungai-sungai yang cukup potensial berada jauh dari pusat kota, bahkan di luar Kota Cilegon.

Keadaan hidrogeologi di Kota Cilegon memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut : (1) Terdapatnya daerah aliran langka, potensi mata air langka dengan daerah penyebaran di bagian utara dan tengah wilayah kota; (2) Akuifer produktif rendah, air melalui celahan dan ruang antar butir, potensi mata air sedang; (3) Akuifer produktif dengan penyebaran luas, alirannya melalui ruang antar butir. Pada akuifer ini tidak terdapat mata air; dan (4) Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas, alirannya melalui ruang antar butir. Pada akuifer ini tidak ada mata air.

Kualitas air tanah Kota Cilegon umumnya masih memenuhi syarat untuk air minum (TDS < 1.000 mg/l), kecuali di sepanjang pantai Selat Sunda (nilai TDS 1.000-20.960 mg/l), dan sebagian lokasi di Kelurahan Kotabumi (Kecamatan Purwakarta), Mekarsari (Kecamatan Pulomerak), Sukmajaya (Kecamatan Jombang), Cibeber (Kecamatan Cibeber), kualitas air tanahnya tidak memenuhi syarat sebagai air minum (nilai TDS 1.000-8.000 mg/l).

Berdasarkan pada analisis dengan Diagram Wilcox, daerah kajian pada umumnya mempunyai resiko kegaraman (*salinity hazard*) sedang dan sodium (*sodium/alkali hazard*) rendah. Resiko kegaraman tinggi-sangat tinggi dan resiko sodium rendah (C4-S1) akan cenderung dijumpai di sekitar daerah pantai setempat, dijumpai di sekitar Kelurahan Kotabumi (Kecamatan Purwakarta) dan Mekarsari (Kecamatan Pulomerak).

Dengan memperhatikan faktor-faktor morfologi, litologi dan arah aliran air tanah, daerah akifer dengan produktivitas tinggi ($Q_s = 1-19 \text{ lt/dtk/m}$) terdapat di sekitar daerah industri PT. Krakatau

Steel. Di dalam peta potensi air tanah, daerah tersebut dizonasikan sebagai daerah yang mempunyai produktivitas sumur >5lt/dtk. Menurut hasil pengamatan lapangan serta dengan memperhatikan tipikal konstruksi sumur bor yang ada, sebagian besar muka air tanah sumur bor yang ada umumnya lebih rendah dari muka air sumur gali di sekitarnya. Berdasarkan kondisi ini untuk tujuan konservasi (melindungi air sumur gali agar tidak tersedot ke sumur bor) pengambilan air tanah untuk sumur bor harus mulai dicermati. Penambahan debit pengambilan untuk industri (usaha komersial) sebaiknya dilakukan dengan *penelitian hidrogeologi yang lebih teliti dan detail pada skala lokal*.

Kondisi Hidrologi Kota Cilegon dapat dilihat dengan daerah aliran Sungai di Kota Cilegon. Pada umunya Sungai-sungai yang ada di Kota Cilegon tergolong sungai-sungai kecil dengan debit air yang tidak terlalu besar. Perlu strategi penangan sungai-sungai di Kota Cilegon agar dapat dimanfaatkan lebih Optimal dengan keterbatasan debit air. Gambaran Keseluruhan DAS yang terdapat di Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
DAS dan Sub River Basin di Kota Cilegon

No.	Nama DAS	Wilayah DAS		Sub River Basin	
		Panjang (Km)	Debit Rata-rata (M3/detik)	Nama Sungai	Panjang (Km)
1.	Cibeber	20,87	65,55	Ciweleh	5,09
				Cigundil	2,89
				Cikukulu	2,72
				K. Husen	1,98
				K. Kubang Semar	3,03
				K. Kalapa	8,16
				K. Melati	3,48
2.	Kedungingas	24,23	35,85	Cibojongjengkol	5,85
				K. Lengkong	2,44
				Cisukanala	5,44
3.	Gunungsugih	4,79	8,46	-	
4.	Kali Malang	3,35	5,70	-	
5.	Kali Saksak	6,76	19,82	-	
6.	Kali Mancak	8,93	11,51	-	
7.	Cigeblag	11,82	18,13	Cibuntu	3,37
				Ciwatujaran	4,20
8.	Ciluwit	8,05	12,99	-	
9.	Kebonsari	6,49	13,30	-	
10.	Kali Grogol	8,53	18,57	-	
11.	Kali Gerem	6,04	9,83	-	
12.	Cibatu	4,70	5,60	-	
13.	Cikuasa	3,93	4,80	-	
14.	Cilangon	6,03	11,19	-	
15.	Cipala	3,28	4,19	-	
16.	Cisalak	3,79	5,02	-	
17.	Cikohot	4,59	11,55	Cipeutey	2,05

Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2012

Untuk sebaran air di permukaan, terdapat beberapa sungai (kali) kecil. Di daerah Pulomerak sungai kecil ini berawal dari kawasan puncak Gunung Gede, sedangkan untuk yang melintasi daerah Kecamatan Cilegon, Ciwandan, dan Cibeber bersumber dari mata air yang berada di luar wilayah Kota Cilegon. Pada umumnya kali tersebut hanya berfungsi sebagai saluran pembuangan air (drainase kota) yang bersifat alami dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan lain, semisal untuk irigasi pertanian dan lain-lain.

Hal ini tidak terlepas dari kondisi permukaan air kali-kali tersebut yang pada umumnya terletak jauh lebih rendah dari lahan di sekitarnya serta debit air rata-rata yang rendah. Neraca air di Kota Cilegon dihitung dengan Metode F.J. Mock, dengan jumlah limpasan air permukaan sebesar 614,79 mm dan volume simpanan air tanah (*storage volume*) sebesar 432 mm. Jika luas wilayah Kota Cilegon 175,5 km², maka besarnya volume simpanan air tanah adalah 75.816.000 m³/tahun.

Secara umum dapat disebutkan kali-kali yang terdapat di Kota Cilegon antara lain Kali Kahal, Kali Tompos, Kali Sekong, Kali Gayam (debit air 36 liter/detik), Kali Medaksa, Kali Sangkanila, Kali Cikuasa, Kali Sumur Wuluh, Kali Gerem, Kali Grogol, Kali Cijalumpang, Kali Cibeber (3000 liter/detik), Kali Kedungingas (14000 liter/detik), Kali Cidanau (2000 liter/detik), Kali Krenceng (5 liter/detik), dan Kali Cipanyurungan. Dari sejumlah kali tersebut, yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan komersial adalah Kali Cidanau. Aliran air kali ini di daerah Krenceng ditampung dalam sebuah waduk (Waduk Krenceng) untuk selanjutnya diolah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan air industri dan untuk pelayanan air bersih untuk kebutuhan domestik.

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan aspek klimatologi, kondisi iklim di Kota Cilegon dengan temperatur berkisar antara 22,1°C - 34,0°C yakni beriklim tropis dengan dua kali pergantian musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi antara bulan Mei-Oktober sedangkan musim penghujan terjadi sekitar bulan November-April. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 1.000-1.500 mm/tahun, sedang kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,7-4,8 m/detik.

Tabel 2.3
Keadaan Suhu Udara Perbulan di Kota Cilegon
Tahun 2008-2011

No.	Bulan	Suhu		Rata-rata Suhu
		Maksimum	Minimum	
1.	Januari	30.5	23.6	26.5
2.	Pebruari	31.5	23.6	26.7
3.	Maret	31	23.6	26.5
4.	April	32	23.6	27
5.	Mei	31.9	23.5	27.2
6.	Juni	32.2	23.2	27
7.	Juli	31.8	22.9	26.7
8.	Agustus	32.4	22.1	26.7
9.	September	33.1	22.6	27.2
10.	Oktober	32.7	28.8	27.3
11.	Nopember	32.3	23.6	27.2
12.	Desember	32	24	27.5
Rata-rata 2011		32	23,8	27
Rata-rata 2010		31.7	23.9	27
Rata-rata 2009		32.2	23.3	27.1
Rata-rata 2008		31.5	23.1	26.6

Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2012

Tabel 2.4
Keadaan Tingkat Kelembaban di Kota Cilegon Tahun 2011

No.	Bulan	Kelembaban Udara	Tekanan Udara	Tekanan Uap Air
1.	Januari	83	1007.7	28.7
2.	Pebruari	84	1007.9	29.4
3.	Maret	84	1008	29.2
4.	April	83	1008.7	29.5
5.	Mei	85	1008.9	30.7
6.	Juni	79	1009.2	28.1
7.	Juli	81	1009.7	28.4
8.	Agustus	77	1010	27
9.	September	76	1010.5	27.4
10.	Oktober	79	1009	28.7
11.	Nopember	80	1008.2	28.9
12.	Desember	81	1008	29.7
Rata-rata		81	1008.8	28.8

Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2012

Secara klimatologi Kota Cilegon memiliki 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi antara bulan November–April. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Mei–Oktober. Besarnya curah hujan bulan November-April berkisar antara 100–400 mm, sedangkan bulan Mei–Oktober berkisar antara 50–150 mm. Besarnya curah hujan tahunan berkisar antara 1000–1500 mm/tahun.

Sementara itu kecepatan angin terendah terjadi pada bulan Februari dan tertinggi pada bulan Maret. Curah hujan tertinggi di bulan Januari sekitar 243 mm/tahun dan terendah di bulan September sekitar 32 mm/tahun.

Hasil rekaman suhu rata-rata di St. Klimatologi Serang nampak bahwa rata-rata bulanan dari Januari hingga Desember, suhu terendah 22,1 C yang terjadi pada Agustus dan suhu tertinggi terjadi pada September yaitu 33,1 C. Keadaan rata-rata tekanan udara berkisar antara 1007,7 milibar (mb) hingga 1010,5 mb. Tekanan terendah pada bulan Januari dan tertinggi pada September. Penyinaran matahari rata-rata bulanan dari yang terendah sampai yang tertinggi antara 8,0 % dan 40,6 %. Penyinaran matahari yang terendah terjadi pada Juli dan tertinggi pada Februari. Kecepatan angin rata-rata bulanan dari yang terendah hingga yang tertinggi antara 2,0 m/det dan 4,0 m/det. Kecepatan terendah terjadi pada Januari dan tertinggi pada Maret. Kelembaban udara rata-rata bulanan dari yang terendah hingga yang tertinggi antara 77 dan 85. Kelembaban terendah terjadi pada Agustus dan tertinggi pada Mei.

2.1.1.6. Kondisi Geologi dan Tanah

Keadaan batuan yang tersingkap di Kota Cilegon terdiri dari batuan vulkanik dan aluvium. Berdasarkan penelitian yang dilakukan IWACO dan WASECO pada tahun 1990 serta hasil analisis dan penafsiran Citra Spot pada tahun 1991, sebaran batuan yang terdapat di Kota Cilegon terdiri dari lava, tuva, breksi dan endapan sungai. Jenis batuan mempunyai sebaran sebagai berikut :

- Lava dan Breksi Gunung Gede tersebar di Bagian Utara;
- Breksi dan Tuva Gunung Gede tersebar di Bagian Tengah sampai Barat;
- Endapan sungai berada diantara sebaran lava/ breksi Gunung Gede dan breksi/tuva Gunung Gede;
- Breksi dan Tuva Gunung Danau tersebar di bagian Tengah, Barat, dan Selatan;
- Tuva dan Breksi Gunung Tukang berada di bagian Barat Daya; dan
- Tuva Gunung Danau berada di bagian Timur.

Berdasarkan pada evaluasi peta geologi yang ada (E. Rusmana,dkk,1991), struktur geologi yang terdapat di daerah kajian berupa kelurusan-kelurusan topografi yang diidentifikasi melalui foto udara. Kelurusan-kelurusan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya jalur struktur rekahan atau sesar (patahan), yang umumnya berarah barat laut-tenggara dan sebagian barat

daya-timur laut. Struktur rekahan atau sesar yang berarah barat laut tenggara terdapat di kompleks G.Gede memotong batuan vulkanik Kuarter Tua, dan struktur yang berarah barat daya-timur laut terdapat di bagian timur Kota Cilegon yang memotong batuan Tufa Banten.

Kondisi tanah di Kota Cilegon merupakan hasil pelapukan batuan vulkanik yang berasal dari Gunung Gede. Jenis tanah ini di jumpai di daratan dan lereng pegunungan, berwarna Cokelat Muda dan Cokelat Tua dengan tekstur halus – kasar, termasuk jenis tanah ini adalah lempung, lempung pasir dan pasir. Jenis tanah pasir atau yang bersifat pasir mempunyai sifat meresapkan air cukup baik.

Tanah yang berasal dari aluvium (endapan sungai, pantai dan rawa) dapat dijumpai di wilayah Utara Kota Cilegon. Jenis tanah ini dicirikan dengan warna abu-abu muda kecoklatan, bersifat agak lepas, ukuran butir dan lempung hingga pasir, tekstur halus – kasar. Sesuai dengan tekstur tanah dan sebenarnya, kadalaman efektif masing-masing tanah bervariasi, yang diuraikan berikut ini:

- Aluvium dengan Kedalaman efektif 30 – 60 cm, tekstur tanah halus, sebaran di bagian Utara;
- Latosol dengan kedalaman efektif < 30 cm, tekstur tanah halus, sebaran di Bagian Utara;
- Regosol dengan kedalaman efektif > 30 cm, Tekstur tanah halus, sebaran di Bagian Tengah, Barat, Timur, dan Utara;
- Regosol dengan kedalaman efektif > 90 cm, tekstur tanah kasar, sebaran di Bagian Barat hingga Barat Daya (pantai);
- Aluvial dengan kedalaman efektif > 90 cm, tekstur tanah kasar, sebaran di Bagian Barat hingga Barat Daya;
- Aluvial dengan kedalaman efektif 90 cm, tekstur tanah sedang, sebaran di Bagian Barat hingga Barat Daya;
- Regosol kelabu kekuning kuningan dengan kedalaman efektif > 90 cm, tekstur tanah halus, sebaran di Bagian Selatan;
- Latosol dengan kedalaman efektif > 90 cm, tekstur tanah kasar, sebaran di Bagian Tengah.

Keadaan tanah di Kota Cilegon merupakan hasil pelapukan batuan vulkanik yang berasal dari Gunung Gede. Jenis tanah ini dijumpai di dataran dan lereng pegunungan, berwarna coklat muda, coklat tua dengan tekstur halus-kasar, termasuk jenis tanah ini adalah lempung, lempung pasir dan pasir. Jenis tanah pasir atau yang bersifat pasir mempunyai sifat meresapkan air cukup baik. Tanah yang berasal dari aluvium (endapan sungai, pantai, dan

rawa) dijumpai di wilayah utara Kota Cilegon. Jenis tanah ini dicirikan dengan warna abu-abu muda kecokelatan, bersifat agak lepas, ukuran butir dari lempung hingga pasir, tekstur halus-kasar. Sesuai dengan tekstur tanah dan sebarannya, dengan kedalaman efektif masing-masing tanah yang bervariasi.

Tekstur tanah merupakan keadaan kasar halusnya tanah (bahan padat anorganik) yang ditentukan berdasarkan perbandingan fraksi-fraksi pasir, debu, dan liat. Tekstur tanah di Kota Cilegon diklasifikasikan dalam tiga kelas, yaitu tekstur tanah kasar, sedang, dan halus. Dilihat dari sebarannya, tekstur tanah di Kota Cilegon sebagian besar merupakan tanah dengan tekstur halus (liat) yang tersebar dari barat, tengah, timur kota, dan sebagian di wilayah selatan. Untuk wilayah utara sebagian besar bertekstur tanah sedang (lempung) dan di bagian barat daya bertekstur kasar (pasir). Berdasarkan luasnya, luas wilayah dengan tekstur tanah sedang (lempung) merupakan wilayah terbesar di Kota Cilegon yaitu dengan luas 10.528 Ha atau sebesar 59,99% dari luas wilayah keseluruhan. Kemudian disusul wilayah dengan tekstur halus seluas 5.847 Ha atau sebesar 33,31% serta yang terkecil adalah luas wilayah dengan tekstur kasar seluas 1.175 Ha atau sebesar 6,70%.

2.1.1.7. Kondisi Kelautan

Kondisi yang dibahas meliputi bathimetri, pasang surut, dan arus. Untuk keadaan bathimetri, Selat Sunda dibagi menjadi dua bagian, yaitu : (1) bagian pantai dengan kedalaman rata-rata 20 meter dengan kemiringan dasar rata-rata 10%; dan (2) bagian tengah dengan kedalaman rata-rata 30 meter selebar 4 kilometer. Dari data sounding, diketahui sampai kurang lebih jarak 1 kilometer dari garis pantai, kedalaman laut rata-rata sekitar 10 meter dengan kemiringan dasar laut slope rata-rata 10%.

Analisis pasang surut dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari daerah di sekitarnya yaitu lokasi Pelabuhan Merak dan Ciwandan. Tipe pasang surutnya adalah 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 24 jam, sedangkan tenggang pasang surut yang tertinggi adalah 1,2 meter. Arus perairan seperti Selat Sunda dapat dipengaruhi pasang surut. Kecepatan arus pada saat pasang kurang lebih 0,6 knot dengan arah timur laut, saat surut 0,7 knot dengan arah barat daya. Pada musim timur, arus laut di perairan Selat Sunda lebih banyak mengarah ke timur atau timur laut sedangkan pada musim barat mengarah ke barat atau barat daya, dengan kecepatan arus berkisar antara 1,5-2,2 knot.

Dari hasil pengkajian analisis dampak lingkungan Proyek Perluasan Pelabuhan Merak-Bakauheni, diperoleh keterangan bahwa berdasarkan informasi dari nelayan setempat dan pengamatan visual, terdapat terumbu karang di sekitar Pulau Merak Kecil dan di sebelah Tenggara, Selatan, dan Barat Laut Pulau Merak Besar.

Ikan hasil tangkapan dengan bagan, pancing, gillnet dan payang, biasanya didaratkan di TPI Anyer. Selain ikan teri, aembang, kembung, layang, umumnya ikan-ikan yang tertangkap merupakan ikan pilajik besar (tongkol, layaran, cakalang, tuna, dan tenggiri). Ladang ikan pilajik ini umumnya terdapat di perairan Dusun Sangiang.

2.1.1.8. Kondisi Pemanfaatan Ruang

Sebagai kawasan perkotaan dengan tipologi kota sedang (jumlah penduduk kurang dari 500 ribu jiwa), Kota Cilegon telah berubah menjadi kota yang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini diindikasikan dengan heterogenitas dan dinamika perubahan konfigurasi ruang dalam konteks peningkatan intensitas pemanfaatan ruang. Secara umum, pemanfaatan atas ruang dibedakan atas dua fungsi utama kawasan yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung merupakan kawasan fungsional yang berperan dalam menjaga kelestarian ekosistem dan keseimbangan tata lingkungan dari penetrasi aktivitas manusia. Sedangkan Kawasan Budidaya merupakan kawasan yang secara fisik mampu menjadi ruang bagi manusia dalam menyelenggarakan aktivitas bagi kehidupan dan penghidupannya.

A. Kawasan Lindung

Secara umum Kawasan lindung di Kota Cilegon dibedakan atas kawasan tangkapan air dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber air baku; kawasan perbukitan yang memiliki kemiringan lereng di atas 40% dengan jenis tanah yang mempunyai tingkat kepekaan sangat tinggi/mudah erosi; dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan hal tersebut, Kota Cilegon memiliki beberapa kawasan lindung baik yang berfungsi sebagai kawasan yang memberikan perlindungan kawasan setempat maupun kawasan dibawahnya, yaitu hutan lindung di sekitar Kecamatan Pulomerak, hutan lindung di sekitar Kecamatan Ciwandan, kawasan lindung di pulau-pulau kecil, dan kawasan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat.

B. Kawasan Budidaya

Secara umum, kawasan budidaya dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kawasan budidaya terbangun dan kawasan budidaya tidak terbangun. Kawasan budidaya terbangun meliputi kawasan perumahan, kawasan industri, dan kawasan perdagangan dan jasa di mana menurut hasil analisis sebagaimana pada tabel di atas memiliki luas sekitar 4.252,28 ha atau sekitar 24,2% dari total luas Kota Cilegon. Sedangkan Kawasan budidaya tidak terbangun mencakup kebun/ladang, sawah (irigasi dan tadah hujan), dan waduk dengan luas sekitar 7.930,43 ha atau sekitar 45,2% dari total luas Kota Cilegon.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

A. Potensi Pengembangan Industri dan Kepelabuhanan

Pengembangan industri (terutama industri berat) dan pelabuhan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain di mana peran pelabuhan itu sendiri sangat penting dalam sirkulasi pergerakan produk industri. Pertumbuhan dan perkembangan sektor industri diinisiasi oleh kondisi pesisir pantai Selat Sunda yang sangat ideal bagi pengembangan kepelabuhanan terutama ditinjau dari topografi (kedalaman) pantai yang ideal bagi penambatan kapal besar dan karakteristik perairan yang relatif tenang (selat). Posisi pelabuhan sendiri dalam perkembangan industri memegang peranan yang sangat sentral sebagai fasilitas utama dalam menunjang pergerakan barang dan produksi baik itu lalu lintas bahan baku maupun produk industri. Kondisi topografis pantai ini pun ditunjang oleh peran Selat Sunda sebagai jalur pelayaran internasional sehingga aksesibilitas perairan Kota Cilegon sangat tinggi.

Dengan panjang pantai yang membentang dari utara hingga selatan wilayah Kota Cilegon (sekitar 40,88 km atau sekitar 43,6% dari total keliling wilayah Kota Cilegon), industri dan pelabuhan merupakan aktivitas yang intensitasnya paling tinggi di mana sekitar 52,3% dari panjang garis pantai telah terisi oleh kegiatan tersebut.

Selain pengembangan industri berbasis pesisir, terdapat pula industri yang dikembangkan pada areal perkotaan seperti di sekitar Kelurahan Kepuh, Kelurahan Gunungsugih, Kelurahan Randakari, Kelurahan Banjarnegara, Kelurahan Kubangsari, Kelurahan Ramanuju, Kelurahan Kedaleman, Kelurahan Gerem, dan sebagainya di mana aksesibilitas industri ditunjang oleh keberadaan sistem jaringan infrastruktur yang menunjang aktivitas industri seperti jaringan

jalan (jalan tol Jakarta-Merak dan Jalan Lingkar Selatan), prasarana listrik dan gas, serta kondisi topografi yang relatif datar. Pada areal perkotaan, pengembangan kawasan industri diarahkan ke Kecamatan Ciwandan (Kelurahan Kepuh, Kelurahan Gunungsugih, dan Kelurahan Randakari) dengan jenis industri adalah industri berat dan industri menengah non-polutan.

B. Potensi Pengembangan Perumahan

Sebagai efek berganda dari pertumbuhan aktivitas perkotaan yang disertai dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan hunian pun semakin meningkat. Saat ini lahan perumahan yang sudah terbangun baik yang masuk ke dalam kategori perumahan terencana maupun perumahan tidak terencana adalah sekitar 2.641,30 ha atau sekitar 15,5% dari total luas kota. Dalam konteks pengembangan perumahan, terdapat beberapa kriteria lokasi yang perlu diperhatikan berkaitan dengan fungsi sosial dan fungsi lingkungan dari pengembangan sektor perumahan di mana berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ditegaskan bahwa penyelenggaraan perumahan harus memperhatikan aspek kelayakan lingkungan perumahan meliputi kesehatan, keamanan, keserasian, dan keteraturan. Mengacu pada hal tersebut, maka lokasi pengembangan perumahan haruslah memperhatikan beberapa faktor antara lain:

1. Jarak relatif terhadap aktivitas yang tidak berkesesuaian dengan karakteristik perumahan (seperti industri, tempat penampungan sampah, pengelolaan limbah, dan sebagainya).
2. Topografi dan tingkat kerentanan terhadap bencana alam
3. Aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana kota
4. Keterpaduan dengan aktivitas sekitarnya.
5. Arah kepadatan bangunan (kepadatan tinggi yaitu lebih dari 36 unit bangunan/ha; kepadatan sedang antara 12 hingga 36 unit bangunan/ha; dan kepadatan rendah yaitu kurang dari 12 unit bangunan/ha).

Dengan memperhatikan ke lima faktor tersebut maka potensi pengembangan perumahan diarahkan pada bagian selatan dan timur kota antara lain:

1. Pengembangan perumahan terencana berbasis kawasan/lingkungan siap bangunan (kasiba/lisiba) terutama di sekitar Kelurahan Cibeber, Kelurahan Kalitimbang, Kelurahan Ciwedes, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Kedaleman, Kelurahan Tamanbaru, dan Kelurahan Lebakdenok
2. Pengembangan perumahan vertikal terutama pada kawasan pusat kota, kawasan cepat tumbuh (fast-growing area), dan sekitar kawasan industri/pelabuhan meliputi di Kelurahan

Mekarsari, Kelurahan Tamansari, Kelurahan Banjarnegara, Kelurahan Jombang Wetan, Kelurahan Ramanuju, dan Kelurahan Gerem.

3. Alih fungsi lahan pertanian yang sudah tidak produktif dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta arahan rencana tata ruang.
4. Pengembangan perumahan tidak terencana (pengembangan individual) yang terintegrasi dengan sistem pusat pelayanan permukiman.
5. Peningkatan kondisi lingkungan permukiman padat-kumuh melalui serangkaian program perbaikan prasarana dasar serta peningkatan kesehatan lingkungan.
6. Penanganan lingkungan perumahan yang tumbuh di sekitar kawasan industri dan kawasan lindung melalui insentif/disinsentif penataan ruang dan relokasi.

C. Potensi Pengembangan Perdagangan dan Jasa

Potensi pengembangan perdagangan dan jasa akan semakin meningkat seiring dengan perubahan atas tiga hal yaitu meningkatnya status pelayanan perkotaan Kota Cilegon sebagai *service-city* bagi daerah sekitarnya (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang), pembangunan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas kawasan, dan peningkatan pembangunan perumahan. Selama ini pengembangan perdagangan dan jasa lebih terkonsentrasi pada dua kawasan yaitu di sekitar jalan protokol dan sekitar kawasan Pelabuhan Merak. Mengacu pada rencana pengembangan aksesibilitas kota serta pengembangan kawasan perumahan, maka potensi pengembangan perdagangan dan jasa akan semakin besar, meliputi:

1. Keberadaan Jalan Lingkar Selatan sebagai pusat pertumbuhan baru yang diproyeksikan memiliki peran strategis dalam menunjang pelayanan perkotaan.
2. Perkembangan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan jasa ke lahan yang potensial dan strategis sehingga mampu memperkuat pembentukan struktur pelayanan dan citra Kota Cilegon sebagai *service-city*.

D. Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Keberadaan RTH di Kota Cilegon akan sangat bermanfaat sebagai penyeimbang tingginya intensitas kegiatan terutama industri dan kawasan terbangun. Apabila pengembangan fisik kawasan tidak disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, maka degradasi kualitas lingkungan baik mikro maupun makro akan semakin kentara seperti polusi udara, banjir, kenaikan suhu udara, dan sebagainya. Dalam konteks pengembangan RTH pada prinsipnya terdapat tiga fungsi yaitu sebagai konservasi, pelindung kelestarian

objek/lingkungan tertentu, dan penunjang estetika kota. Sebagai konservasi, potensi pengembangan RTH direalisasikan dengan penetapan kawasan konservasi di sekitar Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Ciwandan.

RTH yang berfungsi sebagai pelindung kelestarian objek/lingkungan tertentu direalisasikan dalam alokasi RTH penyangga (buffer) antara kawasan industri dan perumahan, RTH di sekitar ruang sempadan sungai, jalur kereta api, jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT/SUTET), jalan tol, sempadan pantai, areal sekitar waduk, dan sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan untuk pengembangan RTH yang berfungsi penunjang estetika kota dialokasikan pada lahan eks-Pasar Kota serta rencana pengembangan taman skala kecamatan dan kelurahan.

E. Potensi Pengembangan Pariwisata

Secara konseptual, pariwisata akan senantiasa diawali dengan keberadaan daya tarik kawasan (*attraction*) sehingga mendorong wisatawan untuk berkunjung. Potensi pengembangan wisata di Kota Cilegon meliputi pengembangan pariwisata eksisting berbasis pantai seperti kawasan wisata Pulorida termasuk pulau di sekitarnya (Pulau Merak Besar, Pulau Merak Kecil, dan Pulorida). Di samping itu direncanakan pula pengembangan wisata alam lain (wisata hutan) seperti wisata Gunung Gede dan wisata Cipala dan infrastruktur pendukungnya seperti fasilitas penginapan (hotel), atraksi wisata, dsb. Secara spasial, potensi pengembangan pariwisata diarahkan ke sekitar Kelurahan Mekarsari dan Kelurahan Lebakgede. Berikut adalah potensi pengembangan kawasan pariwisata:

1. Pengembangan wisata pantai tetap menjadi *icon* pengembangan pariwisata mengingat potensi wisata dan infrastruktur pendukung telah ada seperti wisata Pulorida, beberapa fasilitas penginapan (hotel), dan fasilitas penunjang lainnya seperti pertokoan, angkutan umum, dsb. Untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataan, hal yang perlu dilakukan antara lain pemasaran daya tarik wisata, perbaikan kualitas lingkungan pesisir pantai, perbaikan kondisi permukiman, dsb.
2. Sebagai manifestasi dari pelibatan masyarakat sekitar kawasan pariwisata sebagai bagian dari pengembangan sektor wisata, maka kawasan permukiman/perumahan yang ada dan ditetapkan sebagai lokasi pengembangan pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengembangan pariwisata itu sendiri. Permukiman yang ada perlu ditingkatkan kualitas tata bangunan dan lingkungannya; pelaksanaan sosialisasi peningkatan kualitas lingkungan dan upaya mendukung pengembangan pariwisata; dan

- penetapan permukiman wisata (pengembangan *home-industry*, pelatihan industri kecil, dsb).
3. Fasilitas pendukung wisata sangat penting untuk menunjang keberadaan daya tarik wisata seperti toko *merchandise*, restaurant/rumah makan, kafe, warung kopi, dsb dengan desain dan tata massa bangunan yang memiliki ciri khas.
 4. Untuk pulau-pulau kecil di sekitar wilayah perencanaan seperti Pulau Merak Kecil, Pulau Merak Besar, dan Pulorida, dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata baru seperti pengembangan wisata kuliner, wisata suaka margasatwa (Pulau Merak Besar), dsb.
 5. Di samping pariwisata berbasis pantai, dapat pula dikembangkan wisata pelabuhan, wisata industri, wisata belanja dan kuliner.
 6. Keberadaan areal lindung dan lahan kebun berpotensi pula untuk dikembangkan menjadi agrowisata (wisata berbasis agrikultur).

F. Potensi Pengembangan Agrikultur

Dalam konteks pengembangan perkotaan, keberadaan aktivitas agrikultur memiliki peran ganda yaitu sebagai penunjang ekonomi masyarakat peri-urban dan berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Kegiatan agrikultur yang berkembang di Kota Cilegon antara lain meliputi pertanian lahan kering seperti padi sawah, sayuran (jagung), ketela (pohon dan rambat), kacang-kacangan (kacang tanah, kacang hijau), dan beberapa jenis buah-buahan (mangga, durian, pepaya, dsb) yang secara spasial tersebar di beberapa lokasi terutama pada bagian utara dan selatan Kota Cilegon di sekitar kawasan lindung (Kecamatan Pulomerak, bagian selatan Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cilegon, dan Kecamatan Cibeber); dan pertanian lahan basah berupa sawah irigasi yang terdapat di Kecamatan Cibeber (Kelurahan Kedaleman) dan Kecamatan Jombang (Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Panggungrawi).

Mengacu pada data luasan pemanfaatan ruang Kota Cilegon dapat diketahui bahwa untuk pertanian lahan kering yang meliputi kebun/ladang dan sawah tadah hujan mencapai 2131,63 ha sedangkan untuk pertanian lahan basah (sawah irigasi) sekitar 4.794,04 ha. Berkaitan dengan beberapa luasan lahan pertanian yang terdapat di sepanjang jalan utama kota dikarenakan lokasinya yang strategis dan memiliki nilai ekonomi tinggi, maka dapat dipertimbangkan adanya alih fungsi pemanfaatan ruang secara bertahap ke arah kegiatan non-pertanian terutama pada lahan-lahan di bagian timur Kota Cilegon dan sebagian di sekitar Jalan Lingkar Selatan. Untuk lahan pertanian yang belum beralih fungsi, aktivitas agrikultur dapat terus dikembangkan melalui pendekatan intensifikasi pertanian. Sedangkan konversi

lahan agraris perlu mempertimbangkan hasil analisis HBU (*Highest and Best Use*) yang dilakukan oleh instansi terkait.

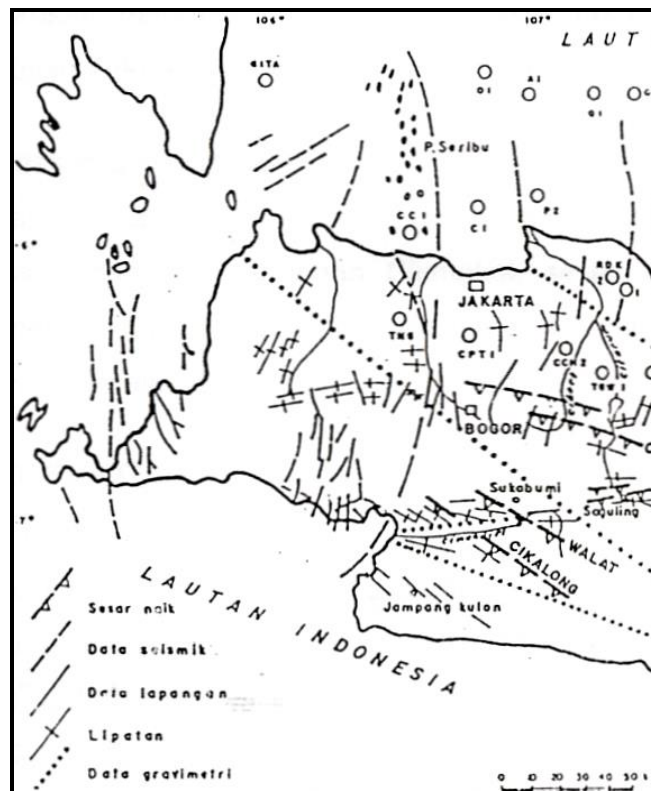
Untuk sawah tadah hujan pengelolaannya diarahkan pada sistem pengelolaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan secara bertahap dikembangkan sebagai kawasan budidaya non-pertanian. Mengingat Kota Cilegon memiliki potensi kegiatan industri dan permukiman yang cukup tinggi, maka perkembangan kawasan industri dan permukiman yang cenderung memanfaatkan lahan pertanian produktif perlu diarahkan ke lokasi/lahan pertanian yang tidak/kurang produktif. Sedangkan Untuk kawasan pertanian lahan kering yang berada dalam kawasan lindung adalah dengan mempertahankan luas yang ada dan meningkatkan perlakuan konservasi sehingga akan mampu mendukung fungsi kawasan lindung sebagai daerah resapan air, selain untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Jenis tanaman yang dikembangkan adalah yang bernilai ekonomi tinggi dan berfungsi konservasi.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

A. Gempa dan Gelombang Tsunami

Gempa di laut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya gelombang tsunami. Intensitas tsunami ditentukan oleh magnitude dari gempa dan kedalamannya, perambatan gelombang tsunami, variasi arah rambatan gelombang gempa, konfigurasi pantai, topografi daratan/bentuk bentang alam, tipe serta ukuran deformasi laut yang diukur dengan bathimetri dasar laut. Gelombang Tsunami di Selat Sunda dapat disebabkan oleh gempa tektonik disebabkan oleh proses subduksi pada lempeng Eurasia dan lempeng Samudera Hindia. Adanya pergesekan antara dua lempengan tersebut baik ke arah vertikal maupun horizontal dapat memicu pergerakan tektonik bawah laut yang akan diikuti oleh rambatan gelombang air laut yang sangat besar. Gelombang Tsunami di pesisir Kota Cilegon dapat pula dipicu oleh gempa vulkanik akibat letusan Gunung Anak Krakatau yang sampai saat ini masih aktif. Kerusakan akibat gelombang tsunami terutama terjadi pada daerah teluk akibat terjadinya penyempitan gerakan gelombang sehingga mempercepat gerakan gelombang tersebut. Kecepatan tsunami lebih besar pada laut dalam dibandingkan laut dangkal karena pada laut dangkal kecepatan gelombang banyak dinetralisir oleh dasar laut, sementara pada laut dalam gelombang bergerak tanpa hambatan.

Gambar 2.3
Peta Struktur Patahan Dan Lipatan Regional di Wilayah Banten Dan Sekitarnya



Sumber: Martodjojo, 1984

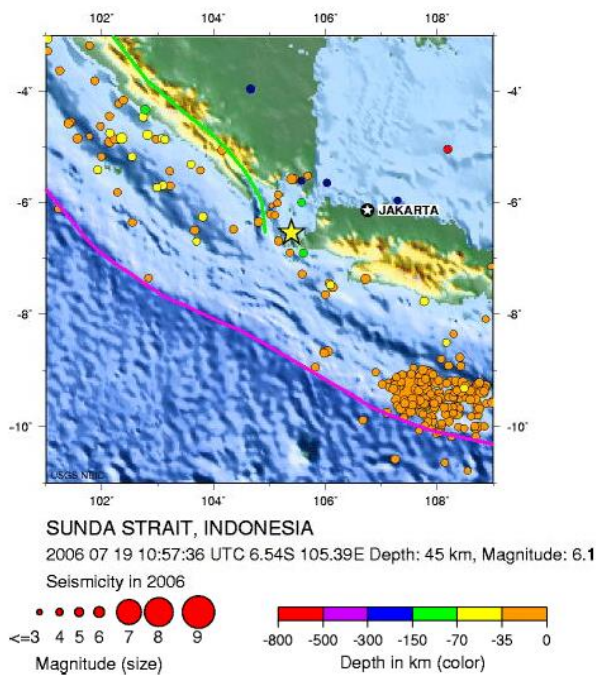
Khusus untuk kawasan Selat Sunda, kegempaan di wilayah ini menunjukkan aktivitas yang besar. Kegempaan di Selat Sunda dengan skala di atas 2,5 skala Richer pada tahun 1988 13 kali, tahun 1989 12 kali dan tahun 1990 sebanyak 6 kali. Berdasarkan pencatatan telemetri didapatkan angka sebanyak 2.456 kali gempa pada tahun 1994, dan paling kecil sebanyak 1.692 kali tahun 1993. Titik pusat gempa dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Rata-rata kejadian gempa adalah sekitar 2000 kali setiap tahunnya. Dari catatan kejadian gempa bumi yang terjadi dari tahun 1900 sampai tahun 1993, sebagian besar mempunyai magnitude (M) sebesar 4,1 sampai 6,0.

Gempa besar lain yang terjadi di kawasan Selat Sunda adalah pada tanggal 27 Februari 1903 dengan skala VII MMI di Banten, 12 Mei 1923 dengan skala VII MMI di Banten yang dirasakan di seluruh Jawa, 24 Juni 1949 skala 7 Richer di dekat Krakatau, 9 Juli 1957 skala 6,2 Richer di sebelah barat Selat Sunda serta 16 Desember 1963 skala V MMI di Labuhan. Pusat gempa antara tahun 1900-1999 dengan magnitude >4 umumnya terjadi di lautan Hindia dan Selat Sunda dengan frekuensi 6–29 kali per tahun. Konsentrasi pusat gempa berada di 3 lokasi, yaitu di bawah G. Krakatau, pada graben (sesar turun) di sebelah barat Selat Sunda, dan di

selatan Sumatera. Beberapa pusat gempa yang telah terjadi di daratan umumnya terjadi di Banten Selatan (Kabupaten Lebak atau Kabupaten Pandeglang).

Dengan memperhatikan potensi bencana alam khususnya gempa bumi dan tsunami, maka kawasan pesisir Kota Cilegon merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Terlebih aktivitas yang berkembang di sekitar kawasan pesisir adalah kawasan industri (khususnya industri kimia dan logam) dan pelabuhan sehingga bencana alam yang terjadi dapat disertai dengan bencana industri.

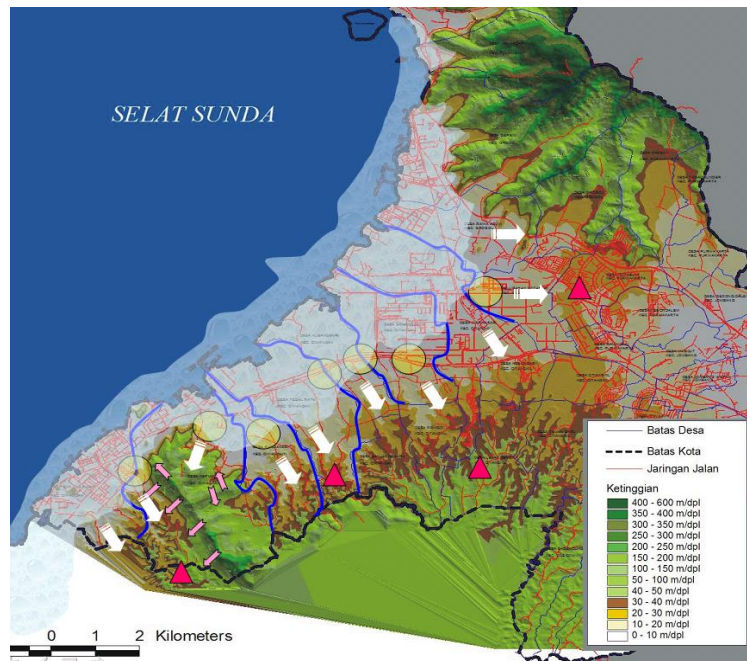
Gambar 2.4
Peta Seismitas di Selat Sunda Tahun 2006



Sumber: USGS, 2006
Keterangan : Pusat gempa umumnya mempunyai intensitas magnitude 6 dan berada pada kedalaman 0 hingga -35 km di bawah permukaan laut.

Lebih jauh lagi, gempa dengan magnitude 7, 8, dan lebih dari 8 sempat terekam sejak tahun 1900. Terdapat 1 titik gempa di Selat Sunda pada kedalaman 0 hingga 35 m di bawah muka laut.

Gambar 2.5
Potensi Tsunami Kawasan Pesisir Kota Cilegon



B. Kegunungapian

Aktivitas gunungapi di sekitar Selat Sunda terdapat pada Gunung Anak Krakatau yang telah tumbuh sejak letusannya terakhir pada abad ke-19. Letusan gunungapi Gunung Krakatau pada tanggal 27 Agustus 1883 yang diikuti oleh tsunami telah menghancurkan kota dan desa di sekitar Selat Sunda dan mengakibatkan hilangnya nyawa 36.000 orang. Letusan gunungapi tersebut merupakan letusan terbesar dengan melontarkan material vulkanik sebanyak 18 km³ setinggi 80 km dan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 30 – 40 m di sepanjang pantai Merak – Banten, Lampung Selatan hingga Jakarta. Gelombang tsunami terdeteksi dengan periode lebih dari 30 menit pada lokasi yang dekat hingga 1 – 2 jam pada lokasi yang jauh. Tsunami tersebut berjalan ke arah barat di perairan Samudera India sekitar Tanjung Harapan (*Cape of Good Hope*) dan ke utara hingga Atlantik. Tsunami terekam di Cape Town, Afrika Selatan (13.032 km jaraknya), di Pelabuhan Cape Horn, Amerika Selatan (14.470 km) dan di Panama, Amerika Tengah (20.646 km).

Letusan besar pada gunungapi tersebut telah membentuk kaldera, serta menyisakan tiga pulau, yaitu Pulau Rakat, Sertung, dan Panjang yang terletak di pematang kaldera. Sejak tahun 1930 di tengah-tengah kaldera muncul titik letusan baru yang lama kelamaan menjadi kerucut gunungapi dan dinamakan G. Anak Krakatau. Sejak tahun 1963 kegiatan G. Anak Krakatau bergeser ke barat dan telah membentuk kerucut kedua yang telah mencapai

ketinggian 201,446 m pada tahun 1983. Dari tahun 1930 hingga 1983, G. Anak Krakatau telah mengerupsi sebanyak 74 kali, baik erupsi eksplosif maupun efusif. Dari sejumlah tersebut, pada umumnya titik letusan selalu berpindah-pindah di sekitar tubuh kerucutnya. Erupsi ini merupakan kegiatan rutin Anak Krakatau yang terjadi setiap satu sampai delapan tahun sekali, dan umumnya terjadi empat tahun sekali yang berupa letusan abu dan lelehan lava.

Berkaitan dengan upaya mitigasi bencana di Kota Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon dalam mengantisipasi tsunami telah membagi zona wilayah rawan bencana tsunami berdasarkan ketinggian (Diatas Permukaan Laut/DPL) berdasarkan versi A. Soebandono. Kota Cilegon dibagi menjadi 4 zona, yaitu:

1. zona yang berada kurang dari 7 M DPL, adalah daerah amat berbahaya.
2. zona dengan ketinggian 7-12 M DPL, adalah daerah berbahaya.
3. zona dengan ketinggian 12-25 M DPL, adalah daerah cukup aman.
4. zona dengan ketinggian di atas 25 M DPL, adalah daerah aman.

C. Banjir

Fenomena banjir yang terjadi di Kota Cilegon mayoritas dapat dijelaskan dari dua aspek yaitu aspek topografi dan aspek pengelolaan sistem drainase. Secara topografis, bagian utara dan selatan Kota Cilegon memiliki tingkat kemiringan (*slope*) yang cukup curam disertai dengan menurunnya kemampuan infiltrasi tanah terhadap air hujan sehingga aliran air bergerak tanpa disertai penyerapan ke tanah. Di sisi lain pada kondisi di mana terjadi pasang laut, aliran air menjadi terhambat sehingga menimbulkan genangan pada beberapa titik terutama untuk area yang memiliki tingkat kemiringan datar atau cekungan. Sedangkan ditinjau dari aspek pengelolaan sistem drainase terdapat beberapa kondisi yang menjadi pemicu timbulnya permasalahan banjir seperti penyempitan saluran, sedimentasi dan pendangkalan yang diakibatkan oleh material dan sampah, pelanggaran terhadap sempadan sungai, tidak terintegrasinya sistem drainase, serta belum adanya saluran yang seharusnya tersedia terutama di kawasan permukiman.

Berikut adalah beberapa daerah dengan potensi genangan yang sering terjadi terutama pada musim penghujan.

Tabel 2.5
Daerah Potensi Genangan

No.	Daerah Genangan	Luas (Ha)	Tinggi (M)	Durasi (Jam)
1	Jl.Raya Cilegon Depan Mitsubishi	2	0,2 - 0,5	4
2	Daerah pasar Baru/Kp.Sawah Besar	1	0,2 - 0,4	2 - 4
3	Daerah Lingkung Kenanga	3	0,5 - 0,8	3 - 5
4	Daerah Mekarsari/ P.Merak	0,02	0,2 - 0,4	1 - 3
5	Daerah Pagebangan / Ds. Ketileng	1,8	0,25 - 0,75	1 - 3
6	Daerah Palas / Ds.Bendungan	0,02	0,3 - 0,5	1 - 2
7	Daerah Perkantoran Pemkot Cilegon	0,01	0,3 - 0,5	1 - 2
8	Daerah Tegalratu	0,05	0,3 - 0,4	1 - 2
9	Belakang Stasiun KA	1,5	0,3 - 0,6	2 - 4
10	Bag.Hulu (sebelah Barat) Pasar Baru	3 – 4	0,3 - 0,6	2 - 4
11	Jl.Keranggut	2	0,3 - 0,5	2 - 3
12	Jl.SMEA 17 sekitar SMP PGRI	2	0,2 - 0,6	2 - 4
13	Jl.Raya Cilegon Depan Hotel Gondang	1	0,3 - 0,5	2 - 3
14	Jl.Piranha Sebelah BBS	4	0,3 - 0,7	2 - 4
15	Ds. Masigit	3	0,4 - 1	4
16	Ds. Kebondalem	0,5	0,15 - 0,75	1 - 1,25
17	Jembatan Jl.Raya Cilegon (K.Kd.Ingas)	2	0,3 - 1	2 - 3
18	Pasar Cigading	2	0,3-0,5	2 - 3
19	Kubangsari	1	0,3 - 0,5	3 - 4
20	Tamansari (Kp. Sawah)	1 - 1,5	0,5 - 1	2 - 3
21	Panyairan Bawah	0,5 - 1	0,5 - 1	2 - 3
22	Sumur Menjangan	1	0,3 - 0,4	1 - 2
23	Sumampir	0,5 - 1	0,5 - 1	1 - 2
24	Kalitimbang	0,5 - 1	0,5 - 1	1 - 1,5
25	Cikerut	0,3 – 0,5	0,3 - 0,4	1 - 1,5
26	Sambirata	0,5 – 0,7	0,4 - 0,6	1 - 2
27	Taman Raya Cilegon	1 - 1,5	0,3 - 0,5	1 - 2
28	Panggungrawi	1 - 1,2	0,3 - 0,5	1 - 2
29	Kaligandu	0,5 - 1	0,3 - 0,4	1 - 2

Sumber : PJM Drainase Kota Cilegon, 2003

D. Intrusi dan Abrasi Air Laut

Proses intrusi terjadi karena adanya penurunan kandungan air tanah sehingga mengakibatkan penetrasi air laut ke arah daratan pada suatu lapisan tanah yang sudah mengalami peronggaan. Adanya eksploitasi air tanah berlebih baik untuk menunjang kebutuhan industri maupun domestik akan meningkatkan penetrasi air laut yang berkorespondensi dengan semakin menurunnya kualitas air tanah. Hal ini pun disebabkan oleh menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan/air buangan yang diakibatkan oleh kerusakan fisik tanah itu sendiri dan/atau berkurangnya luasan tanah untuk penyerapan air sebagai dampak meningkatnya kawasan budidaya (kawasan terbangun). Fenomena ini dapat dirasakan manakala air tawar berubah warnanya menjadi agak keputihan dan rasanya sedikit payau. Kondisi ini dapat dirasakan terutama pada area di sekitar kawasan pesisir seperti di sekitar Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Ciwandan, dan Kecamatan Grogol.

Sedangkan abrasi air laut terjadi sebagai akibat dari tingginya frekuensi hempasan gelombang air laut yang lambat laun mengikis lapisan perkerasan dan dataran pada pesisir pantai terutama pada daerah yang sudah tidak memiliki pelindung alami (*natural-barrier*). Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai, yaitu : (1) proses alami (karena gerakan gelombang pada pantai terbuka), (2) aktivitas manusia. Kegiatan manusia yang tidak mengindahkan konsep konservasi dapat menimbulkan erosi tanah, kemudian sedimennya terbawa oleh aliran sungai serta diendapkan di kawasan pesisir. Dalam jangka panjang, abrasi air laut dapat mengubah bentuk garis panta serta mengancam aktivitas dan bangunan (termasuk infrasturktur) di sekitar pinggir pantai. Meskipun demikian saat ini terdapat pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi abrasi air laut (seperti pemasangan kawat bronjong, wave-breaker, dsb).

2.1.4. Demografi

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2000-2010) jumlah penduduk Kota Cilegon mengalami pertumbuhan sebesar 26,96% (bertambah sebesar 79.528 jiwa) atau setara dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,44% per tahun. Proses perkembangan jumlah penduduk dari 294.936 jiwa pada tahun 2000 menjadi 374.464 jiwa pada tahun 2010 dicirikan dengan proses pertumbuhan yang relatif stagnan dari tahun ke tahun. Pada lima tahun pertama (2000-2005) pertumbuhan penduduk mencapai sebesar 13,89%, atau sekitar 2,32% per tahunnya. Selanjutnya pada periode lima tahun kedua (2005-2010), pertumbuhan penduduk relatif menurun yakni hanya sebesar 11,48%, atau sekitar 1,91% per tahunnya. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Cilegon per lima tahun selama kurun waktu 2000-2010 adalah sebesar 12,69%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahunan pada periode yang sama yakni rata-rata sebesar 2,44% per tahun.

Relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Cilegon selain karena adanya penambahan penduduk secara alami, namun juga dipengaruhi oleh peristiwa migrasi penduduk yang masuk sebagai pencari kerja maupun tenaga kerja yang merupakan implikasi atas bertumbuhkembangnya kondisi perekonomian Kota Cilegon, khususnya pada sektor industri, perdagangan dan jasa.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut, kepadatan penduduk di Kota Cilegon juga mengalami peningkatan dari 1.680 jiwa/km² pada tahun 2000 menjadi 1.914 jiwa/km² pada tahun 2005, dan kembali meningkat menjadi 2.134 jiwa/km² pada tahun 2010. Dan pada tahun 2011 menjadi 2.198 jiwa/km². Konsentrasi kepadatan penduduk pada tahun 2011 tertinggi terjadi di Kecamatan Jombang yang mencapai sebesar 5.377 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Ciwandan merupakan kecamatan yang terendah kepadatan penduduknya yakni mencapai sekitar 850 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Jombang dikarenakan kecamatan ini merupakan kawasan pusat permukiman penduduk, sebaliknya Kecamatan Ciwandan yang kepadatannya rendah dikarenakan kecamatan ini wilayahnya didominasi oleh kawasan perindustrian.

Tabel 2.6
Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan
Kota Cilegon Tahun 2005 dan 2011

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tahun 2005		Tahun 2011	
			Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Ciwandan	51,81	38.552	744	44,063	850
2	Citangkil	22,98	55.589	2.419	67,287	2,928
3	Pulomerak	19,86	41.801	2.099	43,856	2,208
4	Purwakarta	15,29	32.291	2.120	39,126	2,559
5	Grogol	23,38	36.680	1.576	39,891	1,706
6	Cilegon	9,15	37.077	4.048	40,669	4,445
7	Jombang	11,55	53.931	4.669	62,108	5,377
8	Cibeber	21,49	39.992	1.861	48,720	2,267
Kota Cilegon		175,51	335.913	1.914	385,720	2,198

Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2012 dan Sensus Penduduk Kota Cilegon Tahun 2010

Jika diperhatikan dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan (sex rasio) di Kota Cilegon, terlihat bahwa pada tahun 2011 sex rasionya sebesar 105, yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki 5 % lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex rasio terbesar terdapat di Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Purwakarta yakni sebesar 107, sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Cibeber yakni sebesar 102.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kota Cilegon Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Ciwandan	22,717	21,346	44,063	106
2	Citangkil	34,392	32,895	67,287	105
3	Pulomerak	22,373	21,483	43,856	104
4	Purwakarta	20,234	18,892	39,126	107
5	Grogol	20,421	19,470	39,891	105
6	Cilegon	20,703	19,966	40,669	104
7	Jombang	31,780	30,328	62,108	105
8	Cibeber	24,610	24,110	48,720	102
Kota Cilegon		197,230	188,490	385,720	105

Sumber: Cilegon Dalam Angka 2012

Dilihat dari komposisi umur penduduk di Kota Cilegon, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (usia produktif) pada tahun 2011 adalah sebesar 264.762 jiwa atau sekitar 68,64 % dari total jumlah penduduk. Tingginya persentase penduduk usia produktif tersebut merupakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kota Cilegon yang seharusnya menjadi sumber daya yang bisa didayagunakan.

Tabel 2.8
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Di Kota Cilegon Tahun 2008-2011

No.	Kelompok Umur	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1.	0-4	15.422	20.377	15.858	14.635	19.434	17.970	20,587	19,132
2.	5-9	16.968	15.681	15.476	16.540	18.857	17.596	18,131	17,088
3.	10-14	18.001	17.130	19.323	16.099	18.558	17.819	18,772	18,107
4.	15-19	16.728	15.557	18.254	17.000	17.749	17.513	18,371	18,095
5.	20-24	16.323	20.265	15.403	18.138	18.502	18.180	19,153	18,629
6.	25-29	21.096	16.285	19.526	18.071	18.911	18.656	18,873	18,726
7.	30-34	15.751	16.400	17.243	15.407	17.303	17.121	17,994	17,885
8.	35-39	14.863	14.310	12.974	12.898	16.127	15.213	16,606	15,913
9.	40-44	11.235	12.066	12.223	10.042	14.808	13.032	14,754	13,778
10.	45-49	9.176	8.630	10.111	10.300	11.075	9.802	11,800	10,477
11.	50-54	6.791	4.990	8.838	8.023	8.284	7.080	8,793	7,568
12.	55-59	4.975	3.030	6.401	4.804	5.523	4.236	5,978	4,737
13.	60-64	2.275	2.453	2.322	3.482	3.064	3.085	3,391	3,241
14.	65+	3.012	3.809	3.853	5.918	3.762	4.908	2,030	2,259

Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2012

Secara umum struktur penduduk menurut kelompok umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok usia 0-14 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun keatas atau kelompok usia produktif dan non produktif. Penduduk non produktif yang merupakan gabungan antara penduduk muda (0 - 14 tahun) dengan usia tua (65 tahun keatas) pada tahun 2011 mencapai 31,36 %, sementara itu penduduk yang termasuk dalam usia produktif (15 - 64 tahun) sebesar 68,64 %. Mengingat persentase penduduk usia produktif yang cukup tinggi, apabila diimbangi dengan kualitas yang baik akan menjadi sumber daya penting bagi pembangunan.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja atau seberapa besar beban yang ditanggung oleh penduduk berusia produktif terhadap penduduk non produktif. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan atau Angka Beban Ketergantungan (ABK) semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

ABK merupakan perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif, dimana pada tahun 2010 angkanya yaitu 46,58 atau dapat dikatakan bahwa setiap 100 orang produktif akan menanggung 45-46 orang non produktif atau kurang lebih 2 berbanding 1. Meskipun demikian secara total komposisi umur penduduk produktif dan

nonproduktif di Kota Cilegon masih tergolong wajar dan cukup menguntungkan, karena kelompok usia produktif yang cukup besar sementara umur non produktif relatif kecil.

Issue penting yang terkait dengan pemberdayaan penduduk usia produktif utamanya adalah mengenai ketenagakerjaan, yang dalam hal ini adalah terkait dengan keadaan angkatan kerja, struktur ketenagakerjaan, dan pengangguran.

Pada tahun 2010, sekitar 65,50 % dari seluruh penduduk usia kerja merupakan tenaga kerja aktif dalam kegiatan ekonomi atau disebut dengan angkatan kerja. Jumlah ini meningkat sekitar 4 % dibanding tahun 2009. Prosentase angkatan kerja yang diistilahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di Kota Cilegon. TPAK laki-laki sebesar 83,21 %, lebih tinggi daripada TPAK perempuan (47,23 %) karena penduduk laki-laki umumnya pencari nafkah utama di keluarga. Rendahnya TPAK perempuan disebabkan kegiatan utama perempuan umumnya mengurus rumah tangga dibandingkan menjadi angkatan kerja (bekerja atau mencari kerja).

Tabel 2.9
Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT
Di Kota Cilegon Tahun 2006-2010

Tahun	Angkatan Kerja		Total Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
	Bekerja	Menganggur				
2006	14.254	52.920	199.175	140.540	58,63	26,57
2007	158.896	41.857	200.754	137.272	59,39	20,85
2008	167.710	38.448	206.159	137.439	59,99	18,65
2009	176.644	35.286	211.930	135.496	60,09	18,26
2010	204.620	50.644	255.264	118.904	65,60	19,84

Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2011

Prosentase dari jumlah pengangguran terhadap total jumlah angkatan kerja diistilahkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang pada tahun 2006 angkanya mencapai 26,57 % dan pada tahun 2010 dapat ditekan menjadi sebesar 19,84% atau terjadi penurunan sebesar 6,73 %.

Masih tingginya TPT, menunjukan bahwa masalah pengangguran masih merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah ke depan, yang memerlukan adanya sinergitas antara seluruh stakeholder pembangunan. Penyediaan lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang masih menganggur, tentunya harus disokong oleh peningkatan investasi di daerah, yang dalam hal ini sangat bergantung pada stabilitas keamanan di daerah dan aspek perizinan terkait dengan kemudahan birokrasi.

Disamping itu, peningkatan kualitas SDM juga harus dikedepankan. Untuk mengurangi terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja, perlu adanya *link and match* antara pendidikan dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Mengacu kepada visi jangka panjang Pemerintah Daerah sebagai kota industri, perdagangan dan jasa, maka muatan pendidikan seyogyanya lebih diarahkan kepada tiga sektor tersebut. Berdasarkan data penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, ketiga sektor tersebut merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Tabel 2.10
Prosentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Di Kota Cilegon Tahun 2008-2011

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN			
		2008	2009	2010	2011
1.	Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	5,43	4,53	4,25	5.12
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,75	0,75	1,14	0.93
3.	Industri Pengolahan	21,59	23,01	23,76	16.16
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,67	0,67	0,68	0.21
5.	Konstruksi	7,66	7,66	9,32	7.94
6.	Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	26,16	29,14	26,90	30.22
7.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	14,28	14,28	11,99	10.03
8.	Lembaga Keuangan, Real Estate, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,33	3,33	4,27	6.85
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	19,62	16,71	17,67	22.54

Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2012

Selain upaya menumbuhkan lapangan kerja, pengurangan pengangguran juga harus dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui penumbuhan jiwa wirausaha (*entrepreneurship*), peningkatan skill dan kemudahan permodalan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah. Perlu dukungan ruang juga bagi pengembangan industri kecil serta peningkatan kemitraan antara industri kecil/ menengah dan besar, tidak hanya melalui dukungan permodalan, tetapi juga lebih kepada keselarasan produk dan pendampingan peningkatan kualitas SDM.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Nilai, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2008-2011

A. Nilai PDRB Tahun 2008-2011

Salah satu ukuran yang pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi kondisi perekonomian daerah adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Secara umum PDRB mereflesikan seluruh output yang dihasilkan oleh masyarakat sutau wilayah pada kurun waktu tertentu.

Seiring dengan perkembangan pembangunan kota, kondisi perekonomian Kota Cilegon mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang positif. Secara makro ekonomi, kondisi ini tercermin dari semakin meningkatnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2008-2011, yaitu dari Rp. 25,20 trilyun pada tahun 2008 menjadi Rp. 34,48 trilyun pada tahun 2011. Berikut ini diuraikan tentang **perkembangan nilai PDRB ADHB menurut sektor lapangan usaha Kota Cilegon tahun 2008-2011**.

Tabel 2.11
Perkembangan Nilai PDRB ADHB Menurut Sektor Lapangan Usaha
Kota Cilegon Tahun 2008-2011 (Rp. Juta)

No.	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011*
1.	Pertanian	403.145,27	444.553,26	525.555,37	558.676,36
2.	Pertambangan dan Penggalian	12.576,25	13.523,99	14.799,58	16.234,79
3.	Industri Pengolahan	17.844.831,37	19.626.453,67	21.921.373,35	24.098.272,30
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.554.219,92	1.604.340,78	1.687.898,76	1.775.059,73
5.	Bangunan	96.548,27	115.696,71	134.652,01	156.426,24
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.973.623,55	3.617.557,72	4.141.281,10	4.692.181,56
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	1.362.440,28	1.479.039,79	1.614.665,78	1.761.387,99
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	670.527,64	785.131,98	879.509,17	989.189,98
9.	Jasa-jasa	285.162,92	332.254,02	376.173,29	437.724,76
	PDRB ADHB	25.203.075,47	28.018.551,92	31.295.908,41	34.485.153,71

Keterangan:

*) Angka Sementara

Sumber: PDRB Kota Cilegon Tahun 2011, BPS Kota Cilegon Tahun 2012

Seiring dengan perkembangan nilai PDRB ADHB tersebut, nilai PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) dalam kurun waktu tahun 2008-2011 juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 15,46 trilyun pada tahun 2008 dan menjadi Rp. 18,22 trilyun pada tahun 2011.

Berikut ini diuraikan tentang perkembangan nilai PDRB ADHK menurut sektor lapangan usaha Kota Cilegon tahun 2008-2011.

Tabel 2.12
Perkembangan Nilai PDRB ADHK Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2008-2011 (Rp. Juta)

No.	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011*
1.	Pertanian	267.383,93	269.683,54	292.459,20	293.563,49
2.	Pertambangan dan Penggalian	10.184,89	10.658,49	11.341,38	12.101,38
3.	Industri Pengolahan	11.358.550,31	11.814.829,89	12.399.688,73	13.218.285,53
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	911.970,08	927.682,62	953.207,33	980.774,99
5.	Bangunan	49.281,84	51.800,15	56.013,64	60.863,74
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.546.959,42	1.785.190,53	1.958.840,65	2.139.891,01
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	829.553,13	848.642,90	867.877,47	908.332,86
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	319.141,64	357.139,42	380.458,23	408.769,00
9.	Jasa-jasa	167.951,50	181.187,53	191.310,56	206.106,98
	PDRB ADHK	15.460.976,74	16.246.815,07	17.111.197,19	18.228.688,98

Keterangan:

*) Angka Sementara

Sumber: PDRB Kota Cilegon Tahun 2011, BPS Kota Cilegon Tahun 2012

B. Kontribusi PDRB Tahun 2008-2011

Struktur perekonomian terbagi kedalam tiga kelompok sektor yang didasarkan atas asal dari input, cara pengolahan dari input menjadi output serta jenis output yang dihasilkan oleh sektor lapangan usaha. Ketiga kelompok sektor ini biasa disebut kelompok sektor primer, sekunder dan tersier. Berikut ini pembagian sektor dan kelompok sektor lapangan usaha dalam struktur perekonomian Kota Cilegon.

Tabel 2.13
Jenis Sektor dan Klasifikasi Kelompok Sektor Dalam Struktur Perekonomian Kota Cilegon

No.	Jenis Sektor Lapangan Usaha	Kelompok Sektor Lapangan Usaha
1.	Pertanian	Primer
2.	Pertambangan dan Penggalian	Primer
3.	Industri Pengolahan	Sekunder
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	Sekunder
5.	Bangunan	Sekunder
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Tersier
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	Tersier
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Tersier
9.	Jasa-jasa	Tersier

Ditinjau dari perkembangan kontribusi PDRB ADHB, struktur perekonomian Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2008-2011 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (kontribusi sektor ini di atas rata-rata kontribusi sektor-

sektor lainnya). Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi rata-rata sektor industri pengolahan mencapai sekitar 70,19%, sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai sekitar 12,897%. Berikut ini diuraikan tentang **perkembangan kontribusi PDRB ADHB menurut sektor lapangan usaha Kota Cilegon tahun 2008-2011**.

Tabel 2.14
Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Cilegon Tahun 2008-2011 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011*	Rata-Rata 2008-2011
1.	Pertanian	1,60	1,59	1,68	1,62	1,62
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3.	Industri Pengolahan	70,80	70,05	70,05	69,88	70,19
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	6,17	5,73	5,39	5,15	5,61
5.	Bangunan	0,38	0,41	0,43	0,45	0,42
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,80	12,91	13,23	13,61	12,89
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,41	5,28	5,16	5,11	5,24
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,66	2,80	2,81	2,87	2,79
9.	Jasa-jasa	1,13	1,19	1,20	1,27	1,20
	PDRB ADHB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:
*) Angka Sementara
Sumber: PDRB Kota Cilegon Tahun 2011, BPS Kota Cilegon Tahun 2012

Seiring dengan perkembangan kontribusi PDRB ADHB, kontribusi PDRB ADHK dalam struktur perekonomian Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2008-2011 juga masih didominasi oleh sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi yang terbesar (kontribusi sektor ini di atas rata-rata kontribusi sektor-sektor lainnya). Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi rata-rata sektor industri pengolahan mencapai sekitar 72,79%, sedangkan kontribusi rata-rata sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai sekitar 11,05%. Berikut ini diuraikan tentang **perkembangan kontribusi PDRB ADHB menurut sektor lapangan usaha Kota Cilegon tahun 2008-2011**.

Tabel 2.15
Perkembangan Kontribusi PDRB ADHK Menurut Sektor Lapangan Usaha
Kota Cilegon Tahun 2008-2011 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011*	Rata-Rata 2008-2011
1.	Pertanian	1,73	1,66	1,71	1,61	1,68
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3.	Industri Pengolahan	73,47	72,72	72,47	72,51	72,79
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	5,90	5,71	5,57	5,38	5,64
5.	Bangunan	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,01	10,99	11,45	11,74	11,05
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,37	5,22	5,07	4,98	5,16
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,06	2,20	2,22	2,24	2,18
9.	Jasa-jasa	1,09	1,12	1,12	1,13	1,11
	PDRB ADHK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:
 *) Angka Sementara
 Sumber: PDRB Kota Cilegon Tahun 2011, BPS Kota Cilegon Tahun 2012

Berdasarkan pengelompokan sektor, struktur perekonomian Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2008-2010 masih didominasi kelompok sektor sekunder. Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi rata-rata nilai PDRB ADHB pada kelompok sektor sekunder diperkirakan mencapai sekitar 64,89% diikuti kelompok sektor tersier sekitar 32,82% dan kelompok sektor primer sekitar 2,29%. Berikut ini diuraikan tentang **perkembangan kontribusi PDRB ADHB menurut kelompok sektor lapangan usaha Kota Cilegon tahun 2008-2010**.

Tabel 2.16
Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Menurut Kelompok Sektor Lapangan Usaha
Kota Cilegon Tahun 2008-2010 (Persen)

No.	Kelompok Sektor Lapangan Usaha	2008	2009	2010*	Rata-Rata 2008-2010
1.	Sektor Primer	2,31	2,29	2,27	2,29
2.	Sektor Sekunder	66,66	64,73	63,27	64,89
3.	Sektor Tersier	31,03	32,98	34,46	32,82
	PDRB ADHB	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:
 *) Angka Sementara
 Sumber: Diolah dari PDRB Kota Cilegon Tahun 2010

Seiring dengan perkembangan kontribusi PDRB ADHB menurut kelompok sektor, kontribusi PDRB ADHK menurut kelompok sektor dalam struktur perekonomian Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2008-2010 juga masih didominasi oleh kelompok sektor sekunder. Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi rata-rata nilai PDRB ADHK pada kelompok sektor sekunder mencapai sekitar 69,18% diikuti kelompok sektor tersier sekitar 28,40% dan kelompok sektor primer sekitar 2,42%. Berikut ini diuraikan tentang **perkembangan kontribusi PDRB ADHK menurut kelompok sektor lapangan usaha Kota Cilegon tahun 2008-2010**.

Tabel 2.17
Perkembangan Kontribusi PDRB ADHK Menurut Kelompok Sektor Lapangan Usaha
Kota Cilegon Tahun 2008-2010 (Persen)

No.	Kelompok Sektor Lapangan Usaha	2008	2009	2010*	Rata-Rata 2008-2010
1.	Sektor Primer	2,51	2,42	2,32	2,42
2.	Sektor Sekunder	70,69	69,03	67,82	69,18
3.	Sektor Tersier	26,80	28,55	29,85	28,40
	PDRB ADHK	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

*) Angka Sementara

Sumber: Diolah dari PDRB Kota Cilegon Tahun 2010

C. Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2008-2011

Kinerja perekonomian suatu daerah pada umumnya dinilai berdasarkan pencapaian angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) daerah tersebut. Pada suatu daerah yang tergolong sebagai daerah berkembang, angka LPE cenderung masih dapat didorong menjadi lebih tinggi setiap tahunnya. Sedangkan pada daerah yang tergolong maju, angka LPE cenderung kecil dan stagnan karena biasanya kapasitas produksi sudah digunakan secara maksimal, terlebih untuk wilayah yang mengandalkan sektor industri pengolahan sebagai penggerak roda perekonomiannya.

Pertumbuhan ekonomi sendiri menunjukkan tingkat aktivitas perekonomian yang menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat.

Perkembangan laju pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Seiring dengan perkembangan nilai PDRB ADHK, pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2008-2010 mengalami peningkatan. Kondisi ini tercermin dari semakin meningkatnya angka LPE Kota Cilegon dari 5,02% pada tahun 2008 dan menjadi sekitar 5,26% pada tahun 2010. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2008-2010 menunjukkan nilai yang selalu positif memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan produksi barang dan jasa secara riil oleh para pelaku ekonomi di Kota Cilegon. Berikut ini diuraikan tentang **perkembangan laju pertumbuhan PDRB ADHK (laju pertumbuhan ekonomi) menurut sektor lapangan usaha Kota Cilegon tahun 2008-2010.**

Tabel 2.18
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Menurut
Sektor Lapangan Usaha
Kota Cilegon Tahun 2008-2011 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2008	2009	2010*	Rata-Rata 2008-2010
1.	Pertanian	0,68	0,76	1,03	0,82
2.	Pertambangan dan Penggalian	8,52	4,65	4,88	6,02
3.	Industri Pengolahan	3,36	2,43	3,50	3,09
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	-1,00	1,72	2,73	1,15
5.	Bangunan	4,95	5,11	5,43	5,16
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,17	15,40	12,48	14,35
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,90	5,22	4,92	5,68
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10,04	11,81	10,62	10,82
9.	Jasa-jasa	11,72	12,99	12,67	12,46
	LAJU PDRB ADHK (LPE)	5,02	4,83	5,26	5,04

Keterangan:

*) Angka Sementara

Sumber: Diolah dari PDRB Kota Cilegon Tahun 2010

Seiring dengan perkembangan laju pertumbuhan nilai PDRB ADHK, laju pertumbuhan nilai PDRB ADHB Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2008-2010 mengalami penurunan. Kondisi ini tercermin dari semakin menurunnya laju pertumbuhan nilai PDRB ADHB Kota Cilegon, yaitu dari 12,32% pada tahun 2008 menjadi sekitar 11,64% pada tahun 2010. Angka pertumbuhan nilai PDRB ADHB Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2008-2010 menunjukkan nilai yang selalu positif memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan produksi barang dan jasa oleh para pelaku ekonomi di Kota Cilegon. Berikut ini diuraikan tentang **perkembangan laju pertumbuhan PDRB ADHB menurut sektor lapangan usaha Kota Cilegon tahun 2008-2010**.

Tabel 2.19
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Sektor Lapangan Usaha
Kota Cilegon Tahun 2008-2011 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2008	2009	2010*	Rata-Rata 2008-2010
1.	Pertanian	10,07	10,27	10,40	10,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	9,89	7,54	7,84	8,42
3.	Industri Pengolahan	10,45	8,27	9,66	9,46
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,94	3,22	5,19	3,12
5.	Bangunan	19,46	20,12	11,51	17,03
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	24,15	21,73	18,90	21,59
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	14,67	10,98	11,91	12,52
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	16,06	17,32	17,31	16,90
9.	Jasa-jasa	18,01	19,40	17,05	18,15
	LAJU PDRB ADHB	12,32	10,93	11,64	11,63

Keterangan:

*) Angka Sementara

Sumber: Diolah dari PDRB Kota Cilegon Tahun 2010

2.2.1.2. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tahun 2008-2010

PDRB Per Kapita atas harga berlaku (PDRB ADHB Per Kapita) berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan (PRDB ADHK Per Kapita) berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2008-2010, seiring dengan perkembangan perekonomian dan kependudukan Kota Cilegon maka PDRB Per Kapita juga mengalami peningkatan. Kondisi ini tercermin dari semakin meningkatnya nilai PDRB ADHB Per Kapita Kota Cilegon dari Rp. 52,43 juta/jiwa pada tahun 2008 menjadi sekitar Rp. 59,74 juta/jiwa pada tahun 2010. Seiring dengan perkembangan nilai PDRB ADHB Per Kapita tersebut, nilai PDRB ADHK Per Kapita juga mengalami peningkatan. Kondisi ini tercermin dari semakin meningkatnya nilai PDRB ADHK Per Kapita Kota Cilegon dari Rp. 32,15 juta/jiwa pada tahun 2008 dan diperkirakan menjadi sekitar Rp. 32,64 juta/jiwa pada tahun 2010.

Seiring dengan perkembangan nilai PDRB Per Kapita Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2008-2010, pertumbuhan nilai PDRB Per Kapita juga mengalami penurunan. Kondisi ini tercermin dari semakin menurunnya laju pertumbuhan nilai PDRB ADHB Per Kapita Kota Cilegon dari 10,49% pada tahun 2008 menjadi sekitar Rp. 4,38% pada tahun 2010. Seiring dengan perkembangan laju pertumbuhan nilai PDRB ADHB Per Kapita tersebut, laju pertumbuhan nilai PDRB ADHK Per Kapita juga mengalami penurunan. Kondisi ini tercermin dari semakin menurunnya laju pertumbuhan nilai PDRB ADHK Per Kapita Kota Cilegon dari 3,32% pada tahun 2008 menjadi sekitar -1,58% pada tahun 2010.

Berikut ini diuraikan tentang **perkembangan nilai dan laju pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Cilegon tahun 2008-2010**.

Tabel 2.20
Perkembangan Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita
Kota Cilegon Tahun 2008-2010

No.	Uraian	Satuan	2008	2009	2010*
A.	PDRB ADHB Per Kapita				
1.	Nilai PDRB ADHB	Rp.Juta	18.013.859,12	19.982.129,64	22.307.448,12
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	343.599	349.162	373.440
3.	Nilai PDRB ADHB Per Kapita	Rp.Juta/Jiwa	52,43	57,23	59,74
4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Per Kapita	%	10,49	9,16	4,38
B.	PDRB ADHK Per Kapita				

No.	Uraian	Satuan	2008	2009	2010*
1.	Nilai PDRB ADHK	Rp.Juta	11.047.320,63	11.580.598,20	12.190.054,36
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	343.599	349.162	373.440
3.	Nilai PDRB ADHK Per Kapita	Rp.Juta/Jiwa	32,15	33,17	32,64
4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Per Kapita	%	3,32	3,16	-1,58

Keterangan:
 *) Angka Sementara
 Sumber:
 Diolah dari PDRB Kota Cilegon Tahun 2010, Sensus Penduduk Kota Cilegon Tahun 2010

2.2.1.3. Laju Inflasi Tahun 2009-2011

Inflasi menunjukkan tingkat kenaikan harga secara keseluruhan dari perekonomian yang diwakili oleh beberapa komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, inflasi yang tinggi akan mengurangi pendapatan riil (nyata) dari masyarakat karena inflasi yang tinggi akan mengurangi dari jumlah konsumsi masyarakat karena jumlah barang yang dikonsumsi dengan jumlah uang yang sama.

Dalam kurun waktu tahun 2009-2011, laju inflasi di Kota Cilegon cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini tercermin dari laju inflasi yang menurun dari 3,08% pada tahun 2009 menjadi 2,32% pada tahun 2011. Berikut ini diuraikan tentang **perkembangan laju inflasi Kota Cilegon tahun 2009-2011**.

Tabel 2.21
Perkembangan Laju Inflasi
Kota Cilegon Tahun 2009-2011

No.	Uraian	Satuan	2009	2010	2011
1	Laju inflasi	%	3,08	5,96	2,32

Keterangan:
 Sumber: BPS Indonesia, Tahun 2012

2.2.1.4. Nilai dan Laju Pertumbuhan Investasi Tahun 2010-2011

Dalam kurun waktu tahun 2010-2011, nilai investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Cilegon mengalami peningkatan. Kondisi ini tercermin dari semakin meningkatnya nilai investasi (PMA+PMDN) Kota Cilegon dari Rp. 64.219 Milyar (Rp. 64,219 Triliyun) pada tahun 2010 menjadi sekitar Rp. 157.613 Milyar (Rp. 157,613 Triliyun) pada tahun 2011. Seiring dengan perkembangan nilai nilai investasi (PMA+PMDN) Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2010-2011, pertumbuhan nilai investasi (PMA+PMDN) juga mengalami peningkatan. Kondisi ini tercermin dari semakin meningkatnya laju pertumbuhan nilai nilai investasi (PMA+PMDN) Kota Cilegon dari 1,75%

pada tahun 2010 menjadi sekitar 145,43% pada tahun 2011. Berikut ini diuraikan tentang **perkembangan nilai dan laju pertumbuhan investasi Kota Cilegon tahun 2010-2011.**

Tabel 2.22
Perkembangan Nilai dan Laju Perumbuhan Investasi
Kota Cilegon Tahun 2010-2011

No.	Uraian	Satuan	2010	2011
1	Nilai Investasi PMA	Rp. Milyar	48.400	141.644
2	Nilai Investasi PMDN	Rp. Milyar	15.819	15.969
3	Nilai Investasi PMA+PMDN	Rp. Milyar	64.219	157.613
4	Laju Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	%	2,34	192,65
5	Laju Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	%	0,00	0,95
6	Laju Pertumbuhan Nilai Investasi PMA+PMDN	%	1,75	145,43

Keterangan:
Sumber: KPM Kota Cilegon, Tahun 2012

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2011

Dalam kurun waktu tahun 2010-2011, tingkat pengangguran terbuka di Kota Cilegon mengalami penurunan. Kondisi ini tercermin dari semakin menurunnya tingkat pengangguran terbuka Kota Cilegon dari 19,84% pada tahun 2010 menjadi sekitar 13,14% pada tahun 2011. Berikut ini diuraikan tentang **perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Cilegon tahun 2010-2011.**

Tabel 2.23
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Cilegon Tahun 2010-2011

No.	Uraian	Satuan	2010	2011
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	19,84	13,14

Keterangan:
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Tahun 2012

2.2.1.6. Tingkat Kemiskinan Tahun 2010-2011

Dalam kurun waktu tahun 2010-2011, tingkat kemiskinan di Kota Cilegon yang diindikasikan dengan proporsi jumlah rumah tangga miskin dan hampir miskin terhadap total jumlah rumah tangga mengalami penurunan. Kondisi ini tercermin dari semakin menurunnya proporsi jumlah rumah tangga miskin dan hampir miskin terhadap total jumlah rumah tangga Kota Cilegon dari 14,60% pada tahun 2010 menjadi sekitar 12,94% pada tahun 2011.

Berikut ini diuraikan tentang **perkembangan tingkat kemiskinan Kota Cilegon tahun 2010-2011**.

Tabel 2.24
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Kota Cilegon Tahun 2010-2011

No.	Uraian	Satuan	2010	2011
1	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	16.692	
2	Proporsi Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Total Jumlah Penduduk	%	4,47	
3	Jumlah Rumah Tangga Miskin Miskin dan Hampir Miskin	RTS	15.961	14.368
4	Proporsi Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin Terhadap Total Jumlah Rumah Tangga	%	14,60	12,94

Keterangan:
Sumber: Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Banten Tahun 2010, Analisis Tahun 2012

2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008-2011

Perkembangan pembangunan sosial masyarakat Kota Cilegon secara umum dapat dilihat dari perkembangan tingkat pencapaian pembangunan manusianya dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator untuk menggambarkan sejauh mana suatu wilayah/daerah telah menggunakan sumber daya penduduknya untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia wilayah/daerah tersebut.

Perkembangan IPM Kota Cilegon dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan yang semakin membaik. Dalam rentang waktu tahun 2008-2010 perkembangan IPM Kota Cilegon bergerak yaitu dari 74,94 pada tahun 2008 menjadi sekitar 75,29 pada tahun 2010.

Tabel 2.25
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon
Tahun 2008-2010

No.	Indikator	Satuan Indikator	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
	Indeks Pembangunan Manusia	Point	74,94	74,99	75,29
1	Indeks Pendidikan	Point	87,22	87,27	87,29
	a. Angka Melek Huruf (AMH)	%	98,70	98,71	98,71
	b. Indeks Angka Melek Huruf	Point	98,70	98,71	98,71
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,64	9,66	9,67
	d. Indeks Rata-rata Lama Sekolah	Point	64,27	64,40	64,45
2	Indeks Kesehatan	Point	72,48	72,55	72,63
	a. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,49	68,53	68,58
3	Indeks Daya Beli	Point	65,11	65,14	65,95
	a. Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan	Rp.Ribu	641,75	641,88	645,37

Sumber : IPM Kota Cilegon Tahun 2010

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) POS PAUD/ KOBER/ TPA/ SPS

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah. Indikator ini mengukur proporsi jumlah anak yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan PAUD/TPA/KOBER/SPS dalam kelompok umur yg sesuai dg jenjang pendidikan tersebut. pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang PAUD/TK/KOBER/SPS sebanyak 3439 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia PAUD/TK/KOBER/SPS sebanyak 21.946 jiwa atau sebanding dengan 16%, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 capaian APK PAUD/KOBER/TPS/SPS baru mencapai 15 %.

B. Angka Melanjutkan (AM) POS PAUD/ KOBER/ TPA/ SPS

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah atau jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tahun ajaran sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyak lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 4.880 siswa, terhadap jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tahun ajaran sebelumnya sebanyak 2.848 siswa, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 5.487 siswa, terhadap jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tahun ajaran sebelumnya sebanyak 2.984 siswa.

C. Angka Putus Sekolah (APTs) PAUD/ KOBER/ TPA/ MDA

Angka Putus Sekolah (APTs) adalah perbandingan jumlah siswa yang putus sekolah dibanding dengan jumlah siswa seluruhnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa yang putus sekolah pada jenjang PAUD/ KOBER/ TPA/ MDA tidak ada, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 2.881 siswa, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa yang

putus sekolah pada jenjang PAUD/ KOBER/ TPA/ MDA tidak ada, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 3.439 siswa.

D. Proporsi jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang melek huruf

Proporsi jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang melek huruf didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang dapat baca tulis terhadap jumlah penduduk usia diatas 15 tahun, indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang dapat baca tulis. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang dapat baca tulis sebanyak 207.075 siswa, terhadap jumlah penduduk usia diatas 15 tahun sebanyak 207.735 siswa atau sebanding 99,68% sedangkan pada tahun 2011 angka jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang dapat baca tulis sebanyak 232.279 Jiwa, terhadap jumlah penduduk usia diatas 15 tahun sebanyak 235.279 Jiwa atau sebanding 98,72%.

E. Angka Partisipasi Kasar (APK) TK dan sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah. Indikator ini mengukur proporsi jumlah anak yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan TK/RA/sederajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/sederajat sebanyak 6.376 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/sederajat sebanyak 21.946 jiwa atau sebanding dengan 29.05%, capaian ini menurun dimana pada tahun 2010 capaian APK TK/RA/sederajat baru mencapai 31,56 %.

F. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah, Indikator ini mengukur proporsi jumlah anak yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan TK/RA/sederajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/sederajat sebanyak 48.929 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/sederajat sebanyak 43.788 jiwa atau sebanding dengan 111.74%, capaian ini menurun dimana pada tahun 2010 capaian APK TK/RA/sederajat baru mencapai 118,09 %.

G. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) TK/RA/ sederajat Kota Cilegon Tahun Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 42.854 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 41.118 jiwa atau sebanding dengan 104,22% sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 42.327 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 43.788 jiwa atau sebanding dengan 96,66%.

H. Angka Melanjutkan SD/MI

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah atau jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tahun ajaran sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyak lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB sebanyak 7.415 siswa, terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 7.536 siswa, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB sebanyak 8.139 siswa, terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 7.918 siswa.

I. Angka Kelulusan (AL) SD/ MI

Angka Kelulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang tertentu dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam prosentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyak siswa yang lulus, dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa yang lulus sekolah pada jenjang SD/ MI sebanyak 7.378 siswa, terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya sebanyak 7.378 siswa atau sebanding dengan 100%, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa yang lulus sekolah pada jenjang SD/MI sebanyak 7.333 siswa, terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya sebanyak 7.333 siswa atau sebanding dengan 100%.

J. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ SMPLB

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah, Indikator ini mengukur proporsi jumlah anak yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan TK/RA/ sederajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 25.152 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 21.540 jiwa atau sebanding dengan 116,76%, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 capaian APK TK/RA/ sederajat baru mencapai 112,92 %.

K. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ SMPLB

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) TK/RA/ sederajat Kota Cilegon Tahun Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 17.626 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 20.385 jiwa atau sebanding dengan 86,47% sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 18.150 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 21.540 jiwa atau sebanding dengan 84,26%.

L. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ MA/ SMK/ SMLB

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah. Indikator ini mengukur proporsi jumlah anak yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan TK/RA/ sederajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 20.266 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 21.042 jiwa atau sebanding dengan 96,31%, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 capaian APK TK/RA/ sederajat baru mencapai 75,02 %.

M. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ SMK/ SMLB

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia

sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) TK/RA/ sederajat Kota Cilegon Tahun Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 13.106 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 23.457 jiwa atau sebanding dengan 55,87% sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 13.441 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 21.042 jiwa atau sebanding dengan 63,88%.

N. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/SMPLB/ SMA/MA/SMK/SMLB

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah atau jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tahun ajaran sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyak lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/SMLB sebanyak 6.241 siswa, terhadap jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.964 siswa, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/SMLB sebanyak 7.375 siswa, terhadap jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB tahun ajaran sebelumnya sebanyak 5.397 siswa.

O. Angka Putus Sekolah (APTs) SMP/MTs/SMPLB/ SMA/MA/SMK/SMLB

Angka Putus Sekolah (APTs) adalah perbandingan jumlah siswa yang putus sekolah dibanding dengan jumlah siswa seluruhnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa yang putus sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB tidak ada, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 4.964 siswa, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa yang putus sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB tidak ada, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 5.397 siswa.

Angka capaian jumlah siswa yang putus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK/SMLB tidak ada, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 14.013. siswa, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa yang putus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK/SMLB tidak ada, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 17.843 siswa.

P. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/SMPLB/ SMA/MA/SMK/SMLB

Angka Kelulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang tertentu dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam prosentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyak siswa yang lulus, dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa yang lulus sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB sebanyak 7.141 siswa, terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya sebanyak 7.143 siswa atau sebanding dengan 99,97%, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa yang lulus sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB sebanyak 7.283 siswa, terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya sebanyak 7.283 siswa atau sebanding dengan 100%.

Angka capaian jumlah siswa yang lulus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK/SMLB pada tahun 2010 sebanyak 4.968 siswa, terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya sebanyak 4.934 siswa atau sebanding dengan 99,32%, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa yang lulus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK/SMLB sebanyak 4.262 siswa, terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya sebanyak 4.251 siswa atau sebanding dengan 99,74%.

Q. Angka Mengulang Kelas (AMK) SMP/MTs/SMPLB/ SMA/MA/SMK/SMLB

Angka Mengulang Kelas (AMK) adalah perbandingan jumlah siswa yang mengulang kelas dibanding dengan jumlah siswa seluruhnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyak siswa yang mengulang di suatu daerah sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya. Pada tahun 2010 capaian angka mengulang kelas tingkat SMP/MTs/SMPLB sebanyak 41 siswa yang mengulang kelas, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 21.778 siswa atau sebanding dengan 0,18% sedangkan pada tahun 2011 angka mengulang kelas sebanyak 33 siswa, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 24.151 siswa atau sebanding dengan 0,13%.

Angka mengulang kelas tingkat SMA/MA/SMK/SMLB pada tahun 2010 capaian angka mengulang kelas sebanyak 47 siswa yang mengulang kelas, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 16.728 siswa atau sebanding dengan 0,28% sedangkan pada tahun 2011 angka mengulang kelas sebanyak 19 siswa, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 18.486 siswa atau sebanding dengan 0,10%.

2.3.1.2. Kesehatan

A. **Persentase kunjungan Ibu Hamil**

Pemeriksaan antenatal adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksakan kehamilan ibu dan janin secara berkala, yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar ibu hamil dapat melalui masa kehamilannya, persalinan dan nifas dengan baik dan selamat, serta menghasilkan bayi yang sehat. Pada tahun 2011 angka capaian Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar sebanyak 7.704 jiwa terhadap Jumlah sasaran ibu hamil dalam 1 tahun sebanyak 8.486 jiwa atau sebanding dengan 90,8%, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 sebesar 83%.

B. **Prosentase kelurahan yang memenuhi UCI (Universal Child Immunization)**

UCI (Universal Child Immunization) yaitu imunisasi dasar secara lengkap pada anak, jumlah desa/kelurahan yang ada di Kota Cilegon ada sebanyak 43 desa/kelurahan, pada tahun 2011 jumlah Kelurahan yang sudah melakukan UCI ada sebanyak 43 Kelurahan, sehingga untuk Kota Cilegon cakupan Kelurahan yang sudah melaksanakan UCI adalah sebesar 100%, capaian ini sama dengan capaian UCI tahun 2010 yaitu sebesar 100%.

C. **Persentase penyelenggaraan penjangkaran data sarana kesehatan swasta (sarkesta)**

Pelayanan kesehatan tidak semata-mata diselenggarakan oleh pemerintah, melainkan juga melibatkan peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dan pelbagai potensi pihak swasta, yang dimaksud sarana kesehatan swasta adalah Apotik, Klinik/Balai Pengobatan, pengobatan tradisional, Laboratorium swasta, Rumah Sakit Swasta, Radiologi klinik milik swasta. Jumlah sarana kesehatan swasta yang terdata sebanyak 125 buah Jumlah sarana kesehatan swasta yang ada di Kota Cilegon sebanyak 125 buah atau sebanding dengan 100%. Capaian ini sama dengan capaian tahun lalu sebesar 100%.

D. **Tingkat pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan**

Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka didukung dengan fasilitas sarana prasarana kesehatan yang memadai. Sarana dan Prasarana kesehatan yang ada di Kota Cilegon adalah :

- Puskesmas : 8 Unit

- Puskesmas Pembantu : 18 unit
- Puskesmas Keliling : 8 Unit
- Rumah bersalin : 9 unit
- Balai Pengobatan/Klinik : 53 unit
- Poskesdes : 15 Unit
- Polindes : 7 unit
- Poskestren : 2 unit
- Pos Obat Desa (POD) : 4 unit

E. Rasio jumlah poskesdes disetiap kelurahan terhadap jumlah poskesdes di kota Cilegon

Desa/Kelurahan Siaga adalah desa/kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri. Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga dilaksanakan melalui pembentukan Poskesdes, yaitu salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan yang meliputi kegiatan peningkatan hidup sehat (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya. Sampai dengan tahun 2011 Jumlah Poskesdes yang ada di Kota Cilegon sebanyak 15 Poskesdes.

F. Terbentuknya poskesdes tambahan di setiap kelurahan

Poskesdes merupakan salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan yang meliputi kegiatan peningkatan hidup sehat (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya. Sampai dengan tahun 2011 Jumlah Poskesdes yang ada di Kota Cilegon sebanyak 15 Poskesdes.

G. Prosentase sarana dan prasarana kesehatan terhadap jumlah kelurahan

Dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat maka salah satu upaya adalah peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang merata, terjangkau dan memadai. Sarana prasarana kesehatan yang ada di kelurahan yang sudah

melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat (Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan fasilitas kesehatan lainnya) sebanyak 42 terhadap jumlah kelurahan yang ada di Kota Cilegon yaitu sebanyak 43 Kelurahan atau sebanding dengan 97,67% capaian ini sama dengan capaian tahun 2010 sebanyak 97,67%.

H. Jumlah perumusan kebijakan kesehatan tingkat Kota

Pelayanan pemerintah kepada masyarakat pada hakekatnya identik dengan berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan di Daerah. Manifestasi dari berbagai bentuk kebijakan diatas itulah yang selanjutnya akan dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat. Satu kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dalam kenyataanya tidak banyak menerima penolakan, jelas mendapat respon positif dari rakyat selaku pihak yang harus menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah kota cilegon telah mengeluarkan satu kebijakan tentang kesehatan yaitu dengan keluarnya JAMKESDA dimana bagi masyarakat miskin dapat memeriksakan kesehatanya dengan melalui jamkesda, sebelumnya juga Pemkot cilegon telah menggratiskan rawat inap di RSUD di kelas III untuk warga cilegon. Capaian pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah masih mengacu kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu kebijakan yang mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM) yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI No 741 tahun 2008.

I. Rasio pelayanan kesehatan rujukan/kunjungan pasien miskin terhadap jumlah seluruh kunjungan

Dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa kesehatan sebagai hak fundamental setiap individu juga dinyatakan secara global dalam organisasi kesehatan dunia (WHO). Hal ini karena setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan Negara bertanggungjawab terhadap kesehatan penduduknya termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh maka Pemerintah Kota Cilegon melalui SK WaliKota Cilegon No. 440/Kep.333-Dinkes/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pembebasan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. Di Puskesmas Pelayanan Kesehatan Dasar di gratiskan, di RSUD Pembebasan Biaya Rawat Inap Kelas 3. Pelayanan kesehatan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang tidak memiliki akses langsung terhadap pelayanan kesehatan, pada tahun 2011 jumlah masyarakat miskin yang menggunakan fasilitas sarana kesehatan melalui program Jamkesda,

Jamkesmas dan Jampersal di Kota Cilegon sebanyak 18.816 jiwa dari total kunjungan pada tahun 2011 sebanyak 68.117 jiwa, sehingga nilai pencapaian Kota Cilegon untuk pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin mencapai 27,62%. Capaian ini kurang sedikit dari tahun 2010 yang sebesar 27,93%.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

A. Prosentase rata-rata Jaringan irigasi yang dapat dipertahankan luas cakupan pelayanannya

Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola ruang saat ini berdampak pada kebutuhan pasokan air terhadap lahan pertanian. Jaringan irigasi yang merupakan bangunan saluran teknis sebagai penyedia dan pengaturan air guna menunjang kegiatan pertanian, keberadaanya sangat dibutuhkan guna mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal dan sekaligus juga berperan sebagai pengendali banjir dan genangan.(resapan air).

Upaya mempertahankan keberadaan jaringan irigasi di wilayah kota cilegon agar tetap berfungsi dan bermanfaat secara optimal dan keberlanjutan, sehingga cakupan lahan pertanian tetap terjaga merupakan tanggung jawab pemerintah melalui dukungan peningkatan bangunan saluran irigasi dan bangunan pelengkapnnya.

Pada tahun 2011, jaringan irigasi yang dapat dipertahankan luas cakupannya sebesar 30% atau 115 Ha dari 389 Ha luas jaringan pengairan.

B. Rasio panjang jalan dalam kondisi baik

Pemenuhan infrastruktur jalan dengan kondisi baik merupakan upaya pemerintah kota cilegon sebagai penyelenggara jalan.

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi, prasarana distribusi, pendorong perkembangan ekonomi, dan penyeimbang perkembangan antar wilayah keberadaanya kondisinya harus tetap di pertahankan.

Beberapa kegiatan penyelenggaraan jalan guna mendukung pelayanan masyarakat pengguna jalan kerap dilakukan pemerintah kota cilegon. Sampai dengan tahun 2011 panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) sepanjang 296,5 km atau sebesar 85,13 % dari total panjang jalan sepanjang 348,31 km. bila di dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 74,43% maka ada peningkatan kondisi jalan baik sebesar 10,7%.

C. Jumlah ruas jembatan dalam kondisi baik

Upaya pemeliharaan dan merawat keberadaan jembatan di kota cilegon merupakan tugas dan wewenang pemerintah kota cilegon. Secara eksisting jumlah bangunan jembatan sebagai sarana penghubung ruas jalan di Kota Cilegon sebanyak 51 jembatan. Sampai dengan tahun 2011 jumlah jembatan dalam kondisi baik adalah 38 atau prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik 70,59%.

D. Proporsi hasil pekerjaan konstruksi yang melalui pengujian laboratorium

Optimalnya suatu pekerjaan teknis bidang ke-pu-an yang ditunjang dengan sarana dan prasarana alat uji mutu yang memadai salah satu prioritas pemerintah guna memberikan pelayanan terbaik.

Kegiatan Pengujian pada laboratorium bidang ke-pu-an sebagai kegiatan yang memfasilitasi penyelenggara pembangunan sebelum melakukan kegiatan merupakan proses tahapan pelaksanaan pembangunan yang harus di laksanakan sehingga optimalisasi kegiatan dapat tercipta.

Pada tahun 2011 pencapaian sasaran proporsi pekerjaan konstruksi melalui pengujian laboratorium sebesar 96 % sehingga adanya kenaikan capaian 1 % dari tahun 2010.

E. Tingkat pemenuhan pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

Pemenuhan dan penyediaan bangunan gedung pemerintahan yang layak dan berkualitas merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Upaya pemerintah terkait pemenuhan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintahan salah satunya adalah memperbaiki bangunan gedung yang rusak sehingga keberadaan bangunan tetap terjaga. Disamping itu pula pemerintah kota cilegon berupaya menyeragamkan bangunan gedung kelurahan (prototype) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2011, angka capaian jumlah pemenuhan pembangunan dan rehabilitasi terhadap gedung pemerintahan sebesar 48,48%. atau 41 gedung pemerintahan dan bangunan kelurahan.

F. Proporsi pemenuhan kebutuhan fasilitas strategis kota

Pemenuhan kebutuhan fasilitas strategis Kota Cilegon merupakan sektor yang mempunyai multiplier effect yang tinggi dalam menumbuhkan perekonomian daerah.

Di wilayah kota cilegon secara eksisting terdapat 4 fasilitas strategis daerah (peningkatan terminal terpadu merak, lanjutan pasar kota, sub terminal, pembangunan warnasari, dan pasar agro) yang diharapkan dapat dijadikan lokomotif penggerak pertumbuhan perekonomian daerah sehingga keberadaannya sangat di tunjang dari segi kebutuhan dan kelengkapannya.

Pada tahun 2011, proporsi pemenuhan kebutuhan fasilitas strategis kota baru mencapai 15,6 %.

2.3.1.4. Perumahan

A. Prosentase rumah tidak layak huni

Prosentase rumah tidak layak huni tahun 2010 penanganannya sebanyak 80 unit rumah, sedangkan tahun 2011 penanganannya sebanyak 111 unit dari 1333 rumah tidak layak huni. Setara dengan 8.33%.

B. Proporsi ruas jalan yang telah terlayani oleh prasarana kota(PJU)

Keberadaan Penerangan Jalan Umum sebagai salah satu prasarana kota yang berfungsi sebagai pencahayaan jalan harus dilandasi oleh dua aspek, yaitu aspek fungsional yang meliputi pengaman lingkungan, pengenalan objek dan rambu jalan serta sebagai dekorasi kota. Sedangkan pada aspek yang kedua, yaitu aspek manfaat, PJU bermanfaat untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, menurunkan angka kriminalitas, orientasi kota bagi pengguna jalan, memperindah kota dan mendukung lancarnya roda perekonomian. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD, sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya kualitas prasarana dan arsitektur kota dengan indikasi program adalah proporsi kebutuhan PJU pada 392 ruas jalan, dengan total panjang 348,31 km. Pada tahun 2011 total PJU yang sudah ada sebesar 2872 titik dari total kebutuhan di jalan kota sebanyak 7821 titik di seluruh ruas jalan kota, sehingga tingkat capaiannya sebesar 36.72%

C. Proporsi cakupan kawasan yang sudah direvitalisasi secara arsitektural

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD, sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya kualitas prasarana dan arsitektur kota dengan indikasi proram adalah proporsi cakupan kawasan yang

sudah direvitalisasi secara arsitektural. Pada tahun 2011 capaian proporsi kawasan yang telah direvitalisasi secara arsitektural adalah 30%

2.3.1.5. Penataan Ruang

A. Proporsi jumlah bangunan gedung yang sudah ber IMB terhadap Jumlah bangunan gedung yang ada

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD, sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya penataan kota melalui pengendalian bangunan gedung, dengan indikasi program adalah proporsi jumlah bangunan gedung yang sudah ber IMB terhadap jumlah bangunan yang ada. Sampai dengan tahun 2011 jumlah bangunan gedung yang sudah ber IMB sebanyak 5.452 Bangunan gedung sedangkan jumlah bangunan gedung yang ada sebanyak 118.853 bangunan gedung sehingga capaian proporsi adalah 5%.

B. Proporsi jumlah Wajib Pajak Reklame yang aktif terhadap jumlah wajib pajak yang ada.

Reklame adalah suatu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan suatu barang, jasa atau seseorang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap orang, pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan reklame, harus mendapat izin dari kepala daerah melalui instansi yang ditunjuk. Semua Reklame yang telah memperoleh izin otomatis dikenakan pajak reklame, sehingga setiap penyelenggara reklame akan menjadi wajib pajak yang akan dipungut setiap setahun sekali. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD, sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya penataan kota melalui tata informasi (reklame) dengan indikasi program adalah proporsi jumlah wajib pajak reklame yang aktif membayar pajak terhadap jumlah wajib pajak reklame yang ada. Pada tahun 2011 capaian proporsi WP aktif adalah 312 WP dari 362 WP yang tercatat pada tahun 2010 selain itu ada penambahan WP baru pada tahun 2011.

C. Proporsi ketersediaan dokumen perencanaan detail tata ruang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD, sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya kualitas penataan ruang dengan indikasi proram adalah proporsi ketersediaan dokumen perencanaan detail tata ruang. Proporsi ini didasarkan pada kebutuhan dokumen sebagai implementasi berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon. Pada RTRW 2010-2030 terdapat landasan penerbitan rencana rinci yaitu 5 RDTR BWK dan 3 RTR Kawasan Strategis Kota. Hingga tahun 2011 dokumen perencanaan rinci berjumlah 5 dokumen atau dengan capaian 100%. Namun dokumen rencana rinci tersebut mengacu pada produk RTRW lama sehingga perlu penyediaan dokumen perencanaan detail sebagaimana ketentuan di atas.

D. Jumlah juklak dan juknis prasarana kota, reklame dan tower

Salah satu misi Dinas Tata Kota adalah Mewujudkan penataan prasarana dan arsitektur kota dalam menunjang pengelolaan kawasan perkotaan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan suatu perangkat berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis). Perangkat aturan ini akan menjadi pedoman teknis dalam menata prasarana kota, reklame dan tower telekomunikasi. Salah satu bentuk realisasi ketersediaan juklak dan Juknis tersebut adalah penyusunan Buku Pedoman Teknis Pemasangan Utilitas Bawah Tanah pada Ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS), yang dilaksanakan pada tahun Anggaran 2011. Sedangkan pada rencana hingga tahun 2015 akan disusun 2 jenis pedoman teknis, yaitu dokumen Master Plan PJU dan Tower serta dokumen Pedoman zonasi perletakan media reklame.

2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

A. Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena

menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk tahun 2012 RKPD Kota Cilegon telah disahkan melalui peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2011

B. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Cilegon untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten. RPJMD Kota Cilegon merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon. RPJMD Kota Cilegon tahun 2010-2015 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

C. Tingkat pemenuhan kebutuhan perencanaan pembangunan ekonomi

Perencanaan pembangunan daerah merupakan konsep pembangunan yang menyeluruh dan merata, dalam pelaksanaannya harus dipenuhi dokumen perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan terstruktur pada tataran implementasinya sehingga bisa efektif dan efisien, khususnya perencanaan pembangunan bidang perekonomian, kegiatan yang ada pada bidang perekonomian pada tahun 2011 berjalan dengan lancar dengan hasil realisasi mencapai 100%, jumlah kajian dan penelitian perekonomian yang mendukung perencanaan pembangunan daerah sebanyak 8 dokumen.

D. Tingkat pemenuhan kebutuhan perencanaan pembangunan sosial budaya

Perencanaan pembangunan daerah merupakan konsep pembangunan yang menyeluruh dan merata, dalam pelaksanaannya harus dipenuhi dokumen perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan terstruktur pada tataran implementasinya sehingga bisa efektif dan efisien, khususnya perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan, kegiatan yang ada pada bidang sosial dan pemerintahan pada tahun 2011 berjalan dengan lancar dengan hasil realisasi mencapai 100%, jumlah kajian dan penelitian sosial dan pemerintahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah sebanyak 7 dokumen.

E. Tingkat pemenuhan kebutuhan perencanaan pembangunan prasarana wilayah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan konsep pembangunan yang menyeluruh dan merata, dalam pelaksanaannya harus di penuhi dokumen perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan terstruktur pada tataran implementasinya sehingga bisa efektif dan efisien, khususnya perencanaan pembangunan prasarana wilayah, kegiatan yang ada pada bidang prasarana wilayah pada tahun 2011 berjalan dengan lancar dengan hasil realisasi mencapai 100%, jumlah kajian dan penelitian prasarana wilayah yang mendukung perencanaan pembangunan daerah sebanyak 9 dokumen.

2.3.1.7. Perhubungan

A. Tingkat pelayanan perhubungan darat

Baik tidaknya kualitas pelayanan perhubungan darat antara lain dapat dilihat dari kelengkapan sarana lalu lintas darat yang tersedia. Sarana lalu lintas yang dimaksud antara lain meliputi rambu lalu lintas, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan. Dengan kelengkapan sarana tersebut maka keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dapat tercipta sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pelayanan perhubungan darat sangat baik.

Pada tahun 2011 jumlah sarana lalu lintas darat di Kota Cilegon sebanyak **162 unit** (traffic cone 150 unit, warning light 1 unit, traffic light 4 unit, guardrail 2 unit, rambu standar 5 unit, dari target **262 unit** atau sebanding dengan **61,69 %**, capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak **158 unit**.

B. Rasio ketersediaan sarana prasarana perhubungan terhadap kebutuhan

Yang dimaksud sarana prasarana perhubungan adalah suatu unsur penting yang memberi pelayanan dengan fungsi transportasi yang menunjang kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini sarana prasarana perhubungan di Kota Cilegon meliputi terminal, halte, pintu perlintasan sebidang, alat uji kendaraan bermotor, dan alat sistem parkir.

Pada tahun 2011 total sarana prasarana perhubungan yang tersedia sebanyak **27 unit** sedangkan kebutuhan mencapai **39 unit**. Berdasarkan data tersebut maka didapat rasio ketersediaan sarana prasarana perhubungan terhadap kebutuhan adalah **69,23 %** yang meningkat **0,90 %** dari tahun 2010.

C. Tingkat pelayanan perhubungan laut

Minimnya kewenangan Pemkot terhadap wilayah perairan/laut, maka tidak banyak pelayanan yang dapat dilakukan oleh Dishub Kota Cilegon dalam bidang perhubungan laut. Tingkat pelayanan perhubungan laut di Kota Cilegon dapat dinilai berdasarkan **dukungan pengawasan** wilayah perairan yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL). Pada tahun 2011 tidak terdapat kasus keselamatan dan keamanan laut, sedangkan tahun 2010 terjadi 1 kecelakaan kapal di perairan cilegon. Dengan demikian terjadi penurunan kecelakaan lalu lintas laut.

D. Proporsi penyelenggaraan telekomunikasi yg tidak menggunakan spektrum frekuensi radio yang memiliki izin

Berdasarkan kegiatan pendataan yang telah dilakukan bahwa sampai saat ini, di Kota Cilegon semua telah menggunakan spektrum frekuensi radio yaitu sebanyak 2.397 penyelenggara.

E. Proporsi kantor jasa titipan dan pengiriman barang yang memiliki izin

Dalam bidang pos, tidak jauh berbeda dengan bidang telekomunikasi, pelayanan yang dilakukan Dishub meliputi kegiatan pendataan, pengawasan, dan penertiban terhadap kantor jasa titipan dan pengiriman barang yang ada di Kota Cilegon demi terwujudnya pelayanan pos yang berkualitas dan memadai. Pada tahun 2011, total jumlah kantor jasa titipan dan pengiriman barang yang ada di Kota Cilegon adalah **40 unit**, sedangkan yang memiliki izin hanya **31 unit**. Dengan demikian maka proporsi capaian program ini untuk bidang pos pada tahun 2011 sebesar **77,50 %**.

2.3.1.8. Lingkungan Hidup

A. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi. Indikator ini mengukur proporsi jumlah usaha dan/atau kegiatan

yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. Di Kota Cilegon pada tahun 2011 terdapat 30 jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dari 50 jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi, atau secara proporsional mencapai 60%. Capaian ini meningkat bila dibanding tahun 2010 di mana proporsi jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air mencapai 58%.

B. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara

Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi. Indikator ini mengukur proporsi jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. Pada tahun 2011 di Kota Cilegon terdapat 47 jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara dari 65 jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi, atau secara proporsional mencapai 72,31%. Capaian ini meningkat bila dibanding tahun 2010 di mana proporsi jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara mencapai 69,23%.

C. Luas Total lahan yang di Hijaukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD, sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya luasan lahan yang di hijaukan (dalam satuan Ha). Meski demikian, ada batasan mengenai program penghijauan yang dimaksud yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cilegon yaitu pada Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dan berdasarkan tugas pokok dan organisasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon, program penghijauan dimaksud adalah merupakan Hutan Kota, yang menjadi bagian dari RTH

sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon. Pada tahun 2011 luas total lahan yang dihijaukan mencapai 99 Ha, bertambah 25 Ha dari tahun 2010 yang sebesar 74 Ha. Capaian ini meningkat 33,78% dari luas total lahan yang dihijaukan di tahun 2010, sehingga luas lahan atau hutan kritis yang belum direhabilitasi pada tahun 2011 seluas 1264 Ha.

D. Proporsi kasus lingkungan yang di selesaikan

Merupakan indikasi dari penegakan hukum lingkungan hidup, yang didefinisikan sebagai perbandingan antarajumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda terhadap total jumlah kasus lingkungan yang terjadi. Pada tahun 2011 terdapat 3 (tiga) kasus lingkungan yang terjadidan ke-3 kasus lingkungan tersebut telah diselesaikan (proporsi penyelesaian 100%).

E. Persentase cakupan penanganan sampah

Cakupan penanganan sampah adalah jumlah sampah yang terangkut ke TPSA terhadap jumlah timbulan sampah yang ada. Untuk mengetahui cakupan penanganan sampah pada tahun 2010 perkiraan volume timbulan sebesar 762 M³/hari dari jumlah penduduk sebesar 373.440 jiwa, (asumsi : 2 liter/jiwa/hari). Volume timbulan sampah terangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung sekitar 338 M³/hari (48,255%). Sedangkan pada tahun 2011 volume timbulan sebesar 771 M³/hari dari jumlah penduduk sebesar 378.886 jiwa, dengan volume timbulan sampah terangkut ke TPA sekitar 372 M³/hari (50%). Dengan demikian pada tahun 2011 ini persentase cakupan penanganan sampah mengalami peningkatan sebesar 1,745%.

F. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS) merupakan salah satu sarana pendukung dalam pelayanan persampahan. Semakin banyak TPS yang tersebar akan semakin memudahkan petugas dalam melakukan pengangkutan sampah ke TPA, jumlah TPS di Kota Cilegon sampai dengan saat ini adalah sebanyak 95 unit yang tersebar di beberapa lokasi, dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 adalah sebanyak 378.886, dengan rasio 1 TPS melayani 1000 penduduk maka pada tahun 2011 rasio TPS terhadap satuan penduduk di kota cilegon sebesar 25 %.

G. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Keberadaan RTH dalam suatu perkotaan atau disebut juga Hutan kota merupakan suatu ekosistem dari komunitas tumbuh-tumbuhan berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol (menumpuk) dengan struktur meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman, dan estetis.

Perkembangan industri di wilayah Kota Cilegon yang semakin pesat akan berdampak kepada penurunan kualitas lingkungan terutama meningkatnya kadar CO_2 atau disebut juga polusi udara akibat dari kegiatan industri sehingga ketersediaan Hutan Kota (RTH) sangatlah penting demi keberlangsungan makhluk hidup. Pemerintah Kota Cilegon selain melakukan penghijauan kotajuga sedang menginventarisir Asset RTH dan Taman yang menjadi kewenangan Pemerintah. Untuk Taman Kota di Kota Cilegon saat ini tercatat 21,36 Ha dan yang tertangani baru mencapai 3,7 ha sedangkan tahun 2010 yang tertangani 1,066 Ha. Sehingga capaiannya untuk tahun 2011 adalah sebesar 17,32%

2.3.1.9. Pertanahan

A. Tingkat Status tanah pemerintah Daerah

Tanah pemerintah daerah merupakan aset milik pemerintah daerah yang semestinya diperkuat oleh bukti legalitas yang otentik dalam bentuk sertifikat, permasalahan kasus tanah pemerintah daerah dapat berupa permasalahan dalam status hak penggunaan dan kepemilikan. hal ini dapat terjadi karena lemahnya administrasi pertanahan di instansi yang mengeluarkan legalitas status pertanahan. Karena fungsi dan peranan tanah yang begitu besar banyak timbul permasalahan atau sengketa yang terjadi, sehingga dalam menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Cilegon secara terus menerus melakukan pensertifikatan atas tanah-tanah yang dimiliki dengan tujuan agar tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, sampai dengan tahun 2011 total status tanah eks bengkok yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cilegon $\pm 763.037 \text{ m}^2$ dalam 311 bidang, adapun yang sudah bersertifikat $\pm 454.991 \text{ m}^2$ dalam 235 bidang tanah, sisanya $\pm 308.046 \text{ m}^2$ dalam 76 bidang tanah masih dalam tahap verifikasi atau baru sekitar 75,56 % status tanah milik pemda yang bersertifikat.

2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

A. Tingkat Kinerja Pelayanan administrasi Kependudukan

Untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima bagi semua pemohon administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon terus meningkatkan kinerja di dalam memberikan pelayanan publik. yaitu di ukur dari Jumlah pemohon KTP yg dapat diselesaikan 7 hari sebanyak 2755 orang dan Jumlah pemohon KTP 2995 orang, maka tingkat capaian kinerja pelayanan administrai kependudukan adalah 92 %

B. Tingkat Kinerja pelayanan pencatatan sipil

Dalam mendukung capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil yaitu di dalam mengukur tingkat kinerja pelayanan pencatatan sipil, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sehingga tingkat pelayanan kepada masyarakat dapat di tingkatkan dengan mengukur dari jumlah pemohon Akte Kelahiran yg dapat diselesaikan 30 hari sebanyak 19167 lembar dan Jumlah pemohon Akte Kelahiran sebanyak 19167 lembar, maka persentase di dalam Tingkat Kinerja pelayanan pencatatan sipil adalah 100 %

C. Tingkat validasi, akurasi dan up-to-datenya data kependudukan

Di butuhnya tingkat Validasi yang akurat dan up-to-datenya data administrasi kependudukan di nilai sangat penting di dalam mengukur sudah sejauh mana tingkat kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang sudah di jalankan. ada pun capaian tingkat Validasi, akurasi dan up-to-datenya data kependudukan 80 %.

2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Proporsi jumlah pengaduan tidak kekerasan yang ditindaklanjuti

Salah satu capaian kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak melalui pelayanan pengaduan tindak kekerasan adalah rasio jumlah pengaduan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ditindaklanjuti dengan kegiatan operasional P3KC. Penanganan pengaduan tindak

kekerasan pada tahun ini sebanyak 17 kasus. Hal ini terjadi penurunan / berkurang kasus KDRT dari tahun 2010 sebanyak 19 kasus.

B. Proporsi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Salah satu capaian kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melalui partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah rasio jumlah pegawai pemerintah di lingkungan Kota Cilegon pada tahun 2011 sebanyak 6.034 pegawai dengan jumlah pegawai perempuan yang berjumlah 3.454 pegawai atau 57 % . Bila dibandingkan pada tahun 2010 jumlah pegawai perempuan yang bekerja di pemerintahan sebanyak 3.326 pegawai hal ini meningkat 1.04 % tahun sebelumnya dan mencapai target yang ditetapkan sebesar 0,5 %.

2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

A. Angka laju pertumbuhan penduduk

Salah satu program pemerintah Kota Cilegon adalah program **pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga kecil** yang pertumbuhannya berdasarkan jumlah pertumbuhan penduduk Kota Cilegon pada tahun 2011 berdasarkan angka sementara BPS adalah sebesar 378.886 jiwa dan jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 373.440 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk kota cilegon sebesar 1,46 %. Terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk disebabkan selain dari angkakelahiran juga dari migrasi penduduk dari luar daerah yang mencari pekerjaan karena Kota Cilegon merupakan daerah industri.

B. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kesertaan ber – KB

Salah satu capaian kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam program **pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga kecil** adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam kesertaan ber KB. Jumlah keluarga peserta KB pada tahun 2011 sebanyak 52.814 , jumlah keluarga di kota Cilegon tahun 2011 sebanyak 84.196 KK, capaian tingkat partisipasi masyarakat dalam ber KB sebesar 62,7%

C. Rasio Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang menjadi peserta KB terhadap PUS yang ada

Salah satu capaian kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam program pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga kecil melalui PUS

(Pasangan Usia Subur) yang menjadi peserta KB adalah Jumlah PUS yang ada di Kota Cilegon pada tahun 2011 sebanyak 69.322 peserta, Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang menjadi peserta pada KB pada tahun 2011 sebanyak 52.814 atau 76,18 %. Maka capaian program ini telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan sebesar 73% pada tahun 2011.

D. Peningkatan proporsi jumlah kelompok catur bina terhadap jumlah balita

Salah satu capaian kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam program Bina Keluarga Sejahtera melalui catur bina terhadap jumlah balita adalah Peningkatan proporsi jumlah kelompok catur bina terhadap jumlah balita. Jumlah balita pada tahun 2011 sebanyak 31.900 kelompok dan jumlah kelompok catur bina pada tahun 2011 sebanyak 118 kelompok atau 37 %. Hal ini tercapainya capaian program yang telah ditargetkan sebesar 20% pada tahun 2011.

2.3.1.13. Sosial

A. Proporsi jumlah PMKS (PSK, Anjal/gepeng, Lansia, Penyandang cacat) yang mandiri terhadap total jumlah PMKS yang dibina

Keberhasilan di dalam penanganan PMKS adalah meningkatnya derajat kemampuan dan keterampilan dari segi ekonomi yang lebih baik, adapun jumlah PMKS yang mandiri : PSK : 5, Anjal/Gepeng : 15, LU : 40, Eks Napza : 10, Anjal : 10 sedangkan jumlah total PMKS yang di bina pertahun 55 orang.

B. Prosentase jumlah pelayanan orang terlantar dalam perjalanan dan jenazah terlantar

Kegiatan aksi yang di lakukan oleh Dinas Sosial yaitu memberikan bantuan terhadap orang yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti orang miskin, terlantar, cacat yang tidak memiliki biaya untuk ongkos ke tempat tujuan dan pemakaman Jenazah terlantar bagi masyarakat yang tidak memiliki keluarga.

adapun jumlah orang terlantar dalam perjalanan dan jenazah terlantar yang dilayani sebanyak 220 orang terhadap jumlah orang terlantar dalam perjalanan dan jenazah terlantar yang dilaporkan sebanyak 220 orang. maka prosentase jumlah pelayanan orang terlantar dalam perjalanan dan jenazah terlantar 100 %

C. Proporsi peningkatan PSKS aktif

Pemerintah Kota Cilegon membutuhkan bantuan peran lembaga kesejahteraan sosial sangatlah penting dikarenakan sebagai wadah untuk mendukung percepatan penanganan PMKS tersebut. Jumlah lembaga PSKS tahun 2011 adalah 29 lembaga sedangkan di tahun 2010 sebanyak 27 lembaga.

D. Proporsi peningkatan TKSM aktif

Di dalam partisipasi masyarakat di dalam penanggulangan PMKS di Kota Cilegon di harapkan adanya keikutsertaan dan kepedulian bersama di dalam mengatasi permasalahan sosial adapun jumlah TKSM yang aktif di Kota Cilegon sebanyak 243 orang.

E. Proporsi korban bencana yang ditangani

Penanggulangan Permasalahan bencana alam di harapkan mampu menyentuh aspek sosial yang langsung kepada masyarakat di tahun 2011 jumlah korban bencana yang di tangani sebanyak 660 jiwa sedangkan di tahun 2010 sebanyak 1.135 jiwa.

F. Jumlah masyarakat miskin sektor informal yang tercakup dalam Askesos

Di dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan kesejahteraan masyarakat miskin, dengan ini Dinas Sosial yang tercakup dalam Askesos sebanyak 200 orang.

G. Jumlah Tagana yang terlatih

TAGANA pada hakekatnya adalah wadah berhimpun seluruh kekuatan komponen penanggulangan bencana berbasis masyarakat khususnya dari unsur generasi muda di Kota Cilegon.

Melalui Dinas Sosial Kota Cilegon mengadakan Pembinaan dan pelatihan tagana dengan tujuan agar para anggota tagana terlatih dan lebih terampil. adapun Jumlah Tagana yang terlatih di tahun 2011 sebanyak 270 orang, ada peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 183 orang.

H. Prosentase peningkatan kualitas kehidupan beragama

Beragama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing adalah salah satu unsur dari hak azasi manusia (HAM) yang wajib dihormati dan dilindungi keberadaannya. Di Indonesia, hak tersebut terdapat dalam UUD 1945 (amandemen) Bab XI pasal 29 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", dan ayat (2) bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis, sehingga di Kota Cilegon menjadi kota yang kondusif dalam menjalankan di segala aktifitas, prosentase peningkatan kualitas kehidupan beragama mencapai 100%.

I. Jumlah sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan serta kualitas lingkungan peribadatan

Beberapa perkembangan penting yang dicapai dalam pembangunan bidang agama, antara lain: meningkatnya fasilitas berbagai sarana peribadatan untuk memberikan pelayanan kehidupan agama yang lebih bermutu dan merata, meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan ibadah haji, penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dan pemberdayaan umat, dan terbentuknya berbagai forum komunikasi antarumat beragama untuk mendukung terwujudnya kerukunan intern dan antarumat beragama.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Cilegon telah memberikan bantuan secara stimulant untuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana keagamaan sebanyak 797 dari 1100 usulan sekitar 72,45 % (mesjid, mushola, madrasah, pondok pesantren, OKP, dll)

2.3.1.14. Ketenagakerjaan

A. Rasio jumlah tenaga kerja terampil yang ditempatkan terhadap jumlah tenaga kerja yang dibina/ difasilitasi

Salah satu indikator keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dalam membina masyarakat melalui pembinaan ketrampilan khusus adalah pelatihan las industri, servis sepeda motor dengan seluruh peserta yang dibina sebanyak 40 orang. Realisasi tenaga kerja terampil yang ditempatkan sebanyak 31 orang atau 78 % dari target 25,40 %, berarti hal ini tercapai dari target yang ditetapkan.

B. Proporsi jumlah perusahaan yang menerapkan K3 terhadap total jumlah perusahaan

Salah satu indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan maupun pembinaan ke perusahaan perihal K3. Perusahaan di Kota Cilegon sejumlah 677 perusahaan, dan yang wajib memiliki sertifikasi SMK3 222 perusahaan. Dan perusahaan yang telah membentuk lembaga K3 50 perusahaan atau 22,5% dari target 5% yang ditetapkan.

C. Proporsi jumlah perusahaan yang memiliki sertifikasi K3 terhadap total jumlah perusahaan

Salah satu indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan maupun pembinaan ke perusahaan perihal K3. Perusahaan di Kota Cilegon sejumlah 677 perusahaan, dan yang wajib memiliki sertifikasi SMK3 222 perusahaan. Dan perusahaan yang telah memiliki sertifikasi K3 8 perusahaan atau 3,6%.

D. Jumlah perusahaan yg telah memiliki LKS Bipartit

Salah satu indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam peningkatan hubungan industril yaitu dengan indikator jumlah perusahaan yang telah memiliki LKS bipartit sebanyak 64 unit dari 677 perusahaan atau 9,5% . Hal ini tercapainya target 3% yang ditetapkan.

2.3.1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

A. Jumlah koperasi yang aktif

Salah satu kinerja pemerintah Kota Cilegon dengan program peningkatan dan pengembangan koperasi dan UKM yaitu pada perkoperasian. Jumlah koperasi sampai tahun 2011 berjumlah 500 koperasi sedangkan yang aktif sebanyak 273 koperasi hal ini meningkat dari tahun 2010 yaitu berjumlah 249 koperasi atau meningkat 24 koperasi dari target yang akan dicapai sebanyak 20 koperasi.

B. Jumlah UKM yang meningkat statusnya dari usaha kecil menjadi usaha menengah

Salah satu kinerja pemerintah Kota Cilegon dengan program peningkatan dan pengembangan koperasi dan UKM yaitu pada UKM. Jumlah usaha mikro dan kecil sampai dengan tahun 2011 sebesar 29.106 pelaku usaha dan jumlah usaha kecil dan menengah mencapai 12.474 pelaku usaha. Jumlah UKM yang meningkat statusnya dari usaha kecil menjadi menengah sebanyak 5 pelaku usaha, hal tercapai dari target sebesar 5 pelaku usaha.

2.3.1.16. Penanaman Modal

A. Pertambahan Investasi Daerah

Kota Cilegon merupakan kota industri yang terdiri industri padat modal yang mana dipenuhi dengan investasi PMA dan PMDN. Dengan masih tersedianya lahan industri Kota Cilegon masih berupaya menarik investor untuk menanam investasi di Kota Cilegon, sampai saat ini investasi yang telah tertanam sebesar Rp. 157,6 Triliyun hal ini meningkat Rp. 93,39 Triliyun dari tahun 2010 sebesar Rp. 64,21 Triliyun atau 245.44 %. Target Kota Cilegon memenuhi capaian sasaran (target di RPJMD 1,25 triliyun).

2.3.1.17. Kebudayaan

A. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung

Kota Cilegon merupakan Kota Industri yang juga memiliki potensi pariwisata untuk dikunjungi para wisatawan mancanegara, akan tetapi potensi tersebut belum dapat tergali dengan baik dari segi pengelolaan ataupun dari segi sarana dan prasarannya. Pada tahun 2011 ini wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Cilegon sebanyak 11.506 orang.

B. Jumlah Wisatawan Domestik yang berkunjung

Berbeda dengan halnya wisatawan domestik yang masih mendominasi kunjungan wisata dengan jumlah 119.536 orang

C. Proporsi jumlah seni yang dibina terhadap total jenis seni

Jumlah Seni yang ada sebanyak 21 jenis, pada tahun 2011 ditargetkan 2 jenis seni yang dibina sedangkan yang telah dibina pada tahun 2011 sebanyak 8 jenis, indikator pada capaian ini telah mencapai target.

D. Jumlah sanggar seni yang dibina

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cilegon dalam hal ini sanggar seni telah dibina sebanyak 5 Sanggar seni dari jumlah 30 sanggar seni yang ada.

Saat ini pemerintah kota Cilegon telah memiliki gedung sanggar seni dan budaya yang akan difungsikan sebagai sarana pembinaan, pengembangan dan pementasan seni budaya kota Cilegon.

2.3.1.18. Kepemudaan dan Olahraga

A. Tingkat Pemenuhan sarana olahraga

Dalam rangka untuk memajukan atlit-atlit yang berprestasi dan menunjang kebutuhan atlet prestasi untuk berlatih dalam mengembangkan dan menyediakan sarana olah raga bagi para atlit berprestasi. Selain itu sarana dan prasarana ini sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam membina, mengembangkan dan menyediakan sarana olah raga bagi para atlet dan masyarakat Kota Cilegon. pada tahun 2011 angka capaian tingkat Pemenuhan sarana olahraga untuk Jumlah sarana Olahraga yang ada sebanyak 1597 buah, terhadap Total jumlah sarana olahraga yang dibutuhkan

sebanyak 26.000 buah untuk kelengkapan 41 pengcab dan 149 sekolah baru bisa terpenuhi sebesar 5.93 %, capaian ini meningkat dibanding tahun 2010 dimana capaian jumlah sarana Olahraga yang ada terhadap total jumlah sarana olahraga yang dibutuhkan mencapai 2.93%.

B. Tingkat pembinaan atlet olahraga

Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang dilakukan setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi atlet di setiap even cabang olah raga perlu adanya motivasi dari pemerintah Kota Cilegon untuk membina dan mengembangkan olah raga secara kontinue bagi atlet di setiap cabang olah raga diharapkan dapat menciptakan atlet yang berprestasi pada cabang olah raga Sehingga perlu adanya upaya pemerintah untuk memberikan perhatian dan pembinaan yang lebih pada berbagai cabang olah raga.

Pada tahun 2011 angka capaian tingkat pembinaan jumlah atlet menurut jenis cabang olah raga yang dibina sebanyak 1103 orang, terhadap Total jumlah atlet menurut jenis cabang olah raga yang ada sebanyak 2793 orang atau sebanding dengan 39.5 %.

C. Tingkat Pembinaan Pemuda

Dalam upaya pembinaan kinerja pemuda atau pelajar dalam beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam berorganisasi sehingga diharapkan para pemuda dan pelajar dapat mengaktualisasi dirinya menjadi intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif serta berdaya guna dan berhasil guna dalam pembangunan. pada tahun 2011 angka capaian Tingkat Pembinaan Pemuda (rasio jumlah pemuda yang dibina sebanyak 1100 orang, terhadap total jumlah pemuda yang ada) sebanyak 4170 orang atau sebanding dengan 26.4%, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 capaian jumlah pemuda yang dibina terhadap total jumlah pemuda yang ada baru mencapai 19.2 %

D. Tingkat Pembinaan Pramuka

Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan pengembangan anggota pramuka khususnya pramuka agar dapat menjalankan fungsi kepramukaan sesuai dengan prinsip Dasa Darma Pramuka. Karena dengan terbinanya anggota pramuka, yang dapat menghasilkan pemuda dan pelajar yang berkpribadian. pada tahun 2011 angka capaian Tingkat Pembinaan Pramuka (rasio jumlah pramuka yang dibina sebanyak 6000 orang, terhadap total jumlah pramuka yang ada) sebanyak 15.994 orang atau sebanding dengan 37.51 %.

E. Tingkat Pembinaan organisasi Pemuda

Dalam upaya pembinaan kinerja organisasi pemuda dalam beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam berorganisasi sehingga diharapkan para pemuda dan pelajar dapat mengaktualisasi dirinya menjadi intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif serta berdaya guna dan berhasil guna dalam pembangunan.

Pada tahun 2011 angka capaian Tingkat Pembinaan Organisasi Pemuda (rasio jumlah kelompok organisasi kepemudaan yang dibina sebanyak 50orang, terhadap total jumlah kelompok organisasi pemuda yang ada sebanyak 115 orang atau sebanding dengan 43.5%, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 capaian Jumlah kelompok organisasi kepemudaan yang di bina terhadap Jumlah kelompok organisasi kepemudaan yang ada baru mencapai 30.43%.

F. Tingkat Pembinaan organisasi Pramuka

Dalam upaya meningkatkan dan menumbuh kembangkan kreativitas dan kredibilitas dan membentuk watak kepemimpinan, untuk meningkatkan kwaran dan untuk meningkatkan anggota dewan kerja ranting dan wadahnya khususnya organisasi kepramukaan agar dapat menjalankan fungsi kepramukaan sesuai dengan prinsip Dasa Darma Pramuka.

Pada tahun 2011 angka capaian Tingkat Pembinaan Pramuka (rasio jumlah kelompok organisasi pramuka yang dibina sebanyak 130orang, terhadap total jumlah kelompok organisasi pramuka yang ada) sebanyak 404orang atau sebanding dengan 32.2 %, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 capaian jumlah kelompok organisasi pramuka yang dibina terhadap total jumlah kelompok organisasi Pramuka yang ada baru mencapai 25 %.

2.3.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

A. Prosentase Peserta Sosialisasi yang memahami nilai-nilai ideologi bangsa

Wawasan kebangsaan adalah suatu wawasan yang memandang bangsa dari aspek Ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan dan agama. Dimana dengan cara pandang seperti itu akan mencerminkan jati diri bangsa, untuk mewujudkan wawasan kebangsaan seperti yang diharapkan diperlukan

pemasyarakatan atau sosialisasi kepada masyarakat antara lain ideologi bangsa Pancasila.

Adapun pada pelaksanaan sosialisasi ideologi bangsa atau Pancasila yang diikuti oleh 125 peserta sosialisasi ternyata yang benar-benar berdasarkan post test adalah sebanyak 75 peserta sedangkan sisanya masih perlu pendalaman lagi.

B. Jumlah LSM dan Ormas yang memahami etika berdemokrasi

Pembinaan kemandirian jumlah LSM dan Ormas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dilakukan untuk lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi - organisasi kemasyarakatan sebagai wadah berhimpun bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di daerah. Adapun jumlah LSM dan Ormas yang memahami etika berdemokrasi di Kota Cilegon 76 lembaga.

C. Prosentase Jumlah Peserta yang memahami masalah kebencanaan

Perlunya kesiapsiagaan dan antisipasi di dalam penanggulangan bencana sangat dibutuhkan bila mana terjadi, maka dari itu Pemerintah Kota Cilegon mengadakan kegiatan pelatihan dan sosialisai kebencanaan. Adapun Jumlah peserta pelatihan pencegahan dan pelayanan penanggulangan bencana adalah sebanyak 120 orang terhadap Jumlah korban bencana yang ada sebanyak 230 orang. Maka prosentase peserta yang memahami masalah bencana 52 %

2.3.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A. Tingkat kinerja Pelayanan perangkat daerah

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah Kota Cilegon di mata warga masyarakatnya. Hasil analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota Cilegon menunjukkan bahwa seluruh indikator penilaian menunjukkan kinerja **“baik”** dengan nilai indeks sebesar 68.64. Rekapitulasi hasil penilaian terhadap 14 indikator.

B. Tingkat ketersediaan produk hukum daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memegang prinsip Akuntabilitas tentunya perlu disandarkan oleh aturan hukum, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Cilegon mengeluarkan Produk Hukum berupa Peraturan Daerah yang ditetapkan sebanyak 18 Perda dari jumlah usulan raperda 21 Raperda atau (85,71%) yang di setujui menjadi Perda, Peraturan Walikota sebanyak 42 Perwal, Keputusan Walikota sebanyak 544 SK

C. Tingkat pelaksanaan pengendalian pembangunan Daerah

Dalam UU No. 17/2003, tentang keuangan Negara digambarkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja terpadu. Dalam UU ini menetapkan hubungan yang jelas antara rencana kerja, keluaran dan target yang dapat diukur, monitoring kinerja, **pengendalian** dan efektifitas biaya yang diaudit. Pengesahan anggaran-anggaran penyelenggara akan bergantung pada bukti kinerja dan efektivitas biaya penyelenggara kegiatan.

Dalam menjalankan amanat tersebut pelaksanaan pengendalian pembangunan merupakan salahsatu bentuk pertanggungjawaban yang memuat informasi capaian kegiatan yang dilakukan setiap SKPD secara priodik di Kota Cilegon. Tingkat pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah 94,43%

D. Tingkat kinerja kelembagaan perangkat daerah

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Di Pemerintahan Kota Cilegon Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki Standar Operating Prosedur (SOP) adalah 2 OPD yaitu DPPKD dan RSUD, yang mendapatkan ISO baru 1 OPD yaitu DPPKD.

E. Tingkat pemenuhan dan efektifitas Kebutuhan perlengkapan daerah

Untuk mendukung tertib administrasi asset daerah, pemerintah melakukan pengendalian asset daerah guna meningkatkan pengelolaannya. Hal ini berupa pembenahan penatausahaan aset melalui pengolahan data hasil sensus barang daerah. Sedangkan untuk mendukung kelancaran pelayanan publik telah dilakukan pengadaan berbagai barang daerah. Pengadaan barang daerah berupa tanah, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan kebutuhan lainnya.

Tingkat pemenuhan saat ini belum dapat dihitung karena data asset saat ini sedang dalam proses inventarisasi.

Di Tahun 2011 asset yang sudah terinventarisasi sebesar 85.97% hal ini ada beberapa asset yang belum selesai terinventarisasi hasil kerjasama dengan BPKP.

F. Tingkat kinerja pelayanan Legislatif Daerah

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Pada tahun 2011, terdapat 18 Raperda yang disetujui untuk menjadi Perda, dari keseluruhan 21 Raperda yang telah diajukan. Dengan demikian, maka capaian kinerja yang didapatkan adalah sebesar 85,71 %.

G. Tingkat proporsionalitas belanja daerah

Dalam program pengelolaan anggaran dan perbendaharaan keuangan daerah pada tahun 2011 melalui jumlah belanja langsung dalam APBD Rp. 439.051.576.168,00 milyar belanja tidak langsung dalam APBD Rp. 474.907.001.905,00 milyar, secara akumulasi total belanja Rp. 913.958.578.073,00. Sedangkan pendapatan sebesar Rp. 894.973.346.173,00, dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 26.485.231.900,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 7.500.000.000,00 total pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan dan dikurangi pengeluaran pembiayaan adalah sebesar Rp. 913.958.578.073,00. Total belanja dan pendapatan ini belum diaudit oleh BPK.

H. Peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak

Salah satu indikator kinerja pemerintah kota cilegon dalam Program Peningkatan Pajak Daerah pada tahun 2011 melalui peningkatan pajak daerah sebesar Rp. 157.649.968.761 milyar, jumlah PAD Rp. 253.212.312.004.831 milyar total pendapatan daerah Rp. 172.969.160.026 milyar.

I. Tingkat penilaian kinerja keuangan daerah

Salah satu indikator kinerja pemerintah kota cilegon dalam Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah melalui tingkat penilaian kinerja keuangan daerah adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

J. Besaran Realisasi Pendapatan

Salah satu indikator kinerja pemerintah kota cilegon dalam Program Perencanaan dan Pengendalian Dana Perimbangan melalui besaran pendapatan Kota Cilegon adalah realisasi besaran pendapatan Rp. 858.320.973.326 Milyar dan realisasi dana perimbangan Rp. 579.508.968.485 milyar.

K. Persentase SKPD yang temuannya berkurang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, maka fungsi dan peranan Lembaga Pengawasan sangatlah strategis. Untuk itu diperlukan adanya kemauan, komitmen serta kemampuan dari segenap Jajaran Aparatur Pemerintah untuk menumbuh kembangkan budaya pengawasan, sehingga dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan suksesnya dalam pengelolaan pembangunan. Pengawasan berfungsi untuk mengetahui informasi tentang perkembangan aktivitas perbaikan dan kegiatan pembangunanyang dilaksanakan oleh seluruh SKPD. Pada Tahun 2011 angka capaian jumlah unit organisasi yg diperiksa hasil temuannya menurun sebanyak 34 Objek Pemeriksaan(Obrik) terhadap seluruh jumlah Objek Pemeriksaan(Obrik) yang diperiksa sebanyak 71 Objek Pemeriksaan(Obrik) atau sebesar 47.9 %.

L. Tingkat kualitas peningkatan karir SDM aparatur

Sebagai salah satu syarat bagi aparatur Pemerintah yang telah menduduki jabatan harus mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, menurut data di lapangan bahwa belum semuanya aparatur pemerintah Kota Cilegon yang memenuhi persyaratan jenjang karir aparatur, jumlah pejabat yang ada di lingkungan

Pemerintahan Kota Cilegon sebanyak 799 pegawai, sedangkan jumlah pejabat yang baru mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 583 pegawai, sehingga capaian dari program ini sebesar 72,97 %.

M. Tingkat kualitas SDM aparatur

Dengan meningkatkan kualitas profesionalisme aparatur pemerintah, maka kemajuan pembangunan dapat dicapai, termasuk di dalamnya pemberian pelayanan prima terhadap masyarakatnya, oleh karena itu perlu di dukung oleh kualitas peningkatan karir Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang professional. Pada tahun 2011 total dari jumlah pegawai aparatur (PNS) di Kota Cilegon sebanyak 6.034 orang, sedangkan jumlah PNS yang berpendidikan Strata 1 (S1) ke atas sebanyak 3.006 orang sehingga kalau di presentasekan jumlah pegawai PNS yang berpendidikan S1 ke atas di Kota Cilegon sebesar 49,81 %, hal ini terbukti ada kemajuan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya mencapai 42,54 %

N. Tingkat manajemen administrasi Kepegawaian

Dalam memberikan pelayanan kepada aparatur pemerintah secara profesional, jujur adil dan merata dalam melaksanakan manajemen kepegawaian untuk menciptakan suatu sistem yang mampu mengembangkan, profesionalisme yang berorientasi pada kinerja sehingga terciptanya good governance (Pemerintahan yang baik).

Dimana Jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani sebanyak 3.294 berkas terhadap Jumlah administrasi kepegawaian yang seharusnya dilayani sebanyak 3.294 berkas, sehingga tingkat manajemen administrasi kepegawaian mencapai 100 %

O. Tingkat ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menciptakan Suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur, maka diperlukan suatu upaya tindakan yang kontinyu dan berkelanjutan dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di Kota Cilegon, dengan adanya program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat diharapkan terciptanya keamanan , ketertiban, dan ketentraman di Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon disebutkan bahwa tugas pokok Satpol PP adalah melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Sesuai

dengan tugas pokoknya menempatkan satuan polisi pamong praja pada posisi yang strategis sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan ketertiban umum ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Pada Tahun 2011 angka capaian jumlah kejadian terkait ketentraman dan Ketertiban dan keindahan yang tertangani sebanyak 125 terhadap jumlah kejadian terkait ketentraman dan Ketertiban dan keindahan Masyarakat yang teridentifikasi sebesar 125 atau mencapai 100 %.

P. Cakupan pelayanan penanggulangan Kebakaran

Penanggulangan kebakaran merupakan salah satu bentuk pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Kota Cilegon, namun **peran serta masyarakat** untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas Kantor Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya adalah **mutlak dilakukan**, karena tanpa peran serta masyarakat tersebut sulit bagi petugas Kantor Pemadam Kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pemadaman kebakaran, mengingat sumber daya manusia dan kelengkapan sarana dan prasarana yang terbatas. Sampai saat ini **cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran mencapai 100%**. Tetapi yang dapat dilayani dengan tingkat waktu tanggap (response time rate 15 menit) dalam layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah sebesar 81%.

Q. Tingkat kinerja pelayanan perangkat Kecamatan

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan tidak hanya di tempuh melalui keputusan-keputusan akan tetapi juga melalui peningkatan kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan, Guna mendukung terciptanya *Good Governance* yang optimal, maka perlu juga memperhatikan bagaimana pelayanan yang dilakukan terhadap warganya. Pelayanan adalah suatu yang sangat subjektif dan sulit untuk diidentifikasi. Hasil analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tingkat kecamatan Pemerintah Kota Cilegon menunjukkan bahwa seluruh indikator penilaian menunjukkan kinerja **“baik”** dengan nilai indeks sebesar **70,04** nilai ini didapat dari penilaian 14 Indikator layanan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/ /M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

2.3.1.21. Ketahanan Pangan

A. Proporsi jumlah RTS yang dapat memenuhi Pola Pangan Harapan (PPH)

Salah satu kinerja pemerintah kota cilegon dalam program pengembangan ketahanan pangan yaitu dengan pemberian wawasan pola pangan harapan kepada 14.368 RTS. Pada program ini telah mencapai target yang dicapai dari 14.368 RTS.

2.3.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Jumlah RTS yang mendapat BML

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah dengan bantuan masyarakat langsung (BML) kepada 14.368 RTS atau 100 % ke seluruh 43 kelurahan. Pada program ini telah mencapai target yang dicapai dari 14.368 RTS.

B. Rasio jumlah LPMK terhadap jumlah kelurahan

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah rasio jumlah LPMK yang sudah mencapai 43 LPMK untuk masing-masing kelurahan.

C. Proporsi jumlah LPMK yang aktif terhadap total jumlah LPMK

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah PLMK. Pada program ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu ke pada 43 LPMK. Pada program ini mencapai target yang telah ditetapkan pada 43 LPMK.

D. Proporsi jumlah UMKM yang menerapkan TTG terhadap total jumlah UMKM

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah melalui UMKM dimana UMKM diberikan binaan melalui posyantek dan wartek tentang TTG. UMKM yang telah menerapkan TTG sebanyak 10 UMKM sehingga tercapainya target yaitu 100 %

E. Jumlah posyantek mandiri baru

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah melalui pembentuk posyantek. Posyantek yang telah dibentuk pada tahun 2011 sebanyak 1 lembaga atau 100 % dari target yang dicapai.

F. Jumlah wartek baru

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah melalui pembentuk posyantek. Wartek yang telah dibentuk pada tahun 2011 sebanyak 1 lembaga atau 100 % dari target yang dicapai.

G. Proporsi jumlah wira usaha baru yang terlatih terhadap total jumlah wira usaha baru

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah melalui wira usaha baru yang terlatih yang mana jumlah wira usaha baru yang dilatih tahun 2011 sebanyak 327 orang sedangkan akumulasi wira usaha usaha baru yang dilatih sampai dengan tahun 2011 sebanyak 2.127 orang sedangkan jumlah seluruh wira usaha yang ada sebanyak 10.522 orang sehingga proporsi jumlah wira usaha baru yang terlatih terhadap total jumlah wirausaha baru sebesar 20%.

H. Proporsi jumlah RTS yang mendapat penyuluhan pemberdayaan masyarakat terhadap total jumlah RTS

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam Program Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Jumlah RTS 15.961 dan RTS yang mendapat penyuluhan tahun 2011 sebanyak 800 RTS dan keseluruhan yang telah mendapat penyuluhan sebanyak 1900 RTS. Prosentase jumlah RTS yang sudah mendapat penyuluhan adalah sebesar 11.9%

I. Proporsi jumlah RTS yang mendapat penyuluhan pangan dan gizi terhadap total jumlah RTS

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam Program Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Melalui program ini tahun 2011 pemerintah Kota Cilegon telah melakukan penyuluhan kepada 660 RTS dari total 15.961 RTS. Total RTS yang telah mendapatkan penyuluhan sebanyak 2220 RTS. Prosentase jumlah RTS yang sudah mendapat penyuluhan pangan dan gizi adalah sebesar 13,90%.

2.3.1.23. Statistik

A. Tingkat ketersediaan data statistik daerah

Statistik arti sempit sebagai data berperan dalam penelitian untuk mengenali atau menunjukkan adanya masalah (problem identification). Dengan tersedianya data statistik dalam berbagai jenis yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, akan mudah dilihat adanya masalah. Data statistik juga merupakan sebagai indikator penyusunan rencana kerja tanpa data pelaksanaan pembangunan tidak dapat diukur dengan baik.

2.3.1.24. Kearsipan

A. Tingkat kualitas pengelolaan arsip Daerah

Di dalam penerapan pengembangan Arsip Daerah di Kota Cilegon telah di canangkan ke setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip Daerah, adapun yang sudah di terapkan di 28 sekolah dan 18 SKPD.terhadap 79 unit kerja.

2.3.1.25. Komunikasi dan Informatika

A. Prosentase program pembangunan yang dapat terinformasikan melalui media cetak dan elektronik

Informasi di dalam pembangunan pemerintah daerah yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas Pemerintahan daerah Kota Cilegon dalam upaya untuk mensosialisasikan informasi yang akurat kepada masyarakat Kota Cilegon dan mendokumentasikan setiap kegiatan–kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kota Cilegon. Pada Tahun 2011 Persentase kegiatan pemerintah daerah yang di publikasikan melalui media cetak/elektronik mencapai 100%.

2.3.1.26. Perpustakaan

A. Jumlah kunjungan ke perpustakaan

Peningkatan jumlah Kunjungan masyarakat Kota Cilegon di dalam minat baca tahun 2011 sebanyak 38800 orang. ada peningkatan apa bila di bandingkan di tahun 2010 sebanyak 25247 orang.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian

A. Proporsi peningkatan produksi, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Indikator kerja kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam program pengembangan pertanian melalui peningkatan produksi, produktivitas pada atau bahan lokal lainnya adalah realisasi produksi padi tahun 2010 sebesar 15.593 ton dengan target peningkatan produksi sebesar 2,5 % maka target produksi padi tahun 2011 sebesar 15.982 ton. Realisasi produksi padi tahun 2011 sebesar 14.904 ton atau capain pada tahun 2011 sebesar 93,25 %. Produktifitas padi tahun 2010 sebesar 5,26 ton/ha dengan target peningkatan produktivitas 2,5 % makan target peningkatan produktivitas tahun 2011 sebesar 5,39 ton. Realisasi produktivitas padi tahun 2011 sebesar 5,11 ton/ha. Realisasi produktivitas 95,55%.

B. Proporsi peningkatan produksi unggas dan hewan kecil (domba/kambing)

Indikator kerja kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam program pengembangan peternakan melalui peningkatan produksi unggas dan hewan kecil (domba/kambing) adalah realisasi produksi daging unggas tahun 2010 sebesar 238,71 ton dengan target peningkatan produksi sebesar 2,5 % maka target produksi daging unggas tahun 2011 sebesar 244,7 ton. Realisasi jumlah produksi daging unggas tahun 2011 sebesar 205,15 ton. Realisasi tahun 2011 mencapai 83,84 %.

Indikator kerja realisasi telur unggas tahun 2010 sebesar 678.457 ton dengan target peningkatan produksi sebesar 2,5 % maka target produksi telur unggas tahun 2011 sebesar 695.418 ton. Realisasi ketersediaan telur tahun 2011 sebesar 692.026 ton. Realisasi tahun 2011 mencapai 99,51 %.

Indikator kerja realisasi populasi ternak hewan (domba/kambing) tahun 2010 sebesar 14.228 ekor dengan target peningkatan produksi sebesar 2,5 % maka target populasi

ternak tahun 2011 sebesar 14.584 ekor. Realisasi populasi ternak tahun 2011 sebesar 14.256 ekor. Realisasi tahun 2011 mencapai 97,75 %.

2.3.2.2. Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Kontribusi PDRB sektor pertambangan terhadap total PDRB

Salah satu indikator pemerintah kota cilegon dalam program pengembangan potensi sumber daya energi dan mineral yaitu dengan indikator PDRB pada sektor pertambangan. Total PDRB : 12.190.054,36 juta sedangkan PDRB sektor Pertambangan : 11.178,19, Prosentase kontribusi PDRB sektor pertambangan terhadap total PDRB sebesar 0,09%

B. Jumlah rumah yang terpasang satuan sambungan listrik

Salah satu indikator pemerintah kota cilegon dalam program pengembangan potensi sumber daya energi dan mineral yaitu dengan program listrik desa. Tahun 2011 terbangun 42 tiang dengan jaringan transmisi sepanjang 2200 m. Dari 2965 KK pada tahun 2009 sudah terpasang 818 KK, terdapat 2147 KK yang belum teraliri listrik pada tahun 2011.

2.3.2.3. Kepariwisataaan

A. Jumlah Objek daya tarik wisata

Salah satu kinerja pemerintah kota cilegon dalam program perencanaan dan pengembangan pariwisata ODTW, pada tahun 2011 telah dikembangkan sebanyak 1 ODTW yaitu wisata industri.

2.3.2.4. Kelautan dan Perikanan

A. Proporsi peningkatan jumlah produksi perikanan

Indikator kerja kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam Program Pengembangan Kelautan dan Perikanan melalui peningkatan jumlah produksi perikanan adalah realisasi produksi perikanan tahun 2010 sebesar 409,3 ton dengan target peningkatan produksi sebesar 23,7% maka target produksi tahun 2011 sebesar 506,3 ton. Realisasi produksi perikanan tahun 2011 sebesar 480,8 ton. Realisasi mencapai 94,96%.

B. Tingkat konsumsi ikan

Indikator kerja kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam Program Pengembangan Kelautan dan Perikanan melalui konsumsi ikan adalah realisasi tingkat konsumsi ikan tahun 2010 sebesar 20,91 kg/kapita/tahun dengan target peningkatan konsumsi ikan sebesar 14,8% maka target konsumsi ikan tahun 2011 sebesar 24 kg/kapita/tahun. Realisasi konsumsi ikan tahun 2011 sebesar 21,4 kg/kapita/tahun. Realisasi mencapai 89,17%.

2.3.2.5. Perdagangan

A. Kontribusi PDRB sektor perdagangan terhadap total PDRB

Salah satu indikator kinerja pemerintah kota cilegon melalui dalam program pengembangan perdagangan yaitu dengan indikator PDRB pada sektor perdagangan sebesar Rp.2.008.040,65 juta. Total PDRB sebesar Rp. 12.190.054,36 Juta sehingga kontribusi PDRB sektor perdagangan sebesar 16,47%.

2.3.2.6. Industri

A. Kontribusi PDRB ADHK Industri terhadap total PDRB

Salah satu indikator kinerja pemerintah kota cilegon melalui dalam program kemitraan industri yaitu dengan indikator PDRB pada sektor Industri Total PDRB ADHK : 12.190.054,36 Juta PDRB ADHK Industri : 7.260.112,34, Prosentase PDRB ADHK Industri terhadap total PDRB sebesar 59,56%

B. Jumlah industri yang tumbuh dalam memanfaatkan potensi lokal

Indikator kinerja pemerintah kota cilegon dalam program kemitraan industri adalah tumbuhnya industri yang melakukan kemitraan. Pada tahun 2010 terdapat 107 perusahaan yang melakukan kemitraan, sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi 113 perusahaan. Sehingga jumlah industri pada tahun 2011 tumbuh sebanyak 8 Industri, dengan target pertumbuhan industri yang melakukan kemitraan pada tahun 2011 sebanyak 5 Industri, maka capaian indikatornya melebihi target.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Potensi Sektoral Daerah

2.4.1.1. Pertanian

Secara umum sektor pertanian merupakan salah satu kegiatan yang banyak digeluti oleh penduduk di Kota Cilegon. Kawasan pertanian yang cukup potensial di Kota Cilegon tersebar di wilayah selatan sekitar jalan regional Cilegon-Anyer dan di wilayah utara sekitar jalan regional Cilegon-Merak.

Potensi komoditi pertanian yang dimiliki Kota Cilegon diantaranya adalah padi, palawija, mentimun dan pisang, yang umumnya merupakan tanaman hasil perkebunan rakyat. Lahan pertanian padi, sebagian besar merupakan sawah yang masih dikelola secara tradisional yakni mengandalkan pengairan dari tadah hujan.

Tabel 2.26
Produksi Menurut Jenis Tanaman
di Kota Cilegon Tahun 2006-2011 (Ton)

Komoditas	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Padi sawah	18.956	18.134	19.215	18.107	15.468	14.747
Ketela Pohon	2.882	1.764	2.532	1.597	2.019	1.573
Ketela Rambat	122	422	948	450	762	489
Kacang Tanah	-	7.694	7.205	6.876	5.723	3.120
Jagung	-	156	348	177	63	54
Kacang Hijau	-	78	99	124	64	60

Sumber : Diolah dari Cilegon Dalam Angka Tahun 2006-2011

Tabel 2.27
Luas Panen Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman
di Kota Cilegon Tahun 2006-2011 (Ha)

Komoditas	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Mangga	6.255	9.568	13.240	26.302	8,905	35,817
Rambutan	318	478	-	1.248	525	394
Jeruk	394	139	-	144	50	28
Jambu Biji	792	1.137	-	3.656	1,255	2,041
Durian	1.047	1.403	-	377	729	2,225
Pepaya	754	574	1.035	2.270	801	2,160
Pisang	-	18.993	103.519	23.431	10,535	71,238
Alpoket	28	26	-	153	61	128
Nangka	382	683	750	747	366	418
Sawo	172	-	767	1.020	423	651

Sumber : Diolah dari Cilegon Dalam Angka Tahun 2006-2012

2.4.1.2. Perdagangan

Kegiatan perdagangan di Kota Cilegon dicirikan dengan adanya perdagangan tradisional dan modern. Perdagangan tradisional umumnya berupa perdagangan pada pasar-pasar tradisional yang banyak tersebar di Kota Cilegon, diantaranya Pasar Baru, Pasar Kelapa, Pasar Kranggot, Pasar Merak, dan Pasar Cigading. Adapun kegiatan perdagangan modern lokasinya lebih terkonsentrasi di sekitar pusat Kota Cilegon, berupa pasar-pasar swalayan skala besar dan juga mall.

Kegiatan perdagangan di Kota Cilegon dicirikan dengan adanya perdagangan tradisional dan modern. Perdagangan tradisional umumnya berupa perdagangan pada pasar-pasar tradisional yang banyak tersebar di Kota Cilegon, diantaranya Pasar Baru, Pasar Kelapa, Pasar Kranggot, Pasar Merak, dan Pasar Cigading. Adapun kegiatan perdagangan modern lokasinya lebih terkonsentrasi di sekitar pusat Kota Cilegon, berupa pasar-pasar swalayan skala besar dan juga mall.

Tabel 2.28
Jumlah Perusahaan Perdagangan Nasional Terdaftar
di Kota Cilegon Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jenis Perdagangan			Jumlah
		Besar	Menengah	Kecil	
1.	Ciwandan	72	18	10	100
2.	Citangkil	100	16	6	122
3.	Pulomerak	74	14	4	92
4.	Grogol	92	28	7	127
5.	Purwakarta	92	25	12	129
6.	Cilegon	94	24	10	128
7.	Jombang	178	42	17	237
8.	Cibeber	88	22	7	117
TOTAL		790	189	73	1052

Sumber : Diolah dari Cilegon Dalam Angka Tahun 2012

2.4.1.3. Industri

Secara historis, pada awalnya Kota Cilegon merupakan wilayah pertanian, namun semenjak dijadikan kawasan industri berat dan menengah yakni dengan didirikannya industri baja Krakatau Steel, perlahan-lahan kegiatan pertanian tergeser dan semakin menyempit. Jenis industri yang banyak didirikan di Kota Cilegon, secara umum dapat dikategorikan kedalam 3 jenis industri, yaitu industri baja, industri non baja dan industri kecil (*home industry*).

Kelompok industri baja umumnya merupakan industri-industri yang memanfaatkan material baja kasar (*crude steel*) untuk diolah menjadi produk atau barang jadi. Beberapa produk dari industri-industri ini diantaranya adalah baja konstruksi, pipa baja, plat baja, perkakas rumah tangga, dan lain-lain. Kelompok industri ini sebagian besar berlokasi terpusat di sekitar kawasan industri terpadu PT. Krakatau Steel (KIEC).

Kelompok industri non baja yang terdapat di Kota Cilegon diantaranya adalah jenis industri kimia dan pengolahan bahan tambang. Industri ini sebagian besar berkembang di sepanjang pantai Selat Sunda dengan memanfaatkan jasa angkutan laut untuk mendistribusikan dan memasarkan produknya.

Tabel 2.29
Potensi Kawasan Industri di Kota Cilegon
Tahun 2011

No.	Pengelola Kawasan	Potensi Kawasan (Ha)	Terjual (Ha)	Belum Terjual (Ha)
1.	Kawasan Krakatau Industrial Estate (KIEC) I	550,00	330,80	219,20
2.	Kawasan Krakatau Industrial Estate (KIEC) II	80,90	37,60	43,30
3.	Kawasan Panca Puri			
4.	PT. Cipta Niaga Internasional			
5.	Kawasan Peni			
	JUMLAH	630,90	368,40	262,50

Sumber : Diolah dari Cilegon Dalam Angka Tahun 2012

Kelompok industri kecil merupakan jenis industri yang banyak digeluti oleh masyarakat, yakni kelompok industri skala kecil yang masih menggunakan teknologi sederhana. Pada umumnya kegiatan industri ini lokasinya berbaur dengan permukiman masyarakat (*home industry*). Beberapa jenis industri ini diantaranya adalah industri genteng/batu bata, industri makanan/minuman, industri kapur, dan lain-lain.

2.4.1.4. Pariwisata

Kegiatan pariwisata di Kota Cilegon umumnya didominasi oleh kegiatan wisata bahari yang banyak tersebar di sepanjang pesisir pantai. Salah satu objek wisata yang telah dikelola secara baik dan didukung oleh fasilitas yang memadai berupa hotel berbintang yakni pantai Pulorida. Kawasan wisata ini cukup terkenal bahkan hingga ke mancanegara, karenanya kunjungan wisatawan (baik wisatawan domestik maupun mancanegara) ke kawasan ini cukup tinggi.

Tabel 2.30
Jumlah Hotel Menurut Klasifikasi di Kota Cilegon
Tahun 2011

No.	Kecamatan	Klasifikasi Hotel		Jumlah
		Berbintang	Melati	
1.	Ciwandan	-	2	2
2.	Citangkil	-	-	-
3.	Pulomerak	4	8	12
4.	Purwakarta	2	2	4
5.	Grogol	-	2	2
6.	Cilegon	-	-	-
7.	Jombang	1	4	5
8.	Cibeber	1	-	1
TOTAL		6	14	26

Sumber : Diolah dari Cilegon Dalam Angka Tahun 2012

2.4.2. Penataan Ruang

Arah dan kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan Kota Cilegon akan meliputi dua bentuk rencana penataan ruang, yaitu:

2.4.2.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kota Cilegon diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Pembagian wilayah kota dalam BWK (Bagian Wilayah Kota) serta fungsi pengembangannya masing-masing dalam lingkup kota.

Untuk mewujudkan struktur ruang, wilayah Kota Cilegon dibagi dalam 5 (lima) BWK yang masing-masing dilayani oleh satu sub pusat kota serta sesuai dengan karakteristik dan fungsi pengembangannya masing-masing. Pembagian wilayah kota ini adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Karakteristik dan Fungsi Pengembangan Wilayah dalam setiap BWK

BWK	Kelurahan	Luas BWK (Ha)	Pusat Pelayanan Kota/ Sub Pusat Pelayanan Kota	Fungsi Pengembangan	Skala Pelayanan
I	Kebonsari	3.731	Pusat Pelayanan Kota di sekitar Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan - Industri - Pelabuhan & Pergudangan - Pusat pemerintahan & Bangunan Umum - Perdagangan & jasa - RTH - Kawasan Lindung sekitar Waduk 	Kota
	Warnasari				
	Citangkil				
	Tamanbaru				
	Lebakdenok				
	Dringo				
	Samangraya				
	Kotasari				
	Ciwaduk				
	Kotabumi				
	Kebon Dalem				
	Ramanuju				
	Masigit				
	Jombang Wetan				
II	Gerem	2.954	Sub Pusat Pelayanan Kota 1 di sekitar Kelurahan Grogol	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan - Industri - Pelabuhan & Pergudangan - Perdagangan & Jasa - Kawasan lindung - RTH 	Lokal
	Rawa Arum				
	Grogol				
	Pabean				
	Tegal Bunder				
	Purwakarta				
III	Suralaya	1.986	Sub Pusat Pelayanan Kota 2 di sekitar Kawasan Terminal Terpadu Merak	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan - Industri - Pelabuhan & pergudangan - Perdagangan & Jasa - Kawasan terminal terpadu - Pariwisata - Kawasan Lindung - RTH 	Lokal
	Lebak Gede				
	Taman Sari				
	Mekarsari				
IV	Tegalratu	5.185	Sub Pusat Pelayanan Kota 3 di sekitar persimpangan jalan negara dengan jalan lingkaran selatan di Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pelabuhan & pergudangan - Kawasan Lindung - RTH - Perdagangan & Jasa - Perumahan 	Lokal
	Banjarnegara				
	Kubangsari				
	Kepuh				
	Gunungsugih				
	Randakari				

Sumber: RTRW Kota Cilegon, 2010

2) Sistem pusat pelayanan dalam bentuk hirarki atau tata jenjang dan jangkauan pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang akan dikembangkan.

Untuk melayani kegiatan perkotaan di tiap bagian wilayah kota (BWK) sesuai dengan arahan fungsi pengembangannya masing-masing, maka ditetapkan pusat-pusatnya. Pusat kota dan

sub pusat kota pada dasarnya merupakan lokasi berbagai jenis sarana/fasilitas perkotaan sesuai dengan skala pelayanannya masing-masing. Hirarki atau tata jenjang pusat-pusat kegiatan kota yang akan dikembangkan di wilayah Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

- **Pusat Pelayanan Kota**, dengan skala pelayanan kota dan regional. Pusat Pelayanan Kota untuk wilayah Kota Cilegon yaitu di sekitar Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pemerintahan serta perdagangan dan jasa.
- **Sub Pusat Pelayanan Kota**, dengan skala pelayanan bagian wilayah kota (BWK) yang mencakup beberapa kelurahan, baik yang berada pada kecamatan yang sama maupun di beberapa kecamatan yang berbatasan. Sub Pusat Pelayanan Kota ini meliputi:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota 1 (satu) di sekitar Kelurahan Grogol, melayani BWK II;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota 2 (dua) di sekitar Kawasan Terminal Terpadu Merak, melayani BWK III;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota 3 (tiga) di sekitar persimpangan Jalan Negara dengan Jalan Lingkar Selatan di kelurahan kepuh Kecamatan Ciwandan, melayani BWK IV; dan
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota 4 (empat) di sekitar persimpangan Jalan Negara dengan Jalan Lingkar Selatan di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber, melayani BWK V.
- **Pusat lingkungan**, dengan skala pelayanan Sub-BWK dan/atau kelurahan dan/atau lingkungan perumahan. Pusat-pusat ini meliputi:
 - a. Pusat lingkungan pada BWK 1 terdiri dari: Pusat lingkungan sekitar Jalan Lingkar Selatan (JLS) di Kelurahan Lebak Denok, Pusat lingkungan Kotasari, Pusat lingkungan Kotabumi, Pusat lingkungan Kebon Dalem, Pusat lingkungan sekitar Perumahan Metro, Pusat lingkungan sekitar Komplek Bonakarta, Pusat lingkungan sekitar Martapura, Pusat lingkungan sekitar Taman Raya Cilegon, dan Pusat lingkungan Jl. Kubang Laban.
 - b. Pusat lingkungan pada BWK 2 terdiri dari: Pusat lingkungan Gerem, Pusat lingkungan Rawaarum, Pusat Lingkungan Pabean, Pusat Lingkungan Tegal Bunder, dan Pusat lingkungan Purwakarta.
 - c. Pusat lingkungan pada BWK 3 terdiri dari: Pusat lingkungan Suralaya, Pusat lingkungan Lebakgede, dan Pusat lingkungan Tamansari.
 - d. Pusat lingkungan pada BWK 4 terdiri dari: Pusat lingkungan sekitar Cigading.

- e. Pusat lingkungan pada BWK 5 terdiri dari: Pusat lingkungan sekitar Perumahan Taman Cilegon Indah, Pusat lingkungan sekitar Mahkota Mas, Pusat lingkungan sekitar Perumnas, Pusat lingkungan sekitar PCI, Pusat lingkungan sekitar Perum Bumi Rakata, Pusat lingkungan sekitar Jerang, Pusat lingkungan sekitar Kantor Kelurahan Bagendung, Pusat lingkungan sekitar Krotek-Bentola, Pusat Lingkungan sekitar Komplek Griya Praja Mandiri, Pusat lingkungan sekitar Lebak Waluh-Jeruk Tipis, dan Pusat lingkungan sekitar Kantor Kelurahan Cikerei.
- 3) Sistem jaringan prasarana kota yang meliputi sistem jaringan transportasi yang merupakan sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya yang merupakan sistem jaringan prasarana pelengkap yang meliputi sistem prasarana utama (jaringan transportasi darat dan laut) dan sistem prasarana lainnya (jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air, persampahan, drainase, pengelolaan limbah, pedestrian, dan pemadam kebakaran).

2.4.2.2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kota Cilegon meliputi dua fungsi utama kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1) Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Rencana pengelolaan kawasan lindung Kota Cilegon yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang kelestarian lingkungan meliputi:

1. Kawasan Hutan yang meliputi hutan lindung sebagai kawasan preservasi dan hutan produksi di sekitar Kecamatan Purwakarta yang berperan pula dalam hal konservasi.
2. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang meliputi Gunung Gede pada bagian Utara Kota Cilegon serta perbukitan di Kelurahan Gunung Sugih dan Kepuh. Rencana pengelolaan kawasan ini meliputi:
 - a. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b. Memperbanyak keragaman tanaman pohon; dan
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Kawasan perlindungan setempat yang meliputi jalur sempadan pantai, jalur sempadan sungai, kawasan sekitar Waduk Krenceng dan Situ Rawa Arum, kawasan sekitar mata air Ciputri di Kelurahan Cikerei Kecamatan Cibeber, kawasan di bawah SUTT dan SUTET. Rencana pengelolaan kawasan ini adalah:
 - a. Penanaman vegetasi jenis tanaman keras;

- b. Memperbanyak keragaman tanaman pohon; dan
 - c. Menata dan mengamankan kawasan perlindungan setempat tetap sesuai dengan fungsinya.
 - d. Kawasan RTH meliputi RTH hutan kota; RTH taman kota; RTH taman lingkungan; RTH Tempat Pemakaman Umum; RTH lapangan olahraga; RTH kawasan pertanian; RTH benteng alam/mitigasi bencana; RTH jalur hijau jalan, jalan bebas hambatan, dan jalur kereta api; serta *green belt* kawasan industri.
4. Kawasan pelestarian alam yang meliputi Pulau Ular, Pulau Merak Besar, dan taman wisata alam yang dikembangkan di Gunung Gede Kecamatan Pulomerak, dengan rencana pengelolaan adalah menjaga dan melestarikan keberlangsungan keanekaragaman hayati.
 5. Kawasan cagar budaya yang mencakup obyek cagar budaya dan kawasan sekitarnya.
 6. Kawasan rawan bencana alam yang terdiri atas kawasan rawan tsunami dan kawasan rawan bahaya industri kimia yaitu di sekitar Kecamatan Pulomerak, Grogol, Citangkil dan Ciwandan, dengan rencana pengelolaan adalah:
 - a. Melaksanakan penanaman di sekitar pesisir pantai dengan tanaman yang berfungsi sebagai penahan gelombang; dan
 - b. Membangun benteng alam sebagai penyangga antara kawasan industri dan kawasan permukiman.

2) Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Pengembangan kawasan budi daya di Kota Cilegon diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan berdasarkan kesesuaian lahan potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan (permukiman, industri dan kawasan fungsional lainnya). Pengelolaan kawasan budi daya perkotaan ini dilakukan dengan prinsip:

- a. Membatasi perkembangan kawasan perkotaan untuk tidak meluas secara ekspansif dan tidak beraturan;
- b. Mengintegrasikan fungsi pengembangan kawasan-kawasan yang telah berkembang;
- c. Mengantisipasi perkembangan kegiatan di masa mendatang yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk wilayah yang berbatasan.

Kawasan budi daya perkotaan yang akan dikembangkan di wilayah Kota Cilegon didasarkan pada fungsi utama untuk dibudidayakan sebagai kegiatan perkotaan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Sedangkan

rencana pola ruang kawasan budi daya adalah sebagai upaya untuk mengendalikan alih fungsi bangunan dan guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta mendorong perkembangan kawasan budi daya yang sesuai dengan rencana tata ruang.

1. Kawasan Perumahan

Jumlah penduduk Kota Cilegon tahun 2029 diperkirakan mencapai 412.494 jiwa dan sebagian besar akan tinggal di wilayah yang didelineasi sebagai kawasan perkotaan. Dalam kaitan inilah pengembangan kawasan perumahan lebih diarahkan untuk mengakomodasikan kebutuhan perumahan perkotaan. Di luar kawasan perkotaan, kebutuhan perumahan pada dasarnya berada di kawasan yang didelineasikan sebagai kawasan perdesaan, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan pertanian. Beberapa arahan dalam pengelolaan kawasan perumahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan perumahan baru diarahkan untuk terlebih dahulu memanfaatkan kawasan pertanian lahan kering, dengan asumsi bahwa dalam jangka waktu perencanaan RTRW (20 tahun) belum seluruh wilayah Kota Cilegon akan berubah menjadi kawasan perkotaan.
- b. Pengembangan fasilitas dan utilitas pendukung yang memadai untuk melayani kebutuhan penduduk di kawasan perumahan yang telah ada.
- c. Dengan adanya kecenderungan penggunaan lahan campuran (*mixed use*), diperlukan rencana pemanfaatan ruang dalam skala yang lebih detail dari kawasan-kawasan perumahan yang mempunyai perkembangan pesat.

Dalam hal pengembangan kawasan perumahan, kepadatan unit hunian dibagi menjadi tiga interval, yaitu: (1) Kepadatan tinggi: kepadatan bangunan antara 24-36 bangunan/Ha, dengan kepadatan penduduk rata-rata maksimum 180 jiwa/Ha; (2) Kepadatan sedang: kepadatan bangunan antara 12-24 bangunan/Ha dengan kepadatan penduduk rata-rata maksimum 120 jiwa/Ha; dan (3) Kepadatan rendah : kepadatan bangunan <12 bangunan/Ha dengan kepadatan penduduk rata-rata maksimum 60 jiwa/Ha. Dengan demikian rencana pengembangan kawasan perumahan meliputi:

- a. Kepadatan bangunan tinggi, sudah perlu dipertimbangkan terutama untuk Kecamatan Jombang dan Cilegon. Kepadatan bangunan sedang ditetapkan untuk Kecamatan Pulomerak, Purwakarta, Cibeber, dan Citangkil. Sedangkan kepadatan bangunan rendah masih dapat ditetapkan di Kecamatan Grogol dan Ciwandan.
- b. Pada kawasan yang ditetapkan berkepadatan sedang sampai tinggi dapat dikembangkan perumahan secara vertikal kecuali pada kawasan yang ditetapkan sebagai cagar budaya dan/atau kapasitas prasarananya terbatas dan/atau tingkat pelayanan jalannya rendah serta harus mempertimbangkan daya dukung tanah

berdasarkan hasil studi kelayakan.

- c. Perumahan atau rumah yang sudah ditetapkan menjadi kawasan atau objek cagar budaya tetap dipertahankan dalam kerangka perlindungan cagar budaya.
- d. Peremajaan kota dan pembangunan kembali kota pada beberapa lingkungan yang menurun kualitasnya.
- e. Permukiman yang berada pada kawasan perdesaan lokasinya menyebar di bagian pinggiran wilayah Kota Cilegon dan bercampur/menyatu dengan kawasan pertanian. Kawasan permukiman perdesaan ini terutama untuk mengakomodasi masyarakat/penduduk Kota Cilegon yang belum terlibat dalam kegiatan perkotaan (industri, dsb) serta masih memiliki kultur kegiatan pertanian. Untuk mendorong pengembangan perumahan terutama pada lokasi pertanian lahan kering terlebih dahulu dan dapat menggunakan pola kasiba dan lisiba yang berdiri sendiri yaitu berada pada wilayah Cilegon Timur (BWK V) dan Selatan (BWK I).
- f. Untuk kawasan perumahan/permukiman yang berkembang pada kawasan yang bukan peruntukannya secara bertahap harus keluar/pindah dari kawasan tersebut. Seperti pada lokasi kawasan perumahan/permukiman yang berada dalam peruntukan kawasan perindustrian maka akan dilakukan kegiatan relokasi secara bertahap.

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kecenderungan perkembangan kegiatan perdagangan di Kota Cilegon mengikuti perkembangan perilaku sosial ekonomi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan tersebut, perlu direncanakan pengadaan jenis fasilitas perdagangan yang dibutuhkan masyarakat mencakup fasilitas pasar baik skala kota (regional) maupun lingkungan (lokal), pusat-pusat perbelanjaan/swalayan, dan pertokoan. Dalam penempatannya, fasilitas pertokoan yang mendukung permukiman akan dilokasikan berdasarkan sebaran permukiman penduduk. Adapun fasilitas pasar yang memiliki jangkauan regional akan dilokasikan tidak berjauhan dengan keberadaan terminal. Dengan adanya penempatan-penempatan fasilitas perdagangan tersebut, diharapkan pusat kegiatan baru dapat tumbuh di kawasan tersebut maupun di sekitarnya sehingga mengurangi beban kegiatan dan kepadatan pada kawasan pusat kota.

Kawasan perdagangan dan jasa, terutama yang terdapat di pusat Kota Cilegon dan Merak sepanjang jalan arteri primer, merupakan pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan jangkauan pelayanan regional di samping pelayanan lokalnya. Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada penetapan spesialisasi/kekhasan jenis kegiatan perdagangan dan jasa pada suatu lokasi/sub kawasan. Dengan demikian akan memudahkan pengelolaan/penataan subsub kawasan tersebut yang pada akhirnya

akan menentukan citra pusat kota secara keseluruhan. Rencana pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa ini meliputi :

- a. Pengembangan pasar induk grosir/perkulakan di Koridor Jalan Lingkar Selatan dan Pusat Sekunder Cilegon Timur.
- b. Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai peruntukannya di seluruh kecamatan.
- c. Relokasi pasar lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya dalam rencana tata ruang.
- d. Perkembangan pusat belanja yang sudah ada harus dikendalikan dan pengembangan selanjutnya diarahkan ke wilayah Cilegon Timur (BWK V), Selatan (BWK I dan IV), serta Utara (BWK II).
- e. Pembatasan perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor sesuai peruntukannya.
- f. Mengembangkan dan memprioritaskan kegiatan jasa profesional (pengacara, dokter, psikolog, dan sejenisnya); jasa perdagangan (kegiatan ekspor-impor, perdagangan berjangka, dan sejenisnya); dan jasa keuangan (perbankan, asuransi, lembaga keuangan non-bank, pasar modal, dan sejenisnya) ke wilayah Pusat Kota Cilegon dan Cilegon Timur.
- g. Memprioritaskan pengembangan kegiatan jasa profesional; jasa perdagangan; jasa pariwisata (agen dan biro perjalanan, penginapan, dan sejenisnya); dan jasa keuangan di wilayah Cilegon Timur, Cilegon Selatan (Jalan Lingkar Selatan), dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya.
- h. Membatasi konsentrasi perkantoran jasa di wilayah Pusat Kota Cilegon, khususnya kawasan inti pusat kota.

3. Kawasan Perindustrian

Sesuai dengan salah satu fungsi kota, pengembangan kawasan perindustrian dalam suatu areal tersendiri di Kota Cilegon merupakan suatu kebutuhan. Hal ini dapat diakomodasikan baik dalam bentuk kawasan industri bermanajemen (*industrial estate dan kompleks industri*) atau pemusatan industri dalam suatu lahan peruntukan industri. Kawasan perindustrian dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya. Kawasan Industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri (KI). Di dalam KI tidak diharuskan adanya keterkaitan usaha antar pengusaha industri, melainkan dapat saling

independen. Pengadaan suatu KI pada dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam memperoleh lokasi tanah matang bagi industri yang akan didirikannya. Dalam hal ini di Kota Cilegon, kawasan industri dalam pengertian ini terutama diarahkan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri sehingga lebih mudah dalam mengawasi dan mengendalikan perkembangannya. Kawasan tersebut diperkirakan akan cukup menampung pengembangan industri baru, sehingga tidak ada pembangunan industri baru diluar kawasan industri yang telah direncanakan.

Mengingat kegiatan yang terjadi dalam kawasan industri merupakan kegiatan yang menimbulkan polutan serta memerlukan perlakuan pengamanan khusus, maka rencana pengelolaan kawasan industri ini meliputi :

- a. Mengembangkan kawasan perindustrian di Kecamatan Ciwandan dan Pulomerak yang ramah lingkungan;
- b. Industri kecil dan menengah yang ada di lingkungan permukiman dapat dipertahankan selama tidak menimbulkan dampak negatif dan kedepannya diusahakan untuk diaglomerasikan dalam 1 (satu) kawasan industri tertentu dengan alokasi ruang di Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Cibeber, dan Kecamatan Jombang. Kawasan industri untuk usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki ketentuan luasan adalah minimal 5 (lima) hektar;
- c. Industri yang berada bukan pada peruntukannya harus keluar secara bertahap; dan
- d. Kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan diarahkan untuk mengelola dan memantau limbahnya lebih intensif dan/atau dialihfungsikan menjadi kegiatan jasa.

Untuk pengembangan kawasan industri diperlukan rencana tata ruang yang lebih rinci/teknis mengenai pemanfaatan ruang di dalam kawasannya dengan tetap memperhatikan keberadaan kawasan-kawasan fungsional lain disekitarnya serta pembangunan sentra industri terpadu, baik kegiatan industri maupun pemasaran hasil produksi. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan bahaya atau kondisi di luar dugaan, terutama pada industri-industri kimia, diperlukan upaya-upaya penanggulangan serta fasilitas-fasilitas pendukung yang meliputi:

- a. Pengembangan jalan alternatif yang siap digunakan.
- b. Pengembangan fasilitas hidran, sumber-sumber air dan sarana penunjang lainnya (*fire truck, ambulance*) untuk penanggulangan bahaya kebakaran.
- c. Diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota Cilegon beserta instansi-instansi terkait dengan industri yang bersangkutan.
- d. Diperlukan kajian serta rencana yang lebih rinci/teknis mengenai upaya-upaya penanggulangan bahaya serta fasilitas pendukung yang diperlukan.

Untuk industri-industri yang berlokasi di kawasan non-KI, yakni di lahan peruntukan industri, terutama yang lokasinya berhampiran dengan jaringan jalan primer, diperlukan rencana serta upaya-upaya penanganan yang seksama untuk mengamankan kegiatan serta instalasi-instalasi industri di dalamnya dari kemungkinan terjadinya bahaya yang diakibatkan kegiatan lalu lintas yang terjadi disekitarnya. Kemudian mengingat masih sering terjadi konflik antara kegiatan industri dan kegiatan hunian, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka diperlukan perencanaan pembangunan kawasan industri yang aman, layak, kompetitif, dan jauh dari permukiman.

4. Kawasan Pelabuhan dan Pergudangan

Kawasan pelabuhan di Kota Cilegon terdiri dari 3 (tiga) pelabuhan pengumpul dan 17 (tujuh belas) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Pengembangan kawasan pelabuhan di Kota Cilegon meliputi:

a) Kawasan Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batasan tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Dalam kaitan ini pelabuhan pengumpul diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.

Pelabuhan pengumpul yang selama ini terdapat di Kota Cilegon meliputi pelabuhan PT. Pelindo II, Pelabuhan PT. Krakatau Bandar Samudera, dan Pelabuhan PT. Indah Kiat. Selain ketiga pelabuhan tersebut, akan dikembangkan pelabuhan baru di Wilayah Kubang Sari, yang berlokasi di samping kanan dermaga milik PT. Krakatau Bandar Samudera.

Dalam konteks pengembangan pelabuhan-pelabuhan itulah dipandang perlu untuk menata lebih lanjut kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan pergudangan sebagai fasilitas penunjangnya. Dengan menjadikan-nya sebagai suatu kawasan, maka pelabuhan dapat berperan sebagai :

1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya.
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional.
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi.
4. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan.
5. Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.

b) Kawasan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

Di luar pelabuhan umum, di Kota Cilegon terdapat 17 (tujuh belas) TUKS. Mengingat jumlahnya yang cukup banyak, maka diperlukan rencana pengelolaan:

- Pengembangan kegiatan dan kawasan pergudangan yang terpadu dengan kegiatan TUKS tersebut, terutama untuk mendukung kegiatannya sendiri serta cenderung berfungsi untuk dan sebagai pelabuhan pengumpul.
- Pembangunan dan pengembangan TUKS harus didasarkan guna mendukung penggerak perekonomian kota.
- Pembangunan dan pengembangan TUKS tersebut diharapkan tidak mengubah garis pantai (*shore line*) secara signifikan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan lain di sekitarnya.
- Untuk rencana pengembangan kawasan pergudangan yaitu dengan mengarahkan kegiatan pergudangan dan produksi yang non polutan dalam kawasan pelabuhan, selain itu kawasan pergudangan juga dikembangkan di sebelah Timur Kota Cilegon (BWK V) untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Bojonegara.

5. Kawasan Pemerintahan dan Bangunan Umum

Kawasan perkantoran pemerintahan skala kota yang akan dikembangkan, diharapkan dapat menjadi "*node*" bagi Kota Cilegon. Rencana pengembangan kawasan pemerintahan ini secara umum meliputi:

- a. Kawasan ini merupakan kawasan pemerintahan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum skala kota yang terpadu. Perkantoran pemerintah dan bangunan umum berskala nasional, provinsi, dan kota pada lokasi saat ini dipertahankan keberadaannya.
- b. Pengembangan kawasan pemerintahan dan bangunan umum baru di koridor Jalan Lingkar Selatan berfungsi sebagai kawasan cadangan pengembangan pusat pemerintahan dan bangunan umum Kota Cilegon. Kawasan ini direncanakan menjadi suatu kawasan perkantoran pemerintahan yang sekaligus menjadi pertanda (*landmark*) Kota Cilegon. Koridor Lingkar Selatan juga menandakan adanya ketersediaan akses jalan yang lebih banyak.
- c. Pengembangan kawasan pemerintahan dan bangunan umum diintegrasikan dengan pengembangan RTH dan taman kota sehingga tidak menimbulkan kesan ruang/kawasan pemerintahan yang kaku sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota dan menjadi salah satu pembentuk "wajah" Kota Cilegon.

Di luar kawasan pemerintahan yang terpusat dalam suatu lokasi, termasuk dalam kawasan pemerintahan adalah bangunan-bangunan umum yang lokasinya tersebar di berbagai

bagian wilayah kota sesuai dengan fungsinya sebagai pelayanan umum.

6. Kawasan Wisata

Kawasan wisata yang terdapat di wilayah Kota Cilegon adalah kawasan wisata bahari, wisata bangunan bersejarah, wisata industri, dan wana wisata. Kawasan wisata bahari diantaranya adalah Pantai Pulorida, termasuk di dalamnya pulau-pulau di sekitarnya. Selain itu ada juga Kawasan pantai yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari yaitu Pulau Rida dan Pulau Merak Kecil serta kawasan pantai di Kelurahan Mekarsari dan Lebak Gede sampai dengan Suralaya di Kecamatan Pulomerak. Pengembangan kegiatan wisata di kawasan ini dapat sekaligus merupakan upaya penataan kembali lingkungan permukiman yang telah berbaur dengan kegiatan-kegiatan perkotaan lainnya sehingga terkesan kumuh.

Kawasan wisata bangunan bersejarah adalah berupa objek cagar budaya di Kota Cilegon antara lain:

- Kampung Pakuncen yang merupakan Kompleks Bangunan Periodisasi Kolonial (Dusun Pakuncen) di Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon.
- Stasiun KA Cilegon yang merupakan Stasiun KA kolonial di Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang.
- Rumah Kuno Temu Putih yang merupakan bangunan kolonial di Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon.
- Stasiun KA Krenceng yang merupakan Stasiun KA kolonial di Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Citangkil.
- Kampung Ciwedus yang merupakan kompleks bangunan kolonial di Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon.
- Kampung Temu Putih yang merupakan kompleks bangunan kolonial di Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon.
- Bekas Kantor dan Rumah Asisten Residen Gubbels yang merupakan bangunan periodisasi kolonial di Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang.
- Makam Kyai Haji Wasid yang merupakan makam kuno pada masa periodisasi Islam di Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang.

Sedangkan untuk wisata industri banyak sekali potensi yang dapat dijadikan objek wisata diantaranya kawasan PLTU Suralaya di Kecamatan Pulomerak, Kawasan Industri PT. Krakatau Steel dan PT. KIEC di Kecamatan Citangkil.

Selain itu, ada juga kawasan lain yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata yaitu kompleks perbukitan kawasan Gunung Gede (Desa Wisata Cipala). Mengingat kawasan ini secara normatif merupakan kawasan lindung, maka kegiatan wisata yang sesuai untuk dikembangkan adalah kegiatan wisata hutan (wana wisata).

Berdasarkan uraian di atas, maka arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata meliputi:

- Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah yang ada.
- Mempertahankan objek wisata budaya di lokasi yang ada.
- Memberdayakan industri yang ada sebagai objek wisata.
- Mempertahankan obyek rekreasi yang ada dan mengembangkan obyek rekreasi baru di wilayah Cilegon Utara (BWK II dan III).
- Melengkapi objek wisata dan rekreasi dengan fasilitas penunjang.
- Melibatkan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan wisata.
- Untuk tempat hiburan khusus keberadaannya akan dikendalikan, dibatasi, dan/atau dilarang yaitu dengan mengalokasikan pada lokasi tertentu serta pelarangan pada lokasi di sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan permukiman penduduk.

7. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya berada pada Pusat Sekunder Cilegon Timur di Kecamatan Jombang dan Cibeber. Kegiatan yang dikembangkan dalam kawasan ini pada dasarnya merupakan penggunaan campuran (*mixed use*). Berdasarkan karakteristiknya, pengelolaan kawasan ini meliputi:

- Mengembangkan kegiatan campuran yang mencakup kegiatan perumahan didalam kawasan komersial (fasilitas rumah toko, grosir, perkulakan), jasa, kegiatan perkantoran, kegiatan industri, serta terminal.
- Dalam pengembangan kawasan ini harus tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan permukiman di sekitarnya.

8. Kawasan Terminal Terpadu

Kawasan terminal terpadu dengan luas 32 Ha dan berlokasi di Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak, memiliki rencana pengembangan yang meliputi :

- Mengalokasikan ruang dan membangun kawasan perniagaan dalam kawasan terminal terpadu.

- Mengalokasikan ruang dan membangun dermaga baru dalam kawasan terminal.
- Mengalokasikan ruang bagi stasiun kereta di luar kawasan pelabuhan penyeberangan.
- Mengalokasikan ruang untuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

9. Kawasan Pertambangan Batuan

Kegiatan pertambangan batuan di wilayah Kota Cilegon pada umumnya berada di kawasan perbukitan yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang tinggi. Untuk itu pengelolaan kawasan ini meliputi:

- Kegiatan pertambangan yang dilakukan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip teknik penambangan, kapasitas yang diperkenankan, aspek kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan kawasan di sekitarnya. Kegiatan penambangan yang dilakukan tidak diperkenankan untuk menggali dasar tanah, maksimal sampai rata dengan permukaan tanah disekitarnya sehingga kawasan pertambangan yang sudah habis dapat dimanfaatkan untuk perluasan kawasan kegiatan perkotaan.
- Pengawasan secara intensif oleh aparat instansi yang berwenang terhadap kegiatan penambangan galian batu. Diperlukan kajian dan rencana yang lebih mendalam seksama dalam hal pemanfaatan lahan bekas pertambangan galian batu untuk kegiatan perkotaan.

Analisis zonasi telah dilakukan untuk mengetahui jenis dan penyebaran bahan galian batu, mengetahui potensi bahan galian batu, mengetahui kualitas bahan galian dan menetapkan zonasi bahan galian yang layak tambang. Berdasarkan kondisi geologi potensi galian batu di Kota Cilegon terdiri atas batu andesit, tanah urug, dan pasir. Potensi dijumpai di hampir seluruh kecamatan dengan potensi bervariasi.

Penentuan pembagian zona kawasan pertambangan didasarkan pada : kemiringan lereng, daerah permukiman, daerah industri, dan fasilitas umum (jalan raya, jalan kereta, dan jalur listrik). Berdasarkan hal tersebut terbagi tiga zona yaitu:

- **Zona kawasan pertambangan I** yaitu daerah berpotensi galian tinggi dan kemungkinan penambangan berdampak lingkungan kurang berarti.
- **Zona kawasan pertambangan II** yaitu daerah yang mengandung bahan galian berpotensi ekonomi namun memberikan dampak terhadap lingkungan sehingga penambangan perlu penanganan.
- **Zona kawasan pertambangan III** yaitu potensi galian dijumpai namun penambangan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berat dan tidak mudah ditanggulangi secara teknologi .

Tabel 2.32
Potensi dan Zonasi Bahan Tambang Galian Batuan di Kota Cilegon

Kecamatan	Jenis Batuan	Lokasi	Luas sebaran/Cadangan Tereka
Pulomerak	Andesit	-	Luas sebaran 8.670.000 m2, berdasarkan kontur topografi diperkirakan cadangan yang dapat diambil sebesar 30% yaitu 292.612.500, maka cadangan tereka 29..261..250 m3.
Grogol	Andesit-Basal	Kelurahan Grogol, Gerem	Luas 5.200.000 m2 dengan volume cadangan 187.200.000 m3 dan cadangan tereka 18.720.000 m3.
Purwakarta	Andesit-Basal	Daerah Pabean, Tegalbunder, sebagian Kelurahan Purwakarta dan Kotabumi.	Luas penyebaran batuan 4.400.000 m2 dengan cadangan tereka 15.840.000 m3
Jombang	-		
Cibeber	Tanah urug	Kelurahan Bulakan, Cikera	Luas sebaran 1.700.000 m2 dengan cadangan tereka 3.400.000 m3
		Daerah Bulakan	Luas sebaran 1.400.000 m2 dengan cadangan tereka 56.000.000 m3
Cilegon	Pasir	Kelurahan Bagendung	Luas 2.100.000 m2 dengan ketebalan 44 m, dengan jumlah cadangan tereka 92.400.000 m3.
	Tanah urug	-	Luas sebaran 1.000.000 m2 dengan jumlah cadangan tereka 2.000.000 m3
Citangkil	Tanah urug	Dringo	Luas 300.000 m2 dengan

Kecamatan	Jenis Batuan	Lokasi	Luas sebaran/Cadangan Tereka
			perkiraan cadangan tereka 600.000 m2
Ciwandan	Andesit	Daerah Pasir Merengmang, Pasir Praha, dan Pasir Kirijal.	Perkiraan cadangan tereka sebesar 378.000.000 m3 dan besaran layak ditambang sebesar 37.800.000 m3
		Kp.Gobang	Cadangan 19.260.000m3 dan dapat ditambang 1.926.000 m3
	Tanah urug	Kp.Ciromo, Sambironyok, dan Cigobang	Luas sebaran 3.400.000m2 dengan cadangan tereka 6.800.000 m3

Sumber: Analisa Potensi dan Zonasi Bahan Tambang Galian Batuan Kota Cilegon, 2006

Kualitas bahan tambang berdasarkan uji material di lokasi penambangan disimpulkan:

- Material (agregat halus) dari wilayah Kelurahan Bagendung (Kecamatan Cilegon) dapat digunakan untuk lapis permukaan jalan (latasir, macadam, dan laston) dan campuran beton.
- Material (agregat kasar) dari Kelurahan Bagendung dapat digunakan untuk lapis permukaan jalan (burtu, latasir, buras, macadam, dan laston).
- Material dari Kelurahan Pabean (Kecamatan Purwakarta) dapat digunakan untuk lapis permukaan jalan (latasir, buras, macadam, dan laston), campuran beton dan filter media.
- Material dari Kelurahan Gerem (Kecamatan Grogol) dapat digunakan untuk lapis permukaan jalan (buras, latasto, dan macadam), campuran beton, dan filter media.
- Material dari Kelurahan Lebakgede (Kecamatan. Pulomerak) dapat digunakan untuk lapis permukaan jalan (buras, latasto, dan macadam), campuran beton, filter media, dan perkerasan jalan.
- Material dari Kelurahan Tegalratu (Kecamatan Ciwandan) dapat digunakan untuk lapis permukaan jalan (burtu, latasir, buras, macadam, dan laston), campuran beton, dan filter media.

Rekomendasi studi:

- (a) Seluruh potensi bahan galian perlu dilakukan pemilihan yang cermat daerah-daerah yang dikembangkan atau ditetapkan sebagai wilayah pengusahaan pertambangan;

- (b) Dalam penambangan diperlukan penanganan yang baik secara teknis maupun penanganan lingkungannya; dan
- (c) Untuk mengetahui lebih rinci cadangan potensi perlu penelitian dengan metode geologi (pemetaan detail batuan dan bahan galian). Metode geofisika (geolistrik untuk menentukan perlapisan dan ketebalan) dan pemboran uji geologi.
- (d) Adanya penetapan zonasi potensi air tanah yang dapat dieksploitasi untuk kegiatan komersial.

Dasar pertimbangan:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa serta meningkatnya jumlah penduduk sehingga kebutuhan air baku akan meningkat pula;
 2. Penyediaan air baku dari air permukaan (PT.KTI dan PT.PDAM);
 3. Pengeksplotasian air tanah di Kota Cilegon harus terkendali mengingat Kota Cilegon berada di pantai (Selat Sunda), pengeksplotasian air tanah yang tidak terkendali akan berakibat intrusi air laut dan berakibat amblesnya suatu wilayah;
 4. Hasil kajian DLHPE Tahun 2002 (Peta Potensi Air Tanah di Wilayah Kota Cilegon).
- (e) Adanya penetapan lokasi “Penambangan Terbatas” untuk batuan andesit di Wilayah Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Ciwandan.

Dasar pertimbangan:

1. Penambangan batuan andesit selain pemanfaatan batuan tersebut untuk kegiatan ekonomi diharapkan lokasi pasca tambang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur kegiatan industri, perdagangan dan jasa, mengingat adanya keterbatasan ruang untuk pembangunan infrastruktur tersebut;
2. Gunung/bukit batuan andesit tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tanaman dan penghijauan mengingat lapisan top soilnya yang tipis bahkan tidak ada sama sekali.

10. Ruang Terbuka Non-Hijau

Ruang terbuka non hijau di Kota Cilegon meliputi:

- a. Waduk Krenceng dengan luasan + 95,75 hektar di Kelurahan Citangkil, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Lebak Denok, dan Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil; dan
- b. *retention pond* atau danau atau situ dengan luasan + 11,85 hektar di Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol.

Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau ini yaitu:

- a. menyusun rencana aksi pengembangan danau/situ Rawa Arum, rumusan fungsi utama pelayanan, sampai pada tahap penyusunan DED perluasan. Deliniasi perluasan *pond* disesuaikan dengan kajian debit air dan analisis daerah tangkapan air hujan (*catchment*

- area), kajian geologi/topografi, dan kajian lingkungan. Hasil deliniasi tersebut akan dijadikan dasar dalam pembebasan lahan;
- b. menyediakan dan membangun danau-danau (*retention pond*) di dalam kawasan permukiman dan kawasan perindustrian;
 - c. membuat saluran-saluran air menuju badan *pond* disesuaikan dengan topografi dan kecenderungan arah aliran air. Saluran ini dilengkapi dengan *peripheral treatment/filter* yang masuk ke badan *pond*; dan
 - d. Menyiapkan daerah/koridor penyangga dari bibir waduk/danau/situ sebagai RTH.

11. Ruang Evakuasi Bencana

Untuk ruang evakuasi bencana ditetapkan lokasinya berupa RTH sehingga diharapkan tidak akan ada rencana pembangunan pada lokasi tersebut. Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan maka rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana meliputi:

- c. penetapan lokasi posko utama dan alternatif di Kecamatan Jombang, Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Cibeber;
- d. penetapan tempat penampungan sementara di Lingkungan Ciromo, Kawasan Industri Gunung Leneng, dan lapangan terbuka Perumahan Palm Hill; dan
- e. penetapan 15 (lima belas) titik lokasi evakuasi bencana pada beberapa tempat di Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Pulomerak.

12. Sektor Informal

Untuk kegiatan sektor informal lokasinya ditetapkan berada pada peruntukan kawasan perdagangan dan jasa dengan kriteria meliputi:

- a. penetapan lokasi kegiatan informal pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. pengelolaan kegiatan UKL, minimum meliputi ketentuan pendaftaran UKL resmi, penetapan lokasi dan jenis usaha/dagangan, hak dan kewajiban, serta besarnya iuran/retribusi;
- c. menyediakan ruang untuk kegiatan pedagang kaki lima di dalam suatu pusat perbelanjaan formal;
- d. Penertiban UKL secara konsisten (jangka pendek, menengah, panjang); dan
- e. Pembatasan ruang publik (jalan atau taman) yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan pedagang kaki lima.

13. Peruntukan Pelayanan Umum

Yang dimaksud dengan pelayanan umum meliputi semua fasilitas umum yang dibutuhkan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga.

a. Pendidikan

Kebutuhan fasilitas pendidikan didasarkan pada jumlah penduduk minimum yang diperkirakan dapat terlayani, yang masing-masing jenjang memiliki batasan jumlah penduduk minimum yang berbeda pula. Fasilitas TK dan SD perletakkannya dalam lingkungan permukiman serta memperhatikan jarak pencapaian dari rumah maksimal 1 km. Untuk prioritas pembangunan diutamakan untuk pendidikan menengah atas dan tinggi (sekolah tinggi, universitas, akademi, politeknik dan sebagainya) terutama di bagian Timur wilayah kota.

b. Kesehatan

Fasilitas kesehatan berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi penduduk, terdiri dari Rumah Sakit, Poliklinik/Balai Pengobatan, Puskesmas, dan Posyandu. Kebutuhan fasilitas kesehatan disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang harus dilayani. Untuk fasilitas rumah sakit, selain fasilitas yang sudah ada dibutuhkan juga adanya rumah sakit umum daerah yang dapat melayani masyarakat secara umum dan dapat menangani kasus-kasus khusus misalnya akibat kecelakaan kerja pada kegiatan industri.

c. Peribadatan

Karakteristik sosial budaya masyarakat Cilegon tidak terlepas dari sejarah Kesultanan Banten sebagai pusat penyebaran Agama Islam dan identik dengan budaya keislamannya. Mayoritas penduduk Kota Cilegon yang beragama Islam tersebut mempengaruhi ketersediaan fasilitas peribadatan yang ada yaitu Mesjid dan Musholla. Untuk mengimbangi perkembangan penduduk, maka kebutuhan fasilitas peribadatan disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang diperkirakan dapat terlayani. Alokasi penempatan fasilitas peribadatan tersebut berdasarkan sebaran guna lahan.

d. Rekreasi/Taman/Olahraga

Fasilitas rekreasi terdiri dari gedung bioskop, taman, dan gedung olah raga. Ruang terbuka (taman lingkungan) merupakan kebutuhan dasar masyarakat kota. Ruang terbuka berupa tempat bermain, taman kota maupun olah raga yang sekaligus akan menjadi pengikat lingkungan perkotaan. Di sekitar ruang terbuka ini sebaiknya diletakkan fasilitas pelayanan lingkungan lainnya pada tingkat yang sama.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Cilegon memiliki hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum perubahan–perubahan tersebut pada dasarnya tidak mengubah prinsip–prinsip anggaran yang meliputi efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat serta struktur APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Namun apabila kita mencermati secara teknis akuntansi, dapat diketahui bahwa telah terjadi berbagai perubahan baik di bidang pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan

daerah, serta perubahan pada klasifikasi jenis, obyek, dan rincian obyek beserta kode rekeningnya.

Wujud konkrit dari pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Rencana kerja pemerintah dalam bentuk kerangka pendanaan bagi semua program dan kegiatan dalam kerangka waktu satu tahun anggaran.

Adanya perubahan peraturan pada tahun 2007 dimana penyusunan anggaran pada tahun 2005 dan 2006 masih berpedoman kepada keputusan menteri dalam negeri no 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan pada tahun 2007 penyusunan APBD sudah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.1
Perubahan Peraturan Terhadap Struktur Pendapatan

STRUKTUR PENDAPATAN	
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
Pendapatan	Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah	Pajak Daerah
Retribusi Daerah	Retribusi Daerah
Bagian Laba Usaha Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan	Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Khusus
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi	
	Lain-lain Pendapatan yang Sah
Lain-lain Pendapatan yang Sah	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel 3.2
Perubahan Peraturan Terhadap Struktur Belanja

STRUKTUR BELANJA	
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
Belanja	Belanja
Aparatur Daerah	Belanja Tidak Langsung
Belanja Administrasi Umum	Belanja Pegawai
Belanja Pegawai/Personalia	Belanja Bunga
Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi
Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah
Belanja Pemeliharaan	Belanja Bantuan Sosial
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Pegawai/Personalia	Belanja Tidak Terduga
Belanja Barang dan Jasa	Belanja Langsung
Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Pegawai
Belanja Pemeliharaan	Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal	Belanja Modal
Pelayanan Publik	
Belanja Administrasi Umum	
Belanja Pegawai/Personalia	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Perjalanan Dinas	
Belanja Pemeliharaan	
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
Belanja Pegawai/Personalia	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Perjalanan Dinas	
Belanja Pemeliharaan	
Belanja Modal	
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	
Belanja Tidak Tersangka	
Jumlah Belanja	

Tabel 3.3
Perubahan Peraturan Terhadap Struktur Pembiayaan

STRUKTUR PEMBIAYAAN	
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
Pembiayaan	Pembiayaan Daerah
Penerimaan Daerah	Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	
Transfer dari Dana Cadangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi

STRUKTUR PEMBIAYAAN	
	Daerah
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Penerimaan Piutang Daerah
	Pencairan Dana Deposito
Jumlah Penerimaan Daerah	
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Daerah	
Transfer ke Dana Cadangan	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Penyertaan Modal	Pembayaran Pokok Utang
Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Pemberian Pinjaman Daerah
Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Berjalan	Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito
Pembayaran Proyek Lanjutan	
Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ke III	Pembiayaan Netto
Jumlah Pengeluaran Daerah	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Jumlah Pembiayaan	
Sisa Perhitungan	

Perubahan peraturan tersebut telah merubah struktur belanja dan pembiayaan pada kurun waktu 2005-2006 dan 2007-2009 sehingga pembahasan kebijakan keuangan akan dibagi dua periode yaitu periode yang menggunakan Kepmendagri 29 tahun 2002 dan periode yang menggunakan Permendagri 13 tahun 2006 yang kemudian diikuti dengan ditetapkannya Permendagri 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri 13 tahun 2006.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya visi Kota Cilegon.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

A. Target dan Realisasi Pendapatan

Berikut ini diuraikan mengenai target dan realisasi pendapatan dalam APBD Kota Cilegon dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011.

A.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2005

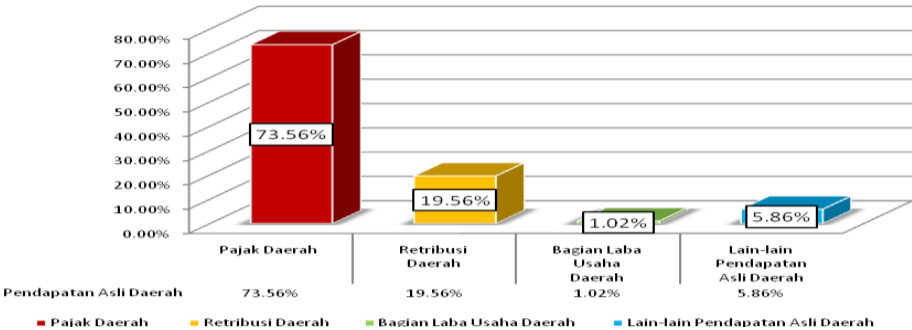
Tahun 2005 realisasi pendapatan adalah sebesar 306 milyar lebih besar 2 persen dari yang direncanakan yaitu sebesar 299 milyar, kontributor terbesar pada kenaikan realisasi pendapatan berada pada pos dana perimbangan yang terealisasi 11 milyar lebih besar dari yang di rencanakan dari 199 milyar yang di rencanakan pos tersebut terealisasi sebesar 211 milyar, yang diikuti oleh pos lain-lain pendapatan yang sah yang naik dari yang direncanakan yaitu sebesar 4.9 milyar menjadi 5.6 milyar yang terealisasi.

Tabel 3.4
Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2005

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan	299,659,543,700.00	306,475,845,768.00	102.27%
Pendapatan Asli Daerah	95,189,393,700.00	89,748,352,796.00	94.28%
Dana Perimbangan	199,533,000,000.00	211,101,492,972.00	105.80%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	4,937,150,000.00	5,626,000,000.00	113.95%

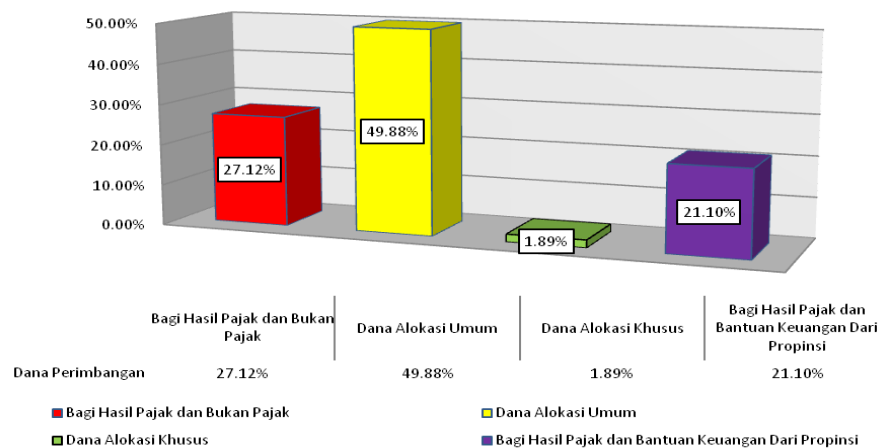
Sedangkan pos pendapatan asli daerah dari yang direncanakan sebesar 95 milyar hanya terealisasi sebesar 89 milyar.

Gambar 3.1
Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005



Berdasarkan strukturnya pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dari total pendapatan asli daerah yaitu sebesar 73.56% diikuti oleh retribusi daerah sebesar 18.44 %.

Gambar 3.2
Struktur Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2005



Pada pos dana perimbangan kontribusi terbesar berada pada pos dana alokasi umum dengan kontribusi sebesar 49.88 % diikuti dengan pos bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 27.12%.

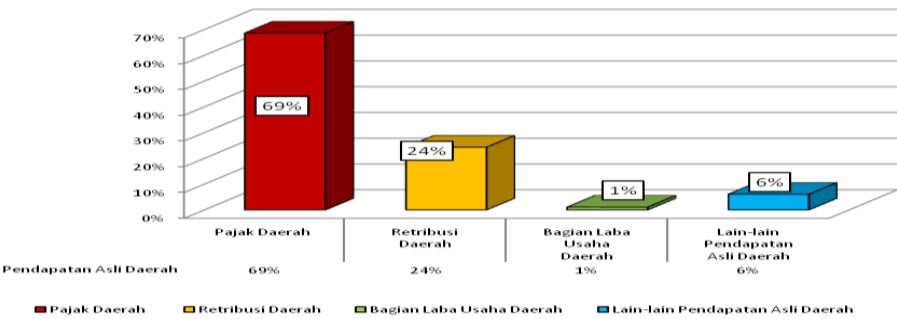
A.2. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2006

Tahun 2006 realisasi pendapatan adalah sebesar 413 milyar nilai tersebut melebihi ekspektasi perencanaan dimana pendapatan pada tahun 2006 di ekspektasikan sebesar 394 milyar. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah yang direncanakan pada 2006 sebesar 104 milyar ternyata pada realisasinya menjadi 112 milyar, selain pendapatan asli daerah dana perimbangan juga melebihi ekspektasi perkiraan dimana pada saat direncanakan dana perimbangan diperkirakan sebesar 289 milyar ternyata pada saat direalisasikan nilainya mencapai 300 milyar.

Tabel 3.5
Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2006

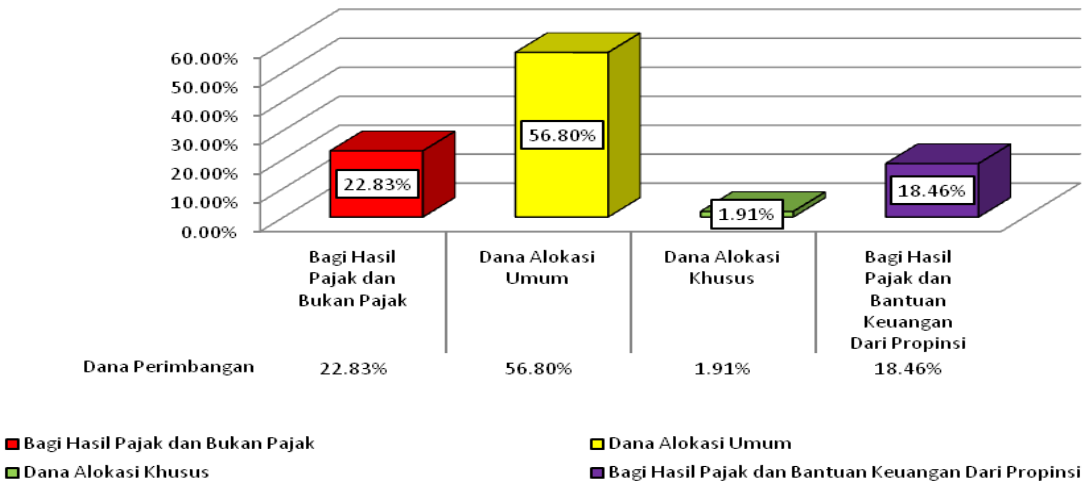
URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan	394,528,229,700.00	413,078,843,529.00	104.70%
Pendapatan Asli Daerah	104,750,459,700.00	112,242,853,817.00	107.15%
Dana Perimbangan	289,777,770,000.00	300,835,989,712.00	103.82%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-

Gambar 3.3
Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006



Berdasarkan struktur PAD pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dari total pendapatan asli daerah yaitu sebesar 69 % diikuti oleh retribusi daerah sebesar 24%.

Gambar 3.4
Struktur Realisasi Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun 2006



Berdasarkan strukturnya kontribusi terbesar untuk dana perimbangan masih sama seperti tahun 2005 yaitu dana alokasi umum sebesar 58.80% diikuti oleh bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 22.83%, sedangkan untuk pos lain-lain pendapatan pada tahun 2005 karena ada nya pelaksanaan pilkada dan adanya dana penyeimbang DAU sedangkan pada tahun 2006 dana tersebut tidak ada sehingga pada tahun 2006 tidak ada realisasi pada pos lain-lain pendapatan yang sah.

A.3. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2007

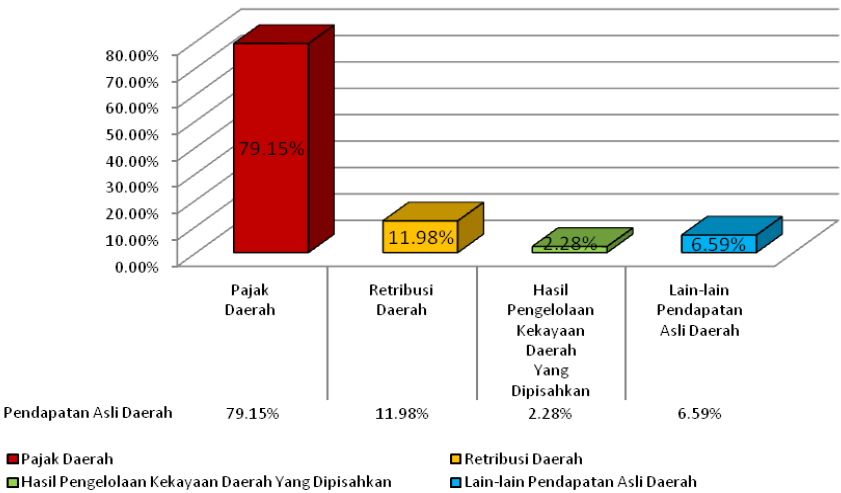
Pada Tahun 2007 terdapat perubahan pedoman penyusunan APBD hal terkait dengan terbitnya permendagri 13 tahun 2006 dimana pada struktur pendapatan komponen bagi

hasil pajak dan bantuan dari provinsi dimasukan pada pos lain-lain pendapatan yang sah bukan pada pos dana perimbangan. Untuk realisasi pendapatan, pada tahun 2007 realisasi pendapatan berada dibawah ekspektasi dimana pada perencanaannya diekspektasikan sebesar 464 milyar namun pada saat realisasinya adalah sebesar 462 milyar. Penurunan ekspektasi tersebut disebabkan oleh turunnya realisasi bagi hasil pajak provinsi yang diekspektasikan sebesar 42 milyar namun pada saat direalisasikan adalah sebesar 32 milyar.

Tabel 3.6
Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2007

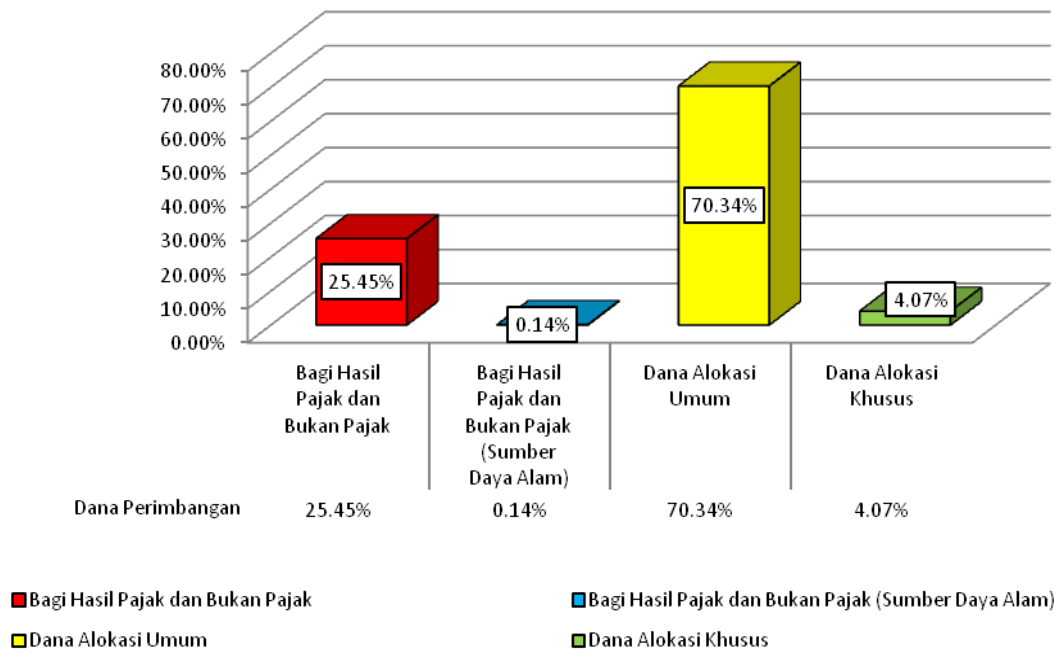
URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan	464,018,741,817.00	462,168,029,416.00	99.60%
Pendapatan Asli Daerah	85,779,891,817.00	92,625,606,151.00	107.98%
Dana Perimbangan	315,623,750,000.00	317,495,473,693.00	100.59%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	62,615,100,000.00	52,046,949,572.00	83.12%

Gambar 3.5
Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2007



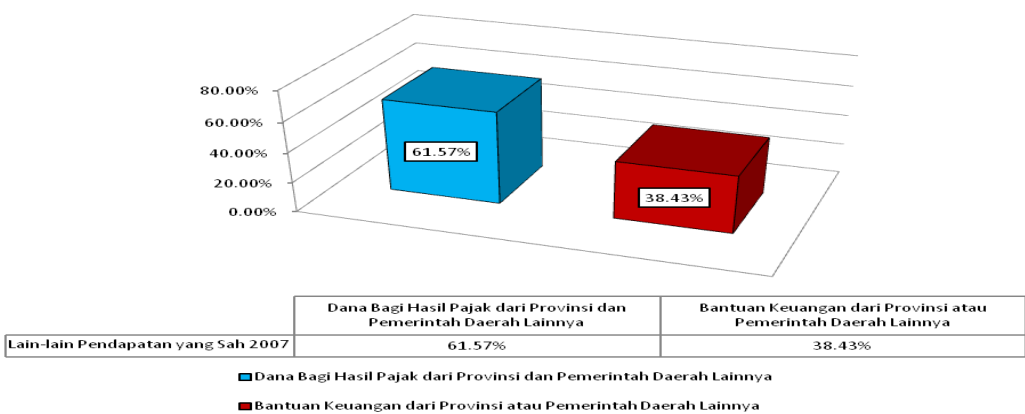
Kontribusi terbesar pada PAD tahun 2007 jika dilihat dari strukturnya berasal dari komponen pajak daerah dimana pada realisasinya memberikan kontribusi sebesar 79.15 % disusul oleh retribusi daerah sebesar 11.98 %.

Gambar 3.6
Struktur Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2007



Pada pos dana perimbangan komponen kontribusi terbesar berada pada komponen dana alokasi umum yaitu sebesar 70.76 % diikuti oleh bagi hasil pajak dan bukan pajak sebsar 25.60 %.

Gambar 3.7
Struktur Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2007



Pada komponen lain-lain pendapatan yang sah tahun 2007 masih di dominasi oleh dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar 61.57%, sedangkan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya hanya memberikan kontribusi sebesar 38.43%.

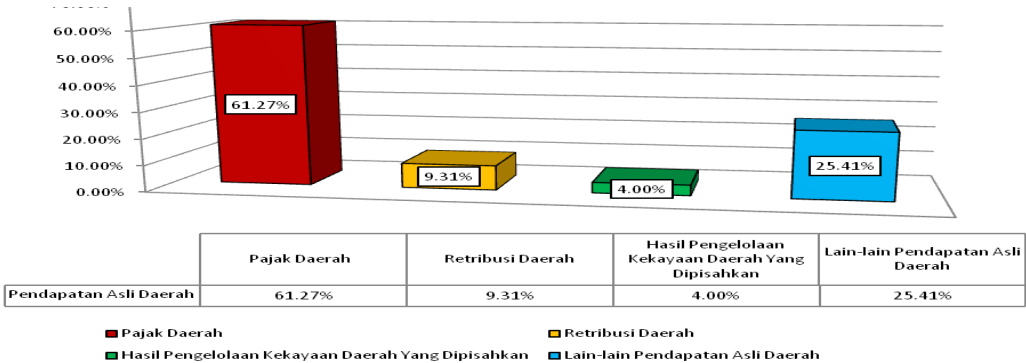
A.4. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2008

Realisasi pendapatan pada tahun 2008 berada di bawah ekspektasi dari yang direncanakan sebesar 561 milyar hanya terealisasi sebesar 554 milyar, hal ini disebabkan oleh realisasi seluruh komponen pendapatan yang berada dibawah ekpektasi mulai dari komponen pendapatan asli daerah yang di rencanakan sebesar 130 milyar hanya terealisasi 129 milyar, komponen dana perimbangan yang di rencanakan sebesar 365 milyar hanya terealisasi sebesar 364 milyar dan dari komponen Lain-lain pendapatan yang sah dari 65 milyar yang direncanakan hanya terealisasi 60 milyar.

Tabel 3.7
Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2008

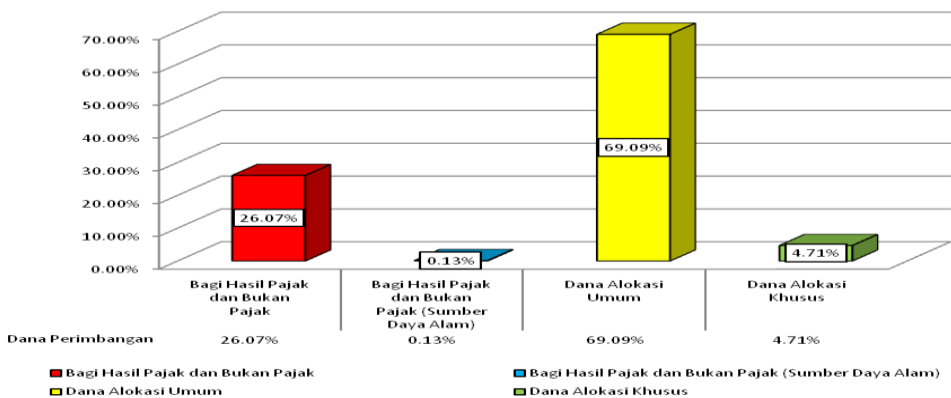
URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan	561,258,190,381.00	554,373,094,897.00	98.77%
Pendapatan Asli Daerah	130,670,503,038.00	129,831,026,861.00	99.36%
Dana Perimbangan	365,355,019,343.00	364,178,442,009.00	99.68%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	65,232,668,000.00	60,363,626,027.00	92.54%

Gambar 3.8
Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2008



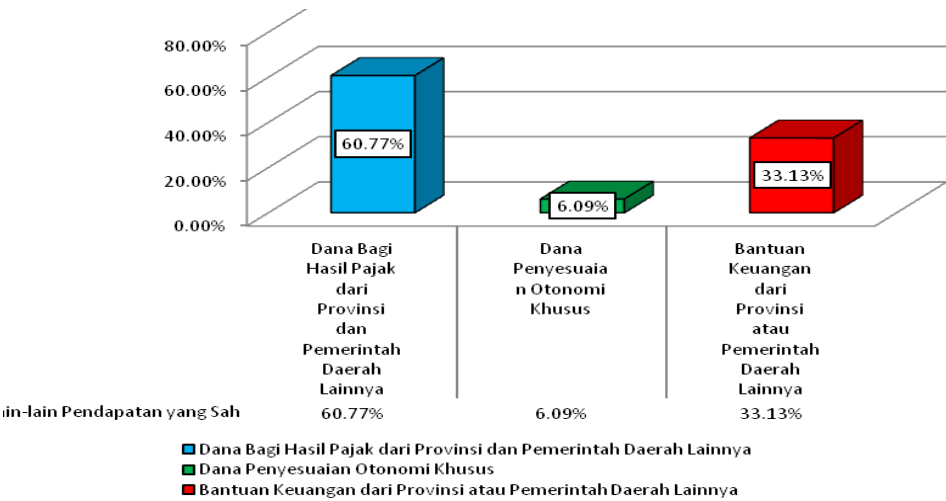
Kontribusi terbesar pada PAD tahun 2008 jika dilihat dari strukturnya berasal dari komponen pajak daerah dimana pada realisasinya memberikan kontribusi sebesar 61.27 % disusul oleh lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 25.41 %.

Gambar 3.9
Struktur Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2008



Pada komponen dana perimbangan kontribusi terbesar berada pada komponen dana alokasi umum yaitu sebesar 69.09 % diikuti oleh bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 26.07 %.

Gambar 3.10
Struktur Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Cilegon Tahun 2008



Pada komponen lain-lain pendapatan yang sah tahun 2008 terdapat komponen dana penyesuaian otonomi khusus dimana komponen tersebut tidak terdapat pada tahun 2007, pos lain lain pendapatan yang sah masih di dominasi oleh dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar 60.77%, sedangkan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya hanya memberikan kontribusi sebesar 33.13%.

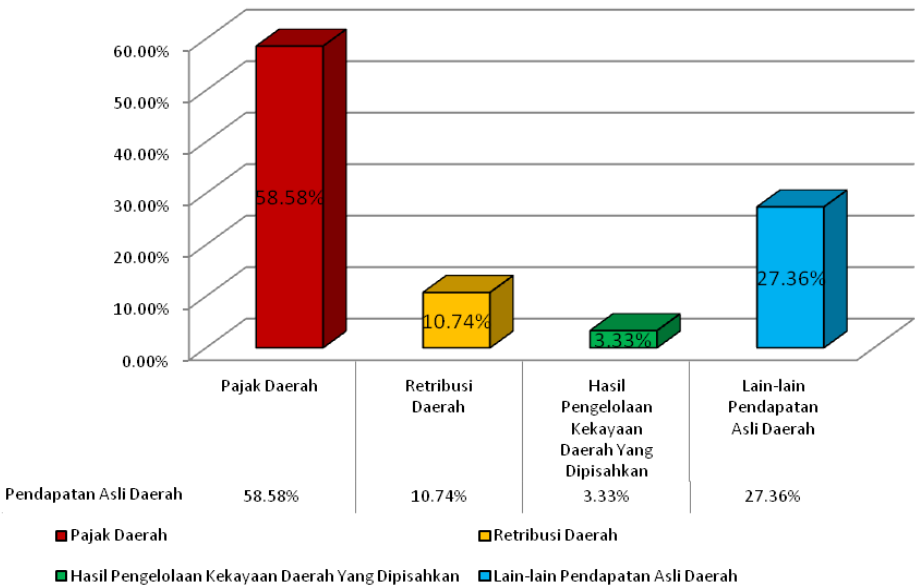
A.5. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2009

Berdasarkan realisasinya pendapatan kota cilegon pada tahun 2009 tetap berada di bawah ekspektasi dari yang direncanakan, hal in terlihat dari perkiraan pendapatan sebesar 620 milyar hanya terealisasi sebesar 620 milyar, hal ini disebabkan dari pos pendapatan yang berasal dari Swakelola RSUD yang atas rekomendasi BPK tidak dimasukan ke dalam APBD, sedangkan dana perimbangan ternyata terealisasi melebihi ekspektasi dari yang direncanakan sebesar 427 milyar terealisasi sebesar 438 milyar, dan komponen lain-lain pendapatan yang sah pun ternyata melebihi ekspektasi dari 59 milyar yang direncanakan menjadi 63 milyar pada saat realisasi

Tabel 3.8
Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2009

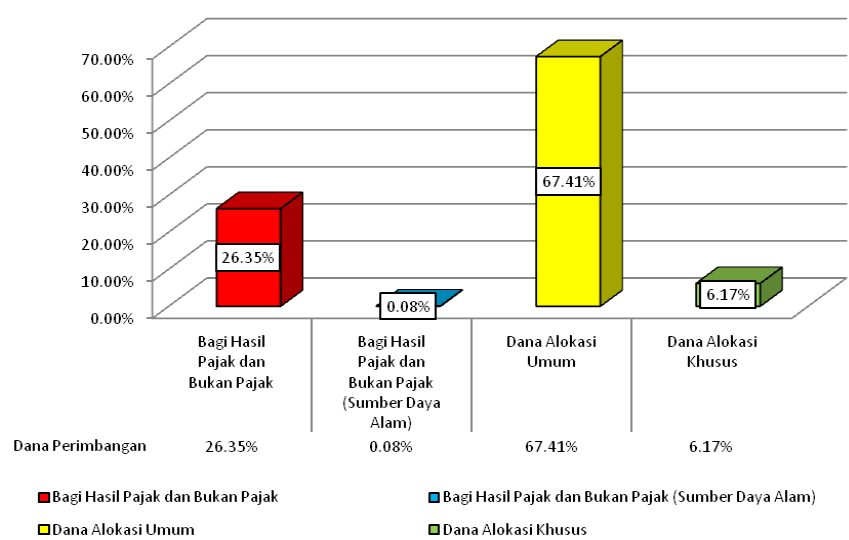
URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan	620,825,997,935.00	600,063,567,143.00	96.66%
Pendapatan Asli Daerah	134,204,104,988.00	98,793,263,133.00	73.61%
Dana Perimbangan	427,613,957,327.00	438,140,629,157.00	102.46%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	59,007,935,620.00	63,129,674,853.00	106.99%

Gambar 3.11
Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009



Berdasarkan strukturnya dapat dilihat bahwa pajak daerah masih mendominasi pendapatan asli daerah kota Cilegon tahun 2009 dengan kontribusi sebesar 58.58 %, sedangkan kontributor terbesar kedua diikuti oleh lain-lain pendapatan asli daerah dengan kontribusi sebesar 27.36%.

Gambar 3.12
Struktur Realisasi Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun 2009



Pada pos dana perimbangan kontribusi terbesar berada pada dana alokasi umum dengan kontribusi sebesar 67.41% dan diikuti oleh dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 26.35%.

A.6. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2010

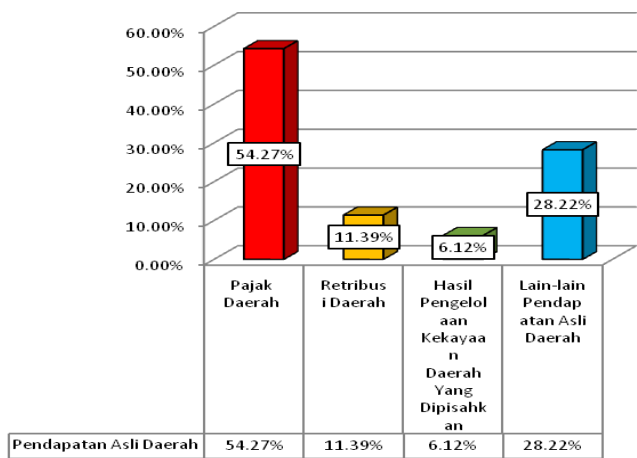
Pendapatan pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 598 Milyar terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar 138 milyar, dana perimbangan sebesar 385 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 74 milyar.

Tabel 3.9
Target Pendapatan Tahun 2010

	Target
Pendapatan	598,203,728,000.00
Pendapatan Asli Daerah	138,392,767,000.00
Dana Perimbangan	385,068,207,000.00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	74,742,754,000.00

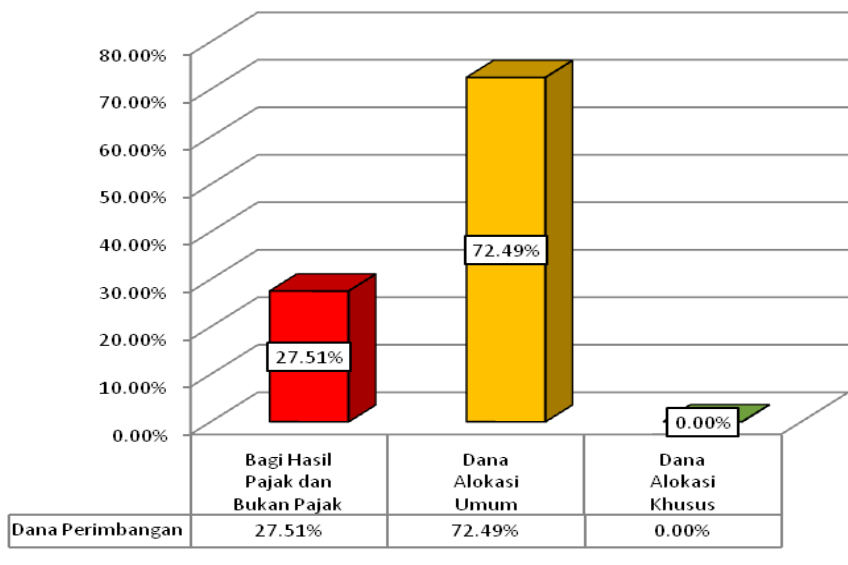
Jika dilihat dari strukturnya target pendapatan asli daerah pada tahun 2010, di perkirakan berasal dari pajak daerah 54.27%, retribusi daerah sebesar 11.39%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 6.12% dan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 28.22%.

Gambar 3.13
Target Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2010



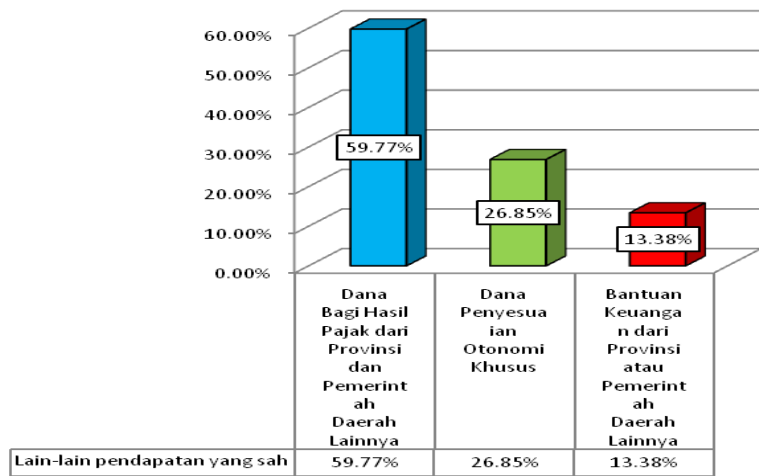
Pada dana perimbangan tahun 2010 strukturnya diperkirakan terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 27.51% dan dan alokasi umum sebesar 72.49%, sedangkan pada tahun 2010 kota Cilegon tidak mendapatkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.

Gambar 3.14
Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun 2010



Untuk lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2010 strukturnya di perkirakan terdiri dari dana bagi hasil pajak da pemerintah daerah lainnya sebesar 59.77%, dana penyesuaian otonomi khusus sebesar 26.85% dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar 13.38%.

Gambar 3.15
Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Cilegon Tahun 2010



B. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan peningkatan kemampuan pendanaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah dilakukan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dengan metode intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber–sumber penerimaan daerah, yang dilaksanakan sejalan dengan peningkatan kemampuan pengelolaan perusahaan daerah dan pemanfaatan aset dan kekayaan daerah serta optimalisasi dana perimbangan dan sumber dana lainnya dari pemerintah pusat serta pemerintah Provinsi Banten.

Secara umum intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang selama ini telah ada dan berupaya untuk mencari sumber–sumber pendapatan baru guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Penataan pendapatan daerah sebagai upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pendanaan yang terus meningkat, yaitu untuk menyelenggarakan tata pemerintahan daerah, percepatan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun hingga saat ini kemandirian kapasitas fiskal pemerintah daerah masih relatif terbatas, sebagaimana tercermin dari persentase kontribusi PAD terhadap APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah antara lain berorientasi kepada penyederhanaan berbagai jenis dan prosedur administrasi perijinan, penetapan tarif retribusi daerah, dan pajak daerah. Upaya ini

dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Penataan secara intensifikasi ini dapat menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pengusaha dan pelaku dunia usaha lainnya, antara lain melalui rasionalisasi jenis pungutan, penyempurnaan struktur tarif, dan prosedur perijinan. Pertumbuhan investasi daerah telah menunjukkan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan dan peningkatan investasi daerah pada akhirnya dapat memacu kenaikan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*, yang pada waktunya akan meningkatkan secara akumulatif kapasitas perekonomian daerah serta kemampuan fiskal daerah.

Upaya lain dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu melalui ekstensifikasi, yaitu menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan antara lain melalui upaya pendayagunaan pemanfaatan potensi daerah dan usaha daerah dengan tidak terlalu membebani masyarakat serta dunia usaha.

Strategi yang ditempuh dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan;
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan berkesinambungan terhadap sumber-sumber PAD;
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah provinsi.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dan strategi tersebut di atas, prioritas yang dilaksanakan dalam mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan PAD diprioritaskan melalui intensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diprioritaskan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, aparatur untuk mendorong peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi. Dengan strategi dan prioritas ini diharapkan akan meningkatkan kepuasan wajib pajak dan

wajib retribusi yang pada akhirnya akan mendorong kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak dan retribusi daerah;

3. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Dengan strategi dan prioritas ini diharapkan target pendapatan dan penerimaan asli daerah dapat dicapai dengan tepat waktu.

Berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahun dengan laju pertumbuhan yang cukup signifikan. Demikian pula upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang hasilnya mampu meningkatkan alokasi dana sebagai sumber pendapatan daerah.

Namun, untuk alokasi dana perimbangan pada setiap tahunnya disesuaikan dengan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Penyesuaian yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan umum keuangan daerah Kota Cilegon ke depan diarahkan pada penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah dan penggalan potensi pendapatan daerah dengan mendorong penguatan ekonomi daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah pada dasarnya diarahkan pada upaya penggalan potensi pendapatan daerah melalui intensifikasi terutama atas pajak daerah dan retribusi daerah yang ada serta ekstensifikasi atas peluang pendapatan asli daerah lainnya secara efektif dan efisien.

C. Neraca Daerah

Neraca daerah Kota Cilegon sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Neraca Daerah
Kota Cilegon Tahun 2006-2009

KD. REK	URAIAN	2006 (Juta Rp.)	2007 (Juta Rp.)	2008 (Juta Rp.)	2009 (Juta Rp.)
1	ASET				
1 . 1	ASET LANCAR				
1 . 1 . 1	Kas	21.884,79	39.362,81	2.931,20	16.821,08
1 . 1 . 2	Investasi Jangka Pendek	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 . 1 . 3	Piutang	29.203,42	29.218,01	21.593,83	16.201,68
1 . 1 . 4	Piutang Lain-lain	4.544,20	7.856,91	8.603,21	14.959,41
1 . 1 . 5	Persediaan	2.959,35	2.944,58	4.421,76	5.354,26
	JUMLAH ASET LANCAR	73.591,77	99.382,30	57.550,00	73.336,42
1 . 2	INVESTASI JANGKA PANJANG				
1 . 2 . 1	Investasi Non Permanen	5.091,18	7.639,45	0.00	0.00
1 . 2 . 2	Investasi Permanen	38.043,20	56.793,20	78.197,23	107.398,16
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	43.134,38	64.432,65	78.197,23	107.398,16
1 . 3	ASET TETAP				
1 . 3 . 1	Tanah	413.788,53	325.518,21	567.507,96	580.935,08
1 . 3 . 2	Peralatan dan Mesin	89.661,69	115.887,23	140.133,05	164.693,21
1 . 3 . 3	Gedung dan Bangunan	253.802,00	268.292,31	364.690,57	416.068,09
1 . 3 . 4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	248.094,32	217.393,22	260.897,76	453.231,55
1 . 3 . 5	Aset Tetap Lainnya	9.270,22	10.878,28	13.645,66	15.552,45
1 . 3 . 6	Konstruksi dalam Pengerjaan	94.072,29	266.138,29	194.241,39	49.177,75
1 . 3 . 7	Akumulasi Penyusutan	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH ASET TETAP	1.108.689,07	1.204.107,54	1.541.116,39	1.679.658,13
1 . 4	DANA CADANGAN				
1 . 4 . 1	Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1 . 5	ASET LAINNYA				
1 . 5 . 1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00
1 . 5 . 2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00	0.00	216,76	216,76
1 . 5 . 3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00
1 . 5 . 4	Aset Tidak Berwujud	0.00	9.425,36	17.123,45	21.180,60
1 . 5 . 5	Aset Lain-lain	1.635,45	3.390,11	9.479,82	18.900,47
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.635,45	12.815,47	26.820,03	40.297,83
	JUMLAH ASET	1.227.050,67	1.380.737,97	1.703.683,67	1.900.690,54
2	KEWAJIBAN				
2 . 1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
2 . 1 . 1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3,09	10,56	7,89	0.00
2 . 1 . 2	Utang Bunga	0.00	96,67	59,72	15,57
2 . 1 . 3	Utang Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
2 . 1 . 4	Bagian Lancar Utang Jangka	0.00	10.570,59	9.381,15	3.622,43

KD. REK	URAIAN	2006 (Juta Rp.)	2007 (Juta Rp.)	2008 (Juta Rp.)	2009 (Juta Rp.)
	Panjang				
2 . 1 . 5	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00
2 . 1 . 6	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.700,29	1.327,56	5.191,85	469,34
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.703,38	12.005,38	14.640,61	4.107,34
2 . 2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
2 . 2 . 1	Utang Dalam Negeri	0.00	13.108,06	3.575,19	0.00
2 . 2 . 2	Utang Luar Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	13.108,06	3.575,19	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.703,38	25.113,43	18.215,81	4.107,34
3	EKUITAS DANA				
3 . 1	EKUITAS DANA LANCAR				
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	36.881,71	59.253,98	22.603,02	35.711,29
3 . 1 . 2	Cadangan untuk Piutang	33.747,62	37.074,92	30.197,04	31.161,74
3 . 1 . 3	Cadangan untuk Persediaan	2.959,35	2.944,58	4.421,76	5.354,26
3 . 1 . 4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(1.700,29)	(11.994,82)	(14.632,72)	(4.107,34)
3 . 1 . 5	Pendapatan Yang Ditangguhkan	0.00	98,27	320,29	1.109,78
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	71.888,39	87.376,93	42.909,39	69.229,74
3 . 2	EKUITAS DANA INVESTASI				
3 . 2 . 1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	43.134,38	64.432,65	78.197,23	107.398,16
3 . 2 . 2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.108.689,07	1.204.107,54	1.541.116,39	1.679.658,13
3 . 2 . 3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	1.635,45	12.815,47	26.820,03	40.297,17
3 . 2 . 4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0.00	(13.108,06)	(3.575,19)	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1.153.458,90	1.268.247,61	1.642.558,46	1.827.353,46
3 . 3	EKUITAS DANA CADANGAN				
3 . 3 . 1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.225.347,29	1.355.624,53	1.685.467,85	1.896.583,19
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.227.050,67	1.380.737,97	1.703.683,67	1.900.690,54

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

A. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2005-2011

Perubahan pedoman dari Kepmendagri 29 tahun 2002 menjadi Permendagri 13 tahun 2006 telah merubah struktur belanja secara signifikan, dimana pada periode 2005-2006 pos belanja dibagi menjadi belanja aparatur dan belanja publik, dan pada periode 2007-2011 terjadi perubahan pos belanja menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung, hal ini merubah secara signifikan sub komponen dari pos belanja sehingga pembahasan tentang pos belanja akan dibagi menjadi dua periode yaitu periode 2005-2006 dan periode 2007-2011.

A.1. Target dan Realisasi Belanja Periode Tahun 2005-2006

Target dan realisasi belanja tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 susunan APBD mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

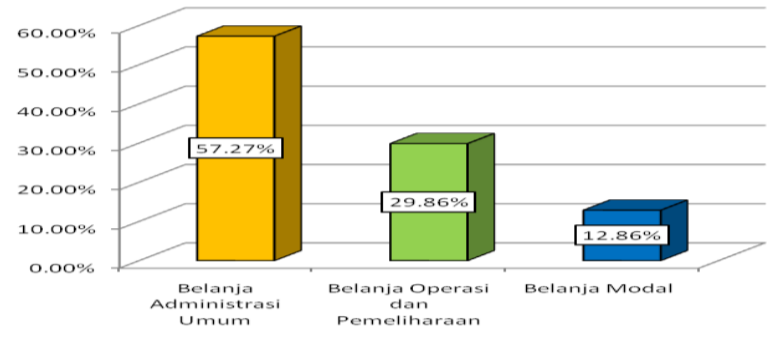
A.1.1. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2005

Pada tahun 2005 realisasi belanja secara keseluruhan berada di bawah perencanaannya dimana belanja direalisasikan sebesar 290 milyar dari 320 milyar yang direncanakan, komponen belanja aparatur daerah tahun 2005 direncanakan sebesar 98 milyar direalisasikan sebesar 85 milyar, komponen belanja pelayanan publik direalisasikan sebesar 204 milyar dari 222 milyar yang direncanakan.

Tabel 3.11
Rencana Dan Realisasi Belanja Tahun 2005

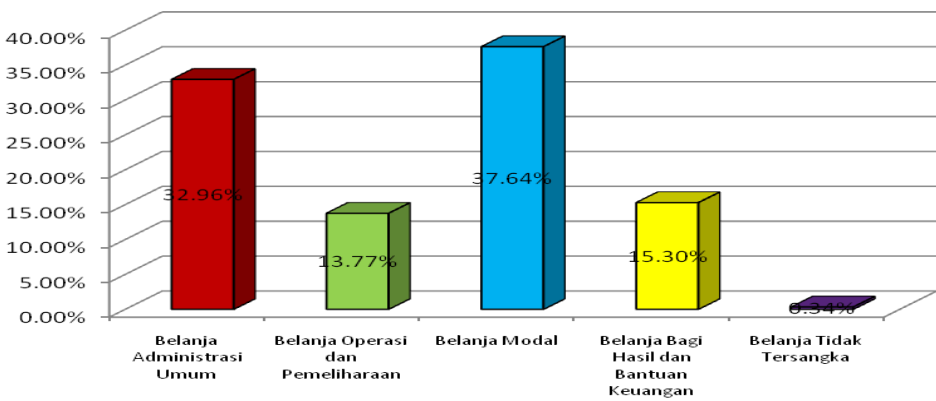
URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
BELANJA	320,895,777,585.00	290,178,861,784.00	90.43%
Aparatur Daerah	98,434,099,396.00	85,585,789,131.00	86.95%
Pelayanan Publik	222,461,678,189.00	204,593,072,653.00	91.97%

Gambar 3.16
Struktur Belanja Aparatur Daerah Kota Cilegon Tahun 2005



Jika dilihat dari strukturnya belanja aparatur daerah terdiri dari 52.27% belanja administrasi umum, 29.86% belanja operasi dan pemeliharaan dan 12.86% belanja Modal.

Gambar 3.17
Struktur Belanja Pelayanan Publik Tahun 2005



Jika dilihat dari komposisinya, belanja pelayanan publik terdiri dari belanja modal 37.64%, belanja administrasi umum sebesar 32.96%, belanja operasi dan pemeliharaan sebesar 13.77%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sebesar 15.30% dan belanja tidak tersangka sebesar 0.34%.

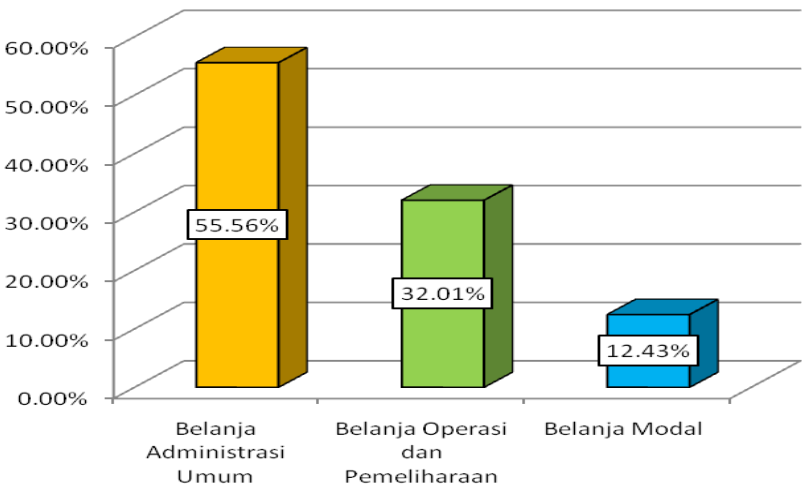
A.1.2. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2006

Tabel 3.12
Rencana Dan Realisasi Belanja Tahun 2006

URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
BELANJA	470,029,748,035.67	404,438,185,238.00	86.05%
Aparatur Daerah	133,212,568,325.00	107,689,155,497.00	80.84%
Pelayanan Publik	336,817,179,710.67	296,749,029,741.00	88.10%

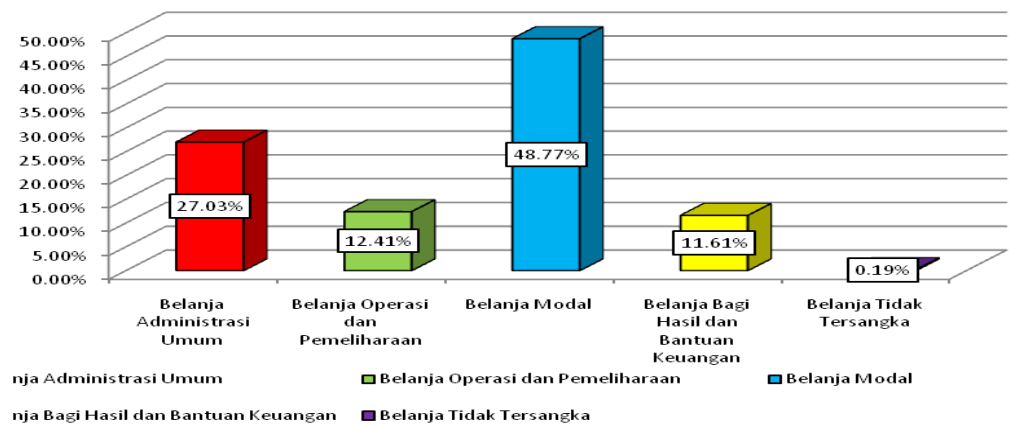
Untuk tahun 2006 realisasi belanja berada di bawah perencanaannya hal ini terlihat dari realisasi total belanja yang terealisasi 404 milyar dibandingkan rencana belanja yang sebesar 470 milyar, untuk komponen belanja aparatur daerah direalisasikan sebesar 107 milyar dari 133 milyar yang direncanakan, sedangkan belanja pelayanan publik dari 336 milyar yang direncanakan terealisasi sebesar 296 milyar.

Gambar 3.18
Struktur Belanja Aparatur Daerah Kota Cilegon Tahun 2006



Pada tahun 2006 belanja aparatur daerah terdiri dari belanja administrasi umum sebesar 55.56%, belanja operasional dan pemeliharaan sebesar 32.01% dan belanja modal sebesar 12.43%.

Gambar 3.19
Struktur Belanja Pelayanan Publik Kota Cilegon Tahun 2006

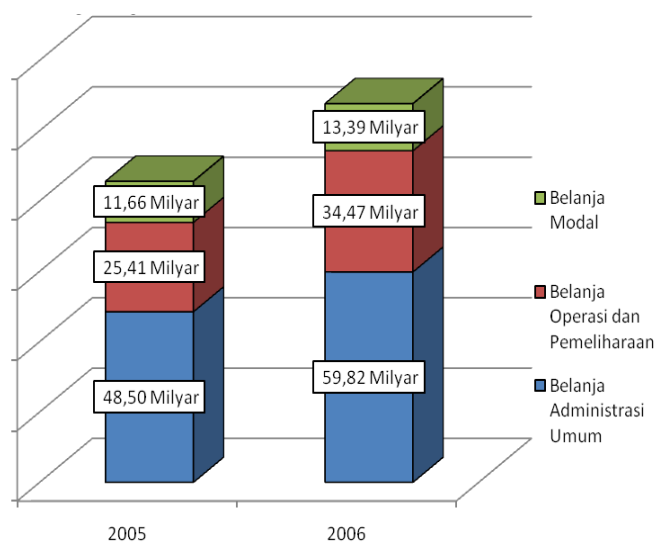


Berdasarkan komposisi belanjanya struktur belanja pelayanan publik didominasi oleh belanja modal sebesar 48.77%, belanja administrasi umum sebesar 27.03%, belanja operasional dan pemeliharaan sebesar 12.41%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak tersangka sebesar 0.19%.

A.1.3. Trend Perkembangan Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik kota Cilegon 2005-2006

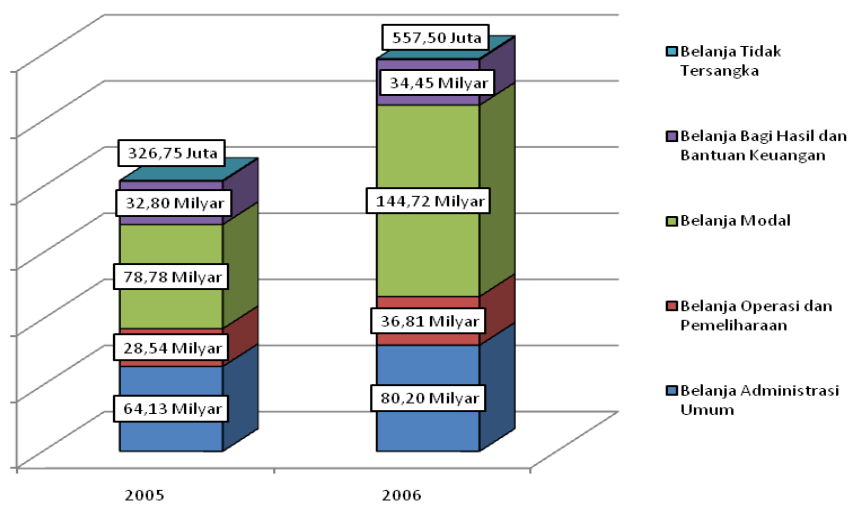
Belanja aparatur daerah dari periode 2005 -2006 meningkat sebesar 22 milyar, kenaikan yang signifikan terjadi pada komponen belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan dimana masing-masing komponen naik sebesar 11.30 milyar dan 9.06 milyar, sedangkan dari komponen belanja modal hanya naik sebesar 1.7 milyar.

Gambar 3.20
Belanja Aparatur Daerah Kota Cilegon Tahun 2005-2006



Untuk belanja pelayanan publik terjadi kenaikan sebesar 92 milyar, kenaikan terbesar terjadi pada belanja modal yaitu sebesar 65 milyar, diikuti oleh belanja administrasi umum sebesar 16 milyar, belanja modal sebesar 8 milyar, belanja tidak tersangka sebesar 1.6 milyar dan belanja tidak tersangka sebesar 230 juta.

Gambar 3.21
Belanja Pelayanan Publik Kota Cilegon Tahun 2005-2006



A.2. Periode 2007-2009 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006)

A.2.1. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2007

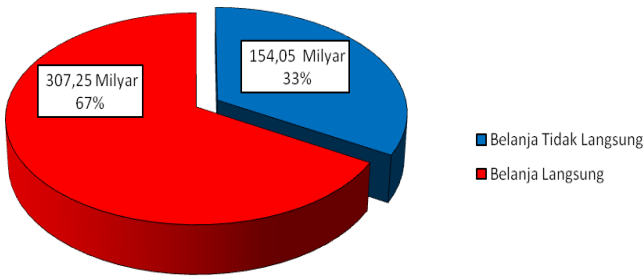
Permendagri no. 13 tahun 2006 merubah secara signifikan struktur belanja yang sebelumnya dibagi berdasarkan belanja aparatur dan belanja publik sekarang dirubah menjadi belanja langsung dan tidak langsung.

Tabel 3.13
Rencana dan Realisasi Belanja Tahun 2007

URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
BELANJA	544,167,212,118.00	461,303,980,066.00	84.77%
Belanja Tidak Langsung	190,594,880,905.00	154,053,799,159.00	80.83%
Belanja Langsung	353,572,331,213.00	307,250,180,907.00	86.90%

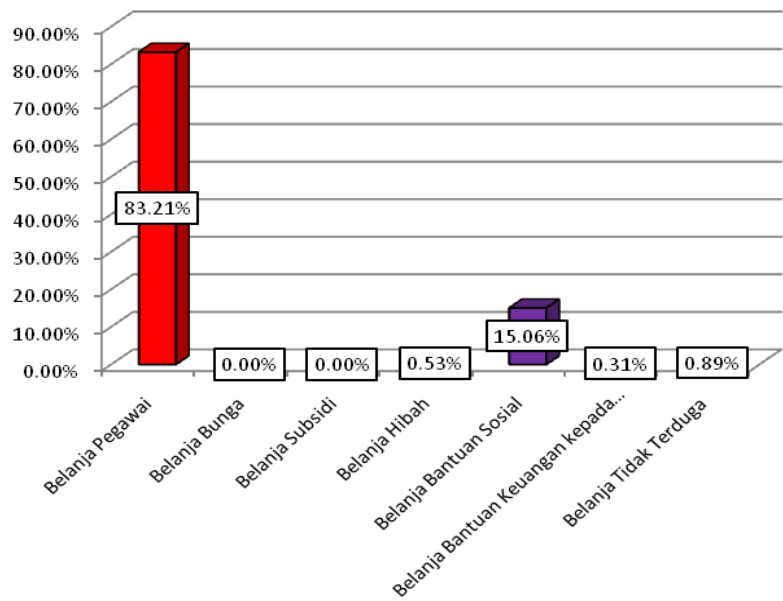
Pada tahun 2007 total realisasi belanja kota Cilegon adalah sebesar 461 milyar, yang terbagi atas 154 milyar belanja tidak langsung dan 307 milyar belanja langsung, terdapat perubahan pos anggaran pada tahun 2007 dimana belanja hibah dan bantuan sosial masuk ke dalam belanja tidak langsung, hal ini menandakan bahwa anggaran untuk masyarakat tidak hanya ada di dalam belanja langsung namun ada juga di dalam belanja tidak langsung.

Gambar 3.22
Struktur Belanja Kota Cilegon Tahun 2007



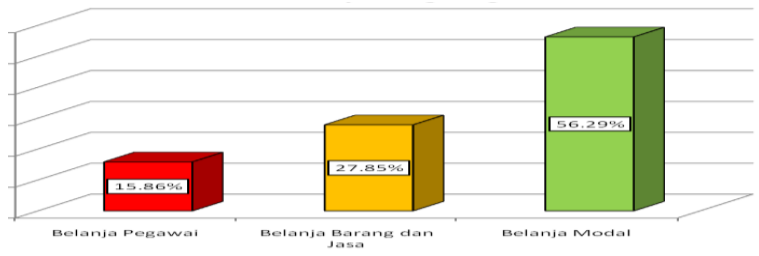
Dilihat dari strukturnya belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar 83.21%, belanja bantuan sosial sebesar 15.06%, belanja hibah sebesar 0.53%, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar 0.31% dan belanja Tidak terduga sebesar 0.89%.

Gambar 3.23
Struktur Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun 2007



Untuk belanja langsung pada tahun 2007 terdiri dari belanja modal sebesar 56.29%, belanja barang dan jasa sebesar 27.85%, dan belanja pegawai sebesar 15.86%.

Gambar 3.24
Struktur Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun 2007



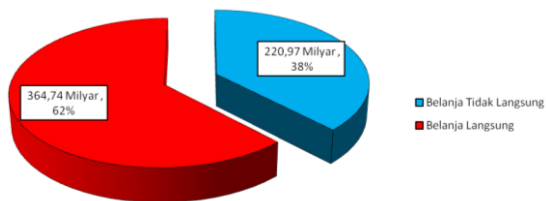
A.2.2. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2008

Total realisasi belanja pada tahun 2008 adalah sebesar 585 milyar dari yang direncanakan sebesar 659 milyar, total realisasi tersebut didapat dari pos belanja tidak langsung sebesar 220 milyar dan pos belanja langsung sebesar 364 milyar.

Tabel 3.14
Rencana dan Realisasi Belanja Tahun 2008

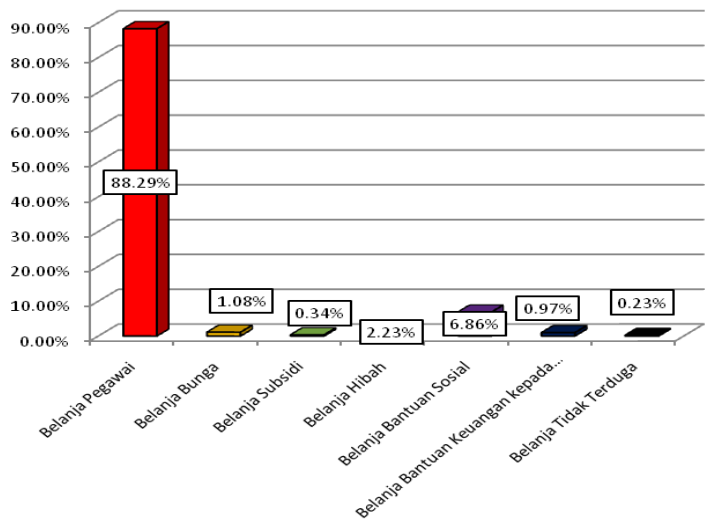
URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
BELANJA	659,559,067,871.00	585,723,003,908.00	88.81%
Belanja Tidak Langsung	249,233,077,567.00	220,974,850,422.00	88.66%
Belanja Langsung	410,325,990,304.00	364,748,153,486.00	88.89%

Gambar 3.25
Struktur Belanja Tahun 2008



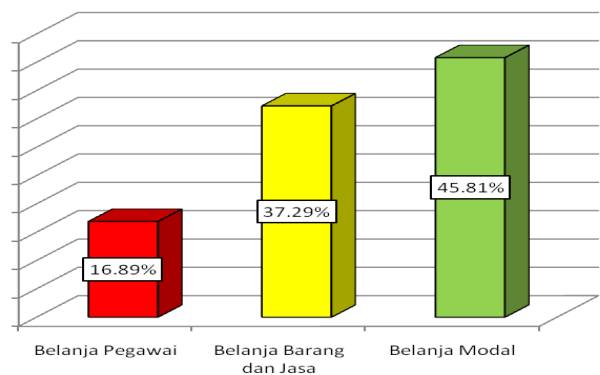
Pada tahun 2008 struktur belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar 88.29%, belanja bantuan sosial sebesar 6.86%, belanja bunga sebesar 1.08%,

Gambar 3.26
Struktur Belanja Tidak Langsung Tahun 2008



belanja hibah sebesar 2.23%, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa 0.97% , belanja subsidi sebesar 0.34% dan belanja tidak terduga sebesar 0.23 %.

Gambar 3.27
Struktur Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun 2008



Pada tahun 2008 struktur belanja langsung terdiri dari belanja modal sebesar 45.81%, belanja barang dan jasa sebesar 37.29% dan belanja pegawai sebesar 16.89%.

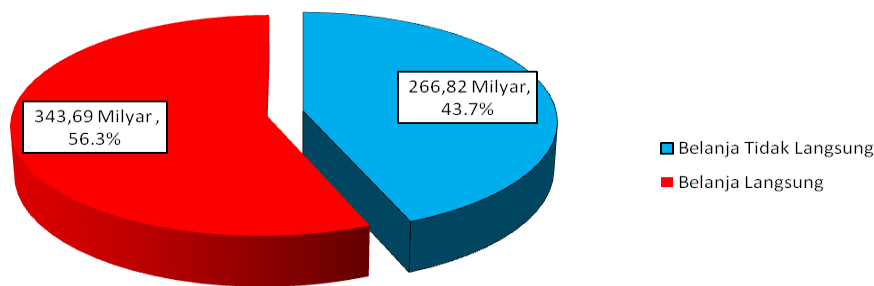
A.2.3. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2009

Realisasi belanja pada tahun 2009 terealisasi sebesar 610 milyar, nilai realisasi tersebut didapat dari realisasi belanja tidak langsung sebesar 266 milyar dan belanja langsung sebesar 343 milyar.

Tabel 3.15
Rencana Dan Realisasi Tahun 2009

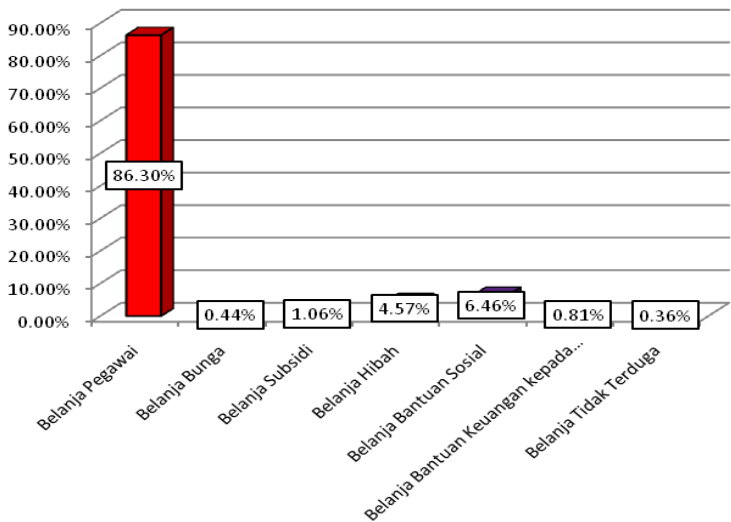
URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
BELANJA	643,853,142,693.00	582,812,916,251.00	94.82%
Belanja Tidak Langsung	275,618,593,009.00	266,821,196,621.00	96.81%
Belanja Langsung	368,234,549,684.00	315,991,719,630.00	93.33%

Gambar 3.28
Struktur Belanja Kota Cilegon Tahun 2009



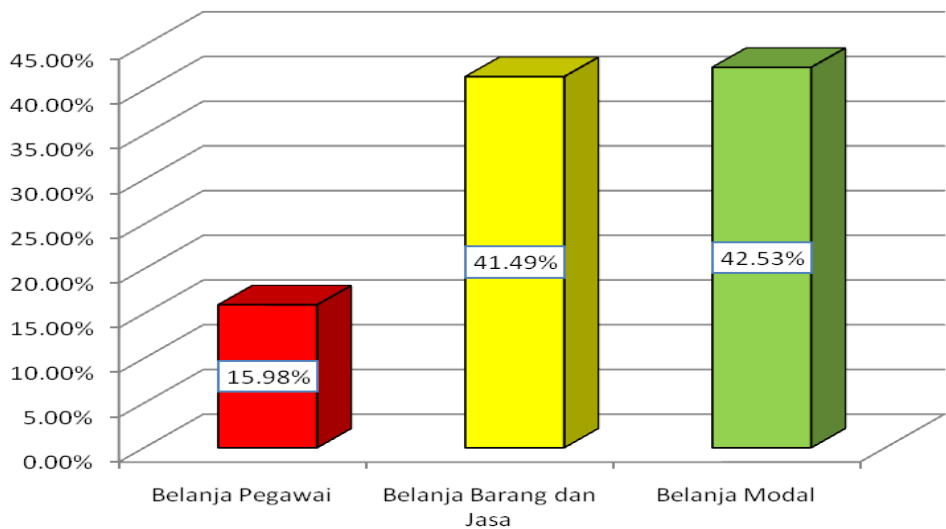
Pada tahun 2009 belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai sebesar 86.30%, belanja bantuan sosial sebesar 6.46%, belanja hibah sebesar 4.57%, belanja subsidi sebesar 1.06%.

Gambar 3.29
Struktur Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun 2009



Belanja bunga sebesar 0.44%, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar 0.81% dan belanja tidak terduga sebesar 0.36%.

Gambar 3.30
Struktur Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun 2009



Untuk belanja langsung pada tahun 2009 terdiri atas belanja modal sebesar 42.53%, belanja barang dan jasa sebesar 41.49%, dan belanja pegawai sebesar 15.98%.

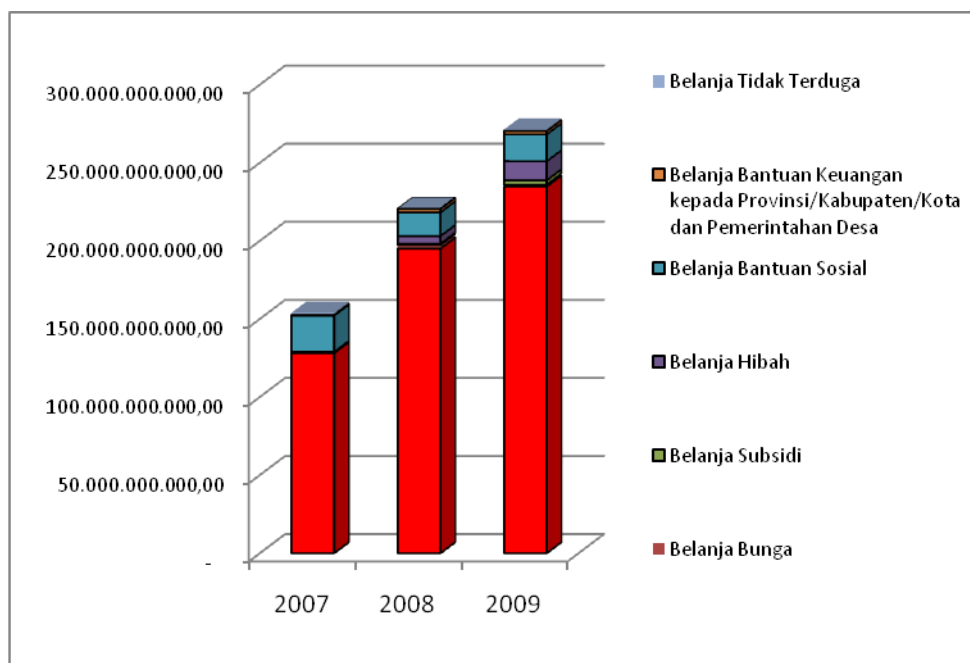
A.2.4. Trend Realisasi Belanja 2007-2009

Jika dilihat selama periode 2007-2009 belanja tidak langsung mengalami kenaikan, mulai dari 154 milyar pada tahun 2007, menjadi 220 milyar pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 266 milyar. Kenaikan secara signifikan terjadi pada komponen belanja pegawai dimana pada tahun 2008 naik sebesar 66 milyar, hal ini disebabkan oleh dua hal, yang pertama adalah penambahan jumlah pegawai baru dan pemekaran SOTK berdasarkan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penambahan jumlah pegawai pada tahun 2009 membuat belanja pegawai naik dari 195 milyar menjadi 230 milyar, digulirkannya program bantuan masyarakat langsung pada tahun 2009 telah menaikkan belanja Bantuan sosial dari 15 milyar pada tahun 2008 menjadi 17 milyar pada tahun 2009. Sedangkan dilihat dari prosentase masing-masing komponen pada Belanja tidak langsung, alokasi belanja pegawai merupakan proporsi terbesar, dengan rata-rata sekitar 83%, dengan jumlah nominal yang terus meningkat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penambahan jumlah PNS serta adanya kenaikan gaji pegawai. Maka jika dikorelasikan dengan peningkatan pendapatan DAU, namun hal ini juga diimbangi dengan kenaikan alokasi belanja pegawai.

Tabel 3.16
Realisasi Belanja Tidak Langsung 2007-2009

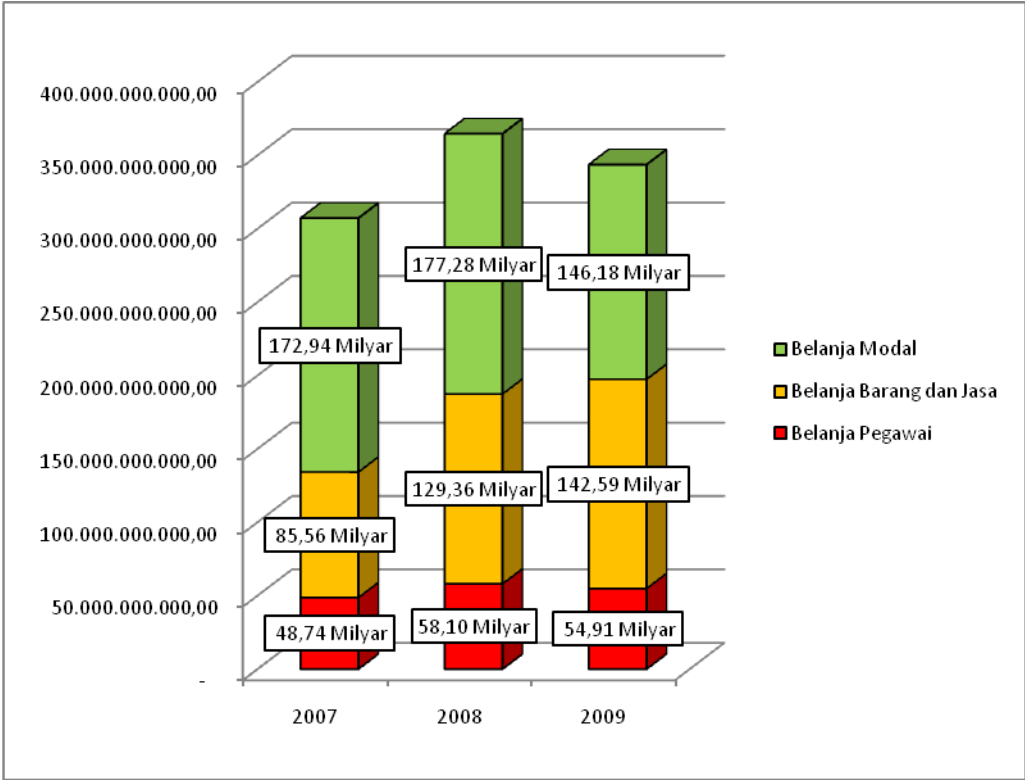
Uraian	2007		2008		2009	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Belanja Tidak Langsung	154,053,799,159	100.0	220,974,850,422	100.0	266,821,196,621	100.0
Belanja Pegawai	128,191,806,957	83.2	195,091,867,797	88.3	230,267,526,874	86.3
Belanja Bunga	-	0	2,390,277,108	1.1	1,183,609,003	0.4
Belanja Subsidi	-	0	759,805,517	0.3	2,832,221,744	1.1
Belanja Hibah	820,000,000	0.5	4,917,900,000	2.2	12,197,599,000	4.6
Belanja Bantuan Sosial	23,203,437,650	15.1	15,165,000,000	6.9	17,228,485,000	6.5
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	473,000,000	0.3	2,150,000,000	1.0	2,149,520,000	0.8
Belanja Tidak Terduga	1,365,554,552	0.9	500,000,000	0.2	962,235,000	0.4

Gambar 3.31
Tren Realisasi Belanja Langsung



Pada pos belanja langsung kenaikan yang signifikan terjadi pada pos belanja barang dan jasa pada tahun 2008 dimana terjadi kenaikan sebesar 43 milyar dibandingkan belanja barang dan jasa tahun 2007, hal ini terjadi karena adanya pemekaran SOTK pada tahun 2008 karena diterbitkannya PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, karena jumlah SOTK mempengaruhi jumlah kegiatan yang harus di akomodir maka perubahan tersebut juga akan mempengaruhi jumlah belanja barang dan jasa, belanja modal naik dari 172.94 milyar pada tahun 2007 dan mencapai puncaknya pada tahun 2009 sebesar 177 milyar dan kemudian pada tahun 2009 turun menjadi 146.18 milyar. Kenaikan pada tahun 2008 karena penyelesaian pekerjaan pembangunan infrastruktur di usahakan selesai sebagian besar pada tahun 2008.

Gambar 3.32.
Tren Belanja Langsung 2007-2009



Tabel 3.17
Realisasi Belanja 2007-2009

	2007	2008	2009
Belanja Langsung	307,250,180,907.00	364,748,153,486.00	343,691,561,773.00
Belanja Pegawai	48,740,556,689.00	58,100,151,463.00	54,917,043,198.00
Belanja Barang dan Jasa	85,567,193,049.00	129,360,079,724.00	142,594,000,731.00
Belanja Modal	172,942,431,169.00	177,287,922,299.00	146,180,517,844.00

A.2.5. Rencana Belanja Tahun 2010

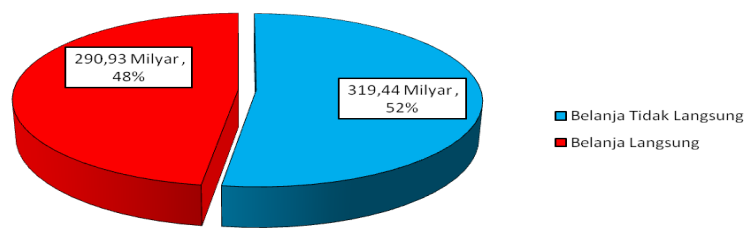
Berdasarkan perencanaannya pada perda no 17 tahun 2009. Belanja pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 610 milyar, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 319 milyar dan belanja langsung 290 milyar.

Tabel 3.18
Rencana Belanja Tahun 2010

	RENCANA
BELANJA	610,376,136,000.00
Belanja Tidak Langsung	319,443,781,000.00
Belanja Langsung	290,932,355,000.00

Gambar 3.33.

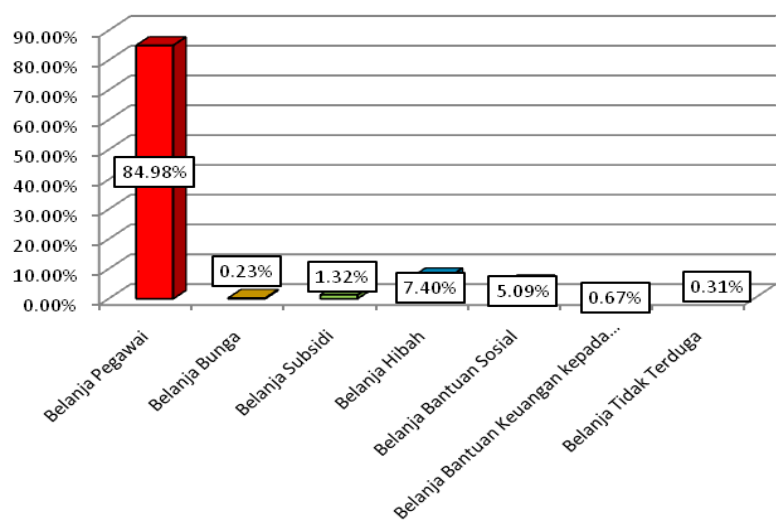
Struktur Rencana Belanja Kota Cilegon Tahun 2010



Pada tahun 2010 belanja langsung di perkirakan terdiri dari belanja pegawai sebesar 84.98%, belanja hibah sebesar 7.4%, belanja bantuan sosial sebesar 5.09%, belanja subsidi sebesar 1.32%, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar 0.67% dan belanja tidak terduga sebesar 0.31%.

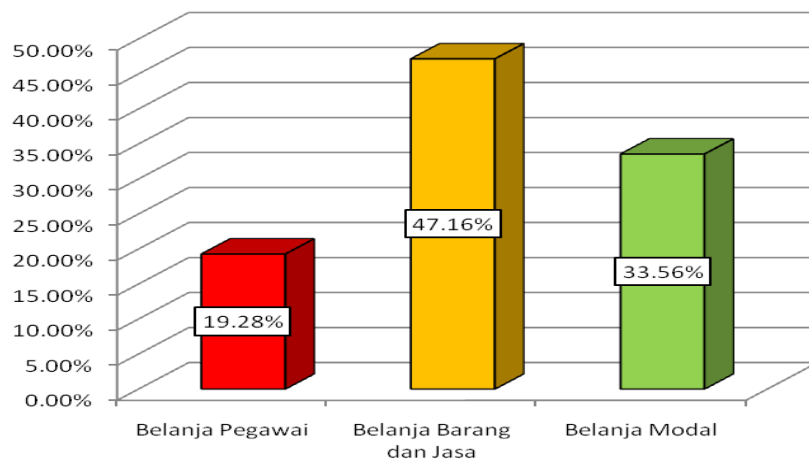
Gambar 3.34

Struktur Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon tahun 2010



Untuk belanja langsung pada tahun 2010 terdiri atas belanja pegawai sebesar 19.28%, belanja barang dan jasa sebesar 47.16% dan belanja modal sebesar 33.56%.

Gambar 3.35.
Struktur Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun 2010



B. Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah

Dalam pengelolaan belanja daerah yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan penatausahaan belanja setiap tahun masih mengalami permasalahan. Secara eksternal permasalahan timbul akibat sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah serta adanya dinamika masyarakat yang menginginkan percepatan pelaksanaan pembangunan yang berhadapan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang masih relatif terbatas.

1. Permasalahan

Permasalahan yang di hadapi dalam rangka keuangan daerah tahun 2005 hingga 2009 adalah sebagai berikut :

- a. SDM di bidang Pengelolaan Keuangan terutama dalam hal penyusunan APBD dan laporan keuangan masih menghadapi kendala dalam hal kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Sarana dan prasarana penunjang untuk menyikapi peraturan perundangan-undangan yang selalu berkembang dalam kurun waktu tersebut masih kurang, terutama dalam penyempurnaan sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
- c. Banyaknya peraturan-perundangan yang harus segera di pahami oleh pengelola keuangan di SKPD membuat banyaknya interpretasi yang masih kurang sehingga masih tersendatnya penyusunan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.
- d. Banyaknya peraturan perundangan dari pusat yang memerlukan peraturan turunannya untuk memperjelas/menjabarkan sehingga dalam kurun waktu tahun 2005

s/d 2006 baru pada tahap penyusunan atau penertiban peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan daerah yang dijadikan dasar pengelolaan keuangan di Kota Cilegon.

2. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan bintek/kursus singkat/sosialisasi terhadap pejabat pengelola keuangan sampai kepada tataran pelaksana pengelola keuangan di Kota Cilegon secara terus-menerus.
- b. Bekerja sama dengan pihak BPKP dalam hal penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan, dalam hal pengelolaan keuangan mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang sampai dengan tahun 2009 sudah berjalan dengan baik.
- c. Menyusun beberapa produk hukum terkait dengan turunan produk hukum dari pusat seperti, Perda, Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah, Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan lain sebagainya, sebagai penunjang dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan belanja daerah agar dapat memenuhi kebutuhan belanja sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan, maka sesuai dengan ketentuan yang ada dimungkinkan adanya pembiayaan pengeluaran yaitu transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus apabila jumlah pendapatan daerah lebih besar dari total belanja daerah.

C. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada upaya mengefektifkan dan mengefesiensikan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan bidang pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja untuk penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dengan fokus utama penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana infrastruktur dalam bidang pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial fasilitas umum yang layak yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Perubahan pedoman dari kepmendagri no 29 tahun menjadi permendagri 13 tahun 2006 merubah struktur pembiayaan daerah, sehingga pembahasan komponen pembiayaan akan dibagi dua periode yaitu periode 2005-2006 dan 2007-2009

A. Target dan Realisasi Pembiayaan

A.1. Pembiayaan Daerah Tahun 2005

Tabel 3.19
Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon 2005

PEMBIAYAAN	RENCANA	REALISASI
Penerimaan Daerah	39,908,936,855.00	36,851,871,230.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	36,908,936,855.00	36,851,871,230.00
Transfer dari Dana Cadangan	-	-
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	3,000,000,000.00	-
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	-	-
Jumlah Penerimaan Daerah	39,908,936,855.00	36,851,871,230.00
Pengeluaran Daerah	18,672,702,970.00	18,150,002,670.00
Transfer ke Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	8,929,278,070.00	8,929,278,070.00
Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Berjalan	-	-
Pembayaran Proyek Lanjutan	4,674,224,900.00	4,506,675,900.00
Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ke III	1,069,200,000.00	714,048,700.00
Jumlah Pengeluaran Daerah	18,672,702,970.00	18,150,002,670.00
Jumlah Pembiayaan	21,236,233,885.00	18,701,868,560.00
Sisa Perhitungan	-	34,998,852,544.00

Dari pos penerimaan daerah pada tahun 2005 terealisasi sebesar 36 milyar, ha ini dicapai dengan memasukan silpa tahun 2004 sebesar 36 milyar. Dari pos pengeluaran daerah terealisasi sebesar 18 milyar yang terdiri dari penyertaan modal sebesar 4 milyar, pembayaran utang jatuh tempo sebesar 8.9 milyar, pembayaran proyek lanjutan sebesar 4.5 milyar dan penyelesaian kewajiban kepada piha ketiga sebesar 714 juta, sehingga selisih antara pengeluaran dan penerimaan daerah adalah sebesar 18.15 milyar. Sehingga jika ditambahkan kepada surplus selisih antara pendapatan dan belanja sebesar 16 milyar maka sisa perhitungan pada tahun 2005 adalah sebesar 34.99 milyar.

A.2. Pembiayaan Daerah Tahun 2006

Tabel 3.20
Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon Tahun 2006

PEMBIAYAAN	RENCANA	REALISASI
Penerimaan Daerah	101,304,713,544.00	34,998,855,544.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	34,998,855,544.00	34,998,855,544.00
Transfer dari Dana Cadangan	-	
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	66,305,858,000.00	
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan		
Jumlah Penerimaan Daerah	101,304,713,544.00	34,998,855,544.00
Pengeluaran Daerah	25,803,195,208.33	43,639,513,835.00
Transfer ke Dana Cadangan	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Penyertaan Modal	9,527,600,000.00	9,527,600,000.00
Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	9,906,860,208.33	3,000,000,000.00
Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Berjalan	-	21,881,706,135.00
Utang Belanja Bangunan Gedung	368,735,000.00	274,625,000.00
Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ke III	1,000,000,000.00	997,102,700.00
Pengeluaran Di Luar Anggaran		2,958,480,000.00
Jumlah Pengeluaran Daerah	25,803,195,208.33	43,639,513,835.00
Jumlah Pembiayaan	75,501,518,335.67	-8,640,658,291.00
Sisa Perhitungan	-	-

Dari pos penerimaan daerah pada tahun 2006 terealisasi sebesar 34 milyar, ha ini dicapai dengan memasukan silpa tahun 2005 sebesar 34 milyar. Dari pos pengeluaran daerah terealisasi sebesar 43 milyar yang terdiri dari penyertaan modal sebesar 9.5 milyar, pembayaran utang jatuh tempo sebesar 3 milyar, utang belanja bangunan gedung sebesar 274 juta dan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga sebesar 997 juta, sehingga selisih antara pengeluaran dan penerimaan daerah adalah minus 8.6 milyar. Sehingga jika ditambahkan kepada surplus selisih antara pendapatan dan belanja sebesar 8.6 milyar maka sisa perhitungan pada tahun 2006 adalah nihil.

A.3. Pembiayaan Daerah Tahun 2007

Tabel 3.21
Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon 2007

PEMBIAYAAN DAERAH	RENCANA	REALISASI	%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	124,354,470,296.00	59,387,810,140.00	47.76%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	19,127,324,938.00	19,127,324,938.00	100.00%
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	89,852,331,363.00	20,000,000,000.00	22.26%
Penerimaan Piutang Daerah	15,374,813,995.00	20,260,485,202.00	131.78%
Pencairan Dana Deposito			
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	44,205,999,995.00	24,581,000,000.00	55.61%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20,250,000,000.00	18,750,000,000.00	92.59%
Pembayaran Pokok Utang	7,155,999,995.00	531,000,000.00	7.42%
Pemberian Pinjaman Daerah	1,800,000,000.00	300,000,000.00	16.67%
Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito	15,000,000,000.00	5,000,000,000.00	33.33%
Pembiayaan Netto	80,148,470,301.00	34,806,810,140.00	43.43%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	36,937,017,959.00	

Pada tahun 2007 komponen penerimaan daerah terealisasi sebesar 59 milyar yang berasal dari komponen SiLpa Tahun anggaran sebelumnya sebesar 19 milyar, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah sebesar 20 milyar dan penerimaan piutang daerah sebesar 20.6 milyar, sedang dari komponen pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar 24 milyar yang berasal dari komponen penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 18.75 milyar, pembayaran pokok utang sebesar 531 juta, pemberian pinjaman daerah sebesar 300 juta dan investasi jangka pendek dalam deposito sebesar 5 milyar, sehingga selisih antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebesar 34.8 milyar sehingga jika di tambahkan kepada selisih pendapatan dan belanja sebesar 864 juta maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaannya adalah sebesar 36.9 milyar.

A.4. Pembiayaan Daerah Tahun 2008

Tabel 3.22
Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon 2008

PEMBIAYAAN DAERAH	RENCANA	REALISASI	%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	129,670,859,490.00	55,287,997,769.00	42.64%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35,670,859,490.00	35,670,859,490.00	100.00%
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	70,000,000,000.00	-	0.00%
Penerimaan Piutang Daerah	24,000,000,000.00	19,617,138,279.00	81.74%
Pencairan Dana Deposito			

PEMBIAYAAN DAERAH	RENCANA	REALISASI	%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	31,369,982,000.00	21,335,072,000.00	68.01%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	100.00%
Pembayaran Pokok Utang	18,369,982,000.00	8,335,072,000.00	45.37%
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito	-	-	
Pembiayaan Netto	98,300,877,490.00	33,952,925,769.00	34.54%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	2,603,016,758.00	

Pada tahun 2008 komponen penerimaan daerah terealisasi sebesar 55 milyar yang berasal dari komponen SiLpa Tahun anggaran sebelumnya sebesar 35.6 milyar, dan penerimaan piutang daerah sebesar 19.6 milyar, sedang dari komponen pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar 21 milyar yang berasal dari komponen penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 13 milyar dan pembayaran pokok utang sebesar 8 milyar, , sehingga selisih antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebesar 33.95 milyar sehingga jika di tambahkan kepada selisih pendapatan dan belanja yang mengalami defisit sebesar 31.35 milyar maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaannya adalah sebesar 2.6 milyar.

A.5. Pembiayaan Daerah Tahun 2009

Tabel 3.23
Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon 2009

PEMBIAYAAN DAERAH	RENCANA	REALISASI	%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	39,303,016,758.00	11,839,404,752.00	33.40%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2,603,016,758.00	643,965,187.00	24,70%
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	
Penerimaan Piutang Daerah	16,700,000,000.00	11,195,439,565.00	67.06%
Pencairan Dana Deposito	20,000,000,000.00	-	0.00%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16,275,872,000.00	16,275,872,000.00	100.00%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	100.00%
Pembayaran Pokok Utang	8,275,872,000.00	8,275,872,000.00	100.00%
Pemberian Pinjaman Daerah			
Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito			
Pembiayaan Netto	23,027,144,758.00	-2,473,627,757.00	-11%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	15,611,843,448.00	

Pada tahun 2009 komponen penerimaan daerah terealisasi sebesar 13 milyar yang berasal dari komponen SiLpa Tahun anggaran sebelumnya sebesar 2.6 milyar, dan penerimaan piutang daerah sebesar 11 milyar, sedang dari komponen pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar 16 milyar yang berasal dari komponen penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 8 milyar dan pembayaran pokok utang sebesar 8 milyar, , sehingga selisih antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah mengalami defisit sebesar 2.4 milyar sehingga jika di tambahkan kepada selisih pendapatan dan belanja yang mengalami Surplus sebesar 18 milyar maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaannya adalah sebesar 15.61 milyar.

Tabel 3.24
Realisasi Pembiayaan Tahun 2007-2009

PEMBIAYAAN DAERAH	2007	2008	2009
Penerimaan Pembiayaan Daerah	59,387,810,140.00	55,287,997,769.00	13,802,244,243.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	19,127,324,938.00	35,670,859,490.00	2,603,016,758.00
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	20,000,000,000.00	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	20,260,485,202.00	19,617,138,279.00	11,199,227,485.00
Pencairan Dana Deposito	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24,581,000,000.00	21,335,072,000.00	16,275,872,000.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	18,750,000,000.00	13,000,000,000.00	8,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	531,000,000.00	8,335,072,000.00	8,275,872,000.00
Pemberian Pinjaman Daerah	300,000,000.00	-	-
Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito	5,000,000,000.00	-	-
Pembiayaan Netto	34,806,810,140.00	33,952,925,769.00	-2,473,627,757.00

PEMBIAYAAN DAERAH	2007	2008	2009
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	35,670,859,490.00	2,603,016,758.00	15,611,843,448.00

A.6. Pembiayaan Daerah Tahun 2010

Tabel 3.26
Rencana Dan Realisasi Pembiayaan 2010

Pembiayaan Daerah	Rencana
Penerimaan Pembiayaan Daerah	35,000,000,000.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-
Penerimaan Piutang Daerah	15,000,000,000.00
Pencairan Dana Deposito	20,000,000,000.00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22,827,592,000.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	4,827,592,000.00
Pemberian Pinjaman Daerah	12,000,000,000.00
Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito	-
Pembiayaan Netto	12,172,408,000.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-

Pada tahun 2010 penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar 35 milyar yang bersumber dari penerimaan piutang daerah sebesar 15 milyar dan pencairan dana deposito sebesar 20 milyar, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperkirakan sebesar 22.8 milyar yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 6 milyar, pembayaran pokok utang sebesar 4.8 milyar dan pemberian pinjaman daerah sebesar 12 milyar, sehingga jika ditambahkan kepada selisih pendapatan dan belanja yang mengalami defisit sebesar 12 milyar maka diperkirakan tidak ada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.

B. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan adalah merupakan pemahaman terhadap komponen Anggaran Daerah untuk menanggulangi defisit dari selisih antar pendapatan dan belanja. Namun sesungguhnya defisit riil anggaran itu sendiri tidak hanya berasal dari defisit belanja terhadap pendapatan, namun juga berasal dari pengeluaran pembiayaan, antara lain untuk pembayaran utang daerah serta penyertaan modal.

Tabel 3.26
Defisit Riil Anggaran

NO	Uraian	2007 (Juta Rp)	2008 (Juta Rp)	2009 (Juta Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	463,434.19	554,373.09	600,063,57
2.	Realisasi Belanja Daerah	461,303.98	585,723.00	582,812,92
3.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24,581.00	21,335.07	16,275.87
	Defisit riil	(22,450.79)	(52,684.98)	974.78

Untuk menutup defisit riil tersebut, maka hal ini ditutup melalui penerimaan SILPA tahun sebelumnya, pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah.

Tabel 3.27
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	Uraian	Tahun		
		2007 (Juta Rp.)	2008 (Juta Rp.)	2009 (Juta Rp.)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	19,127.32	35,670,86	643,97
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	20,000.00	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	20,260.49	19.617,14	11,195.44
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	36,837.02	2,603,12	12,814.18

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
 **) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Proyeksi Pendapatan Kota Cilegon merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam manajemen penganggaran keuangan daerah terutama berkaitan dengan perencanaan Pembangunan. Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 maka dibutuhkan proyeksi Target Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2013-2015.

Tabel 3.28
Target Pendapatan Daerah Kota Cilegon Tahun 2013-2016 (Rp.)

NO.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		REALISASI	RENCANA	RENCANA	RENCANA	RENCANA	RENCANA
	PENDAPATAN DAERAH	858.320.973.326	1.069.436.272.751	934.766.873.707	1.035.668.513.400	1.098.155.423.400	1.165.280.060.200
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	253.212.004.831	339.074.767.867	208.187.737.698	277.975.090.000	289.636.140.000	301.809.120.000
1.1	PAJAK DAERAH	172.965.160.026	152.270.000.000	126.565.000.000	187.487.000.000	194.911.000.000	203.409.000.000
1.2	RETRIBUSI DAERAH	15.473.857.204	10.859.235.000	110.109.047.186	16.949.700.000	17.697.000.000	18.371.350.000
1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.072.057.393	7.276.339.412	10.109.047.186	10.750.000.000	13.750.000.000	16.250.000.000
1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	54.700.930.208	168.669.193.455	61.413.690.512	62.788.390.000	63.278.140.000	63.778.770.000
2	DANA PERIMBANGAN	417.147.321.024	521.390.301.662	584.162.409.009	572.460.039.400	616.815.999.400	664.716.156.200
2.1	BAGI HASIL PAJAK & BAGI HASIL BUKAN PAJAK	97.707.681.024	115.477.043.662	117.262.409.009	73.648.039.400	78.139.039.400	82.985.039.400
2.2	DANA ALOKASI UMUM	315.485.240.000	405.584.438.000	461.400.000.000	498.312.000.000	538.176.960.000	581.231.116.800
2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	3.954.400.000	328.820.000	5.500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	187.961.647.471	208.971.203.222	142.416.727.000	185.233.384.000	191.703.284.000	198.754.784.000
3.1	HIBAH	0	0	0	0	0	0
3.2	DANA DARURAT	0	0	0	0	0	0
3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	71.300.565.341	109.663.919.222	108.716.727.000	116.526.100.000	122.996.000.000	130.047.500.000
3.4	DANA PENYESUIAN DAN OTONOMI KHUSUS	91.061.082.130	58.707.284.000	28.400.000.000	58.707.284.000	58.707.284.000	58.707.284.000
3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	25.600.000.000	40.600.000.000	5.300.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000

Keterangan : Pada Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah Tahun 2012 terdapat Pendapatan dari Penggantian Investasi Kubang Sari sebesar Rp. 98.510.879.600,-

Sumber : DPPKD Kota Cilegon, Tahun 2012

Tabel 3.29
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

NO.	URAIAN	2007	2008	2009	2010
A	Belanja Langsung	56,439,975,386	56,939,245,141	53,557,427,520	59,320,110,599
1	Belanja Honor PNS Khusus untuk guru dan tenaga medis	-	-		
2	Belanja Honor Non PNS Khusus untuk guru dan tenaga medis	7,270,525,000	7,948,949,000	7,425,055,000	16,985,775,000
3	Belanja Honor PNS Khusus (Tim Pengadaan/Tim Pemeriksa)	1,038,060,000	2,100,525,000	945,250,000	885,965,175
4	belanja beasiswa pendidikan PNS	544,100,000	908,800,000	445,500,000	455,000,000
5	Belanja Jasa Kantor (listrik air telepon)	12,358,993,956	15,369,934,816	15,429,828,040	15,407,677,264
6	Honor Tenaga kerja Non PNS	21,458,775,000	14,183,960,900	11,595,062,220	7,787,524,000
7	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Bermotor	8,089,778,850	10,514,364,325	12,336,963,260	11,998,168,160
8	Belanja Premi Asuransi	3,345,167,580	2,988,836,600	2,121,400,000	1,722,621,000
9	Belanja Sewa Gedung Kantor	155,000,000	160,000,000	160,000,000	200,000,000
10	Belanja Sewa Peralatan/perlengkapan kantor	2,179,575,000	2,763,874,500	3,098,369,000	3,877,380,000
B	Pembiayaan Pengeluaran	22,155,999,995	18,369,982,000	8,275,872,000	3,448,256,000
1	Pembentukan Dana Cadangan	15,000,000,000	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	7,155,999,995	18,369,982,000	8,275,872,000	3,448,256,000

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berikut ini diuraikan tentang kerangka pendanaan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015, khususnya kerangka pendanaan pada tahun 2013-2015.

Tabel 3.30
Kerangka Pendanaan Kota Cilegon Tahun 2013-2016 (Rp.)

NO.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		REALISASI	RENCANA	RENCANA	RENCANA	RENCANA	RENCANA
I.	PENDAPATAN	858.320.973.326	1.069.436.272.751	934.766.873.707	1.035.668.513.400	1.098.155.423.400	1.165.280.060.200
II.	BELANJA	839.872.747.801	1.000.383.449.091	1.009.775.599.323	1.035.668.513.400	1.098.155.423.400	1.165.280.060.200
II.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	434.744.116.702	490.581.482.432	467.343.646.485	523.657.642.196	538.183.635.599	531.819.110.903
II.1.1	BTL Belanja Pegawai	346.846.668.100	452.944.302.795	423.606.844.470	488.399.560.181	495.725.553.584	503.161.436.888
II.1.2	BTL Belanja Subsidi	7.654.895.053	0	0	0	0	0
II.1.3	BTL Belanja Hibah	54.729.254.130	21.693.000.000	27.178.900.000	19.499.772.000	27.899.772.000	14.499.772.000
II.1.3.1	BTL Belanja Hibah Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah		7.800.000.000	9.854.400.000	9.854.400.000	18.254.400.000	4.854.400.000
II.1.3.2	BTL Belanja Hibah Selain Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah		13.893.000.000	17.324.500.000	9.645.372.000	9.645.372.000	9.645.372.000
II.1.4	BTL Belanja Bantuan Sosial	23.385.002.176	13.328.852.952	14.638.352.000	13.838.760.000	12.638.760.000	12.238.352.000
II.1.4.1	BTL Belanja Bantuan Sosial Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah		9.211.580.000	14.263.352.000	13.463.760.000	12.263.760.000	11.863.352.000
II.1.4.2	BTL Belanja Bantuan Sosial Selain Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah		4.117.272.952	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000
II.1.5	BTL Belanja Bantuan Keuangan	669.547.243	669.550.015	669.550.015	669.550.015	669.550.015	669.550.015
II.1.6	BTL Belanja Tidak Terduga	1.458.750.000	1.945.776.670	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
II.2	BELANJA LANGSUNG (BL)	405.128.631.099	509.801.966.659	542.431.952.838	512.010.871.204	559.971.787.801	633.460.949.297
	SURPLUS/(DEFISIT)	18.448.225.525	69.052.823.660	-75.008.725.616	0	0	0
III.	PEMBIAYAAN						
III.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.485.231.900	57.433.457.425	188.519.605.216	19.500.000.000	16.500.000.000	7.500.000.000

NO.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		REALISASI	RENCANA	RENCANA	RENCANA	RENCANA	RENCANA
III.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21.485.231.900	37.433.457.425	188.519.605.216	19.500.000.000	16.500.000.000	7.500.000.000
III.1.2	Pencairan Dana Deposito	0	20.000.000.000	0			
III.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	27.975.401.485	113.510.879.600	19.500.000.000	16.500.000.000	7.500.000.000
III.2.1	Pembentukan Dana Cadangan (Pilkada 2015)	0	0	5.000.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000	0
III.2.2	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	2.500.000.000	26.000.000.000	10.000.000.000	9.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
	PT. PAM	2.500.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	PT. BPRS	0	20.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	PT. PCM	0	0	0			
	Bank Jabar Banten	0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
III.2.3	Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito	0	0	98.510.879.600*)	0	0	0
III.2.4	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0	1.975.401.485	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	18.985.231.900	29.458.055.940	75.008.725.616	0	0	0
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	37.433.457.425	98.510.879.600	0	0	0	0

Keterangan :

*) Pengalihan penggantian investasi Pelabuhan Kubang Sari untuk penyertaan modal pada PT. PCM dalam pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Kota Cilegon yang pelaksanaannya melalui pola kerjasama pemerintah swasta (KPS)

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berikut ini diuraikan mengenai **permasalahan pembangunan** dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diperkirakan masih dihadapi oleh Kota Cilegon dalam periode tahun 2013-2015.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
A.	Urusan Wajib			
1.	Pendidikan			Dinas Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan pada usia dini Belum adanya pemetaan kebutuhan sekolah seperti rasio kebutuhan satuan pendidikan terhadap permukiman permanen, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan rombongan belajar Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pengajar dalam mengembangkan kemampuan peserta didik dan masih belum optimalnya penerapan RPP berdasarkan silabus Masih belum optimalnya rasio guru terhadap murid, sehingga ada beberapa guru mengajar lebih dari satu mata pelajaran, semata mata hanya untuk memenuhi standar jam wajib tatap muka antara murid dan guru Masih ada guru yang menyandang pendidikan yang di bawah S1 dan D-IV Masih adanya beberapa jejang pendidikan yang belum mampu mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif atau pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Masih ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan/memberlakukan aturan jumlah siswa 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan sosialisasi secara optimal tentang pemberian pendidikan anak di masa masa golden age (usia dini) baik secara langsung maupun dilakukan melalui bantuan media cetak dan elektronik Di terbitkannya regulasi tentang pemetaan rasio kebutuhan sekolah melalui penelitian kebutuhan satuan biaya pendidikan terhadap pemukiman permanen Peningkatan kapasitas kemampuan tenaga pendidik melalui diklat dikat yang di lakukan secara eksternal maupun internal Pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar terhadap jumlah siswa yang ada di Kota Cilegon melalui perekrutan yang profesional Perlu peningkatan strus tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kebutuhan tenaga pengajar Peningkatan pengawaan terhadap penyelenggaraan pendidikan Kota Cilegon yang lebih optimal Adanya regulasi tentang jumlah siswa perkelas yang sesuai dengan standar nasional. Peningkatan dan pengembangan Ruang kelas baru didalam pemenuhan kebutuhan jumlah siswa yang 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>per ruang kelas yang sesuai standar nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya fasilitas pelayanan pendidikan seperti daya tampung ruang kelas dan ruang laboratorium pada masing masing jenjang pendidikan Masih perlunya penanganan rehabilitasi ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya ditingkat dasar, menengah dan kejuruan Pembebasan biaya pendidikan yang di berikan saat ini masih belum spesifik kepada masyarakat rumah tangga sasaran Evaluasi diri sekolah belum berjalan secara optimal. 	<p>ada pada jenjang pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlunya penanganan rehabilitasi ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya ditingkat dasar, menengah dan kejuruan Perlu dilakukan analisis secara tepat dan komperhensif sehingga pemberian pembebasan biaya pendidikan dapat benar benar di rskan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam rangka pengentas wajib belajar 12 tahun Perlunya penerapakan evaluasi diri sekolah kepada sekolah. 	
2.	Kesehatan			Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> Secara umum ketersediaan sarana prasarana kesehatan telah cukup tersedia, walaupun di beberapa wilayah masih ada yang belum terlayani sarana kesehatan secara memadai. Kebutuhan akan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar di beberapa wilayah masih sangat diperlukan Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan secara merata, bermutu dan terjangkau seperti rehabilitasi, peningkatan status, dan pembangunan fasilitas kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam pencapaian target MDG's Penanganan permasalahan gizi secara menyeluruh Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini Penataan dan pengembangan sistem informasi 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber dari APBD Kota Cilegon belum masih mengutamakan prasarana dan sarana kesehatan belum mengutamakan upaya pencegahan, promosi kesehatan, peningkatan pelayanan lansia, peningkatan pelayanan balita dan keselamatan ibu melahirkan dan anak. • Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi. Kualitas tenaga kesehatan juga perlu untuk ditingkatkan. Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu. • Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas • Masyarakat cenderung masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum optimal merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Disamping itu pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya 	<p>kesehatan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jejaring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif • Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk mencapai indikator SPM dan MDG's • Peningkatan sumber daya kesehatan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya serta pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kota Cilegon terutama di daerah kurang diminati dan rawan bencana • Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan dasar • Optimalisasi fasilitas kesehatan yang ada terutama Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Poskesdes sebagai salah satu wadah di masyarakat untuk mampu merubah masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) • Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, baik peningkatan sarana dan prasarana maupun peningkatan SDM tenaga kesehatan RSUD. 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes perlu untuk terus ditingkatkan dan dioptimalkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit semakin meningkat, salah satu faktor pendorongnya adalah adanya jaminan pembiayaan kesehatan di rumah sakit bagi masyarakat miskin. Untuk meningkatkan akses tersebut, pemerintah memiliki keterbatasan pada jumlah tempat tidur (bed) kelas III yang dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu dalam pelaksanaannya sistem rujukan belum dapat berjalan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan relatif kurang optimal dan efisien. 		
3.	Pekerjaan Umum			Dinas Pekerjaan Umum
		<p><u>Pemenuhan Infrastruktur Jalan Kota yang berstandar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> penyediaan infrastruktur jalan masih belum dapat diandalkan sebagai pendukung perekonomian kota dalam memberikan pelayanan mobilitas orang, barang dan jasa. Bercampurnya pergerakan lalu lintas dan berat beban kendaraan yang melintas pada ruas-ruas jalan di Kota Cilegon menyebabkan penurunan kualitas dan pelayanan jalan. keterbatasan anggaran dalam mengatasi tingginya 	<ul style="list-style-type: none"> sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terkait kesadaran masyarakat terhadap dukungan pembangunan jalan penambahan alokasi anggaran, penerbitan peraturan yang mengatur kapasitas kendaraan sesuai dengan klas jalan dan penanganan jalan sesuai dengan kebutuhan kelengkapannya Perlunya usaha membagi beban kepadatan arus lintas pada rute alternatif 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>nilai lahan terhadap kegiatan pelebaran jalan</p> <p>Bencana Banjir dan Genangan</p> <ul style="list-style-type: none"> terjadinya banjir, saat penghujan dengan intensitas yang cukup tinggi dan durasi yang cukup lama ditambah dengan saluran-saluran utama yang kapasitasnya sangat berkurang sehingga tidak dapat lagi menampung debit air limpasan baik dari air hujan maupun air buangan dari penduduk. Pemanfaatan saluran drainase yang menjadi satu dengan saluran irigasi salah satu penyebab timbulnya genangan, masuknya air limpasan dari daerah permukiman dan areal persawahan secara bersamaan menyebabkan saluran drainase yang ada tidak mampu menampung debit air akibat saluran drainase dan irigasi yang menjadi satu penyumbatan saluran akibat banyak nya sampah dan sedimentasi 	<ul style="list-style-type: none"> koordinasi intensif dan terpadu terkait penanganan saluran dan gorong-gorong di ruas jalan nasional dan diperlukan payung hukum terkait penataan atau relokasi bangunan-bangunan yang menimbulkan penyebab banjir. dukungan anggaran yang besar guna melakukan peningkatan dan pembangunan saluran. Perlunya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengaturan saluran drainase dan Irigasi Penyuluhan dan kampanye kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran drainase 	
4	Perumahan			Dinas Pekerjaan Umum
		<ul style="list-style-type: none"> permukiman kumuh karena dipicu oleh tingkat urbanisasi dan tingginya nilai lahan, Kelangkaan prasarana dan sarana dasar, ketidak mampuan memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman yang ada, dan masih rendahnya kualitas permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> peran aktif masyarakat dan koordinasi intensif dengan instansi/SKPD teknis lain. Upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Cilegon dan Pusat harus bersinergi terhadap pembangunan RUSUNAWA 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum diterapkannya secara optimal pencapaian standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman yang berbasis indeks pembangunan berkelanjutan. • Adanya permasalahan kawasan kumuh dan pemenuhan rumah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. • Sulitnya jangkauan ketersediaan pada lingkungan perumahan yang hanya dilalui jalan setapak atau jalan kecil/gang. • Kesulitan perawatan jaringan kabel lampu Hias yang berada di bawah tanah mengalami kerusakan (terbakar) karena tertanam di tengah median jalan protokol tanpa dilengkapi casing pelindung berupa pipa, terpasangnya pot permanen dan pagar besi pada median jalan. • Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam melaksanakan perawatan jaringan kabel tersebut. • Terjadinya kerusakan diluar dari pada kebiasaan/rutin pemeliharaan, seperti trafo yang meledak menyulitkan petugas pemelihara dalam memperbaiki jaringan PJU dari trafo tersebut. • Kegiatan optimalisasi dan Revitalisasi PJU mengalami kendala dalam ketersediaan data pendukung berupa jumlah dan panjang jalan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instalasi yang dipasang pada jalan kecil/gang cukup dengan neonisasi(lampu neon 40 watt). Pemasangannya dapat dianggarkan dari APBD namun dalam hal pembayaran rekening dan pemeliharaannya dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat sekitar. Solusi ini harus diiringi dengan kesadaran masyarakat, bahwa jaringan PJU tersebut adalah milik mereka dan harus dirawat serta dikelola secara bersama-sama. • Pemeliharaan Lampu Hias, dimana jaringan kabel yang tertanam harus dibungkus dengan casing dan diletakkan tidak pada tengah median, tetapi terpasang pada sisi kanan/kiri median. • Dibutuhkan pula koordinasi intensif dengan SKPD lain dalam mengelola median jalan protokol. • Pemeliharaan PJU, sebaiknya pengadaan barang/suku cadang listrik yang sulit diprediksi kebutuhannya baik jenis maupun jumlahnya, penyediaannya terpisah dari suku cadang yang bersifat rutin. Pengadaan suku cadang yang bersifat insidental tersebut diadakan sesuai dengan kejadian kerusakan. • Pelibatan personil dari instansi/SKPD teknis lainnya harus dibentuk tim teknis, agar dapat memperlancar ketersediaan data dan proses penyusunan dokumen terkait dengan Revitalisasi dan Optimalisasi PJU 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
5.	Penataan Ruang			Dinas Tata Kota
		<ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan RTRW Kota Cilegon menghadapi dinamika pemanfaatan ruang yang tumbuh pesat di Kota Cilegon. Hal ini menjadi tantangan karena bagaimanapun regulasi harus tetap dijalankan sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang-undangan yang berlaku. • belum tersedianya juklak dan juknis prasarana kota, reklame dan tower. Selama ini acuan juklak dan juknis tersebut mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ada, seperti Peraturan Menteri dan sebagainya. • ketiadaan data-data seperti data jumlah kelurahan yang telah terlayani oleh prasarana kota ; data jumlah kawasan yang sudah direvitalisasi secara arsitektural ; data jumlah bangunan yang sudah dievaluasi kualitasnya ; maupun data jumlah reklame yang sudah dievaluasi kualitasnya. • Kurangnya anggaran Pemerintah untuk Pemasangan Baliho Promosi dan Propaganda Pemerintah Daerah, 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya perencanaan yang bersifat rinci yang merupakan turunan dari perencanaan yang bersifat umum yang telah ada yaitu RTRW. dapat menjawab tantangan dari pesatnya dinamika pemanfaatan ruang. • Perlunya dibuatkan juklak dan Juknis untuk pelaksanaan untuk pengaturan prasarana kota • Perlunya diadakan pendataan aset yang berhubungan dengan prasarana kota • Bentuk dari Baliho dan promosi ini adalah berupa digital printing dengan bahan vinyl dan dipasang pada 5 Bando dan 2 baligo diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk peran serta pihak swasta yaitu biro advertising dalam menyampaikan pesan program-program pembangunan pemerintah Kota Cilegon. Dengan demikian, terjadi efisiensi APBD yang diperoleh karena peran aktif swasta (public private partnership). 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
6.	Perencanaan Pembangunan			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya SDM perencanaan dalam pemahaman pelaksanaan tupoksi, sehingga masih belum maksimalnya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, baik dalam koordinasi maupun pemahaman pada pemanfaatan teknologi dan informasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan • Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana masih menggunakan analisa sederhana yang dalam hal ini terbatas pada analisa sektoral atau per program, yang dapat mengakibatkan kegiatan yang dilaksanakan bersifat solusi sektoral atau tidak terintegrasi dengan penyelesaian masalah di sektor lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (<i>skill</i>) yang sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. • Pemahaman mengenai metoda tentang analisis perencanaan yang terintegrasi, hendaknya menjadi materi wajib yang harus dimiliki oleh SDM perencana Bappeda, yang dapat diperoleh baik melalui diklat/kursus singkat ataupun workshop internal 	
7.	Perhubungan			Dinas Perhubungan
		<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya ketertiban pengguna jalan dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan kesadaran pengguna jalan dalam menggunakan alat keselamatan berkendara seperti sabuk pengaman, helm, dll. • Masih banyaknya perlintasan sebidang (jalan dengan rel kereta api) yang tidak dilengkapi dengan pintu perlintasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sosialisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. • Melengkapi setiap perlintasan sebidang dengan pintu perlintasan serta meminimalisir perencanaan pembangunan jalan sebidang dengan rel. • Pembatasan angkutan umum yang melintas di jalur protokol terutama pada jam-jam sibuk. 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> • Ruas jalan protokol yang kecil tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kendaraan yang melintas. • Tumbuhnya pusat-pusat kegiatan (perkantoran, perdagangan dan jasa) di sepanjang jalan protokol yang tidak dilengkapi dengan lahan parkir yang memadai. • Banyaknya awak angkutan kota yang tidak mematuhi rute yang telah ditentukan sehingga semua angkutan kota hanya tertumpu pada ruas jalan protokol. • Tingginya biaya BBM menyebabkan tingginya ongkos angkutan kota. Namun di sisi lain akses masyarakat dalam kepemilikan sepeda motor semakin mudah yang pada akhirnya berakibat pada banyaknya angkutan kota yang kosong karena tidak ada penumpang. • Pelayanan perhubungan laut oleh Dishub Kota Cilegon terkendala oleh batasan wilayah laut yang menjadi kewenangan Kota, yaitu hanya 4 mil wilayah laut, sehingga tidak ada kegiatan pelayanan perhubungan laut yang signifikan karena telah dilakukan oleh ADPEL. • Minimnya jumlah petugas yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan, serta pelayaran dan kelautan. • Adanya tumpang tindih tupoksi antara Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban kendaraan yang parkir di bahu jalan, pembangunan gedung khusus parkir di sekitar jalan protokol, serta membuat Perda tentang Perparkiran. • Penertiban angkutan kota yang tidak mematuhi rute yang telah ditentukan. • Perlunya kajian pengembangan sistem angkutan umum kota Cilegon yang bersifat solutif terhadap permasalahan transportasi • Perlunya pengendalian efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan perhubungan laut oleh Dishub Kota Cilegon. • Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti diklat bersertifikat. • Merevisi Perwal tentang SOTK di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.. 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		Perhubungan dengan Dinas Tata Kota dalam hal penyediaan penerangan jalan umum (PJU) dan jembatan penyeberangan orang (JPO), dimana dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ keduanya merupakan bagian dari perlengkapan jalan.		
8.	Lingkungan Hidup			Badan Lingkungan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan timbulan Sampah dari masyarakat yang belum dapat terkendali secara maksimal • pengelolaan sampah di masyarakat maupun di TPA Bagendung yang masih membebani APBD • masih ada perusahaan yang mendapat peringkat merah dalam hal pencemaran air. Demikian pula masih terdapat pencemaran air yang diakibatkan usaha atau kegiatan. Untuk penanganan limbah B3, ternyata masih ada perusahaan yang belum memiliki izin, baik izin pengumpulan maupun izin TPS B3, masih ada kawasan dengan kondisi yang melebihi baku mutu ambien kualitas udara. • belum adanya lahan kritis yang direhabilitasi terdapat hutan yang berada pada pengelolaan Perhutani sehingga hutan yang ada di luar kewenangan dari Pemerintah Kota Cilegon. • keberadaan hutan kota yang walaupun telah ditetapkan dalam RTRW Kota Cilegon namun keberadaannya bukan dalam pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek peran serta masyarakat harus ditingkatkan sehingga potensi yang ada di masyarakat dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan • pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan, sosialisasi, mendorong pemerintah pusat dan propinsi dalam mensinkronkan program persampahan di Kota Cilegon • Perlu adanya pos pengaduan masyarakat sebagai akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk ditindaklanjuti. • Perlunya koordinasi dengan pihak Perhutani untuk mengatasi permasalahan lahan kritis • perbaikan yang dilakukan Pada aspek manajemen terutama adalah mempertegas wewenang pengelola dan menyusun uraian tugas dan tatalaksana kerja yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan pola operasional yang akan dilaksanakan. • memperkirakan kebutuhan biaya yang akan 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>Pemerintah Kota. Hal lain adalah ketidaktersedian data terkait dengan prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan. Padahal hal ini merupakan bagian dari SPM bidang lingkungan hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • keberadaan sumur resapan dimana belum terpenuhinya kebutuhan sumur resapan dibandingkan dengan luas tutupan lahan, sehingga pada kegiatan selanjutnya hendaknya difokuskan pada penggunaan lahan dengan kegiatan budidaya. • Selain hutan kota, ketidaktersedianya data mengenai kawasan perlindungan setempat menjadi permasalahan, padahal kawasan ini telah ditetapkan dalam RTRW Kota Cilegon, artinya perlu ada program atau kegiatan yang berkaitan dengan rencana ruang kawasan tersebut sesuai dengan umur rencana yaitu 20 tahun. • Terbatasnya jumlah SDM bidang lingkungan hidup yang handal. • Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengendalian lingkungan hidup. 	<p>diperlukan dalam rangka pelaksanaan aspek pembiayaan, juga ditetapkan rencana struktur retribusi yang mampu membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar rencana yang disusun diatas dapat dilaksanakan maka akan diperbaiki juga aspek pengaturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan, sehingga peraturan yang ada akan dapat menunjang rencana perbaikan yang akan dilakukan. . • Pengadaan Mobil Laboratorium, Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan B3 dan limbah B3, Inventarisasi kegiatan/usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan Pembuatan sumur resapan DED Hutan Kota di Cibeber Penghijauan Hutan Kota di Cibeber, Inventarisasi kawasan perlindungan setempat Penghijauan Lahan Kritis • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penghijauan lahan Kritis 	
9.	Pertanahan			Sekretariat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Pemerintah Desa menjadi Kelurahan berpengaruh terhadap tanah bengkok yang menjadi eks tanah bengkok sebagai tanah negara yang diberikan kepada daerah sebagai aset daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • pemerintah daerah kota Cilegon harus memverifikasi tanah eks bengkok dalam mengurus status kepemilikan tanah sampai dengan keluarnya sertifikat tanah sehingga kepemilikan tanah akan 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>Setelah terjadi perubahan dari Pemerintah Desa menjadi Kelurahan pengelolaan dan pemanfaatan eks tanah bengkok disesuaikan dengan situasi dan kondisi tanahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • masih terdapat beberapa bidang tanah yang berasal dari tanah eks bengkok yang belum bersertifikat. 	<p> jelas legalitas kepemilikannya, dan dapat menambah pembendaharaan asset Pemda</p> <ul style="list-style-type: none"> • mentertibkan administrasi tentang pertanahan serta kejelasan atas kepemilikan tanah tersebut harus mengeluarkan legalitas kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa sertifikat. 	
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan data kependudukan / kelurahan tidak mencantumkan jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran, kematian, perpindahan penduduk (baik masuk / keluar daerah) • Masih kurangnya pemahaman petugas pengelola administrasi kependudukan dalam menyusun laporan data kependudukan. • Masih kurangnya informasi tentang administrasi kependudukan secara umum kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data kependudukan harus dikelola dan dilaporkan secara kontinu dan berkala maka perlunya pembinaan terhadap petugas yang menangani masalah administrasi kependudukan maupun plaporannya. • Perlu dilaksanakannya kegiatan pembinaan dan informasi langsung administrasi kependudukan secara berkelanjutan. 	
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya keterampilan para kader dasa wisma • Masih terdapat rumah tidak layak huni/tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keterampilan para kader dasa wisma • Peningkatan alokasi anggaran untuk pemugaran rumah tidak layak huni/tidak sehat 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum memdainya keterampilan SDM guna meningkatkan tambahan pendapatan bagi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM keluarga guna berinovasi dalam menciptakan produk ataupun pemasarnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga 	
13.	Sosial			Dinas Sosial
		<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya keterampilan SDM PMKS • Terbatasnya pelayanan panti asuhan dalam penanganan PMKS 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pembekalan keterampilan yang berkelanjutan sehingga PMKS yang dibina mampu untuk mengembangkan keterampilan hidupnya di dalam memenuhi kebutuhan secara ekonomi dan siap di dalam bersaing di dunia kerja. • Keberadaan panti sosial di Kota Cilegon tetap strategis sebagai salah satu alternatif pelayanan kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam penanganan PMKS. Alasan utama panti sosial yaitu sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban pemerintah di dalam memenuhi hak-hak dasar warganya di dalam memberikan perlindungan. 	
14.	Ketenagakerjaan			Dinas Tenaga Kerja
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja dalam mengurangi pengangguran melalui penambahan peserta pelatihan dari seluruh 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
			kelurahan	
15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		<ul style="list-style-type: none"> Masih banyaknya koperasi yang berbadan hukum namun dalamkepengurusannya sudah tidak aktif lagi 	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran pembinaan koperasi diutamakan terhadap koperasi-koperasi yang masih berpotensi untuk aktif dan berkembang, sedangkan untuk koperasi yang kepengurusannya sudah tidak aktif akan ditinjau kembali ijin operasionalnya 	
16	Penanaman Modal			Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Penanaman Modal upaya yang masih belum memenuhi percepatan dan perluasan jangkauan promosi perlu promosi yang lebih tepat dan efisien dengan jangkauan yang lebih luas 	<ul style="list-style-type: none"> promosi melalui media website dan homepage. 	
17.	Kebudayaan			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		<ul style="list-style-type: none"> Belum seluruhnya jenis kesenian terpehuni alat keseniannya. Belum lengkapnya sarana dan prasarana sanggar seni budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan alat kesenian untuk setiap seni budaya yang dibina sarana dan prasarana sanggar seni budaya akan dipenuhi secara bertahap 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
18.	Kepemudaan dan Olahraga			Dinas Pemuda dan Olahraga
		<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kebutuhan gedung sport centre untuk mendukung keberhasilan Pemuda dan Olahraga dalam berprestasi dan berkeaktifitas Keterbatasan anggaran dalam memenuhi percepatan kebutuhan fasilitas kepemudaahn dan Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> percepatan pembangunan gedung sport Centre perlu diprioritaskan. Adanya koordinasi yang intensif kepada Departemen/Kementrian Pemuda dan Olehraga karena pembangunan gedung tersebut perlu didukung anggaran dari APBN (Pusat).Terkait dengan hal tersebut anggaran APBD Kota Cilegon akan terbantu. 	
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kesadaran pembinaan Ormas dan LSM dalam merespon program dan kegiatan yang ada di pemerintahan, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan tidak maksimal serta kurangnya koordinasi antara pemerintah, ormas dan LSM dalam mengefektifitaskan program Pembangunan Daerah, Belum mantapnya kesiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam. 	<ul style="list-style-type: none"> peningkatan pembinaan secara berkelanjutan terhadap Ormas dan LSM guna mencapai suatu hasil yang maksimal dalam mendukung suatu program dan kegiatan pemerintah agar dapat berjalan secara berkesinambungan antara Ormas / LSM dengan Pemerintah Kota Cilegon. pembinaan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana sehingga masyarakat Kota Cilegon Siap dan sigap bila mana terjadi suatu bencana alam yang tidak diinginkan 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian			
		<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan obyek dan subyek PBB serta Penilaian Individual PBB 	<ul style="list-style-type: none"> • PBB masih belum merupakan pajak daerah dan untuk kegiatan tersebut sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang dilaksanakan oleh kantor pajak pratama Cilegon 	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat temuan BPK RI atas pending tahun sebelumnya yaitu temuan Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2010 yang masih dalam proses penyelesaian. • Masih kurangnya pemahaman terhadap administrasi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan • Masih banyak pelaksana kegiatan yang belum memahami dan tidak mengetahui adanya peraturan baru yang menyebabkan sering terjadi kesalahan administratif 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu mengutamakan pembinaan dan montoring berkelanjutan terhadap SKPD dengan mengutamakan penyelesaian yang bersifat pengecualian. • lebih di tingkatkan lagi pembinaan-pembinaan terhadap SKPD dalam memahami adminstrasi terkait pelaksanaan kegiatan • peraturan mengenai pelaksanaan kegiatan yang baru segera di informasikan atau di sosialisasikan terhadap SKDP, agar SKPD tersebut lebih memahami tentang aturan yang berlaku dengan demikian diharapkan akan mengurangi tingkat kesalahan pada pelaksanaan kegiatan tersebut 	Inspektorat
		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat mentaati ketentuan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan upaya sosialisasi melalui mass media, penyebaran brosur-brosur, pembuatan 	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>Kepala Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih banyak personil yang masih kurang skill dalam pelaksanaan pekerjaan Masih kurangnya koordinasi dengan lintas SKPD dalam menyelesaikan permasalahan yang ada 	<p>spanduk, pembuatan plang himbauan dan penyuluhan-penyuluhan di tempat-tempat umum terkait dengan pemahaman Perda dan Peraturan walikota lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan kesempatan kepada personil untuk mengikuti diklat maupun bimbingan teknis dan sosialisasi-sosialisasi Peningkatan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur masih rendah dilihat dari sektor pendidikan. belum semuanya pejabat aparatur pemerintah Kota Cilegon yang telah memenuhi persyaratan jenjang karir aparatur, dari total jumlah pejabat aparatur Kota Cilegon sebanyak 799 pegawai baru 583 pegawai yang telah mengikuti diklat kepemimpinan atau dengan kata lain baru mencapai 72,97 % yang telah mengikuti diklatpim. Kota Cilegon belum memenuhi standar minimal ISO. yang menerapkan SOP baru 2 SKPD serta yang mendapatkan ISO baru 1 SKPD Masih kurangnya/belum terisi penuh aparatur yang ada di tingkat Kelurahan Masih kurangnya sarana dan prasarana yang representative di tingkat kelurahan Solusi Dalam rangka mempercepat pembangunan dan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Cilegon telah memberikan suntikan dana bagi aparatur yang mengikuti tugas belajar dan bantuan pendidikan S1,S2 dan S3, dengan demikian disiplin ilmu yang dimiliki dapat meningkatkan SDM aparatur. Selain itu pemerintah daerah harus lebih memotivasi bagi para aparatur untuk meningkatkan karir dan disiplin ilmu Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Cilegon, secara bertahap mengirim peserta diklat untuk pemenuhan persyaratan pejabat yang telah menduduki jabatan sehingga selain menjadi prasyarat akan menambah wawasan serta ilmu serta lebih profesional dalam mengemban tugas sebagai aparatur pemerintah. Perlu memacu SKPD-SKPD yang ada untuk memenuhi ISO yang dipersyaratkan yaitu minimal terpenuhi 6 ISO Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia 	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat	<p>(SDM) di Kelurahan dalam mengisi kekosongan pejabat kelurahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlunya pembangunan sarana dan prasarana ti tingkat kelurahan yang representative guna mendukung pelayanan terhadap masyarakat. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya Fasilitas hidran / sumber air minum • Masih kurangnya truk pemadam dan mobil tangki air • Masih kurangnya peralatan damkar dan rescue • Masih kekurangan pegawai • Masih kurangnya petugas yang ahli kimia dan masih kurang trampil dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban. • Masih lemahnya koordinasi antar SKPD pemberi ijin dalam bidang proteksi kebakaran pada bangunan gedung Kondisi padat hunian dan padat penduduk, rumah saling berdempetan • Jalan-jalan lingkungan sempit & adanya portal permanen sehingga akses bagi petugas pemadam sulit • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran • Masih banyak Bangunan termasuk bangunan Pemda Tidak Memiliki Peralatan Proteksi Kebakaran • Pada saat terjadi kebakaran sering terlambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya koordinasi yang lebih baik antar SKPD dalam pemenuhan kebutuhan Hidran • Perlunya penambahan truk pemadam dan mobil tangki air sesuai dengan rasio kebutuhan • Perlunya memenuhi ketersediaan peralatan damkar dan rescue • Penambahan armada pasukan pemadam • Meningkatkan kualitas SDM terutama dalam keahlian Kimia dan ketrampilan pemadam kebakaran serta penyelamatan korban. • Meningkatkan akuntabilitas kinerja kantor pemadam kebakaran yang jelas dan terukur • Meningkatkan kapasitas daya dukung dan kualitas kelembagaan SKPD dengan kantor Damkar • Perlu kesiapan peralatan dan sistematis tindakan dalam menangani jalan lingkungan sempit dan portal permanen • Perlunya sosialisasi akan bahaya kebakaran ke masyarakat • Perlunya kontrol dan pengawasan yang lebih efektif 	Kantor Pemadam Kebakaran

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		menghubungi Instansi Pemadam Kebakaran	terhadap kepemilikan peralatan proteksi kebakaran • Perlunya kajian sistematis dalam mengatasi keterlambatan pemberitahuan kebakaran	
21.	Ketahanan Pangan			Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan
		• masih lemahnya tingkat koordinasi antar SKPD dalam penguatan kelembagaan DKP.	Perlunya peningkatan koordinasi lintas SKPD yang terkait ketahanan pangan guna penguatan kelembagaan DKP	
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan
		Pemberdayaan masyarakat sosial (raskin) : • Warna beras yang di distribusikan kurang bagus • Kurangnya timbangan beras yang di distribusi • Ongkos angkut sering telat	• koordinasikan ke bulog tentang kualitas beras • perlu ada pemeriksaan sebelum pendistribusian ke masyarakat terhadap berat timbangan • perlunya ada koordinasikan ke bagian keuangan masalah ongkos angkut.	
		Pemberdayaan di bidang TTG • Kurang aktifnya pengurus wartek/posyantek • Kurang kontrol/monitoring pengurus wartek/posyantek terhadap alat-alat yang berada di masyarakat • Masih kurang minat masyarakat untuk ikut kegiatan	Pemberdayaan TTG : • Perlu adanya pembinaan untuk pengurus posyantek dan wartek oleh tim Kota. • Perlu dilakukan secara berkala kontrol/monitoring alat-alat wartek/posyantek yang berada di masyarakat	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		lomba cipta TTG.	<ul style="list-style-type: none"> Memperbanyak promosi tentang lomba cipta TTG 	
		Pemberdayaan di bidang ekonomi <ul style="list-style-type: none"> Pinjaman dana bergilir di pandang sebagai hibah Tingginya tunggakan pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet yang ada di mitra binaan Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Produk mitra binaan tidak dapat bersaing terutama dalam kualitas dan harga. Aparatur di tingkat kelurahan tidak dilibatkan dalam rekrutasi, seleksi dan pemcairan calon wira usaha usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dana yang disalurkan adalah dana pinjaman untuk modal usaha. Melakukan sosialisasi kepada mitra binaan yang mampu tapi tidak mau membayar pinjaman. Pembinaan (monitoring) ke mitra binaan lebih intensif. Telah dibukanya trading house sebagai sarana promosi hasil UKM masyarakat cilegon. Adanya koordinasi ke tingkat kelurahan dalam rekrutasi seleksi dan pencairan. 	
23.	Statistik			Bappeda
		<ul style="list-style-type: none"> masih belum dapat di tebitkananya kebutuhan data di awal tahun, dan masih ada beberapa data yang masih tumpang tindih keakuratannya jika di bandingkan dengan data dari para pemangku kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk penyusunan data statistik agar dapat mengeluarkan data proyeksi terhadap data data pembangunan agar dapat menjadi bahan acaun pembangunan 	
24.	Kearsipan			Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> Belum Optimalnya penataan Kearsipan di setiap SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu adanya pembinaan yang lebih intensif di setiap SKPD 	
25.	Komunikasi dan Informatika			Sekretariat Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> Kota Cilegon belum menerapkan e-gov sebagai sarana yang sangat diharapkan untuk memulai budaya kerja efisien 	<ul style="list-style-type: none"> sosialisasi yang memadai agar para pelaku birokrasi dan masyarakat mampu memahami e-gov untuk kemudian mendayagunakan potensinya, sehingga dapat memperbaiki mutu pelayanan publik kepada seluruh masyarakat 	
26	Perpustakaan			Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya rasa ingin tahu masyarakat tentang ilmu pengetahuan melalui perpustakaan. Masih rendahnya minat baca masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan Perpustakaan di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Cilegon. Mengembangkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat secara berkelanjutan 	
B.	Urusan Pilihan			
1.	Pertanian			Dinas Pertanian dan Kelautan
		<ul style="list-style-type: none"> Tidak tercapainya target produksi padi karena disebabkan oleh cuaca dimana curah hujannya rendah sehingga mengalami kekeringan. Masih rendahnya produksi melon akibat serangan organisme pengganggu tanaman seperti (bercak daun dan kertiing) Kurangnya pemahaman petani dalam hal penerapan budidaya melon terkait dengan penggunaan sarana produksi seperti pestisida dan pupuk. Masih tingginya harga pakan unggas, sehingga perlu mencari pakan alternatif yang banyak tersedia, 	<ul style="list-style-type: none"> Peralihan terhadap komoditas pangan lain yang sesuai dengan kondisi dan keadaan tanah kota Cilegon. Perlu penerapan budidaya yang baik dan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Penggunaan pestisida yang tepat sasaran dan sesuai dengan anjuran yang berlaku baik bahan aktif dan konsentrasi penggunaannya. Memberikan informasi secara luas kepada peternak mengenai keanekaragaman tanaman hijau ternak 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<p>murah dan bermutu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terbiasanya masyarakat mengkonsumsi produk susu kambing karena masih kurangnya promosi. 	<p>yang ada sekitarnya dan mengenalkan tanaman obat untuk ternak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengenalkan masyarakat produk susu kambing dalam bentuk kemasan secara luas dan manfaat mengkonsumsi susu bagi manusia 	
2	Energi dan Sumber Daya Mineral			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		<ul style="list-style-type: none"> • kurangnya ketersediaan water meter pada instalasi pengambilan air bawah tanah perusahaan, sehingga menyebabkan tidak tercatatnya besaran pemakaian air perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukannya pengadaan water meter pada anggaran selanjutnya guna memenuhi kebutuhan water meter 	
3	Pariwisata			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya pengembangan sarana dan prasarana Obyek Daerah Tujuan Wisata Kota Cilegon karena belum seluruhnya ODTW memiliki perencanaan pembangunan secara detail yang siap pelaksanaan konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya dukungan alokasi anggaran untuk pelaksanaan perencanaan dan pengembangan ODTW di Kota Cilegon 	
4.	Kelautan dan Perikanan			Dinas Pertanian dan Kelautan
		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menentunya cuaca yang mengakibatkan nelayan tidak dapat melaut. • Peralatan nelayan yang masih sangat tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya perikanan darat/air tawar yang tidak tergantung perubahan cuaca. • Perlunya bantuan untuk modernisasi peralatan nelayan. 	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (SOLUSI)	SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya PPI sebagai sarana untuk melakukan aktifitas transaksi perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Berusaha agar kementrian kelautan dan perikanan dapat memberi bantuan kelanjutan pembuatan PPI di Kota Cilegon. 	
5.	Perdagangan			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		<ul style="list-style-type: none"> Tidak tertatanya pedagang yang berjualan diluar area peruntukannya seperti para pedagang yang menempati sub terminal merak dan pedagang di sepanjang jalan pagebangan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu adanya relokasipara pedagang di sub terminal merak ke pasar merak dan pedagang sepanjang pagebangan ke pasar blok F. 	
6.	Industri			Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya Sumber Daya Manusia pelaku industri kecil sehingga menjadi kendala dalam pengembangan Industri kecil di Kota Cilegon. 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pengetahuan Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Peningkatan Keterampilan dalam meningkatkan proses produksi 	

4.2. ISU STRATEGIS

Berpijak pada kondisi, hasil evaluasi pembangunan dan identifikasi permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Cilegon sampai dengan tahun 2012 maka **isu strategis** dan **permasalahan pokok** pembangunan Kota Cilegon dalam periode tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:

1. KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial merupakan isu yang sangat substansial dalam kerangka pembangunan daerah Kota Cilegon. Kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial merupakan beberapa indikator pokok keberhasilan pembangunan kesejahteraan manusia yang merupakan tujuan utama dari pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu ketiga komponen ini juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan pembangunan di Kota Cilegon.

Tingkat kemiskinan di Kota Cilegon masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara cermat dan serius. Meskipun jumlah dan proporsi jumlah rumah tangga miskin sudah terus berkurang, tetapi keberlanjutan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Cilegon kedepan ditargetkan mampu menekan kembali proporsi jumlah rumah tangga miskin seoptimal mungkin.

Demikian halnya beban permasalahan sosial semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti menipisnya nilai budaya, serta meningkatnya eksekse dan gejala sosial sebagai dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat. Permasalahan sosial perkotaan yang perlu ditangani meliputi masalah prostitusi, kriminalitas, anak jalanan, gepeng, dan penyakit masyarakat lainnya.

Pembangunan Kota Cilegon dalam 5 tahun mendatang dihadapkan pada berbagai tantangan yang menyangkut terjadinya perubahan-perubahan yang diharapkan semakin baik pada seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka menggiring

perubahan-perubahan sebagaimana diharapkan tersebut, maka perlu dibangun kerangka pencapaian pembangunan Kota Cilegon untuk lima tahun ke depan.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Kota Cilegon akan mengalami tekanan jumlah penduduk yang semakin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2010 sebesar 374.464 orang diproyeksikan akan terus meningkat mencapai sekitar 409.142 jiwa hingga tahun 2015, dengan asumsi semakin membaiknya berbagai parameter kependudukan seperti menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi serta rendahnya angka migrasi penduduk.

Dengan demikian diharapkan laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan hingga menjadi 1,54% per tahun dalam rentang periode 2010-2015. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang, antara lain dengan tercapainya komposisi penduduk usia produktif yang lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif, terkendalinya persebaran dan kepadatan penduduk, serta dapat ditekannya angka pengangguran dan migrasi masuk.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kota Cilegon juga diperkirakan akan semakin meningkat menjadi 76,97 hingga tahun 2015, terutama dengan adanya upaya pelayanan pendidikan yang berkualitas yang berorientasi pada peningkatan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta peningkatan daya saing dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pembangunan.

Namun dukungan upaya peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat diharapkan mampu menekan angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, proporsi balita kurang gizi, serta kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan oleh seluruh kelompok masyarakat. Kualitas kesehatan juga diharapkan

didukung dengan peningkatan kemampuan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Sementara itu, angka kemiskinan di Kota Cilegon masih akan menjadi masalah yang perlu ditangani secara cermat dan serius dalam pembangunan 5 tahun mendatang. Meskipun proporsi rumah tangga miskin sepanjang 10 tahun terakhir sudah terus berkurang, tetapi keberlanjutan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Cilegon kedepan ditargetkan mampu menekan kembali proporsi rumah tangga miskin dengan variabel penerima program BLT/BML, dari 15.961 RTS, menjadi kurang dari 8.000 RTS. Sedangkan sasaran pengurangan angka kemiskinan dengan variabel garis kemiskinan (pengeluaran perkapita kurang dari Rp. 198.000,- perbulan), akan ditekan hingga mencapai 2,25% pada tahun 2015.

Di samping itu, tantangan permasalahan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti menipisnya nilai budaya, meningkatnya ekses dan gejala sosial sebagai dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian penting dalam kerangka pembangunan lima tahun ke depan. Permasalahan sosial perkotaan yang perlu ditangani diantaranya meliputi masalah PMKS, kriminalitas, anak jalanan, gepeng, dan penyakit masyarakat lainnya.

Issue penting lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah issue pengangguran. Dalam hal ini konsep penganggur yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*), yang disebut dengan pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Prosentase dari pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja merupakan tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang pada tahun 2008 mencapai 18,65% dan pada tahun 2009 adalah sebesar 18.26% menurun sebesar 10.1% pada tahun 2015.

Masih tingginya TPT, menunjukan bahwa masalah pengangguran masih merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah ke depan, yang memerlukan adanya sinergitas antara seluruh stakeholder pembangunan.

Pertumbuhan lapangan kerja, tentu harus disokong oleh peningkatan investasi di daerah, yang dalam hal ini sangat bergantung pada stabilitas keamanan di daerah dan aspek legislasi dalam hal ini kemudahan birokrasi. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga harus dikedepankan. Untuk mengurangi terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja, perlu adanya *link and match* antara pendidikan dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Mengacu kepada visi jangka panjang pemerintah daerah sebagai kota industri, perdagangan dan jasa, maka muatan pendidikan seyogyanya lebih diarahkan kepada tiga sector tersebut. Berdasarkan data penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, ketiga sector tersebut merupakan sector yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Adapun **permasalahan** yang terkait dengan isu kemiskinan, kesejahteraan sosial dan pengangguran di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

- Penurunan jumlah penduduk miskin;
- Perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga;
- Pengendalian pertumbuhan penduduk dan administrasi kependudukan;
- Perluasan lapangan pekerjaan dan penurunan tingkat pengangguran.

2. DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH

Struktur perekonomian daerah Kota Cilegon yang didominasi oleh sektor industri, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap tingginya laju pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kerawanan sosial. Hal tersebut dikarenakan sektor industri yang berkembang di Kota Cilegon bukan merupakan industri yang berbasis sumberdaya lokal, namun merupakan industri yang padat modal serta membutuhkan tenaga kerja dengan skill atau keahlian

husus. Disamping itu, perekonomian yang didominasi oleh industri, strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumberdaya lokal berupa UMKM dan Koperasi harus lebih ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah, serta mampu mendukung kinerja sektor industri daerah.

Sementara itu, persaingan perekonomian yang lebih ketat dan kompetitif merupakan tantangan bagi Kota Cilegon seiring dengan diberlakukannya pasar bebas Asean (AFTA) dan pasar bebas Asean-Cina (AC-FTA) yang bisa memberikan peluang bagi perekonomian daerah untuk bersaing di pasar regional dan global sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Globalisasi dan pasar bebas di samping menjadi peluang juga bisa menjadi ancaman apabila daerah tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Jika produk-produk lokal tidak efisien dan berkualitas maka akan kalah bersaing dengan produk asing yang hal ini tentunya akan merugikan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, selama periode 2004-2009 pembangunan perekonomian Kota Cilegon menunjukkan proses kemajuan, yang ditandai dengan peran sektor sekunder sebagai tumpuan utama struktur ekonominya. Secara bertahap perekonomian Kota Cilegon diharapkan terus meningkat dimasa mendatang, yang ditunjukkan dengan **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)** Kota Cilegon hingga tahun 2015 diperkirakan berkisar antara 5,86%.

Pengkondisian pembangunan ekonomi Kota Cilegon tersebut dalam proses pencapaiannya diharapkan disertai dengan kondisi stabilitas ekonomi, kondisi keamanan yang semakin kondusif, tidak terjadinya bencana dalam skala besar, **inflasi YoY** yang berkisar antara **5,00 - 7,50%**, **ICOR** yang berkisar antara **2,96 - 2,70**, serta **ILOR** yang berkisar antara **1,00 - 0,52** sepanjang kurun waktu tahun tersebut.

Sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik gas dan air bersih, serta sektor bangunan) hingga tahun 2015 masih memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun dengan kecenderungan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang relatif stagnan. Sektor Bangunan merupakan tumpuan utama dalam penciptaan lapangan kerja, sebagaimana yang telah ditunjukkan selama periode 2000-2009 dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dari kontribusi ekonominya.

Selain itu, kebutuhan pembangunan fisik kota akan semakin meningkat di masa mendatang, sehingga Sektor Bangunan akan memiliki peran strategis dalam penyediaan lapangan kerja. Sementara itu, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih lebih merupakan sektor padat modal dan padat teknologi, sehingga perannya dalam penyerapan tenaga kerja tidak sebaik Sektor Bangunan.

Persaingan perekonomian yang lebih ketat merupakan tantangan bagi Kota Cilegon seiring dengan diberlakukannya pasar bebas Asean (AFTA) dan pasar bebas Asean-Cina (AC-FTA) yang bisa memberikan peluang bagi perekonomian daerah untuk bersaing di pasar regional dan global sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Globalisasi dan pasar bebas di samping menjadi peluang juga bisa menjadi ancaman apabila daerah tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Jika produk-produk lokal tidak efisien dan berkualitas maka akan kalah bersaing dengan produk asing yang hal ini akan merugikan ekonomi daerah.

Perekonomian Kota Cilegon yang di dominasi oleh sektor sekunder, tentunya relatif rentan terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama dengan munculnya kebijakan pusat, seperti kebijakan kenaikan BBM, kenaikan suku bunga, instabilitas politik, penurunan nilai tukar, dan sebagainya.

Adapun **permasalahan** yang terkait dengan isu daya saing perekonomian di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

- Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi didukung investasi;

- Kualitas perekonomian dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- Produktivitas, kualitas dan daya saing perekonomian khususnya di sektor industri;
- Kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal;
- Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pangan.

3. KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH, TATA RUANG, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur serta fasilitas kota merupakan hal yang krusial dilakukan. Hal tersebut mengingat dampak yang sangat signifikan yang dapat ditimbulkan akibat kurang memadainya daya dukung infrastruktur tersebut, baik dampak secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Secara sosial, dampak yang ditimbulkan akibat keterbatasan infrastruktur wilayah adalah semakin meningkatnya kerawanan sosial yang mengancam ketentraman dan ketertiban umum. Dari sisi ekonomi, dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya aksesibilitas pergerakan barang dan angkutan sehingga kegiatan koleksi dan distribusi menjadi terganggu.

Sebagaimana umumnya kawasan perkotaan yang memiliki lahan yang sangat terbatas, Kota Cilegon dihadapkan dengan semakin menurunnya luas lahan terbuka akibat semakin intensifnya penggunaan lahan khususnya untuk permukiman. Dengan kecenderungan demikian, maka konsistensi terhadap implementasi perda penataan ruang harus diupayakan guna mencegah terjadinya konversi lahan yang masif sehingga akan berakibat pada menurunnya daya dukung lahan. Lebih jauh lagi, aktivitas di kawasan perkotaan yang sangat tinggi tanpa diimbangi oleh upaya pengendalian lingkungan, pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang akan sangat merugikan bagi kelangsungan pembangunan.

Permasalahan pokok yang terkait dengan peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota adalah:

(1) Kemacetan dan pelayanan transportasi yang belum mencapai tingkatan nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan

Ditinjau dari sudut pandang mikro, kemacetan yang terjadi dapat ditimbulkan oleh akumulasi dari ketidakdisiplinan pengguna jalan, pelanggaran penggunaan trotoar bagi kegiatan sektor informal (pedagang kaki lima), dan pengelolaan parkir yang buruk. Sedangkan dari sudut pandang makro, kemacetan disebabkan oleh ketimpangan antara kemampuan pelayanan sistem pusat pelayanan kegiatan dengan kapasitas dan volume pergerakan serta melebihinya (over-burden) daya tampung pelayanan jalur protokol kota di mana secara spasial posisinya terlalu dekat dengan pusat-pusat permukiman. Kondisi ini diperparah dengan jarak antar bukaan jalan yang relatif berdekatan sehingga stagnasi kendaraan terakumulasi menjadi sebuah kemacetan. Keberadaan sarana angkutan umum pun belum mampu menjadi alternatif dalam melakukan pergerakan sehingga penggunaan kendaraan pribadi menjadi pilihan utama. Hal ini perlu menjadi isu strategis agar sistem perencanaan kota ke depan dapat mengatur pola pergerakan kawasan perkotaan sehingga menjadi lebih efektif.

(2) Kualitas kondisi dan kinerja jaringan jalan

Secara umum kondisi jalan di Kota Cilegon cukup baik dalam arti mampu menghubungkan antar sistem pusat pelayanan perkotaan. Dengan semakin tingginya konsentrasi pengembangan lahan perlu ditunjang oleh perencanaan sistem jaringan jalan yang mampu menjadi inisiator dalam setiap kegiatan pengembangan lahan sehingga struktur ruang kota menjadi lebih terbentuk. Penyertaan saluran drainase jalan pun perlu menjadi bagian dalam perencanaan jalan mengingat kerusakan struktur jalan lebih disebabkan oleh sistem drainase jalan yang buruk selain tonase kendaraan yang melintasi jalan melebihi batas.

Kinerja jaringan jalan diukur dari seberapa besar kapasitas jalan baik secara fungsional maupun struktural mampu menampung beban pergerakan serta meningkatkan nilai aksesibilitas kawasan. Kinerja jaringan jalan perlu disertai dengan pengendalian ruang jalan dan pemaduserasian dengan karakteristik aktivitas di sekitarnya. Menurunnya kinerja jaringan jalan dapat dilihat antara lain

diindikasikan dengan meningkatnya frekuensi kemacetan, rusaknya struktur jalan, serta lambatnya pertumbuhan kawasan. Ruas jalan protokol dan ruas jalan yang secara langsung terkoneksi dengan jalan protokol menjadi objek penting dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja sistem transportasi.

(3) Bencana banjir

Banjir menjadi permasalahan pokok, karena fenomena ini sering terjadi terutama pada musim penghujan. Sebagian besar penyebab banjir di Kota Cilegon antara lain tidak terintegrasinya sistem drainase kawasan, peningkatan volume larian air di bagian hulu sebagai efek dari tingginya pembukaan lahan, sedimentasi drainase dan pantai, dan berkurangnya kemampuan infiltrasi tanah terhadap air hujan. Di samping menimbulkan berkurangnya kenyamanan, banjir pun akan berdampak pada menurunnya kualitas jalan dan kesehatan lingkungan.

(4) Ketersediaan air baku serta cakupan dan kualitas pelayanan air bersih

Perlu disadari bahwa Kota Cilegon tidak memiliki sumber air baku. Selama ini kebutuhan air baku untuk pelayanan kebutuhan air bersih dipasok dari rawa Cidanau (Kabupaten Serang). Meningkatnya kebutuhan air ini tidak disertai dengan bertambahnya jumlah air baku sehingga berpengaruh terhadap pelayanan air bersih. Di sisi lain masyarakat menuntut pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, salah satunya adalah peningkatan cakupan pelayanan air bersih (terutama berbasis perpipaan).

(5) Cakupan dan kualitas pelayanan persampahan

Pengelolaan persampahan yang terdapat di Kota Cilegon sampai saat ini belum dapat menjangkau seluruh wilayah permukiman. Daerah pelayanan masih terbatas pada jalan utama dan beberapa kawasan permukiman saja. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan dan kendala dalam pemenuhan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, keterbatasan sistem operasional persampahan dan pendekatan/teknologi yang digunakan, serta belum adanya mekanisme kerjasama dalam pengelolaan sampah dari pemilahan, pewadahan, pengumpulan,

pemindahan, pengangkutan hingga pembuangan akhir. Saat ini isu pengelolaan persampahan telah beralih dari paradigma kumpul – angkut – buang ke arah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di mana peran TPA merupakan tempat penampungan sampah yang memang sudah tidak dapat lagi diolah. Selain itu isu strategis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yaitu perlu adanya perubahan metode pengelolaan sampah di TPA yang semula menggunakan sistem open-dumping beralih ke controlled-landfill menuju sanitary landfill.

(6) Kualitas pelayanan pengelolaan limbah

Pembuangan air kotor (mandi dan cuci) pada saat ini bergabung dengan sistem drainase, hal ini dapat menurunkan kualitas air permukaan di sungai-sungai yang menjadi saluran primer drainase. Untuk itu selayaknya dibatasi pembuangan air kotor secara langsung ke badan air (saluran drainase) serta dilakukan upaya pemisahan antara saluran air kotor dengan saluran drainase. Jenis pengelolaan air limbah domestik sebagian besar masih berorientasi pada sistem on-site sanitation. Sedangkan sistem off-site sanitation baru dikembangkan pada beberapa kawasan permukiman padat (MCK, WC umum). Sistem pengelolaan limbah domestik yang lebih modern seperti sewerage system belum diaplikasikan, padahal sistem ini berpeluang untuk mengatasi pembuangan limbah domestik ke badan air secara langsung. Untuk jenis limbah industri sebagian besar telah dikelola secara internal melalui penerapan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Meskipun demikian pengawasan dan pemantauan atas kualitas mekanisme pengelolaan limbah terutama untuk jenis B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) perlu mendapat perhatian mengingat tingginya dampak yang dapat ditimbulkan apabila tidak dikelola secara baik.

(7) Penyediaan dan kualitas rumah layak huni dan terjangkau

Kebutuhan akan hunian akan semakin bertambah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Tingginya nilai lahan perkotaan tentunya menjadi pertimbangan tersendiri dalam upaya penyediaan lahan bagi rumah layak huni. Apabila isu ini tidak diperhatikan secara spesifik, maka jumlah permukiman padat-

kumuh dipastikan akan bertambah. Dengan demikian perlu adanya pendekatan yang strategik dalam mengatasi penyediaan rumah layak huni, misalnya melalui program penyediaan rumah susun.

(8) Kawasan permukiman kumuh

Permukiman kumuh dicirikan dengan struktur jalan yang organik, jarak antar bangunan yang padat, serta kondisi lingkungan yang tidak tertata. Kawasan permukiman kumuh merupakan permasalahan pembangunan jangka menengah karena apabila tidak ditangani secara simultan akan berakibat pada menurunnya tingkat kesehatan lingkungan, rawan bencana kebakaran, konflik sosial dan kriminalitas, serta menurunnya identitas dan estetika kota. Berdasarkan studi tentang kawasan kumuh, terdapat 14 titik kawasan kumuh yang perlu mendapatkan perhatian agar kawasan tersebut tidak semakin menurun kualitasnya.

Permasalahan pokok yang terkait dengan peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang adalah:

(1) Lingkungan Hidup

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, secara umum Kota Cilegon akan mengalami perubahan geomorfologi dan lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup karena faktor manusia jika tidak diantisipasi akan terus meningkat. Pencemaran air, udara, dan tanah di Kota Cilegon berpotensi meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan dan perubahan pola hidup masyarakat. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan pencemaran perlu diupayakan pada kawasan-kawasan potensi pencemaran, khususnya kawasan industri, kawasan pelabuhan dan kawasan permukiman.

Namun harus digarisbawahi bahwa meskipun telah disusun mekanisme pengendalian dampak lingkungan, akan tetapi pengelolaan lingkungan hidup yang parsial hanya akan mampu memperlambat penurunan kualitas lingkungan saja dan tidak mampu menyelesaikan masalah sampai tuntas. Beberapa wilayah yang menjadi pusat kegiatan industri seperti di Kelurahan Kepuh, Kelurahan

Randakari, Kelurahan Gerem, Kelurahan Suralaya, Kelurahan Lebakgede, dan beberapa wilayah lainnya telah terindikasi sebagai daerah yang telah menurun kualitas lingkungannya seperti polusi udara yang tinggi, debu batubara dan bau dari limbah industri yang tidak sedap, kebisingan, meningkatnya penderita ISPA, menurunnya kualitas dan kuantitas air tanah, dan sebagainya.

Selain pencemaran, Kota Cilegon menghadapi ancaman krisis energi, krisis lahan, dan krisis air bersih karena sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan pesisir. **Krisis energi** terkait dengan semakin tingginya permintaan akan kebutuhan energi seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Sementara **krisis lahan** terkait dengan semakin terbatasnya lahan bagi aktifitas penduduk serta adanya kerusakan lahan yang salah satunya diakibatkan oleh kegiatan pertambangan Galian C. Adapun **krisis air bersih** terkait dengan semakin berkurangnya kualitas dan kuantitas air permukaan maupun air tanah. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan intensitas kegiatan baik industri maupun non-industri akan berdampak pada semakin tingginya demand akan kebutuhan air. Kondisi tersebut dipertegas dengan potensi air baku yang rendah sehingga kebutuhan air dipenuhi melalui pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan air bawah tanah tanpa disertai dengan langkah konservasi air tentunya akan menimbulkan serangkaian dampak seperti rongga bawah tanah yang memicu deformasi tanah dan subsident, intrusi air laut, dan kelangkaan air tanah. Indikasi dari berkurangnya kualitas dan kuantitas air tanah dapat ditelusuri dari adanya perubahan warna dan rasa air tanah di sekitar peisisir pantai yang diakibatkan oleh intrusi air laut dan peningkatan derajat kekeruhan air sebagai cerminan dari adanya kejenuhan material tanah/lumpur dalam air.

Bencana alam dan bencana industri masih merupakan ancaman bagi Kota Cilegon dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, diantaranya ancaman yang bersumber dari aktifitas Gunung Krakatau, maupun potensi terhadap dampak aktifitas gempa dan tsunami yang terjadi di daerah selatan Pulau Jawa, dimana salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah dampak yang lebih luas atas

bencana tersebut terkait dengan keberadaan industri-industri kimia pada kawasan pesisir. Sehingga tantangan dimasa mendatang adalah dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana (tanggap darurat).

Isu pembangunan berkelanjutan juga menjadi paradigma pembangunan yang saat ini terus bergulir seiring dengan merebaknya isu global warming yang ditimbulkan oleh kepadatan aktivitas dan jumlah manusia tanpa mengindahkan upaya pelestarian lingkungan. Pembangunan tanpa adanya pengelolaan lingkungan tentunya akan berakibat pada keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.

Maka pelestarian kawasan pesisir perlu menjadi isu strategis karena kondisi garis pantai saat ini hampir 70% telah terisi oleh kegiatan budidaya baik industri, pelabuhan, permukiman, sarana kota, dan bangunan komersil serta peran Selat Sunda sebagai jalur perairan internasional. Dampak yang perlu diperhitungkan bukan hanya terhadap kelestarian kawasan pesisir semata, akan tetapi pengelolaan yang tidak terintegrasi akan berdampak pada eksistensi dan kelangsungan penyelenggaraan kegiatan dan investasi di kawasan pesisir. Sedangkan daerah perbukitan di bagian utara dan selatan kota perlu dikelola dan dilestarikan karena perannya yang sangat penting sebagai pelindung kawasan perkotaan dari hempasan angin laut yang membawa material polutan dari kawasan industri, kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau, penyerap air hujan, dan penyeimbang kualitas lingkungan. Tidak kalah strategis pula peran sungai-sungai yang tersebar sebagai bagian dari sistem drainase kota. Tanpa pengelolaan atasnya, maka fenomena banjir dan genangan air akan berdampak sistemik terhadap kelestarian fasilitas kota dan kualitas lingkungan.

(2) Penataan Ruang

Terkait dengan pemanfaatan ruang, permasalahan utama yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya pelanggaran tata ruang, baik berupa pelanggaran fungsi ruang maupun pelanggaran tata bangunan dan lingkungan. Hal ini antara lain disebabkan oleh : (1) belum memadainya ketersediaan dasar hukum

pelaksanaan penataan ruang baik yang bersifat umum maupun rinci, sebagai landasan operasional yang sangat penting bagi penanganan masalah penataan ruang; (2) kurangnya SDM yang menguasai masalah penataan ruang; (3)kurang berfungsinya lembaga koordinasi penataan ruang di daerah, merupakan hal yang menyebabkan belum optimalnya pembinaan penataan ruang di daerah; (4) Terbatasnya jumlah personil penataan ruang serta (5)kurangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan penataan ruang

4. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Isu kualitas sumberdaya manusia merupakan isu yang sangat substansial dalam kerangka pembangunan daerah Kota Cilegon. Hal tersebut terkait dengan fungsi manusia itu sendiri sebagai subjek dan juga sekaligus objek dari kegiatan pembangunan, sehingga seluruh upaya pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk menunjang kelangsungan aktivitas manusia.

Upaya pelayanan pendidikan yang berkualitas yang berorientasi pada peningkatan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta peningkatan daya saing dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pembangunan merupakan tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan.

Disamping itu dukungan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat diharapkan mampu menekan angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, proporsi balita kurang gizi, serta kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan oleh seluruh kelompok masyarakat. Kualitas kesehatan juga diharapkan didukung dengan peningkatan kemampuan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Adapun **permasalahan** yang terkait dengan isu kualitas sumberdaya manusia di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

- Aktualisasi norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
- Pelestarian dan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya;
- Aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat;
- Aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat.

5. KINERJA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SERTA KUALITAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DEMOKRASI DAN HUKUM

Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kota Cilegon. Kinerja birokrasi yang efisien dan efektif dengan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat akan semakin produktif dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Adapun **permasalahan** yang terkait dengan isu kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

- Kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- Kualitas dan daya saing pelayanan publik;
- Kapasitas dan kemandirian keuangan daerah;
- Kualitas kehidupan demokrasi;
- Ketaatan dan supremasi hukum;
- Kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Berpijak pada kondisi saat ini, permasalahan pembangunan, isu strategis dan tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2015 serta mempertimbangkan kekuatan (potensi), peluang dan harapan masyarakat Kota Cilegon maka **“Visi Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015”** adalah sebagai berikut:

“MASYARAKAT CILEGON SEJAHTERA MELALUI DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA”

Visi ini sangat penting dan kontekstual untuk menghadapi tantangan Kota Cilegon lima tahun yang akan datang. Tantangan itu harus disyukuri karena di dalamnya terkandung capaian pembangunan selama ini dan sekaligus mengandung permasalahan yang perlu dipecahkan.

Visi ini dapat diwujudkan melalui serangkain kerja keras, dengan ditunjang oleh pemerintahan yang berorientasi publik, pembangunan perekonomian yang berkesinambungan, berdaya saing dan berkeadilan serta ketahanan perilaku sosial masyarakat.

Harapan yang terkandung dalam Visi Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015 adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon yang didukung dan didorong oleh peningkatan secara berkelanjutan kinerja perkembangan dan kualitas pertumbuhan perekonomian daerah dengan basis utama pada sektor industri, perdangan dan jasa.

Visi Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 yaitu: **“CILEGON PUSAT INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA TERDEPAN DI PULAU JAWA”**, serta juga merupakan kelanjutan perwujudan dari visi pembangunan RPJMD Kota Cilegon periode sebelumnya (RPJMD Kota Cilegon Tahun 2006-2010).

Adapun indikasi wujud pencapaian **sasaran strategis Visi Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
2. Menurunnya kemiskinan
3. Menurunnya pengangguran
4. Meningkatnya perekonomian

Dalam konteks keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, **Visi Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015** merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kota Cilegon untuk mendukung pencapaian **visi pembangunan Provinsi Banten** dan **visi pembangunan nasional**.

5.2. MISI

Berikut tolak dari Visi Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015 maka dirumuskan "**Misi Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015**" adalah sebagai berikut:

1. **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN**
2. **MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI DAYA DUKUNG SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA**
3. **MENINGKATKAN POTENSI DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN KEPELABUHANAN, PERGUDANGAN, PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**
4. **MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KEAGAMAAN**
5. **MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERKEADILAN, DEMOKRATIS, BERLANDASKAN HUKUM SERTA BERORIENTASI PUBLIK**

Dalam kerangka keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, **misi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015** merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kota Cilegon untuk mendukung pencapaian **misi pembangunan Provinsi Banten** dan **misi pembangunan nasional**.

5.3. AGENDA

Guna mengarahkan rumusan **kebijakan tahunan** selama periode 2010-2015 dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut dituangkan lebih lanjut dalam "**Agenda Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015**", yaitu sebagai berikut:

1. AGENDA CILEGON SEJAHTERA

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diarahkan melalui serangkaian kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada upaya untuk:

- Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya (*pro poor*)
- Memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan menanggulangi pengangguran (*pro job*)
- Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Agenda ini ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan strategis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan perlindungan sosial masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan kemiskinan
3. Penumbuhan Wirausaha Baru dan pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan mengoptimalkan industri hulu
4. Optimalisasi pengelolaan dana CSR untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat
5. Pemenuhan kebutuhan pangan dan perumahan layak huni masyarakat miskin
6. Penciptaan proyek-proyek padat karya guna mengurangi pengangguran
7. Pengembangan sektor-sektor ekonomi selain industri manufaktur untuk penyerapan tenaga kerja (perdagangan, perhotelan, dan jasa)

2. AGENDA CILEGON BERDAYA SAING

Harus diakui tulang punggung ekonomi Kota Cilegon sekarang ini adalah sektor industri. Dengan potensi geostrategis serta ditunjang dengan pelabuhan dan sejumlah kawasan, perkembangan industri Cilegon telah cukup lama berkibar di kancah industri nasional. Daya dukung lahan yang telah dialokasikan dalam rencana tata ruang dipersiapkan untuk pengembangan industri lebih jauh, hingga mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional di ujung barat pulau Jawa.

Selain itu, masalah kemudahan investasi juga merupakan kunci dari ekonomi daerah yang diharapkan, mengingat dengan adanya investasi baru, tentunya berdampak kepada penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta daya saing daerah.

Agenda ini diarahkan pada upaya peningkatan daya saing industri, perdagangan, dan jasa berskala lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional.

Agenda ini ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan strategis, diantaranya :

1. Pembentukan kelembagaan pelayanan perijinan usaha dan investasi yang terpadu
2. Pencanaan Cilegon sebagai ***Pearl of Investment*** (mutiara investasi)
3. Pengembangan jejaring produksi, distribusi, dan pemasaran, serta perluasan akses permodalan
4. Pendayagunaan kawasan perindustrian
5. Penumbuhan kawasan perindustrian ramah lingkungan
6. Penyediaan fasilitas penunjang dan penumbuhan budaya masyarakat pendukung pengembangan pariwisata
7. Revitalisasi pasar tradisional
8. Pembangunan PPI

3. AGENDA CILEGON MAJU DAN MANDIRI

Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan pokok. Semakin maju ekonomi suatu daerah maka kebutuhan infrastruktur fisiknya akan semakin berkembang. Begitu juga sebaliknya, apabila pembangunan infrastruktur fisik tertahan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami hambatan yang serius. Atas dasar ini, pemerintah kota ke depan harus mempercepat program pembangunan infrastruktur kota.

Agenda Cilegon Maju dan Mandiri, dicerminkan dengan kondisi infrastruktur kota yang memadai serta mampu memenuhi kebutuhan aktifitas ekonomi segenap warga masyarakatnya.

Agenda ini ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan strategis, diantaranya :

1. Mewujudkan Pelabuhan Terpadu berskala Internasional
2. Pembangunan Jalan Lingkar Utara
3. Mengoptimalkan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan
4. Pembangunan Landmark Kota
5. Pembangunan Pasar Regional

4. AGENDA CILEGON CERDAS DAN SEHAT

Sesuai dengan amanah konstitusi, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan **pelayanan pendidikan**. Konstitusi juga menggariskan *budget* yang harus disiapkan sekitar 20 persen dari anggaran. Dengan amanah ini, maka program wajib belajar duabelas tahun perlu terus digalakkan. Sekolah gratis yang dimotori sekolah-sekolah pemerintah harus segera ditularkan kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta. Setidaknya, pemerintah harus membatasi biaya-biaya yang dikenakan oleh lembaga pendidikan swasta. Ini semua dalam kerangka memberikan hak rakyat untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang memadai dan sangat terjangkau

Selain masalah pendidikan, **infrastruktur kesehatan** masih perlu terus dikembangkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan terjangkau. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan di daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang, baik dalam bentuk penyediaan pos kesehatan desa, peningkatan puskesmas menjadi puskesmas dengan tempat perawatan, peralatan medis yang cukup, pengobatan yang cukup, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Setelah itu, jangkauan asuransi kesehatan perlu diperluas kepada golongan masyarakat lainnya Mewujudkan **Jaminan Kesehatan Daerah** (Jamkesda) bagi warga Kota Cilegon adalah langkah awal yang sangat penting dalam kerangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional, sebagaimana dimanahkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Agenda ini diarahkan pada peningkatan kecerdasan, kesehatan masyarakat, serta kualitas dan ketrampilan SDM, dalam koridor pembangunan berkelanjutan.

Agenda ini ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan strategis, diantaranya :

1. Perluasan cakupan pendidikan gratis hingga menyentuh sekolah swasta
2. Penyediaan Buku Paket pendidikan dasar dan menengah
3. Penyediaan Pendamping BOS Kota Cilegon
4. Fasilitasi pembiayaan bagi peningkatan pendidikan guru
5. Pendidikan yang berkesetaraan gender
6. Pembangunan perpustakaan daerah berskala nasional
7. Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal

8. Pemenuhan Sekolah Kejuruan di 8 Kecamatan, sesuai kebutuhan industri, perdagangan, dan jasa
9. Menjamin ketersediaan teknologi informasi di sekolah dasar dan menengah
10. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan gratis RSUD dan Puskesmas, serta perluasan cakupan Jamkesda
11. Mewujudkan 43 Kelurahan Siaga
12. Penyediaan anggaran responsif gender
13. Pemantapan partisipasi perempuan dan pemuda, serta pengembangan olahraga daerah

5. AGENDA CILEGON BERWIBAWA

Reformasi birokrasi yang sekarang berjalan, perlu ditingkatkan akselerasinya, untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap birokrasi yang tangkas, tanggap, dan cepat. Oleh karena itu, sudah sangat mendesak untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Restrukturisasi organisasi pemerintahan harus dilakukan dengan memperkuat *front office* pelayanan publik.

Di samping itu, *reward* dan *punishment* di dalam birokrasi harus ditata ulang agar lebih adil dan proporsional. Gebrakan-gebrakan dalam reformasi birokrasi ini adalah suatu keharusan untuk menyesuaikan dengan dinamika demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Agenda ini diarahkan pada peningkatan tatakelola pemerintahan dalam koridor pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Agenda ini ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan strategis, diantaranya :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Penataan remunerasi aparatur
3. Penataan mekanisme pengembangan aparatur
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur
5. Penciptaan akuntabilitas pelayanan publik
6. Fasilitasi pembentukan Komisi Transparansi
7. Pemantapan proses penegakan perda
8. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan (e-gov)

5.4. TUJUAN DAN SASARAN

5.4.1. Tujuan Dan Sasaran Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran

Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran atau agenda Cilegon Sejahtera adalah sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN	
1.1	Meningkatkan keberdayaan perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat	1.1.1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin, ketahanan pangan dan kesempatan kerja masyarakat
		1.1.2	Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat
1.2	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	1.2.1	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
		1.2.2	Meningkatnya kesetaraan dan keberdayaan gender

5.4.2. Tujuan Dan Sasaran Misi Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Jasa

Tujuan dan sasaran misi Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Jasa atau agenda Cilegon Berdaya Saing adalah sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN	
2.1	Meningkatkan pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah	2.1.1	Meningkatnya investasi
2.2	Memperkuat peran sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian daerah	2.2.1	Meningkatnya kinerja sektor industri, perdagangan dan jasa

5.4.3. Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan

Tujuan dan sasaran misi Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan atau agenda Cilegon Maju dan Mandiri adalah sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN	
3.1	Meningkatkan pelayanan infrastruktur untuk mendukung produktivitas kawasan dan perekonomian daerah	3.1.1	Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan handal
		3.1.2	Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang memadai dan berkualitas
		3.1.3	Terwujudnya pelayanan pos dan telekomunikasi yang memadai dan berkualitas
		3.1.4	Terkendalinya bencana banjir dan genangan air serta kekeringan
3.2	Meningkatkan penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung lingkungan kota yang asri dan lestari	3.2.1	Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu
		3.2.2	Terwujudnya lingkungan kota yang bersih dan asri
		3.2.3	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

5.4.4. Tujuan dan Sasaran Misi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan, Dan Keagamaan

Tujuan dan sasaran misi **Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan, Dan Keagamaan** atau agenda **Cilegon Cerdas dan Sehat** adalah sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN	
4.1	Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	4.1.1	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, bermutu, relevan dan kompetitif bagi masyarakat
4.2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4.2.1	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi masyarakat
4.3	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan budaya masyarakat	4.3.1	Terwujudnya peningkatan kehidupan beragama dan pendidikan keagamaan masyarakat
4.4	Meningkatkan pemasyarakatan olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	4.4.1	Meningkatnya prestasi olahraga dan kualitas peran pemuda dalam pembangunan

5.4.5. Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik

Tujuan dan sasaran misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik atau agenda Cilegon Berwibawa adalah sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN	
5.1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	5.1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
		5.1.2	Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah
		5.1.3	Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
		5.1.4	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan pertanahan
		5.1.5	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan informasi daerah yang berkualitas
		5.1.6	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
5.2	Meningkatkan ketentraman, kertiban dan perlindungan masyarakat	5.2.1	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
		5.2.2	Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama
		5.2.3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum daerah
		5.2.4	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan bencana

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.1.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran

Berpijak pada upaya untuk mencapai **sasaran** misi **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran** maka ditetapkan **strategi** dan **arah kebijakan** sebagai berikut:

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1.1.1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin, ketahanan pangan dan kesempatan kerja masyarakat	1.1.1.1	Pemberdayaan kapasitas masyarakat miskin dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat, penerapan TTG dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
				Meningkatkan akses pangan dan pemenuhan gizi bagi masyarakt miskin untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan
		1.1.1.2	Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh	Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat miskin dan meningkatkan penataan kawasan kumuh
		1.1.1.3	Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta peningkatan perlindungan dan produktivittas tenaga kerja	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal melaui pembentukan, pembinaan dan pengawasan regulasi pemanfaatan tenaga kerja lokal
				Mengotimalkan peran balai latihan kerja dan meningkatkan pembinaan, fasilitasi dan pelatihan usaha mandiri masyarakat
				Meningkatkan fasilitasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial
1.1.2	Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat	1.1.2.1	Peningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian sehingga mampu	Meningkatkan pemanfaatan lahan, prasarana dan sarana produksi serta pengelolaan

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
			memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja	hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
				Memfasilitasi dan meningkatkan pembinaan kapasitas SDM dan kelembagaan petani serta alat dan mesin pertanian
		1.1.2.2	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil peternakan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja	Memfasilitasi dan meningkatkan pembinaan pengelolaan usaha peternakan
				Membina dan mengendalikan penyakit serta meningkatkan pengasawan keamanan pangan asal ternak
		1.1.2.3	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil perikanan dan kelautan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja	Memfasilitasi dan meningkatkan pembinaan kapasitas kelembagaan dan sarana dan prasaran produksi serta pengelolaan usaha perikanan tangkap
				Memfasilitasi dan meningkatkan pembinaan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana produksi serta pengelolaan usaha perikanan budidaya
		1.1.2.4	Peningkatan pembinaan, fasilitasi peningkatan kualitas SDM, kapasitas kelembagaan dan manajemen, akses permodalan, pemasaran dan produk bagi UMKM dan koperasi	Memfasilitasi dan meningkatkan pembinaan kapasitas SDM, kelembagaan, manajemen, modal dan pemasaran hasil usaha koperasi
				Memfasilitasi dan meningkatkan pembinaan kapasitas SDM, kelembagaan, manajemen, modal dan pemasaran hasil usaha UMKM
1.2.1	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1.1.2.5	Peningkatan pembinaan usaha pertambangan dan energi	Meningkatkan penataan, pengendalian dan pemetaan usaha bidang pertambangan
				Memperluas cakupan pelayanan listrik perdesaan
		1.2.1.1	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan pelayanan bagi orang terlantar dalam perjalanan dan pemakaman jenazah terlantar serta pengelolaan tempat pemakaman umum
				Membangunan dan memelihara panti rehabilitasi terpadu dan pembinaan

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
				PMKS
		2.1.1	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM kesejahteraan sosial	Memfasilitasi bantuan dan pelatihan peningkatan kualitas tenaga sosial
				Memfasilitasi bantuan dan pemberdayaan sosial dan kepemudaan
		3.1.1	Perluasan cakupan dan kualitas bantuan dan jaminan sosial serta penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas tagana dan penanggulangan bencana
				Memperluas cakupan pelayanan jaminan sosial
1.2.2	Meningkatnya kesetaraan dan keberdayaan gender	1.2.2.1	Pemantapan kapasitas, kemampuan, peran kelembagaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pembinaan media massa
				Meningkatkan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan
		1.2.2.3	Peningkatan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Sosialisasi pemasyarakatan perlindungan perempuan
				Sosialisasi pemasyarakatan perlindungan anak
		1.2.2.4	Pengendalian pertumbuhan penduduk	Memperluas cakupan pelayanan keluarga berencana
				Meningkatkan dan memperluas cakupan promosi dan pemasyarakatan informasi keluarga berencana
		1.2.2.6	Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga	Memfasilitasi dan meningkatkan pembinaan usaha keluarga
				Meningkatkan pelatihan keluarga sejahtera

6.1.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Jasa

Berpijak pada upaya untuk mencapai **sasaran** misi **Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Jasa** maka ditetapkan **strategi** dan **arah kebijakan** sebagai berikut:

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
2.1.1	Meningkatnya investasi	2.1.1.1	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan kualitas pelayanan penanaman modal	Penataan kelembagaan dan sistem perijinan investasi secara terpadu
		2.1.2.1	Mendorong peningkatan kinerja serta pengembangan kemitraan sektor industri	Fasilitasi dan pembinaan kemitraan usaha antara industri dengan UMKM bidang logam, mesin, elektronika dan aneka industri
				Fasilitasi dan pembinaan kemitraan usaha antara industri dengan UMKM bidang kimia, agro dan hasil hutan
		2.1.2.2	Mendorong peningkatan kinerja sektor perdagangan	Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dalam negeri
				Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan luar negeri
2.1.2	Meningkatnya kinerja sektor industri, perdagangan dan jasa	2.1.2.1	Mendorong peningkatan kinerja serta pengembangan kemitraan sektor industri	Revitalisasi dan pembangunan sarana prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional dan pasar agro
				Fasilitasi dan pembinaan kemitraan usaha antara industri dengan UMKM bidang logam, mesin, elektronika dan aneka industri
		2.1.2.2	Mendorong peningkatan kinerja sektor perdagangan	Fasilitasi dan pembinaan kemitraan usaha antara industri dengan UMKM bidang kimia, agro dan hasil hutan
				Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dalam negeri
		2.1.2.3	Mendorong peningkatan kinerja dan pengembangan	Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan luar negeri
				Revitalisasi dan pembangunan sarana prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional dan pasar agro
				Pengembangan destinasi wisata daerah melalui

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
			sektor pariwisata	pembentukan wisata industri, kampung wisata dan museum kota
				Peningkatan pembinaan dan fasilitasi usaha kepariwisataan
		2.1.2.4	Mengembangkan pemasaran potensi seni budaya dan pariwisata daerah	Penguatan informasi dan database seni budaya dan pariwisata daerah
				Peningkatan promosi seni budaya dan pariwisata daerah
		4.3.1.1	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah	Peningkatan seni budaya daerah melalui pembinaan sanggar dan pementasan kesenian tradisional serta fasilitasi peralatan kelompok kesenian
				Peningkatan budaya daerah melalui pembangunan gedung dan festival budaya daerah

6.1.3. Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan

Berpijak pada upaya untuk mencapai **sasaran** misi **Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan** maka ditetapkan **strategi** dan **arah kebijakan** sebagai berikut:

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
3.1.1	Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, handal dan berdaya saing	3.1.1.1	Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan ketersediaan dan daya dukung sarana perhubungan
				Peningkatan ketersediaan dan daya dukung prasarana perhubungan
		3.1.1.2	Meningkatkan pelayanan perhubungan laut	Peningkatan pelayanan operasional angkutan laut
				Peningkatan pelayanan operasional penunjang keselamatan pelayaran
		3.1.1.3	Meningkatkan pelayanan perhubungan darat	Peningkatan pelayanan operasional lalu lintas darat
				Peningkatan pelayanan operasional angkutan darat
3.1.2	Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang memadai dan berkualitas	3.1.2.1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas perencanaan teknis jalan dan jembatan
				Peningkatan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan serta pembangunan JLU
				Peningkatan kualitas jalan dan jembatan
		3.1.2.2	Meningkatkan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umum	Peningkatan mutu hasil pekerjaan konstruksi dan ketersediaan alat berat dan perbengkelan
3.1.3	Terwujudnya pelayanan pos dan telekomunikasi yang memadai dan berkualitas	3.1.3.1	Meningkatkan penataan dan pengawasan jaringan telekomunikasi dan pembinaan usaha pengiriman barang	Peningkatan ketersediaan data dan informasi bidang pos
				Peningkatan ketersediaan data dan informasi bidang telekomunikasi
3.1.4	Terkendalinya bencana banjir dan genangan air serta kekeringan	3.1.4.1	Meningkatkan daya dukung jaringan drainase, sumber daya air dan pengendalian banjir	Pembangunan dan peningkatan saluran/ drainase, DAS, dan jaringan irigasi
				Pemeliharaan saluran/ drainase, DAS, dan jaringan irigasi
				Peningkatan kualitas perencanaan teknis saluran/ drainase, DAS, dan jaringan irigasi

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
3.1.5	Tersedianya fasilitas strategis kota	3.1.5.1	Meningkatkan ketersediaan fasilitas strategis kota yang handal	Pembangunan dan peningkatan pelabuhan skala internasional dan fasilitas strategis kota
3.2.1	Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu	3.2.1.1	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Peningkatan ketersediaan dan kualitas pengukuran dan pemetaan
				Peningkatan ketersediaan dan kualitas perencanaan tata ruang
				Peningkatan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang
		3.2.1.2	Meningkatkan penataan, pemeliharaan dan pengendalian prasarana dan arsitektur kota	Peningkatan penataan dan pelayanan prasarana dan arsitektur kota yang merata, representatif, dan estetik
				Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan arsitektur kota yang merata, representatif, dan estetik
				Peningkatan pengendalian prasarana dan arsitektur kota
3.2.2	Terwujudnya lingkungan kota yang bersih dan asri	3.2.1.3	Meningkatkan penataan kota melalui pengendalian bangunan dan tata informasi (reklame)	Peningkatan penataan dan pengendalian bangunan
				Peningkatan penataan dan pengendalian reklame
				Peningkatan pengendalian perijinan bangunan dan reklame
		3.2.2.1	Meningkatkan cakupan pelayanan dan penanganan persampahan	Peningkatan manajemen pelayanan kebersihan
				Peningkatan manajemen pelayanan dan pengelolaan sarana prasarana kebersihan
				Peningkatan manajemen pelayanan dan pengelolaan sarana prasarana kebersihan
		3.2.2.2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	Pengembangan partisipasi aktif masyarakat dan mitra swasta dalam mewujudkan kebersihan
				Pengendalian pengelolaan sampah
				Pengendalian pengelolaan sampah
		3.2.2.3	Meningkatkan keindahan dan keasrian kota	Penataan dan pengelolaan RTH untuk mewujudkan lingkungan kota yang asri dan lestari
				Penataan dan pengelolaan sarana dan prasaran taman kota
3.2.3	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatnya perlindungan dan konsevasi sumberdaya alam	3.2.3.1	Meningkatkan Penanggulangan, pemulihan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
				Pemulihan kerusakan lingkungan
		3.2.3.2	Meningkatkan Upaya Perencanaan Pengelolaan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Pengembangan Pengawasan Pelaksanaan Regulasi Pengelolaan Lingkungan
				Pembinaan kesadaran lingkungan
		3.2.3.3	Meningkatkan Penanggulangan, Pemulihan, dan perlindungan sumber daya alam	Peningkatan Konservasi Lingkungan Buatan
				Peningkatan Konservasi Lingkungan alam

6.1.4. Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Keagamaan

Berpijak pada upaya untuk mencapai **sasaran** misi **Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan, Dan Keagamaan** maka ditetapkan **strategi** dan **arah kebijakan** sebagai berikut:

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
4.1.1	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, bermutu, relevan dan kompetitif bagi masyarakat	4.1.1.1	Memperluas cakupan pelayanan dan pembinaan pendidikan kesetaraan, anak usia dini, kemasyarakatan, dan informal	Pembinaan dan pengembangan serta pengadaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan dan pendaftaran lulusan pendidikan kesetaraan
				Penyelenggaraan pendidikan kemasyarakatan
		4.1.1.2	Memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang merata, terjangkau dan bermutu	Peningkatan kemampuan peserta didik melalui tryout dan ulangan umum, soialisasi Wajar Dikdas 9 tahun, pengembangan wawasan keilmuan dan pembinaan prestasi siswa, penyelenggaraan lomba UKS dan lomba keindahan kebersihan sekolah serta pengembangan minat baca
				Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar
		4.1.1.3	Memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan pendidikan menengah yang merata, terjangkau dan bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan	Peningkatan kemampuan peserta didik melalui tryout dan ulangan umum, soialisasi Wajar 12 tahun, pengembangan wawasan keilmuan dan pembinaan prestasi siswa, penyelenggaraan lomba UKS dan lomba keindahan kebersihan sekolah serta pengembangan minat, bakat siswa
				Penyediaan dan pemenuhan sarana serta fasilitas pendukung pembelajaran satuan pendidikan menengah
		4.1.1.4	Memperluas cakupan beasiswa dan meningkatkan kualitas tenaga profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Pemberian bantuan beasiswa bagi pserta didik pendidikan dasar dan menengah swasta (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK), serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi
				Pemberian biaya bantuan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan kualitas serta karir bagi guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan dan pelatihan; penyediaan kelengkapan bekerja bagi penilik, pamong belajar serta TDL; fasilitasi untuk sertifikasi

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
		4.1.1.1	Membangun perpustakaan daerah yang representatif dan meningkatkan pelayanan perpustakaan sehingga mampu meningkatkan minat baca masyarakat	Pengelolaan dan pembinaan bahan pustaka
4.1.1	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi masyarakat	4.1.1.1	Meningkatkan fasilitas, SDM, manajemen pelayanan puskesmas dan memperluas pengembangan poskesdes	Pembangunan poskesdes tambahan dan peningkatan puskesmas DTP serta penyiapan tenaga medis diseluruh kelurahan dan peningkatan kepuasan atas pelayanan puskesmas
		4.1.1.2	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, kualitas gizi masyarakat dan perluasan cakupan pelayanan kesehatan khusus dan rujukan	Peningkatan pelayanan dan kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda serta peningkatan mutu kesehatan khusus dan rujukan
		4.1.1.3	Meningkatkan pembinaan pelayanan kesehatan swasta, pemenuhan kebutuhan minima; obat, bahan dan alat kesehatan serta peningkatan pengawasan obat, makanan dan minuman untuk melindungi kesehatan masyarakat	Peningkatan status gizi masyarakat serta kesehatan ibu dan anak
		4.1.1.4	Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kualitas kesehatan lingkungan melalui peningkatan kesadaran, perilaku dan pola hidup sehat masyarakat	
		4.1.1.5	Meningkatkan promosi kesehatan dan memperluas cakupan pelayanan jamkesda	
		4.2.1.6	Meningkatkan daya tampung dan manajemen pelayanan RSUD	Pengadaan dan peningkatan obat serta alat kedokteran dan peningkatan kesehatan tenaga pelayanan medis melalui imunisasi dan medical check up
				Peningkatan mutu keperawatan, pengadaan serta pembangunan alat dan sarana prasarana keperawatan
				Pengelolaan limbah cair dan limbah padat RS, Penyusunan sistem informasi pelaporan pelayanan dan

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
				profil RS, peningkatan keanggotaan PERSI dan ARSADA serta peningkatan kecepatan pelayanan RS
4.3.1	Terwujudnya peningkatan kehidupan beragama dan pendidikan keagamaan masyarakat	4.3.1.1	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah	Peningkatan seni budaya daerah melalui pembinaan sanggar dan pementasan kesenian tradisional serta fasilitasi peralatan kelompok kesenian
				Peningkatan budaya daerah melalui pembangunan gedung dan festival budaya daerah
		4.2.1.1	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai keagamaan melalui pengajian, penyelenggaraan MTQ dan pembinaan SDM
				Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji
4.4.1	Meningkatnya prestasi olahraga dan kualitas peran pemuda dalam pembangunan			

6.1.5. Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik

Berpijak pada upaya untuk mencapai **sasaran** misi **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik** maka ditetapkan **strategi** dan **arah kebijakan** sebagai berikut:

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
5.1.1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	5.1.1.1	Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
5.1.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap tingkat pelayanan pemerintah daerah	5.1.2.1	Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan umum	Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan umum
				Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
		5.1.2.1	Merestrukturisasi dan revitalisasi kelembagaan perangkat daerah yang ramping struktur kaya fungsi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
5.1.3	Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah	5.1.3.1	Peningkatan kapasitas pendapatan dan tata kelola keuangan daerah	Mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif dan efesien
				Mengoptimalkan penerimaan sumber- pendapatan daerah dan pengelolaan keuang daerahdari pajak
				Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yg efektif dan efesien
				Mengoptimalkan perencanaan dan Pengendalian keuangan daerah yg efektif dan efesien
5.1.4	Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	5.1.4.1	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi pembnagunan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas Informasi pembangunan daerah
				Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan daerah
				Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
				ekonomi daerah
				Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan sosial dan pemerintahan daerah
				Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
				Meningkatkan pelayanan dan pembinaan administrasi pertanahan
5.1.5	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan informasi daerah yang berkualitas	5.1.5.1	Peningkatan pelayanan informasi daerah	Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas informasi daerah
5.1.6	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	5.1.6.1	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
				Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil yang berkualitas
				Meningkatkan data dan informasi kependudukan
5.2.1	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	5.2.1.1	Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk hukum daerah	Pelaksanaan Penataan Raperda
				Memenuhi kebutuhan produk dan bantuan hukum
5.2.2	Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama	5.2.2.1	Fasilitasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan kerukunan hidup beragama	Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan
5.2.3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum daerah ketertiban masyarakat serta penegakan hukum daerah	5.2.3.1	Men Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan pembinaan kelembagaan politik dan kemasyarakatan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
				Meningkatkan pembinaan kelembagaan politik dan kemasyarakatan serta penanggulangan konflik
5.2.4	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan bencana	5.2.4.1	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
				Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran

6.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

6.2.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah untuk pembangunan diupayakan untuk dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Disamping itu, hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari pos pajak dan retribusi daerah, yaitu efeknya terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Dimana upaya tersebut hendaknya sedapat mungkin tidak membebani masyarakat, sehingga potensi munculnya efek distorsi ekonomi yang kontra produktif dan akan sangat merugikan dapat hindari.

6.2.2. Strategi Dan Kebijakan Belanja Daerah

Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut diantaranya adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa dan juga sektor bangunan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus sedapat mungkin ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (seperti: pendidikan, kesehatan, perumahan), menanggulangi masalah-masalah sosial (seperti : kemiskinan dan pengangguran), serta meningkatkan ketersediaan dan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pergerakan roda perekonomian daerah dan masyarakat.

6.2.3. Strategi Dan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dari sisi penerimaan pembiayaan daerah, diupayakan untuk dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi terjadinya defisit anggaran. Disamping itu, penting pula dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Guna menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Cilegon tahun 2010-2015 yang juga memperhatikan misi pembangunan nasional dan Provisi Banten maka selanjutnya dijabarkan dalam bentuk **program** beserta **indikasi kegiatan** yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2010-2015.

7.1. PROGRAM

Terbitnya berbagai peraturan perundangan yang berisikan reformasi dalam bidang perencanaan dan penganggaran, maka penyusunan program dalam RPJMD tahun 2010-2015 didasari dengan suatu filosofi adanya keterkaitan yang jelas antara tugas pokok dan fungsi organisasi (tupoksi SKPD) dengan struktur program dan kegiatan serta selaras dengan pencapaian visi dan misi jangka menengah.

Untuk mencapai tujuan ini maka program dalam RPJMD tahun 2010-2015 disusun dengan pertimbangan : (1) program disusun dalam kerangka strategis daerah, dalam arti bahwa ada keselarasan antara sasaran program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (2) program disusun dengan adanya kejelasan penanggung jawabnya, dalam arti bahwa program secara jelas harus dapat menunjukkan hasil (outcome) yang akan dicapai dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerjanya; (3) program dapat dijabarkan dalam kegiatan, dimana satu kegiatan hanya terkait dengan satu program, dan satu program dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan; (4) program harus merupakan cara untuk mendukung prioritas; (5) program terintegrasi dalam manajemen anggaran yang berbasis kinerja secara luas, dalam arti bahwa ada kejelasan antara anggaran yang diberikan dengan kinerja yang dihasilkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara operasional unit eselon III menanggungjawab satu program spesifik; pengecualian dalam hal ini untuk eselon III yang tupoksinya mencakup lebih dari satu jenis urusan pembangunan, maka dimungkinkan untuk menangani lebih dari satu program.

Berdasarkan jenisnya program yang digunakan dalam RPJMD Tahun 2010-2015 meliputi dua jenis program, yaitu :

1. Program Generik, yaitu program-program yang digunakan oleh beberapa unit eselon tiga yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Nomenklatur program generik dijadikan khusus dengan ditambahkan nama SKPD dan/atau dengan membedakan kode program.

Misalnya nama program generik untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah “Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah”.

2. Program Teknis, yaitu program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).

Secara operasional, pencapaian sasaran program dirumuskan dalam kegiatan, yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, maupun barang modal sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Unit eselon IV menanggungjawab satu kegiatan spesifik; pengecualian dalam hal ini untuk eselon IV yang tupoksinya mencakup lebih dari satu jenis program,, maka dimungkinkan untuk menangani lebih dari satu jenis kegiatan.

Berdasarkan jenisnya, kegiatan yang digunakan dalam RPJMD Tahun 2010-2015 meliputi dua jenis program, yaitu :

1. Kegiatan Generik, yaitu kegiatan operasional pada program generik.
2. Kegiatan Teknis, yaitu kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), yang dalam hal ini terbagi atas sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Prioritas Daerah (SKPD), yaitu sub kegiatan-kegiatan strategis yang terkait dengan perwujudan visi misi Kepala Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Prioritas Utama, yaitu sub kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian sasaran agenda pembangunan daerah, yang memiliki kriteria antara lain : memiliki pengaruh yang besar terhadap sasaran agenda pembangunan daerah, merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya, memiliki ukuran kinerja spesifik dan terukur serta realistis.
 - c. Sub Kegiatan Prioritas Pendukung, yaitu sub kegiatan dengan output spesifik yang mendukung terhadap pencapaian kinerja SKPD.

Berikut ini diuraikan program beserta pagu indikatif anggarannya pada Revisi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 untuk tahun 2013-2016.

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Dinas Pendidikan	28,862,791,978	42,702,761,231	52,278,729,930	53,549,000,000	53,549,000,000	55,124,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	10,838,984,928	21,109,030,973	13,578,468,368	13,629,000,000	13,629,000,000	13,629,000,000
	- Dinas Pendidikan	1,695,217,572	9,240,177,781	1,951,066,400	1,990,000,000	1,990,000,000	1,990,000,000
	- Dinas Pendidikan UPTD Cibeber	28,605,474	54,999,960	54,017,870	55,000,000	55,000,000	55,000,000
	- Dinas Pendidikan UPTD Cilegon	45,587,314	55,000,000	56,279,030	55,000,000	55,000,000	55,000,000
	- Dinas Pendidikan UPTD Citangkil	29,602,759	53,526,486	54,728,450	55,000,000	55,000,000	55,000,000
	- Dinas Pendidikan UPTD Ciwandan	23,720,861	50,561,771	55,631,751	55,000,000	55,000,000	55,000,000
	- Dinas Pendidikan UPTD Grogol	42,524,990	55,000,070	53,198,570	55,000,000	55,000,000	55,000,000
	- Dinas Pendidikan UPTD Jombang	34,566,285	55,000,065	54,718,020	55,000,000	55,000,000	55,000,000
	- Dinas Pendidikan UPTD Pulomerak	40,583,305	54,999,338	55,017,050	55,000,000	55,000,000	55,000,000
	- Dinas Pendidikan UPTD Purwakarta	45,098,272	55,475,985	55,201,830	55,000,000	55,000,000	55,000,000
	- Dinas Pendidikan UPTD Sangar Kegiatan Belajar (SKB)	61,260,215	76,500,000	73,336,895	75,000,000	75,000,000	75,000,000
	- SMPN 1	380,395,008	502,713,500	490,069,152	491,000,000	491,000,000	491,000,000
	- SMPN 2	408,952,892	505,509,300	637,265,800	638,000,000	638,000,000	638,000,000
	- SMPN 3	486,826,717	649,335,800	542,273,400	543,000,000	543,000,000	543,000,000
	- SMPN 4	311,147,701	378,931,036	437,907,404	439,000,000	439,000,000	439,000,000
	- SMPN 5	513,012,261	610,380,800	519,533,555	521,000,000	521,000,000	521,000,000
	- SMPN 6	515,527,478	624,355,000	512,482,000	513,000,000	513,000,000	513,000,000
	- SMPN 7	424,700,458	490,115,000	457,777,808	458,000,000	458,000,000	458,000,000
	- SMPN 8	443,922,612	510,993,300	451,260,800	461,000,000	461,000,000	461,000,000
	- SMPN 9	260,950,522	488,225,300	489,420,500	490,000,000	490,000,000	490,000,000
	- SMPN 10	328,398,550	356,395,100	350,647,500	351,000,000	351,000,000	351,000,000
	- SMPN 11	217,913,303	299,007,620	397,627,665	395,000,000	395,000,000	395,000,000
	- SMUN 1	639,121,791	634,485,000	634,640,000	635,000,000	635,000,000	635,000,000
	- SMUN 2	650,249,882	753,106,750	784,220,000	785,000,000	785,000,000	785,000,000
	- SMUN 3	397,919,902	794,445,000	774,104,500	775,000,000	775,000,000	775,000,000
	- SMUN 4	482,574,752	483,825,000	534,614,400	523,000,000	523,000,000	523,000,000
	- SMUN 5	315,919,387	417,674,500	444,031,000	445,000,000	445,000,000	445,000,000
	- SMKN 1	789,336,492	924,709,000	940,340,000	941,000,000	941,000,000	941,000,000
	- SMKN 2	431,546,921	567,183,920	591,395,198	592,000,000	592,000,000	592,000,000
	- SMKN 3	696,046,721	826,327,731	756,699,820	758,000,000	758,000,000	758,000,000
	- SMKN 4	97,754,531	540,070,860	368,962,000	370,000,000	370,000,000	370,000,000
	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	3,190,449,800	3,036,966,000	3,158,418,300	3,185,400,000	3,185,400,000	3,185,400,000
	Peningkatan Kapasitas Tutor dan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
	Bantuan Honor Tutor PAUD	0	943,200,000	1,274,400,000	1,274,400,000	1,274,400,000	1,274,400,000
	Bantuan Honor Pengelola PAUD	0	331,200,000	234,000,000	234,000,000	234,000,000	234,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pendidikan Non Formal dan Informal			1,650,018,300	1,677,000,000	1,677,000,000	1,677,000,000
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	2,476,071,300	4,006,860,000	5,528,570,000	5,585,000,000	5,585,000,000	5,585,000,000
	Bantuan Pembebasan SPP SD Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)	0	0	1,388,100,000	1,388,100,000	1,388,100,000	1,388,184,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	2,476,071,300	4,006,860,000	5,528,570,000	5,585,000,000	5,585,000,000	5,585,000,000
	Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah	10,177,029,350	13,252,318,108	16,095,584,062	17,009,800,000	17,009,800,000	18,509,800,000
	- Dinas Pendidikan	4,354,841,700	5,840,691,200	8,547,126,200	9,451,800,000	9,451,800,000	10,951,800,000
	Bantuan Pembebasan SPP SMP Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)	0	0	1,624,200,000	1,624,260,000	1,624,260,000	1,624,128,000
	Bantuan Pembebasan SPP SMA Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)	0	0	923,400,000	923,400,000	923,400,000	1,624,128,000
	Bantuan Pembebasan SPP SMK Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)	0	0	3,228,000,000	3,228,000,000	3,228,000,000	3,228,000,000
	Bantuan Pembebasan SPP Madrasah Aliyah Negeri (MAN)	500,000,000	500,000,000	554,400,000	554,400,000	554,400,000	554,400,000
	Pengadaan Lahan Pengembangan SMKN 2 dan SMKN 4	0	0	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0
	Pembangunan Konstruksi Bangunan Pengembangan SMKN 2, SMKN 3 dan SMKN 4	0	0	1,858,500,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0
	Peningkatan Kapasitas Sarana Pembelajaran SMKN	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah			5,688,626,200	4,951,800,000	4,951,800,000	9,951,800,000
	- SMPN 1	168,162,000	266,016,000	223,182,100	224,000,000	224,000,000	224,000,000
	- SMPN 2	265,469,500	50,000,000	420,161,400	421,000,000	421,000,000	421,000,000
	- SMPN 3	233,818,000	260,555,100	236,054,400	237,000,000	237,000,000	237,000,000
	- SMPN 4	68,109,500	91,509,928	203,388,000	204,000,000	204,000,000	204,000,000
	- SMPN 5	188,359,000	229,680,000	254,776,000	255,000,000	255,000,000	255,000,000
	- SMPN 6	87,166,000	112,640,000	124,388,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000
	- SMPN 7	137,545,000	145,249,000	173,897,022	174,000,000	174,000,000	174,000,000
	- SMPN 8	36,850,000	110,840,000	74,606,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
	- SMPN 9	38,300,000	44,000,000	43,990,000	44,000,000	44,000,000	44,000,000
	- SMPN 10	87,724,050	126,826,800	144,164,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000
	- SMPN 11	54,545,000	78,921,000	57,100,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000
	- SMUN 1	709,420,500	771,000,000	771,000,000	771,000,000	771,000,000	771,000,000
	- SMUN 2	795,078,950	945,000,000	913,780,000	914,000,000	914,000,000	914,000,000
	- SMUN 3	353,875,300	415,730,000	676,945,500	677,000,000	677,000,000	677,000,000
	- SMUN 4	198,782,250	318,402,500	327,120,000	328,000,000	328,000,000	328,000,000
	- SMUN 5	257,357,000	519,207,300	430,506,300	431,000,000	431,000,000	431,000,000
	- SMKN 1	1,081,264,100	1,033,331,760	1,149,500,000	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000
	- SMKN 2	360,209,000	824,183,320	691,390,940	691,000,000	691,000,000	691,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- SMKN 3	145,096,800	267,179,000	261,258,200	262,000,000	262,000,000	262,000,000
	- SMKN 4	55,055,700	301,355,200	371,250,000	372,000,000	372,000,000	372,000,000
	Program Peningkatan Manajemen, Kualitas, dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan	2,180,256,600	1,297,586,150	13,917,689,200	14,139,800,000	14,139,800,000	14,214,800,000
	Beasiswa Masuk PTN Bagi Siswa Prestasi Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS)	0	0	299,652,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
	Bantuan Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	Bantuan Penghargaan Bagi Guru Berprestasi	0	0	0	75,000,000	75,000,000	75,000,000
	Beasiswa Masuk PT Kerjasama Pemerintah Kota	0	0	0	75,000,000	75,000,000	150,000,000
	Bantuan Honor Guru Madrasah	5,400,000,000	6,699,600,000	8,499,600,000	8,499,600,000	8,499,600,000	8,499,600,000
	Bantuan Honor Guru TKA/TPA (Taman Pendidikan Al Quran)	957,850,000	971,100,000	1,261,200,000	1,261,200,000	1,261,200,000	1,261,200,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Peningkatan Manajemen, Kualitas, dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan			4,156,889,200	4,179,000,000	4,179,000,000	4,179,000,000
	Dinas Kesehatan	12,456,145,105	22,678,221,561	26,078,253,805	24,021,150,000	26,621,150,000	25,221,150,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	4,870,728,188	4,730,323,420	4,955,554,470	5,182,000,000	5,182,000,000	5,182,000,000
	- Dinas Kesehatan	4,094,267,425	3,833,909,000	4,008,871,400	4,231,000,000	4,231,000,000	4,231,000,000
	- Puskesmas UPTD Cibeber	91,503,204	106,180,300	109,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000
	- Puskesmas UPTD Cilegon	110,177,756	122,474,500	127,499,700	128,000,000	128,000,000	128,000,000
	- Puskesmas UPTD Citangkil	101,340,012	103,344,920	108,499,920	109,000,000	109,000,000	109,000,000
	- Puskesmas UPTD Ciwandan	104,621,957	111,492,100	114,000,100	115,000,000	115,000,000	115,000,000
	- Puskesmas UPTD Grogol	65,194,764	74,407,900	76,999,600	77,000,000	77,000,000	77,000,000
	- Puskesmas UPTD Jombang	55,753,606	61,819,800	69,975,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
	- Puskesmas UPTD Pulomerak	100,072,643	142,318,000	161,209,750	162,000,000	162,000,000	162,000,000
	- Puskesmas UPTD Purwakarta	127,991,686	151,173,000	154,499,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000
	- Puskesmas UPTD P2KP	19,805,135	23,203,900	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
	Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1,107,284,250	9,481,273,672	6,562,408,775	6,654,150,000	6,654,150,000	6,654,150,000
	Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)						
	Pelayanan Kesehatan Kelas III Gratis Bagi Seluruh Masyarakat Kota Cilegon	3,000,000,000	5,000,000,000	4,998,150,000	4,998,150,000	4,998,150,000	4,998,150,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan			1,564,258,775	1,656,000,000	1,656,000,000	1,656,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit serta Penyehatan Lingkungan	1,133,678,082	1,674,440,600	1,451,790,000	1,752,000,000	1,752,000,000	1,752,000,000
	Program Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta	2,398,085,418	3,009,116,500	3,027,326,000	3,030,000,000	3,030,000,000	3,030,000,000
	Program Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan	580,091,317	1,083,067,369	3,852,944,600	3,853,000,000	3,853,000,000	3,853,000,000
	Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)	1,666,000,000	1,800,000,000	2,907,125,000	2,880,000,000	2,880,000,000	2,880,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan serta Pembiayaan Kesehatan			945,819,600	973,000,000	973,000,000	973,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	2,366,277,850	2,700,000,000	6,228,229,960	3,550,000,000	6,150,000,000	4,750,000,000
	- Dinas Kesehatan		1,222,899,000	6,228,229,960	2,700,000,000	5,300,000,000	3,900,000,000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan			5,380,200,000	2,700,000,000	5,300,000,000	3,900,000,000
	- Puskesmas UPTD Cibeber	80,380,000	81,520,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000
	- Puskesmas UPTD Cilegon	102,400,400	105,077,600	116,000,000	116,000,000	116,000,000	116,000,000
	- Puskesmas UPTD Citangkil	77,612,500	83,005,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
	- Puskesmas UPTD Ciwandan	98,675,000	96,500,000	121,492,000	122,000,000	122,000,000	122,000,000
	- Puskesmas UPTD Grogol	54,166,000	56,042,000	55,999,600	56,000,000	56,000,000	56,000,000
	- Puskesmas UPTD Jombang	70,730,632	71,681,200	80,500,000	81,000,000	81,000,000	81,000,000
	- Puskesmas UPTD Pulomerak	90,858,000	91,802,000	105,538,400	106,000,000	106,000,000	106,000,000
	- Puskesmas UPTD Purwakarta	113,660,000	116,643,000	122,499,960	123,000,000	123,000,000	123,000,000
	- Puskesmas UPTD P2KP	31,596,000	41,076,000	44,000,000	44,000,000	44,000,000	44,000,000
	Rumah Sakit Umum Daerah	56,207,979,404	53,064,977,500	59,202,404,500	55,333,000,000	55,333,000,000	55,333,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	255,175,000	332,523,500	2,668,273,500	333,000,000	333,000,000	333,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan RSUD	55,952,804,404	52,732,454,000	56,534,131,000	55,000,000,000	55,000,000,000	55,000,000,000
	Sarana Kesehatan dan Bangunan RSUD		2,093,914,000	2,844,700,000	0	0	0
	Operasional Pelayanan RSUD (BLUD RSUD)		50,300,000,000	53,389,431,000	55,000,000,000	55,000,000,000	55,000,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Peningkatan Pelayanan RSUD		338,540,000	300,000,000	0	0	0
	Dinas Pekerjaan Umum	98,776,945,426	144,626,727,077	133,752,700,000	135,946,000,000	173,145,270,581	200,957,432,077

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	1,100,138,921	1,696,200,400	2,191,060,000	2,176,000,000	2,176,000,000	2,176,000,000
	Program Pembangunan, Peningkatan / Normalisasi, Pemeliharaan Sungai, Saluran/Drainase, dan Jaringan Irigasi	4,626,465,820	7,164,571,450	17,126,367,800	20,000,000,000	20,000,000,000	25,000,000,000
	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	54,067,668,910	80,718,924,327	75,940,667,200	87,220,000,000	115,909,270,581	167,031,432,077
	Pembangunan Jalan Lingkar Selatan	20,000,000,000	20,000,000,000	37,338,650,000	40,300,000,000	47,460,000,000	43,231,432,077
	Pembangunan Jalan Lingkar Utara	0	0	838,835,000	1,920,000,000	14,400,000,000	48,800,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			37,763,182,200	45,000,000,000	54,049,270,581	75,000,000,000
	Program Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Bidang ke-PU-an	298,279,500	623,070,000	446,200,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara	23,772,892,000	32,372,989,900	22,614,359,500	17,350,000,000	24,400,000,000	800,000,000
	Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor Kecamatan			0	5,000,000,000	0	0
	Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor Kelurahan			0	9,900,000,000	13,600,000,000	0
	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara			12,877,825,000			
	Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan			2,552,027,000	1,650,000,000	0	0
	Lanjutan Pembangunan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan			1,511,993,000	0	0	0
	Lanjutan Pembangunan Gedung Setda Sayap Kiri dan Kanan			2,467,990,000	0	0	0
	Pembangunan Masjid Pemerintah Daerah			1,866,825,000	0	0	0
	Konstruksi Pembangunan Kantor dan Posko Damkar			0	0	5,000,000,000	0
	Konstruksi Pembangunan Kantor BPTPM			0	0	5,000,000,000	0
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara			1,337,699,500	800,000,000	800,000,000	800,000,000
	Program Penataan Perumahan dan Permukiman	2,728,253,275	6,397,889,000	15,434,045,500	8,750,000,000	10,210,000,000	5,500,000,000
	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	700,000,000	500,000,000	3,709,425,000	3,750,000,000	6,710,000,000	0
	Penataan Kawasan Kumuh	482,496,000	1,150,000,000	2,759,425,000	1,500,000,000	0	2,000,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Penataan Perumahan dan Permukiman			8,965,195,500	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
	Program Pembangunan Fasilitas Strategis Daerah	12,183,247,000	15,653,082,000	0	0	0	0

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Dinas Tata Kota	7,256,231,047	5,560,606,410	4,508,177,599	5,313,000,000	5,313,000,000	5,313,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	1,018,662,847	992,705,210	1,212,643,800	1,256,000,000	1,256,000,000	1,256,000,000
	Program Penataan dan Pemeliharaan Prasarana dan Arsitektur Kota	3,991,018,000	3,626,423,250	2,005,219,999	2,766,000,000	2,766,000,000	2,766,000,000
	Pengadaan dan Pemasangan PJU			810,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	Pemeliharaan PJU			354,600,000	925,000,000	925,000,000	925,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Penataan dan Pemeliharaan Prasarana dan Arsitektur Kota			840,619,999	841,000,000	841,000,000	841,000,000
	Program Pengendalian Bangunan dan Reklame	618,807,200	348,249,950	629,812,000	630,000,000	630,000,000	630,000,000
	Program Pengembangan Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1,627,743,000	593,228,000	660,501,800	661,000,000	661,000,000	661,000,000
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,580,396,939	11,007,193,550	11,552,306,400	9,904,000,000	11,454,000,000	9,954,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	2,822,423,139	3,079,070,550	3,154,970,000	2,404,000,000	2,404,000,000	2,404,000,000
	Program Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	1,623,293,800	1,656,150,000	1,731,826,400	1,500,000,000	2,300,000,000	1,550,000,000
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,323,138,000	1,417,000,000	1,450,000,000	1,250,000,000	1,500,000,000	1,250,000,000
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	1,411,500,000	1,278,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	1,500,000,000	1,250,000,000
	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	1,904,287,000	884,600,000	1,083,303,000	1,250,000,000	1,500,000,000	1,250,000,000
	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah	495,755,000	2,692,373,000	2,882,207,000	2,250,000,000	2,250,000,000	2,250,000,000
	Penyelenggaraan e-Gov Kota Cilegon				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	Evaluasi, Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Kemiskinan				750,000,000	750,000,000	750,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah				500,000,000	500,000,000	500,000,000
	Dinas Perhubungan	4,026,019,240	4,749,237,250	11,703,271,200	4,513,000,000	4,513,000,000	4,513,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	1,982,416,840	2,613,011,250	2,626,196,200	2,631,000,000	2,631,000,000	2,631,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat	975,656,650	1,120,570,000	569,600,000	570,000,000	570,000,000	570,000,000
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	307,753,000	281,220,000	7,781,220,000	582,000,000	582,000,000	582,000,000
	Pembangunan Sub Terminal			2,500,000,000	0	0	0

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Lanjutan Pembangunan Terminal Terpadu Merak (TTM)			5,000,000,000	0	0	0
	Perawatan Terminal Terpadu Merak (TTM)			0	300,000,000	300,000,000	300,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan			281,220,000	282,000,000	282,000,000	282,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut	681,465,250	686,736,000	678,555,000	680,000,000	680,000,000	680,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi	78,727,500	47,700,000	47,700,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	Badan Lingkungan Hidup	2,247,891,119	2,770,288,200	2,991,901,440	3,009,000,000	3,609,000,000	3,109,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	653,694,819	705,645,000	992,868,500	1,008,000,000	1,008,000,000	1,008,000,000
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	512,553,700	493,075,000	571,404,940	572,000,000	1,072,000,000	572,000,000
	Pengadaan Peralatan Laboratorium					500,000,000	0
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			571,404,940	572,000,000	572,000,000	572,000,000
	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Buatan	671,352,600	756,966,000	867,618,000	868,000,000	968,000,000	968,000,000
	Rehabilitasi Lahan Kritis					100,000,000	100,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Buatan			867,618,000	868,000,000	868,000,000	868,000,000
	Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	410,290,000	814,602,200	560,010,000	561,000,000	561,000,000	561,000,000
	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	8,058,317,369	7,912,455,900	9,572,555,500	8,170,613,484	7,464,759,500	7,464,759,500
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	2,562,517,819	2,734,173,900	3,002,128,500	3,022,000,000	3,022,000,000	3,022,000,000
	Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan	3,842,205,600	3,418,044,500	5,429,489,500	4,006,613,484	3,300,759,500	3,300,759,500
	Pengadaan Sarana Kebersihan			1,095,700,000	700,000,000		
	Kegiatan Lainnya Pada Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan			4,333,789,500	3,306,613,484	3,300,759,500	3,300,759,500
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kebersihan	305,213,300	374,237,500	344,837,500	345,000,000	345,000,000	345,000,000
	Program Keindahan Kota	1,348,380,650	1,386,000,000	796,100,000	797,000,000	797,000,000	797,000,000
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2,490,591,981	2,906,542,425	2,813,236,500	2,826,000,000	2,826,000,000	2,826,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	826,380,556	1,273,052,500	1,414,587,000	1,426,000,000	1,426,000,000	1,426,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	931,252,825	826,761,425	702,753,500	703,000,000	703,000,000	703,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	311,623,000	336,481,500	347,776,000	348,000,000	348,000,000	348,000,000
	Program Peningkatan Data dan Informasi Kependudukan	421,335,600	470,247,000	348,120,000	349,000,000	349,000,000	349,000,000
	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP)	3,583,016,482	6,222,933,850	7,393,620,750	7,218,720,000	7,218,720,000	7,218,720,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	801,052,232	1,267,404,050	1,227,841,950	1,259,000,000	1,259,000,000	1,259,000,000
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1,341,080,000	1,703,500,000	3,163,250,000	3,266,720,000	3,266,720,000	3,266,720,000
	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	1,063,500,000	1,130,020,000	0	0	0	0
	Peningkatan Kapasitas Kader Cilegon Mandiri	0	0	2,716,720,000	2,716,720,000	2,716,720,000	2,716,720,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	277,580,000	573,480,000	446,530,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	524,805,900	2,170,776,000	1,849,615,000	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000
	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga Kecil	618,010,350	738,892,900	751,237,900	627,000,000	627,000,000	627,000,000
	Program Bina Keluarga Sejahtera	298,068,000	342,360,900	401,675,900	316,000,000	316,000,000	316,000,000
	Dinas Sosial	1,772,443,691	2,628,907,390	3,226,314,060	4,825,000,000	4,875,000,000	2,825,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	712,579,131	869,054,050	946,513,050	915,000,000	965,000,000	915,000,000
	Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial dan Pemakaman	242,597,800	643,854,300	963,104,300	2,664,000,000	2,664,000,000	664,000,000
	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Panti Rehabilitasi Terpadu			300,000,000	0	0	0
	Pembangunan Konstruksi Panti Rehabilitasi Terpadu			0	2,000,000,000	2,000,000,000	0
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial dan Pemakaman			663,104,300	664,000,000	664,000,000	664,000,000
	Program Pemberdayaan Sosial	341,928,000	453,779,850	616,350,850	645,000,000	645,000,000	645,000,000
	Program Bantuan Sosial, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Bencana	475,338,760	662,219,190	700,345,860	601,000,000	601,000,000	601,000,000
	Dinas Tenaga Kerja	2,738,843,711	4,913,685,371	3,761,907,991	5,067,000,000	4,924,000,000	3,942,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	983,165,141	1,283,541,873	1,127,172,728	1,118,000,000	1,118,000,000	1,118,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas serta Kompetensi Tenaga Kerja	1,008,995,770	2,820,646,028	1,858,231,263	3,032,000,000	2,889,000,000	1,907,000,000
	Pembangunan Prasarana Workshop Otomotif			0	1,125,000,000	0	0
	Pengadaan Sarana Workshop Otomotif			0	0	982,000,000	0
	Kegiatan Lainnya Pada Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas serta Kompetensi Tenaga Kerja			1,858,231,263	1,907,000,000	1,907,000,000	1,907,000,000
	Program Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja	346,769,800	312,051,470	300,449,500	314,000,000	314,000,000	314,000,000
	Program Peningkatan Hubungan Industrial	399,913,000	497,446,000	476,054,500	603,000,000	603,000,000	603,000,000
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	4,736,699,478	7,491,456,750	9,158,813,750	7,377,400,000	12,809,400,000	13,643,400,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	2,439,573,778	2,417,247,000	2,424,479,000	2,446,000,000	2,446,000,000	2,446,000,000
	Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	313,066,600	447,250,000	303,410,000	504,000,000	504,000,000	504,000,000
	Bantuan Sarana Produksi Koperasi dan UKM			0	200,000,000	200,000,000	200,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi dan UKM			303,410,000	304,000,000	304,000,000	304,000,000
	Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Energi dan Mineral	784,669,100	1,197,350,000	1,150,123,000	3,252,400,000	3,384,400,000	4,968,400,000
	Listrik Perdesaan						
	Pemasangan Instalasi Listrik dan Instalasi Rumah Tangga Listrik Perdesaan			529,768,000	1,040,000,000	1,088,000,000	2,588,000,000
	Pengendalian Pelayanan Air Bawah Tanah						
	Pemasangn Water Meter dan Data Logger			0	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000
	Perawatan dan Operasional Water Meter			0	127,400,000	211,400,000	295,400,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Energi dan Mineral			620,355,000	335,000,000	335,000,000	335,000,000
	Program Pengembangan Perdagangan	781,184,000	3,320,102,750	5,063,714,750	725,000,000	6,025,000,000	5,275,000,000
	Bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional Milik Masyarakat	0	0	0	0	900,000,000	0
	Revitalisasi Pasar Kota dan Pasar Tradisional						0
	Revitalisasi (Pembangunan Kembali) Pasar Kranggan			3,015,026,000	0	0	0

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Revitalisasi Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota						
	Penyusunan DED Revitalisasi Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota			0	0	0	0
	Pembangunan Konstruksi Revitalisasi Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota			0	0	1,500,000,000	1,000,000,000
	Revitalisasi Pasar Hewan			0	0	0	500,000,000
	Pembangunan Reservoir dan Hydrant Pasar Kota dan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota			0	0	0	0
	Pembangunan Pasar Tradisional						
	Pengadaan Lahan Pasar Tradisional (Agro)			0	0	3,500,000,000	0
	Penyusunan DED Pasar Tradisional (Agro)			0	0	300,000,000	0
	Pembangunan Konstruksi Pasar Tradisional (Agro)			0	0	0	3,050,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pengembangan Perdagangan			2,048,688,750	725,000,000	725,000,000	725,000,000
	Program Pengembangan Kemitraan Industri	418,206,000	109,507,000	217,087,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000
	Kampung Industri Kecil						
	Bantuan Sarana Produksi IKM			0	200,000,000	200,000,000	200,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pengembangan Kemitraan Industri			217,087,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
	Dinas Pemuda dan Olahraga	4,597,030,709	9,179,962,600	19,945,182,900	15,515,000,000	22,765,000,000	39,015,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	513,960,309	786,009,600	872,031,900	884,000,000	884,000,000	884,000,000
	Program Peningkatan Fasilitas Olahraga dan Pemuda	728,912,000	526,350,000	11,410,576,000	6,935,000,000	14,185,000,000	30,435,000,000
	Pematangan Lahan Kawasan Gedung Stadion Olahraga			3,000,000,000	500,000,000	2,000,000,000	0
	Pembangunan Konstruksi Gedung Serba Guna (Indoor) Stadion Olahraga			8,000,000,000	6,000,000,000	11,750,000,000	0
	Pembangunan Konstruksi dan Pematangan Lahan Outdoor Stadion Olahraga			0	0	0	30,000,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Peningkatan Fasilitas Olahraga dan Pemuda			410,576,000	435,000,000	435,000,000	435,000,000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	2,830,355,400	6,746,110,000	7,121,270,000	7,154,000,000	7,154,000,000	7,154,000,000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	523,803,000	1,121,493,000	541,305,000	542,000,000	542,000,000	542,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	2,950,681,141	2,735,919,500	2,802,413,200	2,920,000,000	2,920,000,000	2,920,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	693,325,646	810,407,000	769,070,000	785,000,000	785,000,000	785,000,000
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	201,715,840	233,247,500	253,402,100	254,000,000	254,000,000	254,000,000
	Program Peningkatan LSM dan ORMAS	1,499,567,255	1,194,491,000	1,225,865,000	1,326,000,000	1,326,000,000	1,326,000,000
	Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Alam	556,072,400	497,774,000	554,076,100	555,000,000	555,000,000	555,000,000
	Sekretariat Daerah	61,572,305,264	67,181,649,589	58,842,780,600	54,743,400,000	46,645,000,000	46,645,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	43,966,181,264	32,629,852,900	30,584,066,100	25,980,000,000	25,980,000,000	25,980,000,000
	- Bagian Pengendalian Program		60,250,000	33,950,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000
	- Bagian Umum		15,764,102,500	15,047,626,100	13,650,000,000	13,650,000,000	13,650,000,000
	- Bagian Perlengkapan		15,081,960,900	13,699,290,000	10,490,000,000	10,490,000,000	10,490,000,000
	- Bagian Perlengkapan (Pengadaan Lahan)	12,846,597,088	0		0	0	0
	- Bagian Keuangan		1,723,539,500	1,803,200,000	1,804,000,000	1,804,000,000	1,804,000,000
	Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	3,628,074,000	17,421,933,000	5,834,615,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Pengadaan Lahan		2,282,789,250		0	0	0
	Inventarisasi dan Pelaporan Aset/BMD				1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
	Validasi Data Tanah Pemerintah Kota				0	0	0
	Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota				2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000
	Pengamanan Asset Tetap				0	0	0
	Kegiatan Lainnya Pada Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah				1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
	Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah			6,243,700,000	8,373,400,000	275,000,000	275,000,000
	Pengadaan Lahan (Bagian Perlengkapan dan Asset)			5,972,700,000			
	Pengadaan Lahan Kantor dan Posko Pemadam Kebakaran			0	1,000,000,000	0	0
	Pengadaan Lahan Kantor BPTPM			0	1,000,000,000	0	0
	Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan dan Kecamatan			0	6,098,400,000	0	0
	Kegiatan Lainnya Pada Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah (Bagian Pemerintahan)	173,147,130	451,689,889	271,000,000	275,000,000	275,000,000	275,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	2,420,193,100	3,249,002,889	1,768,795,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
	Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah	1,627,610,100	1,938,557,000	1,228,585,000	1,230,000,000	1,230,000,000	1,230,000,000
	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	3,067,111,000	2,807,625,000	4,017,725,500	3,530,000,000	3,530,000,000	3,530,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	1,415,421,400	1,915,928,300	1,752,724,000	1,505,000,000	1,505,000,000	1,505,000,000
	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Daerah	2,256,177,500	3,867,177,000	2,515,537,000	2,425,000,000	2,425,000,000	2,425,000,000
	Program Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan	3,191,536,900	3,351,573,500	4,897,033,000	5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000
	Bantuan Pengadaan Lahan Islamic Centre	8,500,000,000	0	0	0	0	0
	Bantuan Pembangunan Konstruksi Islamic Centre	0	2,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	12,500,000,000	0
	Kegiatan Lainnya Pada Program Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan			4,897,033,000	5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000
	Sekretariat DPRD	10,236,306,725	18,915,040,850	19,263,114,750	16,158,106,850	16,158,106,850	16,158,106,850
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	7,168,857,650	9,782,303,250	9,236,170,750	7,490,519,250	7,490,519,250	7,490,519,250
	Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah	3,067,449,075	9,132,737,600	9,626,944,000	8,267,587,600	8,267,587,600	8,267,587,600
	Program Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan Daerah			400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	20,835,126,227	35,139,923,593	40,370,296,394	29,965,971,970	29,965,971,970	29,965,971,970
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	10,233,551,599	22,168,241,080	25,493,295,274	17,711,352,500	17,711,352,500	17,711,352,500
	Program Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan Daerah	5,030,806,978	5,659,936,403	6,498,615,500	5,600,330,500	5,600,330,500	5,600,330,500
	Program Peningkatan Pajak Daerah	2,232,242,300	2,913,977,990	2,336,043,620	2,325,714,970	2,325,714,970	2,325,714,970
	Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah	1,205,768,900	1,798,168,000	2,356,775,000	2,080,640,000	2,080,640,000	2,080,640,000
	Program Perencanaan dan Pengendalian Dana Perimbangan	2,132,756,450	2,599,600,120	3,685,567,000	2,247,934,000	2,247,934,000	2,247,934,000
	Inspektorat	3,143,102,171	4,354,254,000	4,473,349,000	4,123,342,000	4,123,342,000	4,123,342,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	949,244,671	1,289,125,000	1,470,117,000	1,107,342,000	1,107,342,000	1,107,342,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah	2,193,857,500	3,065,129,000	3,003,232,000	3,016,000,000	3,016,000,000	3,016,000,000
	Kecamatan Cibeber	2,624,139,195	2,532,567,250	3,066,023,500	3,078,000,000	3,078,000,000	3,078,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	1,795,969,595	1,549,940,600	1,926,981,100	1,935,000,000	1,935,000,000	1,935,000,000
	- Kecamatan Cibeber	1,007,045,646	992,376,600	1,071,438,600	1,083,000,000	1,083,000,000	1,083,000,000
	- Kel. Bulakan	117,966,580	96,419,200	142,486,000	142,000,000	142,000,000	142,000,000
	- Kel. Cikerei	113,704,027	91,825,800	142,725,000	142,000,000	142,000,000	142,000,000
	- Kel. Cibeber	172,323,500	90,122,000	142,160,000	142,000,000	142,000,000	142,000,000
	- Kel. Kalitimbang	124,394,069	93,508,800	142,779,500	142,000,000	142,000,000	142,000,000
	- Kel. Karang Asem	125,034,767	92,500,000	142,552,000	142,000,000	142,000,000	142,000,000
	- Kel. Kedaleman	135,501,006	93,188,200	142,840,000	142,000,000	142,000,000	142,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	828,169,600	982,626,650	1,139,042,400	1,143,000,000	1,143,000,000	1,143,000,000
	- Kecamatan Cibeber	228,760,300	334,392,400	334,762,400	335,000,000	335,000,000	335,000,000
	- Kel. Bulakan	78,252,350	89,680,500	112,900,000	113,000,000	113,000,000	113,000,000
	- Kel. Cikerei	89,159,400	91,874,150	107,500,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000
	- Kel. Cibeber	139,952,400	149,977,000	193,240,000	194,000,000	194,000,000	194,000,000
	- Kel. Kalitimbang	88,161,500	90,191,200	111,100,000	112,000,000	112,000,000	112,000,000
	- Kel. Karang Asem	97,089,650	108,500,000	131,340,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000
	- Kel. Kedaleman	106,794,000	118,011,400	148,200,000	149,000,000	149,000,000	149,000,000
	Kecamatan Cilegon	2,829,939,795	2,354,338,500	2,738,311,000	2,709,849,000	2,709,849,000	2,709,849,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	1,903,637,295	1,385,442,900	1,690,535,700	1,658,849,000	1,658,849,000	1,658,849,000
	- Kecamatan Cilegon	1,180,771,870	852,469,000	958,088,000	928,849,000	928,849,000	928,849,000
	- Kel. Bagendung	129,914,115	100,027,300	155,841,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000
	- Kel. Bendungan	142,409,897	115,976,100	141,197,700	141,000,000	141,000,000	141,000,000
	- Kel. Ciwaduk	156,307,099	103,700,000	135,780,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000
	- Kel. Ciwedus	156,560,354	100,323,000	143,611,000	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	- Kel. Ketileng	137,673,960	112,947,500	156,018,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	926,302,500	968,895,600	1,047,775,300	1,051,000,000	1,051,000,000	1,051,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- Kecamatan Cilegon	439,808,500	461,602,000	417,558,000	418,000,000	418,000,000	418,000,000
	- Kel. Bagendung	85,299,400	87,841,000	99,831,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	- Kel. Bendungan	94,899,400	102,099,400	128,327,300	129,000,000	129,000,000	129,000,000
	- Kel. Ciwaduk	106,899,400	114,500,000	151,120,000	152,000,000	152,000,000	152,000,000
	- Kel. Ciwedus	111,699,400	113,508,800	147,700,000	148,000,000	148,000,000	148,000,000
	- Kel. Ketileng	87,696,400	89,344,400	103,239,000	104,000,000	104,000,000	104,000,000
	Kecamatan Citangkil	3,329,119,718	2,963,124,570	3,560,634,500	3,502,000,000	3,502,000,000	3,502,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	2,287,449,768	1,751,776,220	2,145,327,650	2,053,000,000	2,053,000,000	2,053,000,000
	- Kecamatan Citangkil	1,296,420,564	995,819,000	1,069,361,850	1,222,000,000	1,222,000,000	1,222,000,000
	- Kel. Wamasari	150,135,105	99,680,000	160,296,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000
	- Kel. Taman Baru	123,569,525	92,544,800	155,003,400	120,000,000	120,000,000	120,000,000
	- Kel. Deringo	124,071,791	92,500,000	140,930,000	106,000,000	106,000,000	106,000,000
	- Kel. Kebonsari	143,728,883	116,339,920	164,774,900	130,000,000	130,000,000	130,000,000
	- Kel. Citangkil	171,060,653	161,771,700	163,173,000	128,000,000	128,000,000	128,000,000
	- Kel. Lebak Denok	135,275,397	98,959,800	145,192,500	110,000,000	110,000,000	110,000,000
	- Kel. Samangraya	143,187,850	94,161,000	146,596,000	112,000,000	112,000,000	112,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1,041,669,950	1,211,348,350	1,415,306,850	1,449,000,000	1,449,000,000	1,449,000,000
	- Kecamatan Citangkil	324,870,500	385,023,500	398,927,000	384,000,000	384,000,000	384,000,000
	- Kel. Wamasari	116,565,550	126,601,000	164,599,000	165,000,000	165,000,000	165,000,000
	- Kel. Taman Baru	88,552,550	116,951,550	145,350,500	146,000,000	146,000,000	146,000,000
	- Kel. Deringo	88,188,550	106,200,000	124,400,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000
	- Kel. Kebonsari	96,165,350	112,100,000	136,500,000	137,000,000	137,000,000	137,000,000
	- Kel. Citangkil	131,696,350	144,600,000	169,600,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000
	- Kel. Lebak Denok	93,165,550	103,340,200	132,798,250	148,000,000	148,000,000	148,000,000
	- Kel. Samangraya	102,465,550	116,532,100	143,132,100	159,000,000	159,000,000	159,000,000
	Kecamatan Ciwandan	2,915,704,311	2,872,140,000	3,231,588,000	3,322,000,000	3,322,000,000	3,322,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	1,995,689,311	1,803,282,000	2,039,165,000	2,147,000,000	2,147,000,000	2,147,000,000
	- Kecamatan Ciwandan	1,194,504,061	1,325,518,000	1,218,978,000	1,334,000,000	1,334,000,000	1,334,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- Kel. Banjarnegara	130,115,825	81,546,000	134,305,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000
	- Kel. Gunung Sugih	134,984,629	77,706,000	133,041,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000
	- Kel. Tegal Ratu	135,106,000	69,816,000	139,465,000	138,000,000	138,000,000	138,000,000
	- Kel. Randakari	143,407,855	83,580,000	142,500,000	141,000,000	141,000,000	141,000,000
	- Kel. Kepuh	131,890,559	86,030,000	140,720,000	139,000,000	139,000,000	139,000,000
	- Kel. Kubang Sari	125,680,382	79,086,000	130,156,000	129,000,000	129,000,000	129,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	920,015,000	1,068,858,000	1,192,423,000	1,175,000,000	1,175,000,000	1,175,000,000
	- Kecamatan Ciwandan	321,565,000	379,678,000	409,370,000	390,000,000	390,000,000	390,000,000
	- Kel. Banjarnegara	96,775,000	112,115,000	126,115,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000
	- Kel. Gunung Sugih	99,175,000	111,765,000	145,759,000	146,000,000	146,000,000	146,000,000
	- Kel. Tegal Ratu	102,775,000	117,695,000	129,955,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000
	- Kel. Randakari	109,775,000	125,300,000	136,660,000	137,000,000	137,000,000	137,000,000
	- Kel. Kepuh	99,175,000	115,700,000	123,900,000	124,000,000	124,000,000	124,000,000
	- Kel. Kubang Sari	90,775,000	106,605,000	120,664,000	121,000,000	121,000,000	121,000,000
	Kecamatan Grogol	1,962,734,161	2,044,237,900	2,402,560,900	2,366,000,000	2,366,000,000	2,366,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	1,391,492,661	1,278,518,400	1,479,617,900	1,455,000,000	1,455,000,000	1,455,000,000
	- Kecamatan Grogol	883,325,160	838,567,900	905,067,900	883,000,000	883,000,000	883,000,000
	- Kel. Kotasari	124,118,240	146,473,500	143,500,000	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	- Kel. Gerem	151,718,742	99,500,000	143,312,500	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	- Kel. Rawaarum	106,872,700	100,627,000	143,437,500	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	- Kel. Grogol	125,457,819	93,350,000	144,300,000	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	571,241,500	765,719,500	922,943,000	911,000,000	911,000,000	911,000,000
	- Kecamatan Grogol	201,676,500	319,343,000	316,143,000	302,000,000	302,000,000	302,000,000
	- Kel. Kotasari	93,780,000	102,126,500	142,900,000	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	- Kel. Gerem	119,175,000	124,300,000	184,000,000	185,000,000	185,000,000	185,000,000
	- Kel. Rawaarum	73,762,500	124,300,000	152,600,000	153,000,000	153,000,000	153,000,000
	- Kel. Grogol	82,847,500	95,650,000	127,300,000	128,000,000	128,000,000	128,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Kecamatan Jombang	3,306,086,774	2,793,661,872	3,113,922,158	2,998,000,000	2,914,000,000	2,914,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	2,218,056,574	1,696,321,872	1,934,434,158	1,814,000,000	1,814,000,000	1,814,000,000
	- Kecamatan Jombang	1,356,673,400	1,113,711,958	1,174,790,158	1,094,000,000	1,094,000,000	1,094,000,000
	- Kel. Panggungrawi	151,050,600	132,889,400	148,390,000	148,000,000	148,000,000	148,000,000
	- Kel. Sukmajaya	130,667,190	94,006,514	142,860,000	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	- Kel. Gedong Dalem	141,219,710	91,799,000	165,699,000	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	- Kel. Masigit	155,559,304	94,117,000	143,620,000	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	- Kel. Jombang Wetan	282,886,370	169,798,000	159,075,000	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1,088,030,200	1,097,340,000	1,179,488,000	1,184,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000
	- Kecamatan Jombang	497,602,200	448,673,000	376,448,000	377,000,000	310,000,000	310,000,000
	- Kel. Panggungrawi	117,517,000	135,500,000	157,400,000	158,000,000	155,000,000	155,000,000
	- Kel. Sukmajaya	93,771,000	95,448,000	124,040,000	125,000,000	120,000,000	120,000,000
	- Kel. Gedong Dalem	102,817,000	113,280,000	135,680,000	136,000,000	135,000,000	135,000,000
	- Kel. Masigit	117,360,000	133,080,000	163,840,000	165,000,000	160,000,000	160,000,000
	- Kel. Jombang Wetan	158,963,000	171,359,000	222,080,000	223,000,000	220,000,000	220,000,000
	Kecamatan Pulomerak	2,256,784,678	2,072,855,600	2,445,095,900	2,447,000,000	2,447,000,000	2,447,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	1,538,197,518	1,303,906,000	1,510,083,300	1,518,000,000	1,518,000,000	1,518,000,000
	- Kecamatan Pulomerak	955,543,006	904,922,000	937,365,500	946,000,000	946,000,000	946,000,000
	- Kel. Mekarsari	141,551,100	100,121,000	143,194,500	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	- Kel. Tamansari	145,693,563	98,621,000	143,213,000	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	- Kel. Suralaya	133,738,347	100,121,000	143,094,500	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	- Kel. Lebak Gede	161,671,502	100,121,000	143,215,800	143,000,000	143,000,000	143,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	718,587,160	768,949,600	935,012,600	929,000,000	929,000,000	929,000,000
	- Kecamatan Pulomerak	276,400,160	320,833,600	340,612,600	333,000,000	333,000,000	333,000,000
	- Kel. Mekarsari	107,154,000	109,979,000	145,900,000	146,000,000	146,000,000	146,000,000
	- Kel. Tamansari	110,478,000	113,579,000	151,300,000	152,000,000	152,000,000	152,000,000
	- Kel. Suralaya	96,076,000	96,079,000	124,300,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000
	- Kel. Lebak Gede	128,479,000	128,479,000	172,900,000	173,000,000	173,000,000	173,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Kecamatan Purwakarta	2,694,768,094	2,669,154,600	3,095,150,600	3,010,000,000	3,010,000,000	3,010,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	1,941,960,094	1,683,370,600	1,978,816,600	1,890,000,000	1,890,000,000	1,890,000,000
	- Kecamatan Purwakarta	1,194,140,577	1,128,036,600	1,125,831,600	1,130,000,000	1,130,000,000	1,130,000,000
	- Kel. Kotabumi	150,729,594	92,500,000	141,860,000	126,000,000	126,000,000	126,000,000
	- Kel. Kebondalem	142,210,005	92,500,000	138,430,000	123,000,000	123,000,000	123,000,000
	- Kel. Ramanuju	113,005,747	92,500,000	143,510,000	128,000,000	128,000,000	128,000,000
	- Kel. Purwakarta	117,315,860	92,200,000	142,475,000	127,000,000	127,000,000	127,000,000
	- Kel. Pabean	113,252,917	93,134,000	143,510,000	128,000,000	128,000,000	128,000,000
	- Kel. Tegal Bunder	111,305,394	92,500,000	143,200,000	128,000,000	128,000,000	128,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	752,808,000	985,784,000	1,116,334,000	1,120,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000
	- Kecamatan Purwakarta	212,537,000	354,044,000	358,699,000	359,000,000	359,000,000	359,000,000
	- Kel. Kotabumi	114,610,000	130,090,000	163,140,000	164,000,000	164,000,000	164,000,000
	- Kel. Kebondalem	107,090,000	125,290,000	156,690,000	157,000,000	157,000,000	157,000,000
	- Kel. Ramanuju	77,390,000	90,490,000	104,490,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000
	- Kel. Purwakarta	84,151,000	100,090,000	117,125,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000
	- Kel. Pabean	78,440,000	91,690,000	106,290,000	107,000,000	107,000,000	107,000,000
	- Kel. Tegal Bunder	78,590,000	94,090,000	109,900,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000
	Kantor Pemadam Kebakaran	2,477,194,069	2,254,208,200	2,504,990,000	2,520,000,000	4,520,000,000	2,520,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	769,592,384	1,242,731,200	1,209,782,000	1,224,000,000	1,224,000,000	1,224,000,000
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1,707,601,685	1,011,477,000	1,295,208,000	1,296,000,000	3,296,000,000	1,296,000,000
	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran					2,000,000,000	
	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	1,966,534,833	2,722,743,200	2,849,880,000	2,871,000,000	2,871,000,000	2,871,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	762,361,633	1,220,790,200	1,135,080,000	1,156,000,000	1,156,000,000	1,156,000,000
	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1,204,173,200	1,501,953,000	1,714,800,000	1,715,000,000	1,715,000,000	1,715,000,000
	Badan Kepegawaian dan Diklat	11,366,523,375	10,603,444,580	10,097,009,300	9,907,000,000	9,907,000,000	9,907,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	1,100,172,906	1,363,218,080	1,726,604,000	1,799,000,000	1,799,000,000	1,799,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (BKD)	1,100,172,906	1,363,218,080	1,500,106,500	1,517,000,000	1,517,000,000	1,517,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (Sekretariat KORPRI)	0	0	226,497,500	282,000,000	282,000,000	282,000,000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,850,699,499	3,704,509,650	2,402,104,300	2,139,000,000	2,139,000,000	2,139,000,000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (BKD)	1,850,699,499	3,704,509,650	1,728,601,800	1,736,000,000	1,736,000,000	1,736,000,000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Sekretariat KORPRI)	0	0	673,502,500	403,000,000	403,000,000	403,000,000
	Program Peningkatan Sistem, Kualitas dan Evaluasi Diklat	7,826,873,800	4,472,097,000	4,554,593,000	4,555,000,000	4,555,000,000	4,555,000,000
	Program Peningkatan Administrasi Kepegawaian	588,777,170	1,063,619,850	1,413,708,000	1,414,000,000	1,414,000,000	1,414,000,000
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP)	5,706,496,778	5,338,981,800	7,371,603,500	9,669,000,000	9,352,000,000	9,064,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	998,800,472	1,069,989,400	1,094,027,500	1,131,000,000	1,131,000,000	1,131,000,000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4,104,401,456	3,705,575,000	5,221,184,000	7,481,000,000	7,191,000,000	6,903,000,000
	Bantuan Masyarakat Langsung (BML)	6,800,000,000	5,196,400,000	6,800,000,000	5,200,000,000	4,800,000,000	4,400,000,000
	Bantuan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000
	Pembebasan Biaya Pembelian Beras Miskin (Raskin)	0	0	0	3,744,000,000	3,456,000,000	3,168,000,000
	Perluasan Penerima Raskin (Raskinda)	0	332,775,000	1,517,429,000	0	0	0
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		957,704,000	3,703,755,000	3,737,000,000	3,735,000,000	3,735,000,000
	Program Pengembangan Ketahanan Pangan	261,858,200	207,271,500	869,650,000	870,000,000	830,000,000	830,000,000
	Program Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan	341,436,650	356,145,900	186,742,000	187,000,000	200,000,000	200,000,000
	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1,357,749,694	1,306,840,000	1,520,420,000	1,722,000,000	2,472,000,000	1,472,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	400,746,794	460,170,000	450,970,000	452,000,000	452,000,000	452,000,000
	Program Pengembangan Arsip Daerah	957,002,900	463,995,000	499,550,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
	Program Pengembangan Perpustakaan Daerah	0	382,675,000	569,900,000	770,000,000	1,520,000,000	520,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Pengadaan Lahan Rumah Pintar	0	0	0	250,000,000	0	0
	Pengadaan Sarana Rumah Pintar	0	0	0	0	1,000,000,000	
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pengembangan Perpustakaan Daerah	0	382,675,000	569,900,000	520,000,000	520,000,000	520,000,000
	Dinas Pertanian dan Kelautan	4,147,733,741	3,951,982,735	4,028,650,111	5,487,400,000	5,365,300,000	42,028,300,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	1,089,249,764	1,170,518,504	1,182,734,040	1,245,000,000	1,245,000,000	1,245,000,000
	Program Pengembangan Pertanian	1,183,935,250	976,145,000	906,795,000	1,660,000,000	1,410,000,000	810,000,000
	Pembangunan Demplot Pertanian						
	FS Demplot Pertanian			100,000,000	0	0	0
	Pengadaan Lahan Demplot Pertanian			0	750,000,000	0	0
	DED Demplot Pertanian			0	100,000,000	0	0
	Konstruksi Demplot Pertanian			0		600,000,000	0
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pengembangan Pertanian			806,795,000	810,000,000	810,000,000	810,000,000
	Program Pengembangan Peternakan	939,706,227	989,383,936	726,454,946	727,000,000	727,000,000	727,000,000
	Program Pengembangan Kelautan dan Perikanan	934,842,500	815,935,295	1,212,666,125	1,855,400,000	1,983,300,000	39,246,300,000
	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)						
	Persiapan Lahan Pembangunan PPI						
	Pelaksanaan Relokasi Pada Pembangunan PPI			0	800,000,000	0	0
	Pendataan, Sosialisasi, Relokasi Penduduk Medaksa			0	50,000,000	0	0
	Pembersihan dan Lanjutan Pematangan Lahan			0	799,700,000	0	0
	Pemagaran			0	110,700,000	0	0
	Pembangunan PPI						
	Pembangunan Area Bongkar Muat			0	0	288,300,000	0
	Jembatan Akses Kawasan			0	0	400,000,000	0
	Pembangunan TPI			0	0	340,000,000	0
	Intalasi Air dan Listrik			0	0	60,000,000	0
	Pembangunan Dermaga, Jeti dan Fasilitas Pendukung PPI			0	0	0	38,351,300,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Pengembangan Kelautan dan Perikanan			1,212,666,125	895,000,000	895,000,000	895,000,000
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,588,566,113	3,883,116,000	3,947,425,000	3,687,000,000	3,687,000,000	3,687,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	501,705,113	629,240,000	640,860,000	654,000,000	654,000,000	654,000,000

NO.	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN (Rp.)		PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.)			
		REALISASI	RENCANA	TARGET			TRANSISI
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Daerah	1,548,305,000	2,438,110,000	2,363,697,000	2,164,000,000	2,164,000,000	2,164,000,000
	Program Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata	288,980,000	518,668,000	673,900,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000
	Penataan Wisata Kuliner	0	0	200,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
	Kegiatan Lainnya Pada Program Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata			473,900,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
	Program Pemasaran Seni Budaya dan Pariwisata	249,576,000	297,098,000	268,968,000	269,000,000	269,000,000	269,000,000
	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (Kantor Penanaman Modal)	825,178,968	536,155,400	2,767,358,100	2,324,000,000	2,324,000,000	2,324,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	287,597,564	309,143,400	1,121,614,100	1,135,000,000	1,135,000,000	1,135,000,000
	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan			478,170,000	0	0	0
	Program Peningkatan Layanan Penanaman Modal	537,581,404	227,012,000	475,595,000	476,000,000	476,000,000	476,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha	0	0	80,706,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Umum	0	0	80,706,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan	0	0	530,567,000	533,000,000	533,000,000	533,000,000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG (BL)	398,484,119,504	507,642,296,804	542,431,952,838	512,118,953,304	560,079,869,901	633,494,031,397

7.2. RENCANA KERJA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan pada dasarnya merupakan wujud rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010-2015. Program dan kegiatan tersebut disertai dengan indikator program yang akan dicapai setiap tahunnya, pagu indikatif anggaran serta SKPD penanggung jawabnya, sebagaimana tercantum pada Buku II-2 Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015.

BAB VIII
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Keberhasilan pencapaian visi, misi sampai dengan program Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada dasarnya merupakan keberhasilan kinerja pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) Kota Cilegon.

8.1. INDIKATOR KINERJA VISI

Berpijak pada hasil evaluasi pencapaian pembangunan tahun 2009-2011 dan rencana program pembangunan tahun 2012-2015 maka **Target Indikator Kinerja Visi Kota Cilegon Tahun 2012-2015** adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI			TARGET			
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	74,99	75,29	75,53	75,89	76,19	76,50	76,81
2	Rasio Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Terhadap Total Jumlah Rumah Tangga	%	15,14	17,36	14,79	13,53	12,22	10,96	9,75
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	18,26	19,84	13,14	12,00	11,00	10,00	9,00
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,08	5,32	6,53	5,44	5,83	6,04	6,14

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2012

8.2. INDIKATOR KINERJA MISI

Berpijak pada pencapaian pembangunan tahun 2009-2011 dan rencana program pembangunan tahun 2012-2015 maka **Target Indikator Kinerja Misi Kota Cilegon Tahun 2012-2015** adalah sebagai berikut:

A. TARGET INDIKATOR KINERJA MISI 1 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN (AGENDA CILEGON SEJAHTERA)

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI			TARGET			
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tujuan 1.1 : Meningkatkan keberdayaan perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat									
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin, ketahanan pangan dan kesempatan kerja masyarakat									
	Jumlah rumah tangga sasaran (RTS)	RTS	16.979	15.961	13.909	13.000	12.000	11.000	10.000
	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	%			100	100	100	100	100
	Cakupan penanganan rumah tidak layak huni	%			7,62	11,78	37,77	63,76	89,74
	Cakupan penataan kawasan kumuh	%			3,57	7,14	35,71	50,00	50,00
	Tingkat penempatan tenaga kerja (TPTK)	%	23,04	16,62	25,58	30,00	35,00	40,00	45,00
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat									
	Indek daya beli masyarakat	Point	65,14	65,95	66,76	67,57	68,39	69,21	70,04
	Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp. Ribu	641,88	645,37	648,87	652,39	655,93	659,49	663,07
	PDRB ADHB per kapita	Rp. Juta/Jiwa	57,23	83,80	90,17	98,00	106,02	114,42	123,20
Tujuan 1.2 : Meningkatkan keberdayaan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat									
Sasaran 1.2.1 : Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)									
	Cakupan penanganan PMKS	%			2,13	0,65	0,65	0,65	0,65

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI			TARGET			
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sasaran 1.2.2 : Meningkatnya kesetaraan dan keberdayaan gender									
	Indeks Pembangunan Gender	Point	57,79	58,01	58,23	58,45	58,67	58,89	59,11
	Partisipasi perempuan di lembaga legislatif daerah (DPRD)	%	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	30,00	30,00

**B. TARGET INDIKATOR KINERJA MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
DAERAH MELALUI DAYA DUKUNG SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN
JASA (CILEGON BERDAYA SAING)**

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI			TARGET			
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tujuan 2.1 : Meningkatkan pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah									
Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya investasi									
	Laju pertumbuhan investasi (PMA+PMDN)	%	10,77	1,75	145,43	2,70	2,93	3,15	3,20
	Nilai realisasi investasi (PMA+PMDN)	Rp. Triliyun per tahun	63,10	64,21	157,60	161,85	166,60	171,85	177,35
Tujuan 2.2 : Memperkuat peran sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian daerah									
Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya kinerja sektor industri, perdagangan dan jasa									
	Pertumbuhan PDRB ADHK sektor industri	%	4,02	4,95	6,60	5,05	5,53	6,17	6,48
	Pertumbuhan PDRB ADHK sektor perdagangan, hotel dan restoran	%	15,40	9,73	9,24	9,44	9,18	6,73	5,43

C. TARGET INDIKATOR KINERJA MISI 3 : MENINGKATKAN POTENSI DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN KEPELABUHANAN, PERGUDANGAN, PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (AGENDA CILEGON MAJU DAN MANDIRI)

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI			TARGET			
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tujuan 3.1 : Meningkatkan pelayanan infrastruktur untuk mendukung produktivitas kawasan dan perekonomian daerah									
Sasaran 3.1.1 : Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan handal									
	Rasio ketersediaan terminal tipe B dan tipe C terhadap kebutuhan	Rasio	3/6	3/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6
	Jumlah titik Kemacetan di jalan Kota	Titik	2	3	4	4	3	3	2
	Waktu tempuh rata-rata jalan perkotaan	Km/Jam	40	40	40	30	30	30	40
	Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan	%	26	50	68	65	60	55	50
Sasaran 3.1.2 : Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang memadai dan berkualitas									
	Panjang jalan dalam kondisi baik (rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik terhadap total panjang jalan kota yang ada)	%	66,31	74,43	84,12	86,44	87,62	91,4	92,30
Sasaran 3.1.3 : Terwujudnya pelayanan pos dan telekomunikasi yang memadai dan berkualitas									
	Proporsi jumlah warnet, wartel dan sejenisnya yang diselenggarakan sesuai standar berlaku	%	-	-	35	40	45	50	55

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI			TARGET			
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sasaran 3.1.4 : Terkendalnya bencana banjir dan genangan air serta kekeringan									
	Jumlah titik banjir yang durasi genangannya lebih dari 2 jam (Jalan Negara)	Lokasi	17	13	13	11	11	10	9
	Jumlah titik banjir yang durasi genangannya lebih dari 2 jam (Jalan Kota)	Lokasi	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	31	28	27	25
Tujuan 3.2 : Meningkatkan penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung lingkungan kota yang asri dan lestari									
Sasaran 3.2.1 : Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu									
	Prosentase penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	%	77,5	78	79	80,5	82	83,5	85
Sasaran 3.2.2 : Terwujudnya lingkungan kota yang bersih dan asri									
	Penanganan sampah (Rasio jumlah sampah yang ditangani terhadap jumlah produksi sampah)	%	41,06	44,30	48,23	49,40	50,00	50,00	50,00
	Rasio realisasi taman kota terhadap RTH publik yang seharusnya tersedia	%	0,51	0,51	0,58	0,59	0,59	0,60	0,61
Sasaran 3.2.3 : Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatnya perlindungan dan konsevasi sumberdaya alam									
	Proporsi penurunan kasus pelanggaran lingkungan	%			14,29	14,29	16,67	20,00	25,00
	Jumlah kasus pelanggaran lingkungan	Kasus		7	7	6	5	4	3
	Penegakan hukum lingkungan hidup (Proporsi jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda terhadap total jumlah kasus lingkungan yang terjadi)	%			100	100	100	100	100

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI			TARGET			
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (Proporsi jumlah perusahaan yang telah memiliki AMDAL terhadap jumlah perusahaan yang wajib AMDAL)	%			66,67	100,00	100,00	100,00	100,00
	Proporsi penurunan luas lahan kritis	%		0,95	2,02	3,77	3,92	4,08	4,25
	Proporsi luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total luas lahan atau hutan kritis yang ada	%	4,86	5,85	7,99	12,06	16,45	21,20	26,35

D. TARGET INDIKATOR KINERJA MISI 4 : MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KEAGAMAAN (AGENDA CILEGON CERDAS DAN SEHAT)

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI			TARGET			
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tujuan 4.1 : Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat									
Sasaran 4.1.1 : Terwujudnya peningkatan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, bermutu, relevan dan kompetitif bagi masyarakat									
	Indeks Pendidikan	Point	87,27	87,29	87,31	87,33	87,34	87,36	87,38
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,66	9,67	9,67	9,68	9,69	9,69	9,70
	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas	%	98,71	98,71	98,72	98,72	98,72	98,73	98,73
Tujuan 4.2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									
Sasaran 4.2.1 : Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi masyarakat									
	Indeks Angka Harapan Hidup (AHH)	Poin	72,55	72,63	72,70	72,78	72,85	72,93	73,00
	Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	68,53	68,58	68,62	68,67	68,71	68,76	68,80
Tujuan 4.3 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan budaya masyarakat									

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI			TARGET			
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sasaran 4.3.1 : Terwujudnya peningkatan kehidupan beragama dan pendidikan keagamaan masyarakat									
	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus/ Kejadian	0	0	0	0	0	0	0
Tujuan 4.4 : Meningkatkan pemasyarakatan olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan									
Sasaran 4.4.1 : Meningkatnya prestasi olahraga dan kualitas peran pemuda dalam pembangunan									
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga	%	25	30	35	35	37	40	45
	Tingkat prestasi olahraga (rasio jumlah cabang olah raga yang berprestasi terhadap total jumlah cabang olah raga yang dibina)	%	16,67	33,33	33,33	33,33	35,33	39,16	42,86

E. TARGET INDIKATOR KINERJA MISI 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERKEADILAN, DEMOKRATIS, BERLANDASKAN HUKUM SERTA BERORIENTASI PUBLIK (AGENDA CILEGON BERWIBAWA)

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI			TARGET			
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tujuan 5.1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik									
Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan									
	Nilai kinerja pemerintah daerah	Peringkat	CC	C	C	C	C	C	C
Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap tingkat pelayanan pemerintah daerah									
	Indeks kepuasan masyarakat	Point			68,64	69,00	70,00	71,00	72,00
Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah									
	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
Sasaran 5.1.4 : Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah									
	Ketersediaan Peraturan Walikota tentang RKPD tahunan tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
	Ketersediaan Perda RPJMD, RPJPD, dan RTRW	Dokumen	1	3	3	3	3	3	3
Sasaran 5.1.5 : Meningkatnya akes masyarakat terhadap pelayanan informasi daerah yang berkualitas									
	Tingkat kualitas akseibilitas masyarakat terhadap pelayanan informasi daerah	Poin	-	73,71	75,01	76,31	77,61	78,91	80,21
Sasaran 5.1.6 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil									

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI			TARGET			
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan	Hari kerja	3	3	2	2	2	2	2
	Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pencatatan sipil	Hari kerja	3	3	3	3	3	3	3
	Rasio jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP	%	83,26	86,59	88,17	98,70	98,71	98,73	98,75
Tujuan 5.2 : Meningkatkan ketentraman, kertiban dan perlindungan masyarakat									
Sasaran 5.2.1 : Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat									
	Tingkat pemenuhan produk hukum daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat pemenuhan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran 5.2.2 : Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama									
	Tingkat penyelesaian kasus SARA yang difasilitasi oleh pemda	%	Tidak tersedia data	100	100	100	100	100	100
Sasaran 5.2.3 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum daerah									
	Tingkat penyelesaian jumlah pelanggaran perda yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
	Rata rata jumlah kasus terkait tranbibmas Kota Cilegon yang tertangani terhadap jumlah total kasus	%	100	100	100	100	100	100	100
	Rata rata jumlah kasus pelanggaran perda yang tertangani terhadap jumlah total kasus pelanggaran perda	%	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran 5.2.4 : Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan bencana									
	Persentase jumlah kasus bencana yang dapat ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Berikut ini ditetapkan **pedoman transisi** pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015, yaitu sebagai berikut:

1. Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Cilegon adalah terhitung mulai tahun 2010-2015.
2. Pada tahun ke lima (5) setelah periode Walikota masa bakti 2010-2015 berakhir, ditetapkan satu tahun transisi yang memuat indikasi program dan kegiatan beserta pagu indikatif anggarannya untuk tahun 2016. Hal ini dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) oleh Walikota Cilegon masa jabatan tahun 2015-2020.

9.2. PROGRAM TRANSISI

9.2.1. Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran.

Program Transisi tahun 2016 Pada **Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran** adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3. Program Pengembangan Ketahanan Pangan
4. Program Penyuluhan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan
5. Program Penataan Perumahan dan Permukiman
6. Program Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja
7. Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja
8. Program Peningkatan Hubungan Industrial
9. Program Pengembangan Pertanian
10. Program Pengembangan Peternakan
11. Program Pengembangan Kelautan dan Perikanan
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi dan UKM

13. Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Energi dan Mineral
14. Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial dan Pemakaman
15. Program Pemberdayaan Sosial
16. Program bantuan sosial, Jaminan sosial dan Penanggulangan Bencana
17. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan
18. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
19. Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga Kecil
20. Program Bina Keluarga Sejahtera

9.2.2. Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Jasa

Program Transisi tahun 2016 Pada **Misi Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Jasa** adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Penanaman Modal
2. Program Pengembangan Kemitraan Industri
3. Program Pengembangan Perdagangan
4. Program Pengembangan Kemitraan Industri
5. Program Pengembangan Perdagangan
6. Program Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata
7. Program Pemasaran Seni Budaya dan Pariwisata Daerah
8. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Daerah

9.2.3. Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan

Program Transisi tahun 2016 Pada **Misi Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan** adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan
2. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut
3. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat
4. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5. Program Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Bidang ke-PU-an
6. Program Peningkatan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi
7. Program Pembangunan, Peningkatan/ Normalisasi, Pemeliharaan Sungai, Saluran/ Drainase, dan Jaringan Irigasi
8. Program Pengembangan Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
9. Program Penataan dan Pemeliharaan Prasarana dan Arsitektur Kota
10. Program Pengendalian Bangunan dan Reklame
11. Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan
13. Program Keindahan Kota
14. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan
15. Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. Program Konservasi sumber daya alam dan buatan

9.2.4. Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Keagamaan

Program Transisi tahun 2016 Pada **Misi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Keagamaan** adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Non Formal dan Informal
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah
4. Program Peningkatan Manajemen, Kualitas dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan
5. Program Pengembangan Perpustakaan dan Arsip Daerah
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringanya
7. Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
8. Program Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta
9. Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit serta Penyehatan Lingkungan
10. Program Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan serta pembiayaan kesehatan
11. Program Peningkatan Pelayanan RSUD
12. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

13. Program Peningkatan Fasilitas Olahraga dan Pemuda
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
15. Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

9.2.5. Program Transisi Tahun 2016 Pada Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik

Program Transisi tahun 2016 Pada **Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik** adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
2. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan
3. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah
5. Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah
6. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah
7. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
9. Program Peningkatan Sistem, Kualitas dan Evaluasi Diklat
10. Program Peningkatan Administrasi Kepegawaian
11. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
12. Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah
13. Program Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan Daerah
14. Program Peningkatan Pajak Daerah
15. Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
16. Program Perencanaan dan Pengendalian Dana Perimbangan
17. Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah
18. Program Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
19. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
20. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
21. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
22. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah
23. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Daerah
24. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk
25. Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

26. Program Peningkatan Data dan Informasi Kependudukan
27. Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah
28. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
29. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
30. Program Peningkatan LSM dan ORMAS
31. Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Alam
32. Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

9.3. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Cilegon untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Cilegon dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten yang berlaku untuk periode perencanaan tahun 2013-2015. Selanjutnya Perubahan RPJMD Kota Cilegon tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu juga, Perubahan RPJMD Kota Cilegon menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renstra SKPD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 dan transisi Tahun 2016.

Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 maka ditetapkan **kaidah pelaksanaan** sebagai berikut:

1. Walikota Cilegon menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 kepada masyarakat.
2. Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renstra SKPD) Tahun 2010-2015 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 dan transisi Tahun 2016.
4. Walikota Cilegon melalui Bappeda Kota Cilegon melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015.
5. Walikota Cilegon berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015.
6. Partisipasi masyarakat Kota Cilegon dapat diwujudkan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

7. Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 dapat diubah dalam hal:
 - Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - Terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - Merugikan kepentingan daerah dan nasional.
8. Perubahan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 ditetapkan dengan peraturan daerah.

Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang kuat dan demokratis, konsistensi kebijakan Pemerintah Kota Cilegon, keberpihakan kepada rakyat, dan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015.

WALIKOTA CILEGON,

Tb. IMAN ARIYADI